



BUPATI SABU RAIJUA

**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI SABU RAIJUA**



TAHUN ANGGARAN
2023



**SEBA
2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas penyertaan dan perlindungan-Nya, penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023 ini dapat diselesaikan dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua sebagai perwakilan dari masyarakat Sabu Raijua, tepat waktu sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Penyusunan LKPJ Bupati Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023 ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 19 ayat (1), dimana Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam rapat paripurna paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

LKPJ Tahun Anggaran 2023 ini merupakan manifestasi dari komitmen dan konsistensi Bupati sebagai Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta merupakan “progress report” yang memuat capaian hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang telah ditetapkan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua, mencakup Urusan Wajib (Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar), Urusan Pilihan dan Urusan Pendukung Tugas Umum Pemerintahan yang dilaksanakan di Kabupaten Sabu Raijua.

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua menyadari bahwa pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 belum optimal sebagaimana diharapkan. Karena itu Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua mengaharapkan dukungan lembaga DPRD Kabupaten Sabu Raijua untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi.

Terhadap hal tersebut di atas, di samping keberhasilan yang telah dicapai, masih terdapat hal-hal yang memerlukan upaya peningkatan pada masa mendatang. Oleh karena itu catatan-catatan strategis, saran, dan atau masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua merupakan masukan penting bagi penyempurnaan dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sabu Raijua pada masa yang akan datang. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan Tahun 2023 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Sabu Raijua pada perencanaan dan pelaksanaan



pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian yang dapat kami laporkan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua dan semua pihak yang telah membantu penyusunan dokumen LKPJ Tahun 2023 ini. Semoga dapat bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sabu Raijua dimasa yang akan datang.

Seba, 25 Maret 2024

Drs. NIKODEMUS N. RIHI HEKE, M.Si



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 DASAR HUKUM	1
1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH	3
1.2.1 VISI.....	3
1.2.2 MISI	4
1.3 DATA UMUM DAERAH	4
1.3.1 WILAYAH ADMINISTRASI DAERAH	4
1.3.2 KONDISI GEOGRAFIS	5
1.3.3 KONDISI DEMOGRAFIS DAERAH.....	7
1.3.4 KONDISI APARATUR.....	9
1.3.5 REALISASI PENDAPATAN MENURUT JENIS PENDAPATAN	10
1.3.6 REALISASI BELANJA MENURUT JENIS BELANJA	13
1.3.7 REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN	16
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	18
2.1 PENDAPATAN DAERAH	20
2.2 BELANJA DAERAH.....	21
2.3 PEMBIAYAAN DAERAH	21
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	23
A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	23
1. URUSAN PENDIDIKAN	23
2. URUSAN KESEHATAN.....	53
3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	146
4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN.....	173
5. URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINGUNGAN MASYARAKAT	186
6. URUSAN SOSIAL	204
B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	218
1. URUSAN TENAGA KERJA.....	218



2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	227
3. URUSAN PANGAN.....	252
4. URUSAN PERTANAHAN	260
5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	265
6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	283
7. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	290
8. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	302
9. URUSAN PERHUBUNGAN.....	319
10. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.....	336
11. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	346
12. URUSAN PENANAMAN MODAL.....	353
13. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA.....	363
14. URUSAN STATISTIK.....	369
15. URUSAN PERSANDIAN.....	373
16. URUSAN KEBUDAYAAN	378
17. URUSAN PERPUSTAKAAN	383
18. URUSAN KEARSIPAN	393
C. URUSAN PILIHAN	397
1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	397
2. URUSAN PARIWISATA.....	407
3. URUSAN PERTANIAN	417
4. URUSAN PERDAGANGAN	426
5. URUSAN PERINDUSTRIAN.....	433
6. URUSAN TRANSMIGRASI.....	439
D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG.....	443
1. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	443
2. PENGAWASAN	498
3. PERENCANAAN.....	506
4. KEUANGAN.....	522
5. KEPEGAWAIAN	541
6. SEKRETARIAT DPRD	549
7. KEWILAYAHAN.....	560
8. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.....	608



BAB IV CAPAIAN KINERJA TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	621
BAB V CAPAIAN KINERJA MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH.....	622
5.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO	622
5.2 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	623
5.3 ANGKA KEMISKINAN	624
5.4 ANGKA PENGANGGURAN	625
5.5 PERTUMBUHAN EKONOMI.....	626
5.6 PENDAPATAN PERKAPITA	628
5.7 KETIMPANGAN PENDAPATAN.....	629
BAB VI PENUTUP.....	630



DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel 1.1. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023	5
2. Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2023	7
3. Tabel 1.3. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan Tahun 2023	8
4. Tabel 1.4. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Tahun 2023	8
5. Tabel 1.5. Realisasi Pendapatan Daerah Menurut Sumber Pendapatan Tahun 2023	12
6. Tabel 1.6. Realisasi dan Kontribusi Pendapatan Daerah Menurut Sumber Pendapatan Tahun 2023	12
7. Tabel 1.7. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	14
8. Tabel 1.8. Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023	15
9. Tabel 1.9. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023	17
10. Tabel 2.1. Alokasi APBD Kabupaten Sabu Raijua TA 2023 Induk dan Perubahan	18
11. Tabel 2.2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 Induk dan Perubahan	20
12. Tabel 2.3. Belanja Daerah TA 2023 Induk dan Perubahan	21
13. Tabel 2.4. Pembiayaan Daerah TA 2023 Induk dan Perubahan	22
14. Tabel 5.1. Capaian Kinerja Makro Kabupaten Sabu Raijua Dua Tahun Terakhir 2022-2023	622
15. Tabel 5.2. Angka Kemiskinan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019-2023	625



DAFTAR GRAFIK

	Halaman
1. Grafik 5.1. Perkembangan IPM Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019-2023	624
2. Grafik 5.2. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019-2023	625
3. Grafik 5.3. Pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019-2023	627
4. Grafik 5.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019-2023	628
5. Grafik 5.5 Gini Rasio Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021-2023	629
.....	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. DASAR HUKUM

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2023 disusun sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ruang lingkup LKPJ Bupati Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 meliputi : a) hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua mencakup : 1) Urusan Wajib (Pelayanan Dasar dan non Pelayanan Dasar); 2) Urusan Pilihan; 3) dan Urusan Penunjang, yang dijabarkan pelaksanaannya oleh 32 (tiga puluh Dua) Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.

LKPJ TA 2023 ini disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen Perencanaan dan Anggaran Tahun 2023 sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

LKPJ Bupati Sabu Raijua TA 2023 tersebut, selanjutnya akan dibahas oleh DPRD Kabupaten Sabu Raijua dan hasil pembahasannya diharapkan dapat ditetapkan menjadi Keputusan DPRD Kabupaten Sabu Raijua. Sebagai mitra, DPRD kemudian menyampaikan rekomendasi dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sabu Raijua ke depan.



Penyusunan LKPJ Bupati Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023, merujuk pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63232);
3. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 29);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Nomor 36);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 Nomor 39);



1.2. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

1.2.1 Visi

Sebagai gambaran singkat tentang kondisi yang ingin dicapai oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan tugasnya selama lima tahun kedepan Visinya, yang harus mendapat dukungan dari segenap komponen masyarakat Kabupaten Sabu Raijua.

Visi dimaksud adalah **“Sabu Raijua Bersatu, Maju dan Bermartabat”**. Bersatu merepresentasikan kebersamaan semua elemen masyarakat Kabupaten Sabu Raijua yang ada di Kabupaten Sabu Raijua dan masyarakat Sabu Raijua *diaspora* dan semua lembaga yang ada untuk berkolaborasi membangun Kabupaten Sabu Raijua, membangun dalam suasana kekeluargaan yakni memperkuat budaya masyarakat Sabu Raijua berupa prinsip hidup yang dilandasi sikap saling menghormati perbedaan dan keberagaman serta jiwa gotong-royong, berinovasi memanfaatkan potensi wilayah dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem. Maju merepresentasikan terwujudnya peningkatan taraf hidup yang dimaknai sebagai suatu kondisi derajat atau kualitas kehidupan yang terus meningkat. Kabupaten Sabu Raijua yang Sejahtera dalam kerangka Pembangunan Daerah adalah Kabupaten yang menunjukkan kemakmuran, mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata. Kabupaten Sabu Raijua sejahtera menekankan peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berkelanjutan, peningkatan pendapatan perkapita yang tinggi dan terus bertumbuh, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dan berusaha, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, peningkatan kesejahteraan pekerja, peningkatan partisipasi pemuda dan prestasi olah raga, serta peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan. Dengan kondisi yang lebih sejahtera ini, maka akan terpenuhi seluruh kebutuhan sosial dasar bagi seluruh warganya, sehingga akan dapat hidup secara bermartabat. Bermartabat, ditandai dengan terpenuhinya hak seseorang untuk dihargai dan dihormati, dan diperlakukan secara etis dan berkeadilan sesuai dengan harkatnya sebagai warga negara, baik dalam nilai agama, etika, moralitas, hukum, sosial, politik, dan



ekonomi. Manusia yang bermartabat merupakan manusia yang menikmati umur panjang, dapat hidup bahagia, mempunyai akses yang luas terhadap pengetahuan dan dapat hidup yang layak. Masyarakat yang bermartabat juga selaras dengan masyarakat yang memiliki kepribadian dengan landasan bergotong royong, kerjasama, untuk mencapai martabat manusia seutuhnya yang adil, makmur, dan sejahtera.

1.2.2 Misi

Untuk mewujudkan Visi diatas maka Misi pembangunan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;
2. Menjamin ketercukupan pangan, air dan energi serta meningkatkan daya saing perekonomian daerah dengan sektor pariwisata sebagai penggerak utama;
3. Meningkatkan kualitas layanan publik yang profesional dan mewujudkan birokrasi yang bersih, efisien, efektif dan akuntabel;
4. Meningkatkan akses masyarakat melalui penyediaan infrastruktur yang handal, pemerataan wilayah serta menjamin pembangunan berkelanjutan.

1.3. DATA UMUM DAERAH

1.3.1 Wilayah Administrasi Daerah

Wilayah Administrasi Kabupaten Sabu Raijua terdiri dari 4 pulau yaitu Pulau Sabu, Pulau Raijua, Pulau Dana dan Wadu Mea. Pulau Sabu dan Raijua merupakan pulau yang berpenghuni sedangkan Pulau Dana dan Wadu Mea merupakan pulau yang tidak berpenghuni. Kabupaten Sabu Raijua terdiri dari 6 Kecamatan, 5 Kelurahan dan 58 Desa dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:



Tabel 1.1
Pembagian Wilayah Administrasi
Di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023

No	Kecamatan	Ibu Kota	Banyaknya Desa	Banyaknya Kelurahan
1.	Raijua	Ledeunu	3	2
2.	Sabu Barat	Seba	17	1
3.	Hawu Mehara	Tanajawa	10	-
4.	Sabu Timur	Bolou	8	2
5.	Sabu Liae	Eilogo	12	-
6.	Sabu Tengah	Eimadake	8	-
Jumlah			58	5

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sabu Raijua,2023

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Sabu Barat yakni sebanyak 17 Desa dan 1 Kelurahan. Kecamatan Sabu Barat juga merupakan pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian di Kabupaten Sabu Raijua.

1.3.2 Kondisi Geografis

a. Kondisi Wilayah

Kabupaten Sabu Raijua terletak diantara Pulau Timor, Pulau Rote Ndao, Pulau Flores dan Pulau Sumba dan berada pada posisi 100 25'7,12" - 100 49'45,83" Lintang Selatan dan antara 1210,16'10,78 - 1220 0'30,26 Bujur Timur, dengan batas-batas:

- a. Sebelah Timur : Laut Sawu
- b. Sebelah Barat : Laut Sawu
- c. Sebelah Utara : Laut Sawu
- d. Sebelah Selatan : Samudera Hindia

b. Luas Wilayah

Luas wilayah Daratan Kabupaten Sabu Raijua adalah 459,58 Km² dan terdiri dari 4 (empat) pulau, yaitu Pulau Sabu, Pulau Raijua, Pulau Dana dan Pulau Wadu Mea. Berdasarkan posisi geografis, Kabupaten Sabu Raijua selain memiliki potensi daratan, juga memiliki potensi bahari yang sangat besar. Kabupaten Sabu Raijua memiliki luas wilayah perairan laut cukup luas, dengan total Panjang garis pantai kurang lebih 1.026,36 km.



c. Topografi

Ditilik dari kelerengan (slope), Sebagian besar wilayah Sabu Raijua tergolong sebagai daerah yang datar s/d landau dengan kelas lereng 0-8% (luas 25.451,28 ha atau 55.23%) dan 9-15% (luas 10.422,92 ha atau 22.62%). Jika ditilik dari persebaran kelas lereng per Kecamatan menunjukkan bahwa Kecamatan Sabu Barat, Sabu Tengah dan Hawu Mehara akan memiliki kelas lereng yang tergolong curam (26-40%) s/d sangat curam (>41%) paling luas dibandingkan Kecamatan lainnya secara berturut-turut.

Secara umum wilayah Kabupaten Sabu Raijua berada pada elevansi dai 0 s/d 343 meter serta didominasi area dengan ketinggian tempat (elevansi) 0-100 meter dengan luasan kumulatif 27.839,76 ha atau dengan presentase 60.41% dari keseluruhan wilayah. Kecuali Sabu Barat dan Sabu Tengah, maka Kecamatan lain di wilayah Kabupat Kabupaten Sabu Raijua tidak memiliki elevansi sampai maksimum 300-350 meter.

d. Iklim

Seperti Daerah lainnya di Indonesia Kabupaten Sabu Raijua memiliki dua iklim yaitu musim Kemarau dan musim Hujan. Pada bulan Juni – September arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember – Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan samudra pasifik sehingga terjadi musim hujan. Keadaan seperti ini terus berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April – Mei dan Oktober – November. Mengingat Kabupaten Sabu Raijua dekat dengan Australia, arus angin yang banyak mengandung uap air dari Asia dan Samudra Pasifik ketika sampai diwilayah Kabupaten Sabu Raijua kandungan uap airnya sudah berkurang yang mengakibatkan hari hujan di Kabupaten Sabu Raijua menjadi lebih sedikit apabila dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia yang dekat dengan Asia. Hal ini menjadikan Kabupaten Sabu Raijua sebagai daerah yang tergolong kering, sehingga lahan pertanian basah sangat sedikit dibandingkan dengan lahan pertanian kering yang membutuhkan tanaman spesifikasi



untuk lahan kering. Rata – rata kelembaban udara di Kabupaten Sabu Raijua tahun 2014 sebesar 76,42 persen, arah kecepatan angin E/13 knot, tekanan udara 1.011,83 milibar, dan rata – rata suhu udara maksimum 32,010c, minimum 24,750c.

e. Filora dan Fauna

Sebagian besar Flora di Kabupaten Sabu Raijua terdiri dari padang rumput yang luas, pohon kelapa/lontar, pohon pinus, gewang dan hutan mangrove. Sementara Fauna di Kabupaten Sabu Raijua terdiri dari hewan–hewan menyusui besar seperti kerbau, sapi dan kuda. Sedangkan hewan menyusui kecil terdiri dari kambing, babi dan domba. Unggas terdiri dari ayam dan bebek.

1.3.3 Kondisi Demografi Daerah

Jumlah Penduduk Kabupaten Sabu Raijua sampai dengan Tahun 2023 sebanyak 96.035 jiwa, terdiri dari 48.973 panduduk Perempuan dan 47.062 penduduk laki-laki

a. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan

Jumlah Penduduk Kabupaten Sabu Raijua sampai dengan akhir Tahun 2023 menurut Kecamatan dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Manurut Kecamatan
Tahun 2023**

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	SABU BARAT	18.420	17.604	36.024
2.	SABU TENGAH	4.851	4.662	9.513
3.	SABU TIMUR	4.854	4.685	9.539
4.	SABU LIAE	5.630	5.405	11.035
5.	HAWU MEHARA	10.246	9.863	20.109
6.	RAIJUA	4.972	4.843	9.815
JUMLAH		48.973	47.062	96.035

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua, 2023
(DKB SEMESTER II 2023)*

b. Jumlah Penduduk menurut Pekerjaan

Jumlah penduduk Kabupaten Sabu Raijua pada Tahun 2023 menurut Tingkat Pekerjaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan Tahun 2023

NO	JENIS PEKERJAAN	KECAMATAN						TOTAL
		SABU BARAT	SABU TENGAH	SABU TIMUR	SABU LIAE	HAWU MEHARA	RAIJUA	
1.	BELUM/TIDAK BEKERJA	8.970	2.566	2.466	2.497	4.838	2.467	23.804
2.	MENGURUS RUMAH TANGGA	3.140	854	959	982	1.206	360	7.501
3.	PELAJAR/ MAHASISWA	9.689	2.684	2.523	3.068	5.773	2.495	26.232
4.	PENSIUNAN	171	15	54	17	19	4	280
5.	PNS/TNI/POLRI	1.111	121	219	101	132	93	1.777
6.	PETANI/ PEKEBUN	10.350	2.855	2.684	4.014	7.376	4.079	31.358
7.	LAINNYA	2.593	418	634	356	765	317	5.083
JUMLAH		36.024	9.513	9.539	11.035	20.109	9.815	96.035

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua, 2023 (DKB SEMESTER II 2023)

c. Jumlah Penduduk menurut Pendidikan

Jumlah penduduk Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 menurut Pendidikan dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Tahun 2023

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	KECAMATAN						TOTAL
		SABU BARAT	SABU TENGAH	SABU TIMUR	SABU LIAE	HAWU MEHARA	RAIJUA	
1.	TIDAK/BELUM SEKOLAH	8.784	2.766	2.636	3.046	5.936	2.959	26127
2.	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	5.251	1.439	1.246	1.620	3.047	1.512	14115
3.	TAMAT SD/SEDERAJAT	8.116	2.364	2.172	3.004	5.432	3.198	24286
4.	SLTP/SEDERAJAT	4.163	982	1.019	1.232	2.060	854	10310
5.	SLTA/SEDERAJAT	6.982	1.547	1.827	1.709	2.987	969	16021
6.	DIPLOMA I/II	304	38	52	42	55	21	512
7.	AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA	612	75	140	93	106	78	1104
8.	DIPLOMA IV/ STRATA I	1.770	300	440	287	480	222	3499
9.	STRATA II	42	2	7	1	6	2	60
10.	STRATA III	0	0	0	1	0	0	1
JUMLAH		36.024	9.513	9.539	11.035	20.109	9.815	96.035

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua, 2023 (DKB SEMESTER II 2023)



1.3.4 KONDISI APARATUR

❖ Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan	Jumlah	Satuan
SD	1	Orang
SMP	4	Orang
SMA/SMK	229	Orang
DI	2	Orang
DII	55	Orang
DIII	513	Orang
SI	1.500	Orang
S2	19	Orang

❖ Menurut Golongan

Tingkat Golongan	Jumlah	Satuan
Golongan I/c	-	Orang
Golongan I/d	3	Orang
Golongan II/a	4	Orang
Golongan II/b	19	Orang
Golongan II/c	181	Orang
Golongan II/d	137	Orang
Golongan III/a	269	Orang
Golongan III/b	526	Orang
Golongan III/c	301	Orang
Golongan III/d	263	Orang
Golongan IV/a	86	Orang
Golongan IV/b	45	Orang
Golongan IV/c	15	Orang
Golongan IV/d	1	Orang
Golongan VII(P3K)	186	Orang
Golongan IX (P3K)	257	Orang
Golongan X (P3K)	30	Orang

❖ Menurut Kelompok Jabatan

Jabatan	Jumlah	Satuan
Tinggi Pratama	21	Orang
Administrator	92	Orang
Pengawas	79	Orang
Pelaksana	947	Orang
Fungsional Tertentu	1184	Orang

❖ Menurut Diklat Penjurangan

Jenjang diklat	Jumlah	Satuan
PIM II	3	Orang
PIM III	30	Orang
PIM IV	29	Orang

❖ Fungsional

Jenjang diklat	Jumlah	Satuan
Fungsional diluar guru dan Kesehatan	107	Orang
orang Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	567	Orang



❖ Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Satuan
Laki-Laki	930	Orang
Perempuan	1.393	Orang
Jumlah	2.323	Orang

1.3.5 Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2023 setelah perubahan APBD ditargetkan sebesar Rp. 669.186.856.329,00 dengan realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 (sebelum diaudit BPK RI Perwakilan Provinsi NTT) sebesar Rp. 646.280.226.115,32 atau 96,58%. Pendapatan Daerah ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dijabarkan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 24.556.954.027,32 atau 56,16% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 43.730.366.650,-. Rincian pendapatan dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp. 4.978.609.604,80 atau 98,19% dari target sebesar Rp. 5.070.378.136,-.
- (2) Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp. 11.716.204.568,00 atau 38,41 % dari target sebesar Rp. 30.506.895.501,-.
- (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar Rp. 4.304.652.548,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 4.304.652.548.
- (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terealisasi Rp. 3.557.487.306,52 atau 92,44% dari target Rp. 3.848.440.465,00.

b. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 Rp. 614.484.788.868,00 atau 99,51% dari target ditetapkan sebesar Rp. 617.534.974.168,- dengan rincian sebagai berikut :



- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp. 596.849.908.291,00 atau 99,58% dari target sebesar Rp. 599.383.997.499,- yang terdiri dari:
 - Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp. 509.990.480.741,00 atau 99,54% dari target sebesar Rp. 512.355.253.499,-
 - Dana Insentif Daerah (DID) terealisasi sebesar Rp. 18.501.542.000,00 atau 100,00% dari target sebesar Rp. 18.501.542.000,00
 - Dana Desa terealisasi sebesar Rp. 62.145.670.550,00 atau 99,73% dari target sebesar Rp. 62.314.987.000,00
 - Insentif Fiskal terealisasi sebesar Rp. 6.212.215.000,00 atau 100,00% dari target sebesar Rp. 6.212.215.000,00
- (2) Pendapatan Transfer Antar Daerah terealisasi sebesar Rp 17.634.880.577,00 atau 97,16% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 18.150.976.669,-.
 - Pendapatan Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp 17.634.880.577,00 atau 97,16% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 18.150.976.669,00.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi sebesar Rp. 7.238.483.220,00 atau 91,38% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 7.921.515.511,00. Dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Pendapatan Hibah terealisasi sebesar Rp. 1.329.549.000,00 atau 120,75% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.101.063.000,00.
- (2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan terealisasi sebesar Rp 5.908.934.220,00 atau 86,64% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 6.820.452.511,-.

Realisasi pendapatan daerah menurut sumber pendapatan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 1.5. sementara kontribusi Pendapatan dapat dilihat pada tabel 1.6



Tabel 1.5
Realisasi Pendapatan Daerah menurut Sumber Pendapatan
Tahun 2023

No	Sumber Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
I.	PENDAPATAN	669.186.856.329	646.280.226.115,32	96,58
A.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	43.730.366.650	24.556.954.027,32	56,16
1.	Pajak Daerah	5.070.378.136	4.978.609.604,80	98,19
2.	Retribusi Daerah	30.506.895.501	11.716.204.568,00	38,41
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.304.652.548	4.304.652.548,00	100,00
4.	Lain-lain PAD yang Sah	3.848.440.465	3.557.487.306,52	92,44
B.	PENDAPATAN TRANSFER	617.534.974.168	614.484.788.868,00	99,51
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	599.383.997.499	596.849.908.291,00	99,58
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	18.150.976.669	17.634.880.577,00	97,16
C.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.921.515.511	7.238.483.220,00	91,38
1.	Pendapatan Hibah	1.101.063.000	1.329.549.000,00	120,75
2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.820.452.511	5.908.934.220,00	86,64

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2023 (data unaudit)

Tabel 1.6
Realisasi dan Kontribusi Pendapatan Daerah Menurut Sumber
Pendapatan Tahun 2023

No	Sumber Pendapatan	Realisasi (Rp)	Kontribusi (%)	Kontribusi per pos pendapatan (%)
I.	PENDAPATAN	646.280.226.115,32	100	
A.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	24.556.954.027,32	3,79	100
1.	Pajak Daerah	4.978.609.604,80		20,27
2.	Retribusi Daerah	11.716.204.568,00		47,71
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	4.304.652.548,00		17,52
4.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.557.487.306,52		14,48
B.	PENDAPATAN TRANSFER	614.484.788.868,00	95,08	100
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	596.849.908.291,00		97,13
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	17.634.880.577,00		2,86
C.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.238.483.220,00	1,12	100
1.	Pendapatan Hibah	1.329.549.000,00		18,36
2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.908.934.220,00		81,63

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2023 (data unaudit)



1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 726.933.070.399 untuk membiayai Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan total realisasi sebesar Rp. 610.384.223.137,00 atau 83,97 dari rencana yang ditetapkan setelah perubahan APBD, terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja operasi terealisasi sebesar Rp. 368.861.639.320,00 atau 82,34% dari rencana anggaran sebesar Rp. 447.989.986.699 meliputi :

- (1) Belanja Pegawai terealisasi Rp. 186.616.832.342,00 atau 80,96% dari rencana Rp. 230.493.298.622.
- (2) Belanja Barang Jasa terealisasi sebesar Rp. 165.063.255.974,00 atau 84,89% dari rencana sebesar Rp. 194.434.012.077.
- (3) Belanja Subsidi terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0% dari rencana sebesar Rp. 0,00.
- (4) Belanja Hibah teralisasi sebesar Rp. 11.727.033.004,00 atau 67,00% dari rencana sebesar Rp. 17.503.658.000.
- (5) Belanja Bantuan Sosial teralisasi sebesar Rp. 5.454.518.000,00 atau 98,12% dari rencana sebesar Rp. 5.559.018.000.

b. Belanja Modal

Belanja modal pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 142.821.467.670,00 atau 87,95% dari rencana sebesar Rp. 162.386.588.315 terdiri:

- (1) Belanja Modal Tanah terealisasi sebesar Rp. 6.000.000,00 atau 37,50% dari rencana sebesar Rp. 16.000.000.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp. 22.213.565.262,00 atau 95,35% dari rencana sebesar Rp. 23.296.025.788.
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp. 32.522.108.837,00 atau 89,30% dari rencana sebesar Rp. 36.420.136.591.



- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi terealisasi sebesar Rp. 87.803.912.171,00 atau 86,85% dari rencana sebesar Rp. 101.097.773.636.
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp. 275.881.400,00 atau 17,72% dari rencana sebesar Rp. 1.556.652.300.
- c. Belanja Transfer
- Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp. 98.492.164.247,00 atau 99,83% dari rencana sebesar Rp. 98.661.480.700 yang terdiri dari:
- (1) Belanja Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp438.878.560,00 atau 93,72% dari rencana sebesar Rp468.306.600.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp. 98.053.285.687,00 atau 99,86% dari rencana sebesar Rp. 98.193.174.100.

Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel 1.7, sementara Pola alokasi belanja dan alokasi belanja per jenis belanja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.7
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

No	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A.	BELANJA OPERASI	447.989.986.699	368.861.639.320,00	82,34
1.	Belanja Pegawai	230.493.298.622	186.616.832.342,00	80,96
2.	Belanja Barang dan Jasa	194.434.012.077	165.063.255.974,00	84,89
3.	Belanja Subsidi	0,00	,00	0
4.	Belanja Hibah	17.503.658.000	11.727.033.004,00	67,00
5.	Belanja Bantuan Sosial	5.559.018.000	5.454.518.000,00	98,12
B.	BELANJA MODAL	162.386.588.315	142.821.467.670,00	87,95
1.	Belanja Modal Tanah	16.000.000	6.000.000,00	37,50
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.296.025.788	22.213.565.262,00	95,35
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.420.136.591	32.522.108.837,00	89,30
4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	101.097.773.636	87.803.912.171,00	86,85



5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.556.652.300	275.881.400,00	17,72
C.	BELANJA TIDAK TERDUGA	17.895.014.685	208.951.900,00	1,17
1.	Belanja Tidak Terduga	17.895.014.685	208.951.900,00	1,17
D.	BELANJA TRANSFER	98.661.480.700	98.492.164.247,00	99,83
1.	Belanja Bagi Hasil	468.306.600	438.878.560,00	93,72
2.	Belanja Bantuan Keuangan	98.193.174.100	98.053.285.687,00	99,86
Total Belanja		726.933.070.399	610.384.223.137,00	83,97

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2023 (data unaudit)

Tabel 1.8
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023

No	Jenis Belanja	Realisasi (Rp)	Kontribusi (%)	Kontribusi per pos pendapatan (%)
A.	BELANJA OPERASI	368.861.639.320,00	60,43	100,00
1.	Belanja Pegawai	186.616.832.342,00		50,59
2.	Belanja Barang dan Jasa	165.063.255.974,00		44,74
3.	Belanja Subsidi	0		0,00
4.	Belanja Hibah	11.727.033.004,00		3,17
5.	Belanja Bantuan Sosial	5.454.518.000,00		1,47
B.	BELANJA MODAL	142.821.467.670,00	22,09	100,00
1.	Belanja Modal Tanah	6.000.000,00		0,01
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.213.565.262,00		15,55
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.522.108.837,00		22,77
4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	87.803.912.171,00		61,47
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	275.881.400,00		0,19
C.	BELANJA TIDAK TERDUGA	208.951.900,00	0,03	100,00
1.	Belanja Tidak Terduga	208.951.900,00		100,00
D.	BELANJA TRANSFER	98.492.164.247,00	15,23	100,00
1.	Belanja Bagi Hasil	438.878.560,00		0,44
2.	Belanja Bantuan Keuangan	98.053.285.687,00		99,55
Total Belanja		610.384.223.137,00	100,00	

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2023 (data unaudit)



1.3.7 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Target dan realisasi pembiayaan keuangan daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pembiayaan Daerah

Target dan realisasi pembiayaan keuangan daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

(1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp.95.961.142.735,34 atau 100,22% dari target sebesar Rp. 95.746.214.070 terdiri dari :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp. 55.038.160.787,26 atau 100% dari yang ditargetkan sebesar Rp. 55.038.160.787.
- b. Pencairan dana Cadangan Rp. 40.922.981.948,08 atau 100,53 % dari yang ditargetkan sebesar Rp. 40.708.053.283.

(2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp. 38.000.000.000,00 atau 100,00% dari yang ditargetkan sebesar Rp. 38.000.000.000 terdiri dari :

- a. Pembentukan Dana Cadangan realisasi sebesar Rp. 31.000.000.000,00 (100%) dari yang ditargetkan sebesar Rp. 31.000.000.000,00.
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah direalisasikan sebesar Rp. 7.000.000.000,00 atau 100,00% dari target Rp. 7.000.000.000,00

(3) Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp. 57.961.142.735,34 atau 100,37% dari rencana sebesar Rp. 57.746.214.070. Realisasi pembiayaan netto merupakan selisih antara realisasi penerimaan pembiayaan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan.



Anggaran dan realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1.9
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023

No.	Jenis Belanja	Target (%)	Realisasi (%)	%
A.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	95.746.214.070	95.961.142.735,34	100,22
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	55.038.160.787	55.038.160.787,26	100,00
2.	Pencairan Dana Cadangan	40.708.053.283	40.922.981.948,08	100,53
B.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	38.000.000.000	38.000.000.000,00	100,00
1.	Pembentukan Dana Cadangan	31.000.000.000	31.000.000.000,00	100,00
2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO		57.746.214.070	57.961.142.735,34	100,37

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sabu Raijua, 2023 (data unaudit)



BAB II
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

Pelaksanaan pemerintahan yang didasarkan pada pelaksanaan otonomi daerah adalah memberikan sebagai kewenangan Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan Pemerintah Daerah, dengan maksud akan mempercepat proses pembangunan secara nasional, pelaksanaan pemerintahan tersebut tentunya akan berhasil manakala didukung dengan program-program dan kegiatan yang dapat diimplementasikan secara tepat, mendapatkan partisipasi dari masyarakat, didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan secara baik, transparan, akuntabel dan berkualitas.

Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023, didasarkan pada pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya menegaskan jika selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran. Peraturan Daerah mengenai Perubahan APBD ini memuat perubahan terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan dari struktur APBD yang sebelumnya telah ditetapkan. Terjadi beberapa penambahan dan pengurangan terhadap sejumlah komponen baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan terhadap APBD 2023. Tahun Anggaran 2023, APBD Kabupaten Sabu Raijua mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.1.
Alokasi APBD Kabupaten Sabu Raijua
Tahun Anggaran 2023 Induk dan Perubahan

Jenis Perubahan	Dasar Hukum	Total APBD
APBD Induk	Perda Kabupaten Sabu Raijua Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023;	Rp. 672.979.294.614,-
	Perbup Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023;	



Jenis Perubahan	Dasar Hukum	Total APBD
Perubahan I	Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023;	Rp. 672.979.294.614,-
Perubahan II	Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023	Rp. 691.480.836.614,-
Perubahan III	Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023	Rp. 717.480.836.614,-
APBD Perubahan	Perda Kabupaten Sabu Raijua Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023;	Rp. 758.720.855.399,-
	Perbup Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023;	
Perubahan I	Perbup Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023;	Rp. 764.933.070.399,-

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2023 (data unaudit)



Sesuai Tabel 2.1. di atas, pada Tahun Anggaran 2023, APBD Murni Kabupaten Sabu Raijua sebesar Rp. 672.979.294.614,- Perubahan APBD naik menjadi Rp. 764.933.070.399,-.

2.1 PENDAPATAN DAERAH

Alokasi Pendapatan Daerah pada anggaran murni sebesar Rp 649.714.461.021,-sampai dengan Perubahan terakhir bertambah sebesar Rp. 19.472.395.308,- atau naik 2,90% menjadi Rp. 669.186.856.329,- Rincian Perubahan Pendapatan Daerah berdasarkan Sumber Pendapatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2023 Induk dan Perubahan

No	Jenis Perubahan	Sumber Pendapatan		
		Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Rp)
1.	APBD Induk	42.780.774.178,00	599.352.950.669,00	7.580.736.174,00
2.	Perubahan I	42.780.774.178,00	599.352.950.669,00	7.580.736.174,00
3.	Perubahan II	42.780.774.178,00	617.854.492.669,00	7.580.736.174,00
	Perubahan III	42.780.774.178,00	617.854.492.669,00	7.580.736.174,00
4.	APBD Perubahan	43.730.366.650,00	611.322.759.168,00	7.921.515.511,00
	Perubahan I	43.730.366.650,00	617.534.974.168,00	7.921.515.511,00
	Realisasi	24.556.954.027,32	614.484.788.868,00	7.238.483.220,00
	%	56,16	99,51	91,38

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2023 (data unaudit)

Pada Tabel 2.2. di atas, dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Sumber Pendapatan sejak penetapan APBD Murni sampai dengan Perubahan terakhir mengalami perubahan/penurunan target untuk : Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sebesar Rp.43.730.366.650,- dengan realisasi Rp.24.556.954.027,32 (56,16%); Pendapatan Transfer sebesar Rp.617.534.974.168,- dengan realisasi Rp.614.484.788.868,- (99,51%); Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp.7.921.515.511,- realisasi sebesar Rp.7.238.483.220,- (91,38%).



2.2 BELANJA DAERAH

Alokasi Belanja Daerah pada anggaran murni ditetapkan sebesar Rp. 660.979.294.614,- sampai dengan Perubahan terakhir bertambah sebesar Rp. 65.953.775.785,- atau naik 9,07% menjadi Rp 726.933.070.399,-. Rincian Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3.
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Induk dan Perubahan

No	Jenis Perubahan	Jenis Belanja (Rp)				Total Belanja (Rp)
		Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	
1	APBD Induk	409.651.870.656	149.815.154.458	5.000.000.000	96.512.269.500	660.979.294.614
2	Perubahan I	412.975.100.143	146.491.924.971	5.000.000.000	96.512.269.500	660.979.294.614
3	Perubahan II	417.870.042.243	160.226.524.871	4.462.487.800	96.921.781.700	679.480.836.614
	Perubahan III	417.870.042.243	160.226.524.871	4.462.487.800	96.921.781.700	679.480.836.614
4	APBD Perubahan	441.777.771.699	162.386.588.315	17.895.014.685	98.661.480.700	720.720.855.399
	Perubahan I	447.989.986.699	162.386.588.315	17.895.014.685	98.661.480.700	726.933.070.399
	Realisasi	368.861.639.320,00	142.821.467.670,00	208.951.900,00	98.492.164.247,00	610.384.223.137,00
	%	82,34	87,95	1,17	99,83	83,97

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2023 (data unaudit)

2.3 PEMBIAYAAN DAERAH

Alokasi Pembiayaan Daerah pada anggaran murni ditetapkan sebesar Rp 11.264.833.59,- sampai dengan Perubahan APBD terakhir mengalami perubahan sebesar Rp. 57.746.214.070,-. Realisasi Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 57.961.142.735,34 dengan rincian Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tabel berikut :



Tabel 2.4
Pembiayaan Daerah Tanggaran 2023 Induk dan Perubahan

Jenis Perubahan	Jenis Pembiayaan		
	Penerimaan Pembiayaan (Rp)	Pengeluaran Pembiayaan (Rp)	Pembiayaan Neto (Rp)
APBD Induk	23.264.833.593	12.000.000.000	11.264.833.593
Perubahan I	23.264.833.593	12.000.000.000	11.264.833.593
Perubahan II	23.264.833.593	12.000.000.000	11.264.833.593
Perubahan III	49.264.833.593	38.000.000.000	11.264.833.593
APBD Perubahan	95.746.214.070	38.000.000.000	57.746.214.070
Perubahan I	95.746.214.070	38.000.000.000	57.746.214.070
Realisasi	95.961.142.735,34	38.000.000.000,00	57.961.142.735,34
%	100,22	100,00	100,37

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2023 (data unaudit)



BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. Urusan Pendidikan

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan di Kabupaten Sabu Raijua dilaksanakan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 161.364.848.695** dan realisasi sebesar **Rp. 139.113.548.053 (86,21%)** Adapun rincian anggaran dan realisasi program/kegiatan sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	109.311.747.145	88.479.151.060	80,94
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	108.766.567.415	87.942.935.132	80,85
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan	108.498.539.415	87.679.537.132	80,81
	2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	268.028.000	263.398.000	98,27
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	411.921.230	410.078.587	99,55
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.631.250	6.600.000	99,52
	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	165.333.980	164.185.980	99,30
	3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.180.000	18.082.500	99,46
	4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.600.000	40.174.000	98,95
	5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	181.176.000	181.036.107	99,92
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.568.500	57.478.000	89,01
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.500.000	12.497.000	99,97
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.600.000	26.564.000	79,05
	3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.930.000	8.900.000	99,66
	4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.538.500	9.517.000	99,77
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.690.000	68.659.341	99,95



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.690.000	68.659.341	99,95
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	51.914.497.800	30.868.205.947	59,45
1.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	23.717.777.200	14.727.755.452	62,09
	1) Penambahan Ruang Kelas Baru	711.872.141	703.571.692	98,83
	2) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.124.092.600	1.105.081.068	98,30
	3) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	743.343.350	709.165.892	95,40
	4) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.084.975.087	1.068.188.457	98,45
	5) Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.219.118.115	1.193.513.112	97,89
	6) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	3.297.732.252	3.128.255.534	94,86
	7) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	172.445.531	172.235.438	99,87
	8) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	436.249.600	425.122.542	97,44
	9) Rehabilitasi Sedang/Berat Prasarana dan Utilitas Sekolah	62.746.464	62.555.151	99,69
	10) Pengadaan Mebel Sekolah	355.147.900	328.235.990	92,42
	11) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	140.034.500	123.502.000	88,19
	12) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	625.000.000	624.807.900	99,96
	13) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3.319.926.000	3.284.384.250	98,92
	14) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	290.426.000	261.377.811	89,99
	15) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	8.589.200.606	8.581.225.016	99,90
	16) Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1.545.467.054	1.537.758.615	99,50
2.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	15.833.992.039	7.116.835.365	44,94
	1) Penambahan Ruang Kelas Baru	657.319.976	651.508.178	99,11
	2) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	341.870.000	245.471.840	71,80
	3) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	671.358.672	661.695.283	98,56



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
	4) Pembangunan Laboratorium	1.679.600.000	1.448.534.723	86,24
	5) Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	457.985.000	457.954.626	99,99
	6) Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	953.161.153	953.160.855	99,99
	7) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	434.011.000	395.315.205	91,08
	8) Pengadaan Mebel Sekolah	261.217.400	258.863.405	99,09
	9) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	30.900.000	28.740.000	93
	10) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.173.138.200	1.957.842.750	90,09
	11) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	80.809.500	57.748.500	71,46
	12) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	8.092.621.138	8.089.652.280	99,96
3.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	11.761.148.761	8.498.933.880	72,26
	1) Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	156.374.748	156.374.748	100
	2) Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	287.239.163	284.869.163	99,17
	3) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	184.684.600	184.188.469	99,73
	4) Pengadaan Perlengkapan PAUD	110.630.000	110.500.000	99,88
	5) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	8.009.925.000	7.733.006.250	96,54
	6) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	29.995.250	29.995.250	100
	7) Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.982.300.000	2.960.067.000	99,25
4.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	601.579.800	524.681.250	87,21
	1) Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	52.467.000	51.626.000	98,39
	2) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	549.112.800	473.055.250	86,14
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	126.469.000	123.112.000	97,34



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
1.	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	126.469.000	123.112.000	97,34
	1) Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	48.612.500	46.905.500	96,48
	2) Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	77.856.500	76.206.500	97,88
IV	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	12.134.750	12.134.750	100
1.	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	12.134.750	12.134.750	100
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	12.134.750	12.134.750	100
	Jumlah	161.364.848.695	139.113.548.053	86,21



3.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Arah Kebijakan	Program	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Diarahkan pada upaya peningkatan sumber daya manusia berkualitas, kesetaraan gender dan pengentasan kemiskinan.	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya layanan Pendidikan menuju SARAI PINTAR	Persentase Capaian SPM Pendidikan	100	Paud = 97,43 Pendidikan Dasar = 97,38 Kesetaraan = 87,22	Paud = 97,43 Pendidikan Dasar = 97,38 Kesetaraan = 87,22
Diarahkan pada upaya peningkatan sumber daya manusia berkualitas, kesetaraan gender dan pengentasan kemiskinan.	Program Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya layanan Pendidikan menuju SARAI PINTAR	Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	100	100	100
Diarahkan pada upaya peningkatan sumber daya manusia berkualitas, kesetaraan gender dan pengentasan kemiskinan.	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Meningkatnya layanan Pendidikan menuju SARAI PINTAR	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	45	59,77	132,82



3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan
Alokasi Anggaran : Rp. 108.498.539.415,-
Realisasi : Rp. 87.679.537.132,- (80,81%)
Keluaran :
Tersedianya Gaji ASN selama 1 Tahun, TPP PNS Guru SMP selama 12 bulan dan PPPK SMP selama 3 bulan dan Tunjangan Guru.
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Alokasi Anggaran : Rp. 268.028.000,-
Realisasi : Rp. 263.398.000,- (98,27%)
Keluaran :
Tersedianya honor pengguna anggaran, penatausahaan keuangan, PPTK, PPK, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan dan Pengurus Barang selama 1 Tahun.

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 6.631.250,-
Realisasi : Rp. 6.600.000,- (99,52%)
Keluaran :
Tersedianya komponen instalasi listrik, penerangan bangunan kantor sebanyak 9 Jenis.
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 165.333.980,-
Realisasi : Rp. 164.185.980,- (99,30%)
Keluaran :
Tersedianya ATK sebanyak 34 jenis, peralatan gedung kantor sebanyak 8 jenis.
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 18.180.000,-
Realisasi : Rp. 18.082.500,- (99,46%)
Keluaran :
Tersedianya penyediaan makanan dan minuman rapat sebanyak 606 dos.
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Alokasi Anggaran : Rp. 40.600.000,-
Realisasi : Rp. 40.174.000,- (98,95%)
Keluaran :
Tersedianya kebutuhan barang cetak dan penggandaan dokumen kantor berupa cetak DPA/DPPA 30 buku, cetak dokumen lainya sebanyak 60 buku serta penggandaan administrasi perkantoran sebanyak 75.500 lembar selama 12 bulan
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Alokasi Anggaran : Rp. 181.176.000,-
Realisasi : Rp. 181.036.107,- (99,92%)



Keluaran :

- Tersedianya data dan informasi melalui perjalanan dinas dalam daerah rangka mengikuti kegiatan musrenbangcam dan pamong praja di 6 kecamatan, Monitoring pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan SD dan SMP di 6 Kecamatan.
- Tersedianya data dan informasi melalui perjalanan dinas luar daerah ke kupang dan ke Jakarta sebanyak 12 kali.

3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Alokasi Anggaran : Rp. 12.500.000,-

Realisasi : Rp. 12.497.000,- (99,97%)

Keluaran :

Tersedianya materai sebanyak 1.040 lembar

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Alokasi Anggaran : Rp. 33.600.000,-

Realisasi : Rp. 26.564.000,- (79,05%)

Keluaran :

Tersedianya Penerangan Gedung Kantor selama 12 bulan dan pengisian air tangki 240.000 Liter (48 Tengki) selama 12 bulan.

3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 8.930.000,-

Realisasi : Rp. 8.900.000,- (99,66%)

Keluaran :

Tersedianya Jasa pemeliharaan laptop, printer dan AC

4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 9.538.500,-

Realisasi : Rp. 9.517.000,- (99,77%)

Keluaran :

Tersedianya Peralatan kebersihan sebanyak 23 jenis

4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Alokasi Anggaran : Rp. 68.690.000,-

Realisasi : Rp. 68.659.341,- (99,95%)

Keluaran :

Tersedianya Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan 2 unit roda empat.

5. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

1) Penambahan Ruang Kelas Baru

Alokasi Anggaran : Rp. 711.872.141,-

Realisasi : Rp. 703.571.692,- (98,83%)

Keluaran :

Tersedianya 1 ruang kelas baru pada SD Negeri Bolua-Filial Nadega (DAU-2023), Jasa Konsultasi perencanaan RKB SDN Bolua-Filial Nadega : 1 Paket (DAU -2023, Jasa konsultasi pengawasan RKB SDN Bolua- Filial Nadega : 1 Paket (DAU -2023, 2 ruang pada SD Negeri Bolua-Filial Nadega (DAU-2022 – 70%), Jasa Konsultasi pengawasan



- RKB SDN Bolua- Filial Nadega:1 Paket (DAU 2022), Jasa Konsultasi pengawasan RKB SDN Bolua- Filial Nadega : 1 paket (DAU 2022)
- 2) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
 Alokasi Anggaran : Rp. 1.124.092.600,-
 Realisasi : Rp. 1.105.081.068,- (98,30%)
 Keluaran :
 Tersedianya Pembangunan 4 Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD : SD Negeri Luipau 1 Ruang, SDG Raeliu 1 Ruang,SDG Raerobo 1 Ruang, dan SDG Lederaemawide 2 1 Ruang (DAK-2023), Jasa Konsultansi perencanaan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SDN Luipau : 1 Paket (DAK -2023), Jasa Konsultansi pengawasan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SDN Luipau : 1 Paket (DAK -2023), Jasa Konsultansi perencanaan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SDG Raeliu,SDG Raerobo dan SDG Lederaemawide 2 : 1 Paket (DAK -2023), Jasa Konsultansi pengawasan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SDG Raeliu,SDG Raerobo dan SDG Lederaemawide 2 : 1 Paket (DAK -2023)
- 3) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
 Alokasi Anggaran : Rp. 743.343.350,-
 Realisasi : Rp. 709.165.892,- (95,40%)
 Keluaran :
 Tersedianya Pembangunan 6 Ruang Unit Kesehatan Sekolah SD : SD Negeri Luipau 1 Ruang,SD Inpres Delo 1 Ruang,SDG Raeliu 1 Ruang,SDG Raerobo 1 Ruang,SDG Wuiray 1 Ruang dan SDG Lederaemawide 2 1 Ruang (DAK-2023), Jasa Konsultansi perencanaan UKS SDN Luipau dan SDI Delo : 1 Paket (DAK -2023), Jasa Konsultansi pengawasan UKS SDN Luipau dan SDI Delo : 1 Paket (DAK -2023), Jasa Konsultansi perencanaan UKS SDG Raeliu,SDG Raerobo,SDG Wuiray dan SDG Lederaemawide 2 : 1 Paket (DAK -2023), Jasa Konsultansi pengawasan UKS SDG Raeliu,SDG Raerobo,SDG Wuiray dan SDG Lederaemawide 2 : 1 Paket (DAK -2023)
- 4) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 Alokasi Anggaran : Rp. 1.084.975.087,-
 Realisasi : Rp. 1.068.188.457,- (98,45%)
 Keluaran :
 Tersedianya Sarana Prasarana Utilitas SD 8 Unit pada SDN 3 Seba 1 ruang (DAU 2023), SDN Loboaju 1 ruang (DAU 2023),SDN Luipau 1 ruang (DAK 2023),SD Inpres Delo 1 ruang (DAK 2023),SDG Raerobo 1 ruang (DAK 2023), SDG Wuiray 1 Ruang (DAK 2023), SDG Raeliu 1 Ruang (DAK 2023), SDG Lederaemawide 2 1 Ruang (DAK-2023), Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Utilitas SDN 3 Seba dan SDN Loboaju 1 Paket (DAU-2023), Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Utilitas SDN 3 Seba dan SDN Loboaju 1 Paket (DAU-2023), Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Utilitas SDN Luipau dan SD Inpres Delo 1 Paket (DAK-2023), Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Utilitas SDN Luipau dan SD Inpres Delo 1 Paket (DAK-2023), Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Utilitas SDG Raeliu, SDG Raerobo, SDG Wuiray, SDG



- Lederaemawide 2 1 Paket (DAK-2023), Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Utilitas SDG Raeliu, SDG Raerobo, SDG Wuiray, SDG Lederaemawide 2 1 Paket (DAK-2023)
- 5) Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
 Alokasi Anggaran : Rp. 1.219.118.115,-
 Realisasi : Rp. 1.193.513.112,- (97,89%)
 Keluaran :
- Tersedianya 6 Unit Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah SDN Luipau 1 Unit (DAK 2023), SDI Delo 1 Unit (DAK 2023),SDG Raeliu 1 Unit (DAK 2023), SDG Raerobo 1 Unit (DAK 2023),SDG Wuiray 1 Unit (DAK 2023) dan SDG Lederaemawide 2 1 Unit (DAK 2023), Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah SDN Luipau dan SDI Delo 1 Paket (DAK 2023), Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah SDN Luipau dan SDI Delo 1 Paket (DAK 2023), Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah SDG Raeliu , SDG Raerobo, SDG Wuiray dan SDG Lederaemawide 2 1 Paket (DAK 2023);, Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah SDG Raeliu , SDG Raerobo, SDG Wuiray dan SDG Lederaemawide 2 1 Paket (DAK 2023) ;
- 6) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
 Alokasi Anggaran : Rp. 3.297.732.252,-
 Realisasi : Rp. 3.128.255.534,- (94,86%)
 Keluaran :
- Tersedianya 23 ruang kelas yang direhabilitasi pada SDN Ledea 1 ruang (DID 2023), SDN Kalemuri 2 ruang (DID 2023),SDG Raerobo 6 ruang (dak 2023),SDG Raeliu 4 ruang (DAK 2023), SDN Boko 4 ruang (DAU 2023), SDG Bolou 1 3 ruang (DAU 2023), SDG Lederaemawide 2 3 ruang (DAK 2023), Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN Ledea,SDN Kalemuri 1 paket (DID-2023), Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN Ledea,SDN Kalemuri 1 paket (DID-2023), Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDG Raerobo,SDG Raeliu,SDG Lederaemawide 2 1 paket (DAK 2023), Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDG Raerobo,SDG Raeliu,SDG Lederaemawide 2 1 paket (DAK 2023), Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN Boko,SDG Bolou 1 paket (DAU-2023), Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN Boko,SDG Bolou 1 paket (DAU-2023).
- 7) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
 Alokasi Anggaran : Rp. 172.445.531,-
 Realisasi : Rp. 172.235.438,- (99,87%)
 Keluaran :
- Tersedianya 1 ruang Guru yang direhabilitasi pada SDG Wuiray (DAK 2023), 1 ruang Kepala Sekolah yang direhabilitasi pada SDG Wuiray (DAK 2023), Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat



- Ruang Guru SDG Wuiray 1 paket (DAK 2023), Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru SDG Wuiray 1 Paket (DAK 2023), Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah SDG Wuiray 1 Paket (DAK 2023), Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah SDG Wuiray 1 Paket (DAK 2023) SDG Wuiray (DAK 2023).
- 8) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
 Alokasi Anggaran : Rp. 436.249.600-
 Realisasi : Rp. 425.122.542,- (97,44%)
 Keluaran :
 Tersedianya 3 ruang Perpustakaan yang direhabilitasi pada SDG Raerobo 1 Ruang (DAK 2023), SDN Dainao 1 Ruang (DAU 2023), SDN Ledeke 2 1 Ruang (DAU 2023), Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan SDG Raerobo 1 Paket (DAK 2023), Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan SDG Raerobo 1 Paket (DAK 2023), Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan SDN Dainao ,SDN Ledeke 2 1 Paket (DAK 2023), Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan SDN SDN Ledeke 2 1 Paket (DAK 2023).
- 9) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 Alokasi Anggaran : Rp. 62.746.464-
 Realisasi : Rp. 62.555.151,- (99,69%)
 Keluaran :
 Tersedianya 1 ruang Sarana Prasarana dan Utilitas yang direhabilitasi pada SDG Wuiray 1 Ruang (DAK 2023), Tersedianya Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Sarana Prasarana dan Utilitas SDG Wuiray 1 Paket (DAK 2023), Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Sarana Prasarana dan Utilitas SDG Wuiray 1 Paket (DAK 2023)
- 10) Pengadaan Mebel Sekolah
 Alokasi Anggaran : Rp. 355.147.900-
 Realisasi : Rp. 328.235.990,- (92,42%)
 Keluaran :
 ❖ Tersedianya 16 Paket Mebel Sekolah Dasar
Mebel Ruang Guru 4 Paket (DAK 2023) :
SDG Raeliu : Lemari Arsip 3 Buah, Meja guru ½ Biro 2 Buah, Kursi Petugas 4 Buah, *SDG Lederaemawide 2* : Lemari Arsip 3 Buah, Meja guru ½ Biro 2 Buah, Kursi Petugas 4 Buah, *SDG Raerobo* : Lemari Arsip 3 Buah, Meja guru ½ Biro 2 Buah, Kursi Petugas 4 Buah, *SDN Luipau* : Lemari Arsip 3 Buah, Meja guru ½ Biro 2 Buah, Kursi Petugas 4 Buah.
Mebel Ruang Laboratorium 6 Paket (DAK 2023) :
SDG Raeliu : Meja Siswa 13 Buah, Kursi Siswa 13 Buah, Meja Guru 1 Buah, Kursi Guru 2 Buah, Lemari 1 Buah, Tempat Sampah 1 Buah, *SDG Lederaemawide 2* : Meja Siswa 13 Buah, Kursi Siswa 13 Buah, Meja Guru 1 Buah, Kursi Guru 2 Buah, Lemari 1 Buah, Tempat Sampah 1 Buah, *SDG Raerobo* : Meja Siswa 13 Buah, Kursi Siswa 13

Buah, Meja Guru 1 Buah, Kursi Guru 2 Buah, Lemari 1 Buah, Tempat Sampah 1 Buah, *SDG Wuiray* : Meja Siswa 13 Buah, Kursi Siswa 13 Buah, Meja Guru 1 Buah, Kursi Guru 2 Buah, Lemari 1 Buah, Tempat Sampah 1 Buah, *SDN Luipau* : Meja Siswa 13 Buah, Kursi Siswa 13 Buah, Meja Guru 1 Buah, Kursi Guru 2 Buah, Lemari 1 Buah, Tempat Sampah 1 Buah;

SDI Delo : Meja Siswa 13 Buah, Kursi Siswa 13 Buah, Meja Guru 1 Buah, Kursi Guru 2 Buah, Lemari 1 Buah, Tempat Sampah 1 Buah.

Mebel Ruang UKS 6 Paket (DAK 2023) :

SDG Raeliu : Kursi Petugas 1 Buah, Tandu lipat 1 Buah, Tempat tidur single jati 1 buah, Kasur/divan 1 Buah, Lemari penyimpanan 1 Buah, Selimut 6 buah, Kaset kaki besar 2 buah, Sapu lantai 2 buah, Serok 2 buah, Kemoceng 2 buah dan Tempat Sampah 2 buah, *SDG Lederaemawide 2* : Kursi Petugas 1 Buah, Tandu lipat 1 Buah, Tempat tidur single jati 1 buah, Kasur/divan 1 Buah, Lemari penyimpanan 1 Buah, Selimut 6 buah, Kaset kaki besar 2 buah, Sapu lantai 2 buah, Serok 2 buah, Kemoceng 2 buah dan Tempat Sampah 2 buah, *SDG Raerobo* : Kursi Petugas 1 Buah, Tandu lipat 1 Buah, Tempat tidur single jati 1 buah, Kasur/divan 1 Buah, Lemari penyimpanan 1 Buah, Selimut 6 buah, Kaset kaki besar 2 buah, Sapu lantai 2 buah, Serok 2 buah, Kemoceng 2 buah dan Tempat Sampah 2 buah, *SDG Wuiray* : Kursi Petugas 1 Buah, Tandu lipat 1 Buah, Tempat tidur single jati 1 buah, Kasur/divan 1 Buah, Lemari penyimpanan 1 Buah, Selimut 6 buah, Kaset kaki besar 2 buah, Sapu lantai 2 buah, Serok 2 buah, Kemoceng 2 buah dan Tempat Sampah 2 buah; *SDN Luipau* : Kursi Petugas 1 Buah, Tandu lipat 1 Buah, Tempat tidur single jati 1 buah, Kasur/divan 1 Buah, Lemari penyimpanan 1 Buah, Selimut 6 buah, Kaset kaki besar 2 buah, Sapu lantai 2 buah, Serok 2 buah, Kemoceng 2 buah dan Tempat Sampah 2 buah, *SDI Delo* : Kursi Petugas 1 Buah, Tandu lipat 1 Buah, Tempat tidur single jati 1 buah, Kasur/divan 1 Buah, Lemari penyimpanan 1 Buah, Selimut 6 buah, Kaset kaki besar 2 buah, Sapu lantai 2 buah, Serok 2 buah, Kemoceng 2 buah dan Tempat Sampah 2 buah.

11) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Alokasi Anggaran : Rp. 140.034.500,-

Realisasi : Rp. 123.502.000,- (88,19%)

Keluaran :

Terbayarnya honor Tim Manajemen BOS, Panitia sosialisasi Dana BOS, Narasumber Sosialisasi Dana Bos, Narasumber Dapodik. tingkat Kabupaten, honor narasumber sosialisasi aplikasi Dapodik, honor Tim Verifikasi Dana Bos dan terlaksananya monitoring BOS dan Verifikasi aset BOS pada 77 Sekolah Dasar.

12) Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa

Alokasi Anggaran : Rp. 625.000.000,-

Realisasi : Rp. 624.807.900,- (99,96%)



Keluaran :

Tersedianya 5 Paket Alat Praktik dan Peraga Siswa SDN Luipau 1 Paket (DAK 2023), (DAK 2023), SDG Raeliu 1 Paket (DAK 2023), SDG Raerobo 1 Paket (DAK 2023),SDG Wuiray 1 Paket DAK 2023) dan SDG Lederaemawide 2 1 Paket (DAK 2023) : SDN Luipau : Lap Top Aceer (core 5) = 7 Buah, Printer Epson /WIFI = 1 Buah, Infocus = 1 Buah, Kabel Lan Belden Cat 6 1 Buah, Orbit = 2 Buah,Tang Kringing 1 Buah, Lan Tester D-Link = 1 buah, UPS 1100VA 1 Buah, Swithch Hub 16 Port = 1 Buah : SDN Lederaemawide 2 : LapTop Aceer (core 5) = 7 Buah, Printer Epson /WIFI = 1 Buah, Infocus = 1 Buah, Kabel Lan Belden Cat 6 1 Buah, Orbit = 2 Buah,Tang Kringing 1 Buah, Lan Tester D-Link = 1 buah, UPS 1100VA 1 Buah, Swithch Hub 16 Port = 1 Buah : SDG Raeliu : Lap Top Aceer (core 5) = 7 Buah, Printer Epson /WIFI = 1 Buah, Infocus = 1 Buah, Kabel Lan Belden Cat 6 1 Buah, Orbit = 2 Buah,Tang Kringing 1 Buah, Lan Tester D-Link = 1 buah, UPS 1100VA 1 Buah, Swithch Hub 16 Port = 1 Buah : SDG Raerobo : LapTop Aceer (core 5) = 7 Buah, Printer Epson /WIFI = 1 Buah, Infocus = 1 Buah, Kabel Lan Belden Cat 6 1 Buah, Orbit = 2 Buah,Tang Kringing 1 Buah, Lan Tester D-Link = 1 buah, UPS 1100VA 1 Buah, Swithch Hub 16 Port = 1 Buah : SDG Wuiray: LapTop Aceer (core 5) = 7 Buah, Printer Epson /WIFI = 1 Buah, Infocus = 1 Buah, Kabel Lan Belden Cat 6 1 Buah, Orbit = 2 Buah,Tang Kringing 1 Buah, Lan Tester D-Link = 1 buah, UPS 1100VA 1 Buah, Swithch Hub 16 Port = 1 Buah

- 13) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Alokasi Anggaran : Rp. 3.319.926.000,-

Realisasi : Rp. 3.284.384.250,- (98,92%)

Keluaran :

Tersedianya honor guru kontrak SD sebanyak 192 orang untuk 12 bulan dan 52 orang untuk 6 bulan.

- 14) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Alokasi Anggaran : Rp. 290.426.000,-

Realisasi : Rp. 261.377.811,- (89,99%)

Keluaran :

Tersedianya ATK kegiatan sosialisasi pendidikan anti korupsi dan Implementasi Kurikulum Merdeka sebanyak sebanyak 9 jenis dan ATK Tim Penilai Angka Kredit Guru sebanyak 6 jenis, makan dan minum panitia, peserta dan narasumber kegiatan sosialisasi kurikulum merdeka sebanyak 167 orang, Tersedianya honorarium panitia sosialisasi kurikulum merdeka sebanyak 9 orang, honorarium panitia bimterk best practice sebanyak 9 orang , honorarium tim badan pertimbangan jabatan kepangkatan kepala sekolah sebanyak 7 orang, honor tim penilai angka kredit sebanyak 14 orang dan honor tim sekretariat angka kredit guru sebanyak 7 orang, honor narasumber kegiatan sosialisasi kurikulum merdeka sebanyak 4 orang dan honor narasumber bimtek pebulisan best practice 1 orang, koordinasi dan konsultasi kegiatan kurikulum merdeka



dan sekolah/guru penggerak serta kegiatan prioritas kemdikburistek, perjalanan dinas pengawas sekolah.

15) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Alokasi Anggaran : Rp. 8.589.200.606,-

Realisasi : Rp. 8.581.225.016,- (99,90%)

Keluaran :

Tersedianya honor guru dan tenaga kependidikan (tata usaha, tenaga kebersihan dan penjaga sekolah) untuk 49 sekolah, alat tulis kantor untuk kegiatan penata usahaan di sekolah sebanyak 7 jenis, atk keg pembelajaran dan ujian sekolah serta anbk sebanyak 5 jenis, honor panitia PPBD/MPLS, honor panitia literasi, honor kegiatan ekstra kulikuler sebanyak 4 jenis, pengembangan sumberdaya pendidik melalui wadah Kelompok Kerja guru dan komunitas belajar sebanyak 2 Jenis, Jasa pemeliharaan sarana prasara berupa rusak ringan 5 jenis, jasa air listrik internet sebanyak 3 jenis dan keg ekstrakurikuler Pramuka, olahraga preatasi dan hut RI dan hut sarai, transportasi guru pendamping 4 jenis, tranprotasi untuk perjalanan guru/kepala sekolah untuk 15 kegiatan, honor tim penyusunan laporan dana bos untuk bendahara dan guru sebanyak 49 sekolah, Pembelian untuk item kegiatan diatas u 49 sekolah dasar, buku kurikulum Merdeka kelas 1 dan kelas 4 untuk 49 sekolah baik buku siswa dan buku pegangan guru serta buku referensi siswa dan guru sebanyak 12.050 eksemplar, laptop 25 Unit untuk 25 sekolah menunjang proses pembelajaran maupun mendukung kegaitan ANBK. krusi guru dan kursi kantor untuk 10 sekolah, kipas angin 12 Unit. AC sebanyak 5 Unit, mike wireless 7 unit 7 sekolah, rak buku sebanyak 4 buah

16) Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar

Alokasi Anggaran : Rp. 1.545.467.054,-

Realisasi : Rp. 1.537.758.615,- (99,50%)

Keluaran :

Tersedianya 6 Unit Laboratorium Sekolah Dasar SDN Luipau 1 Unit (DAK 2023), SDI Delo 1 Unit (DAK 2023), SDG Raeliu 1 Unit (DAK 2023), SDG Raerobo 1 Unit (DAK 2023),SDG Wuiray 1 Unit (DAK 2023) dan SDG Lederaemawide 2, 1 Unit (DAK 2023); Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Laboratorium SDN Luipau dan SDI Delo 1 Paket (DAK 2023); Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Laboratorium SDN Luipau dan SDI Delo 1 Paket (DAK 2023); Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Laboratorium SDG Raeliu, SDG Raerobo, SDG Wuiray dan SDG Lederaemawide 2, 1 Paket (DAK 2023); Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Laboratorium SDG Raeliu, SDG Raerobo, SDG Wuiray dan SDG Lederaemawide 2, 1 Paket (DAK 2023)

6. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

1) Penambahan Ruang Kelas Baru

Alokasi Anggaran : Rp. 657.319.976,-

Realisasi : Rp. 651.508.178,- (99,11%)



- Keluaran :
- Tersedianya 2 Ruang Kelas Baru (DAU 2022) yaitu pada SMPN 3 Hawu Mehara 2 Ruang; Jasa Konsultasi perencanaan RKB SMPN 3 Hawu Mehara 1 Paket (DAU -2022); Jasa Konsultasi pengawasan RKB SMPN 3 Hawu Mehara 1 Paket (DAU -2022).
- 2) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- Alokasi Anggaran : Rp. 341.870.000,-
- Realisasi : Rp. 245.471.840,- (71,80%)
- Keluaran :
- Tersedianya Pembangunan 1 Ruang Tata Usaha pada: SMP Negeri Satap Kujiratu (DAK 2023); Jasa Konsultasi perencanaan Ruang Tata Usaha 1 Paket pada: SMP Negeri Satap Kujiratu (DAK 2023); Jasa Konsultasi perencanaan Ruang Tata Usaha 1 Paket pada: SMP Negeri Satap Kujiratu (DAK 2023);
- 3) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- Alokasi Anggaran : Rp. 671.358.672,-
- Realisasi : Rp. 661.695.283,- (98,56%)
- Keluaran :
- Terlaksananya Pembangunan 2 Ruang Unit Kesehatan Sekolah pada SMPN SATap Kujiratu 1 Unit (DAK 2023) dan SMPN 2 Raijua 1 Unit (DAK 2023); Jasa Konsultasi perencanaan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) 1 Paket pada : SMPN 2 Raijua dan SMP Negeri Satap Kujiratu (DAK 2023); Jasa Konsultasi pengawasan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) 1 Paket pada : SMPN 2 Raijua dan SMP Negeri Satap Kujiratu (DAK 2023); pembangunan 1 Unit Ruang UKS SMPN Satap Eirobo 1 Paket (DAK 2022), Tahap akhir 30%.
- 4) Pembangunan Laboratorium
- Alokasi Anggaran : Rp. 1.679.600.000,-
- Realisasi : Rp. 1.448.534.723,- (86,24%)
- Keluaran :
- Terlaksananya Pembangunan 2 Ruang Laboratorium Komputer pada SMPN SATap Kujiratu 1 Unit (DAK 2023) dan SMPN 2 Raijua 1 Unit (DAK 2023);
 - Tersedianya Jasa Konsultasi perencanaan Ruang Laboratorium Komputer 1 Paket pada : SMPN 2 Raijua dan SMP Negeri Satap Kujiratu (DAK 2023); Jasa Konsultasi pengawasan Ruang Laboratorium Komputer 1 Paket pada : SMPN 2 Raijua dan SMP Negeri Satap Kujiratu (DAK 2023);
- Alasan realisasi 86,24% yaitu tidak terbayarnya dana tahap akhir (30%) dari paket pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer pada SMPN SATap Kujiratu (DAK 2023) senilai Rp.231.065.277, karna Administrasi pengajuan pembayaran oleh Penyedia masuk pada tanggal 30 Desember 2023.
- 5) Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
- Alokasi Anggaran : Rp. 457.985.000,-
- Realisasi : Rp. 457.954.626,- (99,99%)

Keluaran :

- Terlaksananya Pembangunan 2 Unit Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah pada SMPN SATap Kujiratu 1 Unit (DAK 2023) dan SMPN 2 Raijua 1 Unit (DAK 2023);
- Tersedianya Jasa Konsultasi perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 1 Paket pada : SMPN 2 Raijua dan SMP Negeri Satap Kujiratu (DAK 2023), Jasa Konsultasi pengawasan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 1 Paket pada : SMPN 2 Raijua dan SMP Negeri Satap Kujiratu (DAK 2023), Jasa Konsultasi pengawasan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 1 Paket pada : SMPN 2 Liae dan SMP Negeri Satap Eirobo (DAK 2022).

6) Pembangunan Sarana Prasarana Utilitas Sekolah

Alokasi Anggaran : Rp. 953.161.153,-

Realisasi : Rp. 953.160.855,- (99,99%)

Keluaran :

- Terlaksananya Pembangunan 2 Unit Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah pada SMPN SATap Kujiratu 1 Unit (DAK 2023) dan SMPN 2 Raijua 1 Unit (DAK 2023);
- Tersedianya Jasa Konsultasi perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 1 Paket pada : SMPN 2 Raijua dan SMP Negeri Satap Kujiratu (DAK 2023), Jasa Konsultasi pengawasan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 1 Paket pada : SMPN 2 Raijua dan SMP Negeri Satap Kujiratu (DAK 2023), Jasa Konsultasi pengawasan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 1 Paket pada : SMPN 2 Liae dan SMP Negeri Satap Eirobo (DAK 2022).

7) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Alokasi Anggaran : Rp. 434.011.000,-

Realisasi : Rp. 395.315.205,- (91,08%)

Keluaran :

Tersedianya ruang kelas yang direhabilitasi pada SMPN 3 Sabu Barat (DID 2023), Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMPN 3 Sabu Barat 1 paket (DID-2023), Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMPN 3 Sabu Barat 1 paket (DID-2023);

8) Pengadaan Mebel Sekolah

Alokasi Anggaran : Rp. 261.217.400,-

Realisasi : Rp. 258.863.405,- (99,09%)

Keluaran :

Tersedianya Mebel Sekolah 7 Paket pada :

Mebel Ruang Laboratorium Komputer 2 paket :

SMP Negeri 2 Raijua : Meja siswa 31 pasang, Kursi siswa 31 pasang, Meja guru 1 buah, Kursi guru 1 buah, Lemari 2 buah, Tempat sampah 2 buah: *SMP Negeri Satap Kujiratu* : Meja siswa 31 pasang, Kursi siswa 31 pasang, Meja guru 1 buah, Kursi guru 1 buah, Lemari 2 buah, Tempat



sampah 2 buah.

Mebeluer UKS 2 Paket :

SMP Negeri 2 Raijua : Kursi Petugas 1 Buah, Tandu lipat 2 Buah, Tempat tidur single jati 1 buah, Kasur/divan 2 Buah, Lemari penyimpan 2 Buah, Selimut 6 buah, Kaset kaki besar 2 buah, Sapu lantai 2 buah, Serok 2 buah, Kemoceng 2 buah dan Tempat Sampah 2 buah: *SMP Negeri Satap Kujiratu* : Kursi Petugas 1 Buah, Tandu lipat 2 Buah, Tempat tidur single jati 1 buah, Kasur/divan 2 Buah, Lemari penyimpan 2 Buah, Selimut 6 buah, Kaset kaki besar 2 buah, Sapu lantai 2 buah, Serok 2 buah, Kemoceng 2 buah dan Tempat Sampah 2 buah.

Mebeluer Rumah Dinas Guru :

SMP Negeri 2 Raijua : Tempat tidur jati 2 buah, Kasur/Spring bed 2 buah, Lemari pakaian jati 2 buah, Meja makan jati 1 buah, Kursi makan jati 4 buah Meja /kursi tamu/jati (sofa) 1 Set: *SMP Negeri Satap Kujiratu* : Tempat tidur jati 2 buah, Kasur/Spring bed 2 buah, Lemari pakaian jati 2 buah, Meja makan jati 1 buah, Kursi makan jati 4 buah Meja /kursi tamu/jati (sofa) 1 Set.

Mebeluer Ruang Tata Usaha :

SMP Negeri 2 Raijua : Lemari arsip 4 buah, Meja Guru 3 buah, Kursi petugas 3 buah, Tempat sampah plastik 1 buah.

- 9) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Alokasi Anggaran : Rp. 30.900.000,-

Realisasi : Rp. 28.740.000,- (93%)

Keluaran :

Terlaksananya monitoring pelaksanaan ANBK SMP daratan Sabu dan Raijua dan verifikasi aset BOS pada 24 Sekolah Menengah Pertama.

- 10) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Alokasi Anggaran : Rp. 2.173.138.200,-

Realisasi : Rp. 1.957.842.750,- (90,09%)

Keluaran :

Tersedianya honor guru kontrak MIPA sebanyak 17 orang selama 12 bulan, 6 orang untuk 6 bulan dan honor Guru umum sebanyak 96 orang untuk 1 tahun.

- 11) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Alokasi Anggaran : Rp. 80.809.500,-

Realisasi : Rp. 57.748.500,- (71,46%)

Keluaran :

Tersedianya ATK kegiatan sosialisasi kurikulum merdeka dan bimtek penulisan best praktik sebanyak 3 jenis, makan dan minum peserta kegiatan sosialisasi kurikulum merdeka dan bimtek penulisan best practice sebanyak 24 orang, transpor peserta kegiatan dan terbayarkan perjalanan dinas para pengawas sekolah.

- 12) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Alokasi Anggaran : Rp. 8.092.621.138,-

Realisasi : Rp. 8.089.652.280,- (99,96%)



Keluaran :

Tersedianya honor guru dan tenaga kependidikan (tata usaha, tenaga kebersihan dan penjaga sekolah) untuk 24 sekolah, alat tulis kantor untuk kegiatan penata usahaan di sekolah sebanyak 7 jenis, atk keg pembelajaran dan ujian sekolah serta anbk sebanyak 7 jenis, honor panitia PPBD/MPLS, honor panitia literasi, honor kegiatan ekstra kulikuler sebanyak 4 jenis, pengembangan sumberdaya pendidik melalui wadah musyawarah guru mata pelajaran dan komunitas belajar sebanyak 2 Jenis, Jasa pemeliharaan sarana prasara 5 jenis, Jasa pembiayaan air listrik internet sebanyak 3 jenis dan keg ekstrakurikuler Pramuka, olahraga preatasi dan HUT RI dan Hut Sarai, transportasi guru pendamping 4 jenis serta tranprotasi perjalanan guru/kepala sekolah untuk 9 kegiatan, Pembelanjaran untuk item kegiatan diatas 24 sekolah dasar, buku kurikulum Merdeka kelas kelas 7 untuk 24 sekolah baik buku siswa dan buku pegangan guru serta buku referensi siswa dan guru sebanyak 7.710 eksemplas, laptop untuk 12 buah untuk 24 sekolah baik menunjang proses pembelajaran maupun mendukung kegaitan ANBK. Tersedinya krusi guru dan kursi kantor untuk 7 sekolah, kipas angin 12 buah, AC sebanyak 5 buah, mike wireless u 7 sekolah, rak buku sebanyak 4 buah .

7. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1) Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD

Alokasi Anggaran : Rp. 156.374.748
Realisasi : Rp. 156.374.748 (100%)
Keluaran : -

Tersedianya 1 ruang Guru pada TK Dharma Wanita Seba (DAK 2023), 1 paket Jasa Konsultasi perencanaan pembangunan Ruang Guru pada TK Dharma Wanita Seba (DAK 2023), 1 paket Jasa Konsultasi pengawasan pembangunan Ruang Guru pada TK Dharma Wanita Seba (DAK 2023)

2) Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD

Alokasi Anggaran : Rp. 287.239.163,-
Realisasi : Rp. 284.869.163,- (99,17%)
Keluaran :

Tersedianya 1 Ruang Unit Kesehatan Sekolah/UKS pada TK Dharma Wanita Seba (DAK 2023), 1 Area Bermain beserta APE Luar pada TK Dharma Wanita Seba (DAK 2023), 1 paket Jasa Konsultansi Perencanaan pembangunan 1 ruang Unit Kesehatan Sekolah/UKS pada TK Dharma Wanita Seba (DAK 2023), 1 paket Jasa Konsultansi Pengawasan pembangunan 1 ruang Unit Kesehatan Sekolah/UKS pada TK Dharma Wanita Seba (DAK 2023), 1 paket Jasa Konsultansi Perencanaan pembangunan 1 Area Bermain beserta APE Luar pada TK Dharma Wanita Seba (DAK 2023), 1 paket Jasa Konsultansi Pengawasan pembangunan 1 Area Bermain beserta APE Luar pada TK Dharma Wanita Seba (DAK 2023)

3) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD

Alokasi Anggaran : Rp. 184.684.600,-
Realisasi : Rp. 184.188.469,- (99,73%)



- Keluaran :
- Tersedianya Jasa Rehabilitasi Sedang 1 unit Bangunan Sekolah TK Negeri Pembina Sabu Tengah (DID 2023), 1 paket Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Sedang 1 unit Bangunan Sekolah TK Negeri Pembina Sabu Tengah (DID 2023), 1 paket Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Sedang 1 unit Bangunan Sekolah TK Negeri Pembina Sabu Tengah (DID 2023)
- 4) Pengadaan Perlengkapan PAUD
- Alokasi Anggaran : Rp. 110.630.000,-
- Realisasi : Rp. 110.500.000,- (99,88%)
- Keluaran :
- Tersedianya 13 paket APE Luar dimana masing-masing paket terdiri atas 1 buah Ayunan Ganda Bulat dan 1 Buah Perosotan yang dibagikan ke 13 lembaga penerima (DAU 2023)
- 5) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan PAUD
- Alokasi Anggaran : Rp. 8.009.925.000,-
- Realisasi : Rp. 7.733.006.250,- (96,54%)
- Keluaran :
- Tersedianya Honor Pendidik TK 34 orang selama 6 bulan, 33 orang selama 1 bulan, 32 orang selama 3 bulan dan 31 orang selama 2 bulan, Honor Pendidik PAUD 322 orang selama 6 bulan, 318 orang selama 3 bulan, 323 orang selama 2 bulan dan 319 orang selama 1 bulan, Honor Pengelola PAUD 149 orang selama 6 bulan, 148 orang selama 5 bulan dan 147 orang selama 1 bulan, Honor Pendidik PAUD SPNF-SKB 5 orang selama 12 bulan, Transportasi Kader Posyandu SKB 5 orang dan Petugas Kesehatan 2 orang selama 12 bulan, Transport Operator Dapodik dan Dikmas 17 orang selama 12 bulan, Iuran JKK dan JKM bagi Pendidik TK, Pendidik PAUD, Pendidik PAUD SPNF-SKB dan Pengelola PAUD selama 1 tahun
- 6) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
- Alokasi Anggaran : Rp. 29.995.250,-
- Realisasi : Rp. 29.995.250,- (100%)
- Keluaran :
- ❖ Tersedianya Alat Tulis Kantor bagi Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD dan Kesetaraan sebanyak 5 jenis, Makan dan Minum Rapat bagi 9 orang sebanyak 2 kali, Snack kegiatan sosialisasi bagi 180 orang
 - ❖ Terlaksananya kegiatan Verifikasi Dokumen RKAS BOP PAUD dan Kesetaraan Tahun 2023 bagi 171 lembaga, Kegiatan Pendampingan Persiapan Akreditasi bagi 50 lembaga, Kegiatan Monev PAUD & PNF di 6 Kecamatan
- 7) Pengelolaan Dana BOP PAUD
- Alokasi Anggaran : Rp. 2.982.300.000,-
- Realisasi : Rp. 2.960.067.000,- (99,25%)
- Keluaran :
- ❖ Terlaksananya penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan dan layanan pojok baca, kegiatan pembelajaran dan bermain, kegiatan evaluasi/asesmen pembelajaran, pengembangan



profesi pendidik dan tenaga kependidikan, penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi dan kebersihan

- ❖ Tersedianya Jasa Penerangan Kantor, Jasa pemeliharaan sarana dan prasarana, Jasa administrasi kegiatan satuan pendidikan, pembayaran honor.

8. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

- 1) Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Alokasi Anggaran : Rp. 52.467.000,-

Realisasi : Rp. 51.626.000,- (98,39%)

Keluaran :

Tersedianya ATK US Paket A,B dan C sebanyak 33 jenis, biaya Fotocopy naskah US Paket A,B dan C sebanyak 7.090 lembar, makan minum rapat persiapan dan evaluasi Ujian paket A,B, dan C, makan minum panitia dan pengawas US paket A,B dan C, makan minum Tim pemeriksa ujian Paket A,B dan C sebanyak 67 orang pada SPNF SKB, honor tim pelaksana panitia penyelenggara ujian sekolah pendidikan kesetaraan Paket A,B dan C sebanyak 50 orang, biaya transport untuk tim proctor, teknisi dan pengawas assesmen nasional berbasis komputer (ANBK) pendidikan kesetaraan sebanyak 19 orang, biaya transport untuk penanggung jawab, proktor, teknisis dan pengawas ruang Uji Kesetaraan (UK) pendidikan kesetaraan paket A,B dan C sebanyak 11 orang.

- 2) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Alokasi Anggaran : Rp. 549.112.800,-

Realisasi : Rp. 473.055.250,- (86,14%)

Keluaran :

❖ Tersedianya honor tenaga teknis pada Satuan Pendidikan Non Formal sebanyak 3 orang selama 12 bulan beserta luran JKK dan JKM, honor TLD/FDI sebanyak 11 orang selama 5 bulan, 10 orang selama 5 bulan, 9 orang selama 1 bulan dan 8 orang selama 1 bulan beserta luran JKK dan JKM, Transport Tutor Kesetaraan Paket A sebanyak 4 orang, Tutor Kesetaraan Paket B sebanyak 8 orang, dan Tutor Kursus Bahasa Inggris sebanyak 12 orang selama 12 bulan Honor Tutor Kesetaraan Paket C sebanyak 9 orang selama 12 bulan dan 1 orang selama 11 bulan .

❖ Terlaksananya Pemuktahiran Data dan Identifikasi Warga Belajar Kesetaraan.

9. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

- 1) Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Alokasi Anggaran : Rp. 48.612.500

Realisasi : Rp. 46.905.500,- (96,48%)

Keluaran :

Tersedianya ATK pelatihan pengelola PAUD sebanyak 6 jenis; Sertifikat pelatihan pengelola PAUD sebanyak 25 lembar; Spanduk sebanyak 1 Lembar; makan rapat panitia persiapan kegiatan pelatihan



pengelola PAUD sebanyak 9 dos; makan minum panitia, narasumber dan peserta kegiatan pelatihan pengelola PAUD selama 3 hari sebanyak 102 dos nasi dan 204 dos snack, biaya Akomodasi dan Transport narasumber BPMP Provinsi NTT sebanyak 1 orang dan peserta 25 orang, honor panitia pelaksana kegiatan pengelola PAUD sebanyak 4 orang, honor Narasumber kegiatan pengelola PAUD sebanyak 5 orang.

2) Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Alokasi Anggaran : Rp. 77.856.500,-

Realisasi : Rp. 76.206.500,- (97,88)

Keluaran :

Tersedianya ATK pelatihan pendidik PAUD sebanyak 11 jenis; Fotocopy dokumen sebanyak 100 lembar, Sertifikat pelatihan pendidik PAUD sebanyak 60 lembar; cetak foto dan Spanduk sebanyak 1 Lembar; makan rapat panitia persiapan kegiatan pelatihan pendidik PAUD sebanyak 6 dos; makan minum panitia, narasumber dan peserta kegiatan pelatihan pendidik PAUD selama 3 hari sebanyak 213 dos nasi dan 426 dos snack, biaya Akomodasi dan Transport narasumber BPMP Provinsi NTT sebanyak 1 orang dan peserta 60 orang, honor panitia pelaksana kegiatan pendidik PAUD sebanyak 6 orang, honor Narasumber kegiatan pendidik PAUD sebanyak 5 orang.

10. Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

1) Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Alokasi Anggaran : Rp. 12.134.750,-

Realisasi : Rp. 12.134.750,- (100%)

Keluaran :

- ❖ Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk kegiatan Monev BOP PAUD sebanyak 3 jenis dan untuk kegiatan Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan PNF sebanyak 5 jenis.
- ❖ Terlaksananya Kegiatan Monev Penggunaan BOP PAUD kepada 19 lembaga, Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan PNF sebanyak 5 lembaga

3.4 Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN (YA/TIDAK)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
1	Meningkatnya layanan pendidikan menuju SARAI PINTAR	Sekolah Dasar (SD)	Tenaga pendidik dan siswa	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB)	SD	Terbangunan Ruang Kelas Baru SD	YA
					Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	SD	Terbangunnya Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	YA
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	SD	Terbangunan UKS SD	YA
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SD	Terbangunnya MCK/Toilet baru SD	YA
					Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah	SD	Terbangunan Rumah Dinas Guru/Kepala Sekolah	YA
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	SD	Terlaksananya rehabilitasi Ruang Kelas SD	YA
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	SD	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	YA



NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN (YA/TIDAK)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	SD	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	YA
					Pengadaan Mebel Sekolah	SD	Tersedianya mebeleur bagi siswa SD	YA
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kepala sekolah dan Bendahara SD	Terlaksananya sosialisasi dan monitoring BOS SD	YA
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Siswa SD	Terlaksananya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	YA
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Guru Kontrak	Terbayarnya honor guru kontrak	YA
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Guru SD	Terlaksananya Sosialisai Kurikulum Merdeka dan Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi bagi Guru dan Kepala Sekolah SD.	YA



NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN (YA/TIDAK)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	
					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Siswa SD	Tersedianya dana BOS bagi siswa SD	YA
					Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Siswa SD	Terbangunnya Laboratorium Sekolah Dasar	YA
		SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)			Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB)	SMP	Terbangunan Ruang Kelas Baru SMP	YA
					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	SMP	Terbangunnya Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	YA
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	SMP	Terbangunnya Ruang Unit Kesehatan Sekolah	YA
					Pembangunan Laboratorium	SMP	Terbangunnya Laboratorium	YA
					Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	SMP	Terbangunnya Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah SMP	YA
					Pembangunan Sarana Prasarana Utilitas Sekolah	SMP	Terbangunnya Sarana Prasarana Utilitas Sekolah SMP	YA
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	SMP	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP	YA



NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN (YA/TIDAK)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	
					Pengadaan Mebel Sekolah	SMP	Terbangunan Rumah Dinas Guru/Kepala Sekolah	YA
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Pertama	Kepala sekolah dan Bendahara SMP	Terlaksananya sosialisasi dan monitoring BOS SMP	YA
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Guru Kontrak	Terbayarnya honor guru kontrak MIPA	YA
					Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Guru SD	Terlaksananya Sosialisai Kurikulum Meredeka dan Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi bagi Guru dan Kepala Sekolah SMP.	YA
					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Siswa SMP	Tersedianya dana BOS bagi siswa SMP	YA
		Pendidikan Anak Usia Dini			Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Peserta Didik Paud/TK dan Pendidik PAUD/TK	Tersedianya honor pendidik, transport pengelola/posyandu untuk PAUD	YA



NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN (YA/TIDAK)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	
					Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	Peserta Didik Paud/TK dan Pendidik PAUD/TK	Terbangunnya Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	YA
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Peserta Didik Paud/TK dan Pendidik PAUD/TK	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	YA
					Pengadaan Perlengkapan PAUD	Peserta Didik PAUD/TK	Tersedianya Perlengkapan PAUD	YA
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Pengelola dan Pendidik Paud/TK	Tersedianya honor pendidik, transport pengelola/posyandu untuk PAUD	YA
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Pengelola dan Pendidik Paud/TK	Terlaksananya monitoring pembinaan PAUD di 6 Kecamatan	YA
					Pengelolaan Dana BOP PAUD	Siswa PAUD	Tersedianya Dana BOP PAUD bagi Siswa PAUD	YA
		Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Paket A,B dan C	Terselenggaranya ujian Paket A,B dan C	YA



NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN (YA/TIDAK)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	
					Penyiapan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tenaga Lapangan Dikmas/TL D	Tersedianya honor TLD	YA
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Pengelola dan Pendidik Paud/TK	Tersedianya data dan identifikasiwarga belajar	YA
	Meningkatnya layanan pendidikan menuju SARAI PINTAR	PROGRAM PENGEMBAN GAN KURIKULUM	Pengelola dan Pendidik PAUD	Persentase Satuan Pendidikan yang telah menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Pengelola dan Pendidik Paud/TK	Terselenggaranya bimtek pengelola dan pendidik paud	YA
					Penyusunan Silabus Muatan Lokal	Pengelola dan Pendidik Paud/TK		YA
	Meningkatnya layanan pendidikan menuju SARAI PINTAR	PROGRAM PENGENDALI AN DAN PERIZINAN PAUD	Lembaga PAUD/TK	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonfromal Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	Pengelola dan Pendidik Paud/TK	Terlaksananya monitoring ijin kelayakan perijinan PAUD	YA



3.5 Permasalahan dan Solusi

➤ Permasalahan

1. Belum terpenuhinya rasio jumlah satuan pendidikan dengan jumlah pengawas sekolah.
2. Belum terpenuhinya kebutuhan/kekurangan sarana dan prasarana pendidikan, dalam rangka mengatasi daya tampung peserta didik dan peningkatan mutu proses pembelajaran di sekolah.
3. Berdasarkan Standar Kualifikasi tenaga pendidik secara formal di SD dan SMP masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S-1 dan belum bersertifikat (sertifikasi pendidik).

➤ Solusi

1. Pemenuhan tenaga kependidikan di jenjang SD dan SMP termasuk rasio pengawas.
2. Perbaikan data sarana prasarana pada Dapodik
3. Dihimbau untuk menyelesaikan pendidikan S1 sehingga dapat mengikuti seleksi PPG agar dapat memiliki Sertifikat Pendidik .

3.6 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Tidak Ada



3.7 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1(2022)	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Terhadap kinerja daya serap anggaran secara umum dinilai Cukup Baik . Ke depan agar kualitas perencanaan lebih ditingkatkan lagi.	Pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga menindaklanjuti rekomendasi ini dengan terus meningkatkan daya serap anggaran.	Melakukan perencanaan yang baik agar penyerapan anggaran mengalami peningkatan setiap tahun.
2	DPRD memberikan Catatan bahwa masih terjadi kesenjangan antar sekolah, di mana banyak guru menumpuk di beberapa sekolah sementara di sekolah lain masih terjadi kekurangan guru. Demikian juga kebijakan mutasi guru yang masih saja sering menimbulkan persoalan kesenjangan, ditambah lagi dengan status guru-guru kontrak daerah dan honorer yang kerap terabaikan kesejahteraannya, untuk itu Pansus memberi Rekomendasi agar Bupati Sabu Raijua segera menata ulang kebijakan terkait persoalan-persoalan tersebut demi terselenggaranya Urusan Pendidikan yang lebih baik di masa-masa mendatang	Pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga menindaklanjuti rekomendasi tentang penumpukan guru di sekolah tertentu dan kekurangan guru disekolah lain dengan melakukan pemetaan dan pemerataan guru. Terhadap kesejahteraan guru honorer akan dilakukan pembenahan.	Melakukan pemerataan tenaga guru di sekolah yang mengalami kekurangan tenaga guru dan bagi tenaga honorer di lakukan pembenahan-pembenahan layanan.
3	Pansus juga memberi Rekomendasi agar Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua terus menjamin alokasi anggaran untuk peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) guru dan murid, demikian pula dengan kebijakan yang menjamin kesejahteraan guru, baik yang PNS maupun guru kontrak daerah dan guru honorer	Pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga menindaklanjuti rekomendasi ini dengan terus menjamin alokasi anggaran untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) guru dan murid dan juga kebijakan yang menjamin kesejahteraan guru baik PNS maupun guru kontrak daerah dan guru honorer.	Mengalokasikan anggaran untuk peningkatan mutu SDM guru.
4	Pansus memberi Rekomendasi agar Bupati Sabu Raijua memperhatikan dengan sungguh- sungguh pemerataan guru dan tenaga pendidik baik secara kuantitatif maupun kualitatif pada semua jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten	Pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga menindaklanjuti rekomendasi ini dengan memperhatikan dengan sungguh-sungguh pemerataan guru.	Melakukan identifikasi ketersediaan tenaga guru disekolah.

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1(2022)	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
5	Pansus juga memberi Catatan bahwa pembinaan mental dan penegakan disiplin tenaga pendidik juga masih belum optimal dan masih terkesan tebang pilih dan melukai rasa keadilan. Ini terbukti dengan banyaknya keluhan serta pengaduan yang masuk ke DPRD. Untuk itu, Pansus memberi Rekomendasi agar Pembinaan Mental dan Penegakkan Disiplin benar-benar dilakukan dengan objektif, berkeadilan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga menindaklanjuti rekomendasi ini dengan memperhatikan pembinaan mental dan penegakan disiplin dilakukan dengan objektif, berkeadilan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Pemerintah Daerah Melakukan pembinaan mental dan penegakan disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	Pansus memberikan Catatan bahwa masih saja terjadi alih fungsi tenaga pendidik ke dalam jabatan-jabatan struktural. Sehubungan hal tersebut, Pansus telah melakukan konsultasi kepada Kemenpan-RB dan BKN. Hasil dari konsultasi tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh Kemenpan-RB maupun BKN, apa yang dilakukan oleh Bupati Sabu Raijua tersebut menyalahi aturan. Untuk itu, Pansus memberikan Rekomendasi agar Bupati Sabu Raijua mengevaluasi dan meninjau kembali keputusan tersebut.	Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga menindaklanjuti rekomendasi ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan merujuk kepada Peraturan MenpanRB Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional Pasal 41 ayat 1 huruf e : “ Pejabat Fungsional diberhentikan dari jabatannya apabila :ditugaskan secara penuh pada JPT,jabatan administrator,jabatan pengawas,dan jabatan pelaksana “	Pemerintah Daerah menindaklanjuti rekomendasi ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7	Terkait keluhan dan pengaduan PGRI Sabu Raijua tentang belum terbayarkannya Dana Tunjangan Non Sertifikasi Guru Tahun Anggaran 2022 terhadap 531 orang guru di Kabupaten Sabu Raijua, maka sebagaimana klarifikasi yang disampaikan kepada Pansus oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sabu Raijua dan juga jawaban yang disampaikan Kementerian Pendidikan Nasional dalam kesempatan dialog saat konsultasi DPRD Kabupaten Sabu Raijua ke Kementerian Pendidikan Nasional, bahwa Tunjangan Non Sertifikasi Guru tersebut terlambat dikirim ke rekening Pemerintah Sabu Raijua akibat adanya keterlambatan koordinasi dan konsultasi penginputan administrasi dan dokumen pendukung kepada pihak Kementerian, sehingga setelah seluruh persyaratan dipenuhi ke Kementerian barulah anggaran tersebut ditransfer ke rekening Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga menindaklanjuti rekomendasi ini dengan merujuk kepada Permendikbudristek nomor 4 Tahun 2022 dan Permendikbudristek nomor 45 Tahun 2023 tentang Juknis Pemberian Tunjangan guru ASN Daerah dimana kondisi Carry Over ini sudah diatur di dalam Salinan Lampiran Permendikbud ini, terkait Tahapan Penyaluran, Bagian A Item 3 e menyatakan bahwa : “ dalam hal 	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1(2022)	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	<p>8 Desember 2022. Namun dinas beralasan tidak cukup waktu lagi untuk melakukan pembayaran karena tahun anggaran segera berakhir. Anggaran tersebut kemudian baru bisa dibayarkan setelah masuk pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023. Sementara untuk Dana Tunjangan Profesi Guru (carry over) triwulan 4 selama 2 bulan bagi 278 orang guru, belum ditransfer oleh Kementerian karena masih ada persoalan teknis dan administratif yang belum dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sabu Raijua. Karena itu DPRD memberi Rekomendasi agar Bupati Sabu Raijua segera mengevaluasi kinerja dan Jabatan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sabu Raijua dan sudah terbukti lalai. maka DPRD meminta Bupati Sabu Raijua mencopot sementara jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga dan menugaskan Irda melakukan Audit pada dinas tersebut, karena apa yang terjadi sebagaimana disebutkan bukan satu-satunya persoalan. Masih terdapat begitu banyak persoalan yang terjadi dalam urusan Pendidikan di Kabupaten Sabu Raijua ini yang butuh penanganan segera jika kita benar-benar ingin menampilkan wajah dunia Pendidikan yang maju dan bermartabat di Kabupaten Sabu Raijua. Persoalan-persoalan menyangkut keterlambatan pengurusan anggaran pada penyelenggaraan urusan Pendidikan di Sabu Raijua ini bukan kali ini saja. Kejadian hangusnya Anggaran yang merugikan yang menyebabkan hilangnya peluang kita mengejar ketertinggalan urusan Pendidikan akibat kesalahan input data juga pernah terjadi. Karena itu DPRD berpendapat bahwa menempatkan Sumber Daya Manusia yang handal dan memahami betul tupoksi urusan Pendidikan adalah jalan keluar terbaik yang harus segera diambil oleh Bupati Sabu Raijua sehingga kita tidak terus berputar menghabiskan terlalu banyak energi hanya untuk mengurus begitu banyak persoalan yang muncul yang sebenarnya tidak perlu ada jika saja urusan Pendidikan ini ditangani secara baik.</p>	<p>terdapat kekurangan pembayaran Tunjangan Profesi pada tahun sebelumnya, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan pembayaran setelah mengusulkan kurang bayar melalui Sistem Informasi Manajemen Pembayaran dan mendapat Persetujuan dari Puslapdik dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kurang Bayar (Carry Over) .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Daerah melalui dinas PKKO telah membayar dana non sertifikasi guru tahun 2022 dan dana tunjangan profesi guru (carry over) tahun 2022 di tahun anggaran 2023 ini. 	



2. Urusan Kesehatan

Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan wajib pelayanan dasar **Kesehatan** di Kabupaten Sabu Raijua dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sabu Raijua dengan alokasi anggaran **Rp.60.829.043.296** dan realisasi sebesar **Rp. 49.531.792.094 (81,43%)**. Adapun rincian anggaran dan realisasi program/kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	Uraian Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.987.890.760	23.694.750.542	74,1
A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.903.201.940	22.711.587.294	73,49
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30.485.265.940	22.297.629.294	73,14
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	417.936.000	413.958.000	99,05
B	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	84.102.000	82.700.000	98,33
01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	84.102.000	82.700.000	98,33
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	59.535.000	58.960.000	99,03
01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	42.350.000	42.350.000	100
02	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17.185.000	16.610.000	96,65
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	433.269.570	413.868.578	95,52
01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	123.942.270	121.190.000	97,78
02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.800.000	10.800.000	100
03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.520.000	42.469.600	99,88
04	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	233.713.000	220.323.978	94,27
05	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	22.294.300	19.085.000	85,60
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.400.000	6.380.000	99,69
01	Pengadaan Mebel	6.400.000	6.380.000	99,69
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	343.762.250	263.754.000	76,73
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.890.000	6.890.000	100
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300.720.000	220.960.000	73,48



NO	Uraian Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.660.000	3.440.000	93,99
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.492.250	32.464.000	99,91
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.620.000	157.500.670	99,92
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	157.620.000	157.500.670	99,92
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	20.887.767.666	18.880.047.433	90,39
A	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	11.746.779.301	10.458.445.215	89,03
01	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	184.781.500	156.643.500	84,77
02	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	7.819.286.328	6.716.788.161	85,90
03	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.673.606.203	2.566.125.889	95,98
04	Pengadaan Obat, Vaksin	523.919.000	509.019.072	97,16
05	Pengadaan Bahan Habis Pakai	421.525.770	387.195.065	91,86
06	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	61.130.000	60.890.000	99,61
07	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	62.530.500	61.783.528	98,81
B	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.086.248.365	8.369.817.218	92,12
01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	169.130.500	71.808.000	42,46
02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	98.430.000	98.390.000	99,96
03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	14.206.000	13.255.000	93,31
04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	10.830.000	9.630.000	88,92
05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	18.060.000	18.060.000	100
06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	22.780.000	21.740.000	95,43



NO	Uraian Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3.400.000	2.720.000	80
08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	7.347.900	7.122.600	96,93
09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	75.844.684	75.619.384	99,70
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.028.000	2.755.000	90,98
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	79.308.600	67.059.600	84,56
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	252.225.000	252.074.360	99,94
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	92.260.000	83.890.000	90,93
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.872.100.200	1.820.112.648	97,22
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	51.700.000	48.880.000	94,55
16	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.086.247.000	986.541.414	90,82
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	25.255.000	22.917.000	90,74
18	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14.280.000	14.280.000	100
19	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	298.805.500	225.527.200	75,48
20	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4.251.567.001	4.023.515.900	94,64
21	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	3.028.000	2.875.000	94,95
22	Operasional Pelayanan Puskesmas	52.500.000	27.665.000	52,70
23	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	339.412.000	229.182.132	67,52
24	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	106.644.000	106.625.000	99,98
25	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	137.858.980	137.571.980	99,79
C	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	54.740.000	51.785.000	94,60
01	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	54.740.000	51.785.000	94,60



NO	Uraian Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	7.495.825.320	6.572.551.519	87,68
A	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	6.451.982.320	6.134.470.619	95,08
01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	6.421.882.320	6.115.340.619	95,23
02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	30.100.000	19.130.000	63,55
B	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.043.843.000	438.080.900	41,97
01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.043.843.000	438.080.900	41,97
IV	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	254.833.850	198.223.000	77,79
A	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	8.120.000	7.920.000	97,54
01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	8.120.000	7.920.000	97,54
B	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	75.000.000	63.805.000	85,07
01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	75.000.000	63.805.000	85,07



NO	Uraian Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
C	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	171.713.850	126.498.000	73,67
01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	171.713.850	126.498.000	73,67
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	202.725.700	186.219.600	91,86
A	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	168.855.900	158.963.600	94,14
01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	168.855.900	158.963.600	94,14
B	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33.869.800	27.256.000	80,47
01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	33.869.800	27.256.000	80,47
Jumlah		60.829.043.296	49.531.792.094	81,43



3.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUSAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting;	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Layanan UKP dan UKM	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat Kabupaten/kota	Jumlah penduduk yang memanfaatkan layanan UKM Tk. Kab. dibagi jumlah seluruh penduduk Tk. Kab. X 100%	100	82,21	82,21
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Cakupan Rumah Sakit dan Puskesmas Milik Pemerintah yang memiliki Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar dibagi jumlah seluruh rumah sakit dan puskesmas di kabupaten x 100%	100	14,29	14,29
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnya Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	Presentase Sarana Farmasi yang memenuhi standar	Jumlah Sarana Farmasi yang memenuhi standar dibagi Jumlah seluruh Sarana Farmasi di Kabupaten x 100%	100	100	100
			Presentase Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang Bebas Dari Cemaran	Jumlah Industri Rumah Tangga yang sudah mendapatkan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dibagi Jumlah seluruh Industri Rumah Tangga di Kabupaten	100	36,66	36,66



ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUSAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam berperilaku hidup sehat	Presentase Rumah Tangga Sehat	Jumlah Rumah Tangga Sehat dibagi Jumlah Rumah Tangga di kabupaten yang dipantau x 100%	100	87,44	87,44



3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Alokasi Anggaran : Rp. 30.485.265.940
Realisasi : Rp. 22.297.629.294 (73,14%)
Keluaran :

Tersedianya gaji dan tunjangan bagi ASN selama 12 bulan, Gaji Ketiga Belas dan THR, iuran jaminan kesehatan, JKK, dan JKM bagi ASN selama 12 bulan, tambahan penghasilan bagi ASN selama 12 bulan, TPP Ketiga Belas dan TPP, THR

- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Alokasi Anggaran : Rp. 417.936.000
Realisasi : Rp. 413.958.000 (99,05%)
Keluaran :

Tersedianya honorarium pengguna anggaran selama 12 bulan, honorarium kuasa pengguna anggaran Puskesmas selama 12 bulan, honorarium bendahara pengeluaran selama 12 bulan, honorarium bendahara pengeluaran pembantu selama 12 bulan, honorarium bendahara pengeluaran pembantu puskesmas selama 12 bulan, honorarium PPKEU selama 12 bulan, honorarium PPTK selama 12 bulan, honorarium Pejabat Pembuat komitmen selama 12 bulan, honorarium Pejabat Pengadaan selama 12 bulan, honorarium Pengurus Barang selama 12 bulan, honorarium admin RUP selama 12 bulan

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

- 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Alokasi Anggaran : Rp. 84.102.000
Realisasi : Rp. 82.700.000 (98,33%)
Keluaran :

Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 2 kegiatan selama 1 tahun.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Alokasi Anggaran : Rp. 42.350.000
Realisasi : Rp. 42.350.000 (100%)
Keluaran :

Tersedianya pakaian PDH untuk ASN sebanyak 32 selama 12 bulan

- 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Alokasi Anggaran : Rp. 17.185.000
Realisasi : Rp. 16.610.000 (96,65%)
Keluaran :

Terlaksananya kegiatan Pendataan monitoring dan evaluasi system administrasi kepegawaian di Tk. Puskesmas



4. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 123.942.270

Realisasi : Rp. 121.190.000 (97,78%)

Keluaran :

Tersedianya Atk sebanyak 18 jenis selama 12 bulan, peralatan gedung kantor sebanyak 3 jenis selama 1 tahun yang terdiri dari Papan Pengumuman 1 Unit, Laptop 1 Unit, Printer 3 Unit

2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 10.800.000

Realisasi : Rp. 10.800.000 (100%)

Keluaran :

Tersedianya makan minum rapat sebanyak 5 kali selama 12 bulan

3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Alokasi Anggaran : Rp. 42.520.000

Realisasi : Rp. 42.469.000 (99,88%)

Keluaran :

Tersedianya bahan cetak lainnya sebanyak 152 buku, dan dokumen kantor sebanyak 124.000 lembar

4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Alokasi Anggaran : Rp. 233.713.000

Realisasi : Rp. 220.323.978 (94,27%)

Keluaran :

Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 3 kegiatan di 6 kecamatan, kegiatan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 2 kegiatan di Jakarta dan Kupang

5) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Alokasi Anggaran : Rp. 22.294.300

Realisasi : Rp. 19.085.000 (85,60%)

Keluaran :

Tersedianya ATK sebanyak 3 Jenis selama 12 bulan, perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 1 kegiatan di 6 kecamatan

5. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1) Pengadaan Mebel

Alokasi Anggaran : Rp. 6.400.000

Realisasi : Rp. 6.380.000 (99,69%)

Keluaran :

Tersedianya Kursi tunggu 1 unit

6. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Alokasi Anggaran : Rp. 6.890.000

Realisasi : Rp. 6.890.000 (100%)

Keluaran :

Tersedianya materai 10.000 sebanyak 689 Lembar



- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Alokasi Anggaran : Rp. 300.720.000
 Realisasi : Rp. 220.960.000 (73,48%)
 Keluaran :
 Tersedianya air bersih 5.120.000 liter (1.024 tengki), Tagihan Listrik Gedung Kantor selama 12 Bulan
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Alokasi Anggaran : Rp. 3.660.000
 Realisasi : Rp. 3.440.000 (93,99%)
 Keluaran :
 Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor (AC 6 Unit)
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 Alokasi Anggaran : Rp. 32.492.250
 Realisasi : Rp. 32.464.000 (99,91%)
 Keluaran :
 Tersedianya Atk sebanyak 10 jenis selama 12 bulan
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 Alokasi Anggaran : Rp. 157.620.000
 Realisasi : Rp. 157.500.670 (99,92%)
 Keluaran :
 Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 dan Roda 4 Selama 12 bulan
- 8. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**
- 1) Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 Alokasi Anggaran : Rp. 184.781.500
 Realisasi : Rp. 156.643.500 (84,77%)
 Keluaran :
 - Tersedianya Meteran Listrik pada RS Pratama Raijua
 - Terlaksananya kegiatan Tim TPCB, Rujukan Pasien dari Puskesmas Ledebu ke RSUD Seba, Konsultasi Akreditasi Puskesmas, Survey Akreditasi, Pembinaan dan Pengawasan Mutu Pelayanan Kesehatan di Tingkat Puskesmas dan Tingkat Pustu
- 2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
 Alokasi Anggaran : Rp. 7.819.286.328
 Realisasi : Rp. 6.716.788.161 (85,90%)
 Keluaran :
 Terlaksananya pekerjaan rehab Puskesmas Bolou, Rehab Rumah Dinas Puskesmas Bolou, rehab puskesmas Bolou dan Rumah Dinas Puskesmas Bolou
- 3) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 Alokasi Anggaran : Rp. 2.673.606.203
 Realisasi : Rp. 2.566.125.889 (95,98%)



- Keluaran :
- Tersedianya BMHP sebanyak 15 Jenis, Alat Kesehatan Umum sebanyak 3 paket, Alat Kesehatan Kebidanan dan penyakit kandungan sebanyak 3 paket, Alat Kesehatan Umum Lainnya sebanyak 9 jenis barang
- 4) Pengadaan Obat, Vaksin
- Alokasi Anggaran : Rp. 523.919.000
- Realisasi : Rp. 509.019.072 (97,16%)
- Keluaran :
- Tersedianya obat pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
- 5) Pengadaan Bahan Habis Pakai
- Alokasi Anggaran : Rp. 421.525.770
- Realisasi : Rp. 387.195.065 (91,86%)
- Keluaran :
- Tersedianya obat pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas, Bahan Habis Pakai sebanyak 20 Jenis, BMHP Gula Darah, Catrige TCM 10 Paket, BMHP Pemeriksaan Darah Lengkap 1 Paket, RDT Malaria 1 Paket, RDT DBD, stik pemeriksaan gula darah
- 6) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Alokasi Anggaran : Rp. 61.130.000
- Realisasi : Rp. 60.890.000 (99,61%)
- Keluaran :
- Terlaksananya Monitoring Aset dan Pertemuan Pemutahiran Data Aspak sebanyak 2 kali, Monitoring dan Prasarana Kesehatan Tk. Puskesmas
 - Tersedianya obat pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Meteran Listrik pada Puskesmas Pembantu sebanyak 5 Unit, Tabung Oksigen Bagi Puskesmas 1 Unit
- 7) Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
- Alokasi Anggaran : Rp. 62.530.500
- Realisasi : Rp. 61.783.528 (98,81%)
- Keluaran :
- Terlaksananya Kegiatan Distribusi Obat dan BMHP ke Puskesmas, Kegiatan Pemusnahan Obat dan BMHP

9. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- Alokasi Anggaran : Rp. 169.130.500
- Realisasi : Rp. 71.808.000 (42,46%)
- Keluaran :
- Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Kegiatan Gerakan Temukan Ibu Hamil (GTIB), kegiatan rujukan ibu bersalin dari Puskesmas Ledeunu ke RSUD Sabu Raijua, Kegiatan Jejaring ANC, Pertemuan Bidan rutin, Kegiatan Pengkajian kasus kematian ibu dan anak, kegiatan pengambilan vaksin TT
 - Tersedianya ATK (Tinta Epson 4 botol dan Amplop Pustih Kecil 6 Pak), Rumah Tunggu Kelahiran Selama 1 Tahun



- 2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Alokasi Anggaran : Rp. 98.430.000
Realisasi : Rp. 98.390.000 (99,96%)
Keluaran :
Tersedianya kegiatan Penguatan APN bagi Bidan di Pustu, Paket Kasih bagi Ibu Hamil Kurang Mampu, sewa sarana mobilitas laut bagi ibu melahirkan rujukan dari puskesmas ledeunu ke RSUD Sabu Raijua
- 3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Alokasi Anggaran : Rp. 14.206.000
Realisasi : Rp. 13.255.000 (93,31%)
Keluaran :
Terlaksananya Sosialisasi Pojok Laktasi di Fasilitas Publik
- 4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Alokasi Anggaran : Rp. 10.830.000
Realisasi : Rp. 9.630.000 (88,92%)
Keluaran :
Terlaksananya pendampingan pelaksanaan program MTBS di Puskesmas
- 5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Alokasi Anggaran : Rp. 18.060.000
Realisasi : Rp. 18.060.000 (100%)
Keluaran :
Terlaksananya kegiatan penjangkaran kesehatan berkala di sekolah, supervisi kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas
- 6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Alokasi Anggaran : Rp. 22.780.000
Realisasi : Rp. 21.740.000 (95,43%)
Keluaran :
 - Terlaksananya Pertemuan Eradikasi Frambusia
 - Tersedianya obat pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Perjalanan Dinas Faktor Resiko PTM dan penyuluhan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan pada Remaja (Usia Produktif)
- 7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
Alokasi Anggaran : Rp. 3.400.000
Realisasi : Rp. 2.720.000 (80%)
Keluaran :
Tersedianya obat pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas, perjalanan Dinas Dalam rangka Deteksi Dini Faktor Resiko PTM Usia 60 Tahun Keatas
- 8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Alokasi Anggaran : Rp. 7.347.900
Realisasi : Rp. 7.122.600 (96,93%)
Keluaran :
Tersedianya obat pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi sebanyak 2 kali
- 9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Alokasi Anggaran : Rp. 75.844.684
Realisasi : Rp. 75.619.384 (99,70%)



- Keluaran :
- Tersedianya Blood Lancet, Stik Pemeriksaan Gula Darah dan Swab Alkohol
 - Terlaksananya Kegiatan Monitoring pelayanan kesehatan penderita Diabetes
- 10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
- Alokasi Anggaran : Rp. 3.028.000
- Realisasi : Rp. 2.755.000 (90,98%)
- Keluaran :
- Tersedianya obat pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas perjalanan dinas pengambilan obat program sebanyak 1 kali
- 11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Terduga Tuberkulosis
- Alokasi Anggaran : Rp. 79.308.600
- Realisasi : Rp. 67.059.600 (84,56%)
- Keluaran :
- Terlaksananya kegiatan Pelayanan Kesehatan oleh Dokter Spesialis sebanyak 1 kali
 - Tersedianya obat pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Pengadaan Reagen Zn Nlesen
- 12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV
- Alokasi Anggaran : Rp. 252.225.000
- Realisasi : Rp. 252.074.360 (99,94%)
- Keluaran :
- Terlaksananya Kegiatan Pembinaan teknis pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV
 - Tersedianya Hibah kepada Komisi Penanggulangan HIV/AIDS
- 13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
- Alokasi Anggaran : Rp. 92.260.000
- Realisasi : Rp. 83.890.000 (90,93%)
- Keluaran :
- Terlaksananya kegiatan penyelidikan Epidemiologi penyakit menular sebanyak 3 kali pada 6 Puskesmas, kegiatan Verifikasi Rumor dan Alert Web ke Puskesmas
- 14) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- Alokasi Anggaran : Rp. 1.872.100.200
- Realisasi : Rp. 1.820.112.648 (97,22%)
- Terlaksananya kegiatan pelayanan gizi yang bersumber dari Dak Non fisik selama 12 bulan untuk 6 puskesmas dan Dinas Kesehatan, pengendalian penduduk dan KB dalam rangka penurunan Stunting, Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin (PMT Balita Gizi Buruk dan PMT Bumil KEK), Terlaksananya pertemuan evaluasi data dan system pelaporan aplikasi E-PPGBM, Rapat Evaluasi Jejaring ANC bagi Ibu Hamil, Rapat evaluasi jejaring dalam penanganan stunting, Rapat pengkajian kasus kematian Ibu dan Anak triwulan.



- Tersedianya Jasa Pengiriman Logistik Gizi dari Provinsi, Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Operasi Timbang di 22 Desa dengan Angka Stunting Terbanyak sebanyak 2 kali, Alat Kesehatan Lainnya Antripometri Kit sebanyak 90 Unit, kegiatan pengambilan bufferstock logistic di Kupang, kegiatan koordinasi terkait PKS antar Dinas Kesehatan Kabupaten Sabu Raijua dengan Rumah Sakit Umum Pusat Prof/ DR. IG.NG Ngoerah di Bali
- 15) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- Alokasi Anggaran : Rp. 51.700.000
- Realisasi : Rp. 48.880.000 (94,55%)
- Keluaran :
- Terlaksananya kegiatan Pertemuan dan evaluasi program kesling dan system pelaporan kesling di Puskesmas
 - Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monev program kesling sebanyak 8 kali, perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monev program program Pos Unit Kesehatan Kerja (UKK) sebanyak 6 kali
- 16) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
- Alokasi Anggaran : Rp. 1.086.247.000
- Realisasi : Rp. 986.541.414 (90,82%)
- Keluaran :
- Tersedianya BBM kegiatan Fogging dan penyemprotan Malaria, kegiatan aksi bergizi, kegiatan pembinaan dan penilaian strata posyandu, Kegiatan pertemuan lintas sektor dalam rangka percepatan vaksinasi, hibah kepada PMI selama 12 bulan
 - Terlaksananya monev Program Promosi Kesehatan Tk.Puskesmas
- 17) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisioanal, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
- Alokasi Anggaran : Rp.25.255.000
- Realisasi : Rp.22.917.000 (90,74)
- Keluaran :
- Terlaksananya Kegiatan Workshop Pengobatan Tradisional
- 18) Pengelolaan Surveilans Kesehatan
- Alokasi Anggaran : Rp.14.280.000
- Realisasi : Rp.14.280.000 (100 %)
- Keluaran :
- Terlaksananya pelacakan AFP dalam rangka surveilains PD3i dan surveilains aktif rumah Sakit
- 19) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- Alokasi Anggaran : Rp. 298.805.500
- Realisasi : Rp. 225.527.200 (75,48%)
- Keluaran :
- Terlaksananya kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular dan tidak menular yang bersumber dari Dak Non fisik selama 12 bulan untuk 6 puskesmas dan Dinas Kesehatan, pengendalian penduduk dan KB, Konsultasi dan Koordinasi program penyakit tidak menular di Jakarta sebanyak 2 kali, Kegiatan koordinasi dan konsultasi



- percepatan eliminasi malaria di Kab Sabu Raijua di Provinsi sebanyak 2 kali, monitoring penyakit tidak menular di daratan Sabu dan Raijua sebanyak 4 kali, pendampingan teknis assesmen eliminasi kusta, Kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan deteksi dini preventif dan respon penyakit tingkat kabupaten, rapat koordinasi lintas program dan lintas sector, pelacakan kasus kusta di daratan Sabu dan Raijua
- Tersedianya BBM untuk Fogging, jasa fogging
- 20) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- | | | |
|------------------|---|----------------------------|
| Alokasi Anggaran | : | Rp. 4.251.567.001 |
| Realisasi | : | Rp. 4.023.515.900 (94,64%) |
| Keluaran | : | |
- Terlaksananya pertemuan evaluasi pengelolaan dana kapitasi dan non kapitasi tingkat Puskesmas selama 12 bulan, monitoring dan evaluasi penyelenggara jaminan kesehatan masyarakat di Puskesmas
 - Tersedianya Honor Tim pengelola dana JKN selama 12 bulan, kegiatan prolanis Tahun 2022 bulan januari s.d September 2022, kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat di 6 puskesmas selama 12 bulan, jasa pelayanan kesehatan bagi nakes di 6 puskesmas selama 1 tahun
- 21) Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
- | | | |
|------------------|---|------------------------|
| Alokasi Anggaran | : | Rp. 3.028.000 |
| Realisasi | : | Rp. 2.875.000 (94,95%) |
| Keluaran | : | |
- Tersedianya Jasa pengiriman sampel dugaan KLB ke propinsi
- 22) Operasional Pelayanan Puskesmas
- | | | |
|------------------|---|-------------------------|
| Alokasi Anggaran | : | Rp. 52.500.000 |
| Realisasi | : | Rp. 27.665.000 (52,70%) |
| Keluaran | : | |
- Tersedianya Jasa pengiriman dan pengisian tabung oksigen
- 23) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
- | | | |
|------------------|---|--------------------------|
| Alokasi Anggaran | : | Rp. 339.412.000 |
| Realisasi | : | Rp. 229.182.132 (67,52%) |
| Keluaran | : | |
- Terlaksananya kegiatan survey reakreditasi 6 puskesmas
 - Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi kegiatan akreditasi puskesmas di Provinsi sebanyak 1 kali, pendampingan Tim TPCB Puskesmas sebanyak 2 kali
- 24) Pengelolaan Pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
- | | | |
|------------------|---|--------------------------|
| Alokasi Anggaran | : | Rp. 106,644,000 |
| Realisasi | : | Rp. 106,625,000 (99,98%) |
| Keluaran | : | |
- Terlaksananya pemberian susu bagi pasien TBC, kegiatan pelacakan kasus TB
- 25) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
- | | | |
|------------------|---|--------------------------|
| Alokasi Anggaran | : | Rp. 137,858,980 |
| Realisasi | : | Rp. 137,571,980 (99,79%) |



Keluaran :
Tersedianya bahan-bahan lainnya (Larvasida Malaria dan RDT Malaria), ATK untuk kegiatan MBS dan pertemuan lintas sector dalam percepatan Eliminasi Malaria di Kabupaten Sabu Raijua, bahan penggandaan sebanyak 665 lembar, Makanan dan Minuman Rapat dalam rangka pertemua Lintas Sektor dalam Percepatan Eliminasi Malaria di Kabupaten Sabu Raijua, Jasa Tenaga Kesehatan Cross Chekker Malaria, perjalanan dinas dalam rangka pertemua lintas sector dalam percepatan eliminasi malaria di kab. Sabu Raijua

10. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

1) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Alokasi Anggaran : Rp. 54.740.000

Realisasi : Rp. 51.785.000 (94,60%)

Keluaran :

Terlaksananya pertemuan e logistic Tk.Kabupaten sebanyak 1 kali, kegiatan sosialisasi SIK di 6 Puskesmas, kegiatan validasi dan manajemen data puskesmas

11. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

1) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

Alokasi Anggaran : Rp. 6.421.882.320

Realisasi : Rp. 6.115.340.619 (95,23%)

Keluaran :

- Tersedianya Insentif Dokter ASN selama 12 Bulan, Gaji dan Insentif Dokter Kontrak selama 12 Bulan, Gaji Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan selama 12 Bulan, insentif dokter internsip selama 12 bulan
- Terlaksananya kegiatan koordinasi teknis tentang penyusunan formasi penugasan khusus nakes dalam mendukung program nusantara sehat

2) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Alokasi Anggaran : Rp. 30.100.000

Realisasi : Rp. 19.130.000 (63,55%)

Keluaran :

Terlaksananya pendampingan tim ahli dan dinas kesehatan ke FKTP

12. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi Anggaran : Rp. 1.043.843.000

Realisasi : Rp. 438.080.900 (41,97%)

Keluaran :

Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Manajemen puskesmas bagi tenaga puskesmas dan kepala puskesmas, pelatihan surveilans PD3i bagi petugas surveilans di Puskesmas, pelatihan Entomologi Puskesmas, pelatihan pelayanan kesehatan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dan tindak pidana perdagangan orang dan disabilitas, kegiatan pembekalan tim penguji UKOM jabatan fungsional sebanyak 1 kali, kegiatan orientasi penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat Tk.I, kegiatan rapat pelaksanaan UKOM sebanyak 1 kali



- 13. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**
- 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- Alokasi Anggaran : Rp. 8.120.000
 Realisasi : Rp. 7.920.000 (97,54%)
 Keluaran :
- Terlaksananya kegiatan monev kefarmasian di puskesmas sebanyak 2 kali, kegiatan Monev Apotek dan Toko Obat sebanyak 3 Tempat
- 14. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**
- 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
- Alokasi Anggaran : Rp. 75.000.000
 Realisasi : Rp. 63.805.000 (85,07%)
 Keluaran :
- Terlaksananya kegiatan Pertemuan Percepatan Pemberian SPP-IRT sebanyak 1 kali, kegiatan pengawasan dalam rangka penerbitan SPP-IRT sebanyak 2 kali
- 15. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**
- 1) Pemeriksaan Post Market pada Prodik Makanan – Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan
- Alokasi Anggaran : Rp. 171.713.850
 Realisasi : Rp. 126.498.000 (73,67%)
 Keluaran :
- Tersedianya Jasa Pembelian Sampel Pemeriksaan Makanan, BIMTEK Penilaian Mandiri CPPOB IRTP bagi pelaku usaha
 - Terlaksananya kegiatan Desk CAPA tindak lanjut hasil pengawasan Iklan, Pemeriksaan Sarana Post Market IRTP
- 16. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
- 1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Alokasi Anggaran : Rp. 168.855.900
 Realisasi : Rp. 158.963.600 (94,14%)
 Keluaran :
- Terlaksananya BIMTEK Keamanan Pangan, pertemuan tindak lanjut hasil pengawasan, kegiatan sosialisasi kader keamanan pangan, kegiatan workshop CDOB bagi petugas kefarmasian, kegiatan Pemeriksaan, pengawasan dan pengambilan sampel air minum di Rumah makan dan Depot Air



17. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Alokasi Anggaran : Rp. 33.869.800

Realisasi : Rp. 27.256.000 (80,47%)

Keluaran :

Tersedianya media KIE untuk posyandu/alat bantu kader, pertemuan koordinasi bagi kelompok kerja operasional posyandu, puskesmas, camat PKK, dan mitra dalam pengelolaan posyandu prima dan posyandu transformasi layanan prima, pertemuan penguatan kader dalam rangka peningkatan strata posyandu, kegiatan Pembinaan dan Penilaian strata Posyandu sebanyak 2 kali



3.4 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Penjanjian Kinerja

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			Kesesuaian (Ya/Tidak)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	
1	Meningkatnya layanan kesehatan menuju SARAI sehat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100%	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat Kabupaten/ kota	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Fasyankes sesuai standar	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6 Unit	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Ya
								Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1 Paket	Jumlah Sarana Prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan Pemeliharaan	Ya
								Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	18 Paket	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Ya
								Pengadaan Obat, Vaksin	1 Paket	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Ya



No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			Kesesuaian (Ya/Tidak)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	
								Pengadaan Bahan Habis Pakai	27 Jenis	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Ya
								Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7 Paket	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Ya
								Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Paket	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Ya



No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			Kesesuaian (Ya/Tidak)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	Presentase pelayanan Kesehatan sesuai SPM	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1846 Orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Ya
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1846 Orang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Ya
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1758 Orang	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Ya
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	8645 orang	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Ya
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	18227 Orang	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Ya



No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			Kesesuaian (Ya/Tidak)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	56999	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Ya
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	10032 Orang	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Ya
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	16346 Orang	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Ya
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	199 Orang	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Ya



No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			Kesesuaian (Ya/Tidak)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	76 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Ya
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1864 Orang	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Ya
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2231 Orang	Tersedianya pelayanan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Ya



No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			Kesesuaian (Ya/Tidak)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Ya
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat presentasi masyarakat yang mendapat pelayanan gizi sesuai standar	Ya
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Ya



No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			Kesesuaian (Ya/Tidak)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	
								Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Tersedianya pelayanan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Ya
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Ya
								Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Ya
								Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Ya



No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			Kesesuaian (Ya/Tidak)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	
								Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Ya
								Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	1 paket	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan	Ya
								Operasional Pelayanan Puskesmas	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Ya
								Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	6 Puskesmas	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Ya



No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			Kesesuaian (Ya/Tidak)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	
								Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	160 orang	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Ya
								Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	93995 Orang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Ya
					Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Presentase penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Ya



No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			Kesesuaian (Ya/Tidak)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	
	2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	100%	Cakupan Rumah Sakit dan Puskesmas Milik Pemerintah yang memiliki Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten	Jumlah SDM yang diusulkan per tahun	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	98 Orang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Ya
								Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Ya
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pelayanan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pengembangan mutu dan Pelatihan teknis Kesehatan bagi SDM	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	10 Orang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Ya



No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			Kesesuaian (Ya/Tidak)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	
	3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	100%	Presentase Sarana Farmasi yang memenuhi standar	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Tersedianya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotik dan Toko Obat yang memiliki ijin	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	10 Orang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Ya
			100%	Presentase Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang Bebas Dari Cemaran	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya pelayanan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah P-IRT yang mendapat SPP-IRT	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Ya



No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			Kesesuaian (Ya/Tidak)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	
					Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Terlaksananya pelayanan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah IRTP yang memiliki SPP-IRT	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	1 Unit	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Ya
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	100	Presentase Rumah Tangga Sehat	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksana nya pelayanan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkat dan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Ya



No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			Kesesuaian (Ya/Tidak)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDI KATOR KINERJA KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	
					Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Penguatan terhadap Posyandu aktif dan UKBM lainnya	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Ya



3.5 Permasalahan dan Solusi

➤ Permasalahan yang dihadapi

1) PROGRAM PENUNJANG USRUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- ❖ Belum maksimalnya penyerapan pada kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan dikarenakan Dana DAU Grand PPPK hanya dibayarkan mulai bulan Juni sampai dengan Desember 2023 berdasarkan TMT sehingga anggaran selama 5 bulan tidak terserap.
- ❖ Belum maksimalnya penyerapan pada kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dikarenakan adanya efisiensi pengisian air pada pustu di wilayah Kec. Sabu Barat,

2) PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANNGAN DAN UPAYA KESEHATAN

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- ❖ Belum maksimalnya penyerapan anggaran pada kegiatan Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya dikarenakan biaya rujukan pasien dibayarkan berdasarkan jumlah kasus rujukan yang ada.

2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- ❖ Belum maksimalnya penyerapan anggaran pada kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, dikarenakan adanya keterlambatan ketersediaan anggaran kementerian atau lembaga terkait dana BOK yang di transfer ke daerah dan rata-rata ibu hamil yang bersalin di RSUD Sabu Raijua tidak menginap di RTK
- ❖ Belum maksimalnya penyerapan anggaran pada kegiatan Pengelolaan Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular dikarenakan kegiatan SHK tidak terlaksana.
- ❖ Belum maksimalnya penyerapan anggaran pada kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan dikarenakan oksigen digunakan sesuai dengan kebutuhan.
- ❖ Belum maksimalnya penyerapan anggaran pada kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota dikarenakan surveyor akreditasi yang didatangkan dari lembaga berasal dari prov.NTT dan anggaran yang disiapkan untuk surveyor akreditasi dari Jakarta sehingga terdapat kelebihan tiket.



3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

- 1) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

Belum maksimalnya penyerapan anggaran pada Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan dikarenakan kegiatan monitoring Tenaga Ahli dan Dinas Kesehatan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan dari Momentum.

- 2) Pengembangan Mutu dan peningkatan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota

Belum maksimalnya penyerapan anggaran pada kegiatan Pengembangan Mutu dan peningkatan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dikarenakan pelatihan manajemen puskesmas yang seharusnya dilaksanakan di Kupang dialihkan pelaksanaannya di tingkat Kabupaten.

- 3) Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

- 4) Pemberian Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Belum maksimalnya penyerapan anggaran pada kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Perizinan Apotik, Toko Obat, Toko alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tarsional (UMOT) disebabkan terdapat belanja uji laboratorium depot air minum yang tidak dapat di SPJ merupakan kegiatan pada Bidang PMK

- 5) Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan Post Maket pada produksi dan Produk Makanan minuman industri rumah tangga

Belum maksimalnya penyerapan anggaran pada kegiatan Pemeriksaan Post Maket pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan disebabkan belum adanya IRTP yang memenuhi standar untuk mendapatkan SPP-IRT.

➤ Solusi

1. Pemanfaatan data dan informasi kesehatan untuk perencanaan
2. Melakukan Evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja beserta hambatan.
3. Kegiatan dilaksanakan terintegrasi antar bidang.
4. Meningkatkan Koordinasi antar bidang baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten

3.6 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Tidak ada



3.7 Tindak Lanjut DPRD Tahun Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	<p>Pansus memberikan Catatan, bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan demi lebih mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka Pemerintah Pusat telah mengucurkan dana yang tidak sedikit untuk dapat terbangunnya Rumah Sakit Umum Daerah Pratama di Pulau Raijua. Pembangunannya telah selesai dikerjakan dan dilakukan PHO, namun sampai dengan hari ini keberadaan rumah sakit tersebut belum dapat difungsikan sebagaimana mestinya akibat terkendala ijin operasional. Terhadap hal tersebut, DPRD telah berulang kali melakukan pembahasan dengan pemerintah dan telah merekomendasikan serta mendorong percepatan penyelesaian pengurusan ijin operasional dimaksud. Tetapi sampai dengan dilaporkannya LKPJ Bupati ini, masih saja belum ada tanda-tanda yang menggembirakan. Untuk itu Pansus memberikan Rekomendasi agar Bupati Sabu Raijua segera memerintahkan OPD-OPD terkait untuk secepatnya merampungkan pengurusan dimaksud</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖Terkait pemenuhan administrasi, RS Pratama Kelas D Raijua sudah memiliki IMB dan Ijin Operasional serta sementara berproses registrasi Fasyankes pada Kemenkes RI. ❖Belum beroperasinya RS Pratama Raijua karena terkendala jaringan listrik yang belum terpasang, namun pada Bulan November Tahun 2023 sudah dilakukan pemasangan listrik. ❖RS Pratama Kelas D Raijua direncanakan beroperasi pada awal tahun 2024. 	<p>Diharapkan RS Pratama Raijua dapat segera beroperasi tahun ini.</p>
2	<p>Pansus memberikan Catatan terkait ketersediaan maupun kualifikasi tenaga medis baik perawat, bidan dan dokter maupun tenaga pendukung di bidang kesehatan yang masih belum memadai. Demikian juga dengan perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan para tenaga medis tersebut yang masih sangat kurang. Untuk itu, Pansus memberi Rekomendasi kepada Bupati Sabu Raijua untuk segera melakukan pembenahan-pembenahan yang diperlukan. Pembenahan dimaksud termasuk membuat kebijakan-kebijakan teknis maupun keuangan yang menjamin kesejahteraan mereka. Salah satu persoalan yang terus berulang dari tahun ke tahun adalah berlarut-larutnya pembayaran hak-hak keuangan para tenaga medis. Sesuai penjelasan yang diterima oleh Pansus saat melakukan pendalaman materi LKPJ Bersama OPD-OPD terkait, hal ini salah satunya disebabkan karena penerbitan SK Tenaga Kontrak Daerah yang masih kolektif. Karena itu Pansus merekomendasikan agar ke depan penerbitan SK Tenaga Kontrak Daerah tidak lagi dilakukan secara kolektif.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖Terimakasih kepada Pansus atas perhatian akan kesejahteraan tenaga kesehatan. ❖Terkait SK Tenaga Kontrak Daerah pada Dinkes telah dilakukan koordinasi dengan BKDPP untuk percepatan penetapan SK Tenaga Kontrak 	<p>Diharapkan agar proses penerbitan SK Tenaga Kontrak dilakukan tepat waktu sehingga proses pembayaran gaji berjalan lancar</p>

2.2. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sabu Raijua

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sabu Raijua dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 25.179.010.828,-** dan realisasi sebesar **Rp. 20.735.282.268,- (82.35%)**. Adapun rincian anggaran dan realisasi berikut :

No	Program/KegiatanSub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah	15,832,412,663	12,474,633,018	78,79
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11,722,241,968	8,597,967,577	73,35
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.566.369.968	8.467.590.577	73,21
	2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	155.872.000	130.377.000	83,64
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	132.809.000	106.266.071	80,01
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	132.809.000	106.266.071	80,01
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	522.615.520	503.604.330	96,36
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	84.815.400	80.730.000	95,18
	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.826.970	95.755.200	95,92
	3) Penyedia Peralatan Rumah Tangga	33.962.350	33.962.350	100
	4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.780.000	57.757.500	99,96
	5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	169.974.800	168.300.265	99,01
	6) Penyelenggaraan Konsultasi dan Koordinasi	76.256.000	67.099.015	87,99
	7) Penyelenggaraan Perjalanan Dalam Kota	2.040.000	1.020.000	50,00
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.082.956.175	2.923.179.600	94,82
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.900.000	3.000.000	76,92
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	457.000.000	370.281.600	81,02
	3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.622.056.175	2.549.898.000	97,25
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	371.790.000	343.615.440	92,42
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	280.680.000	272.905.440	97,23



No	Program/KegiatanSub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
	2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	91.110.000	70.710.000	77,61
II.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	6.500.848.165	5.723.149.250	88,04
1.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5.949.338.785	5.237.631.894	88,04
	1) Pengembangan Rumah Sakit	1.158.407.565	998.373.642	86,19
	2) Rebalitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	827.000.000	740.226.868	89,51
	3) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.451.381.220	1.201.427.214	82,78
	4) Pengadaan Obat, Vaksin	1.650.000.000	1.567.838.960	95,02
	5) Pengadaan Bahan Habis Pakai	425.650.000	366.504.710	86,10
	6) Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	50.000.000	38.660.500	77,32
	7) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	20.000.000	5.100.000	25,50
	8) <i>Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>	366.900.000	319.500.000	87,08
2.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	551.509.380	485.517.356	88,03
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	551.509.380	485.517.356	88,03
III.	program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.845.750.000	2.537.500.000	89,17
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	2.845.750.000	2.537.500.000	89,17
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	2.845.750.000	2.537.500.000	89,17
Jumlah		25.179.010.828	20.735.282.268	82,35



3.2. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya layanan kesehatan menuju SARAI sehat	1.1.	Rehabilitasi pemeliharaan rumah sakit a. Jumlah prasarana yang dipelihara	unit	1	1	100
			1.2.	Pengadaan alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan b. Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik yang diadakan	Paket	1	1	100
			1.3.	Pengadaan obat dan vaksin c. Jumlah obat dan vaksin yang diadakan	Paket	6	6	100
			1.4.	Pengadaan bahan habis pakai d. Jumlah bahan habis pakai yang diadakan	Jenis	13	13	100
			1.5.	Pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan e. Jumlah prasarana yang dipelihara	gedung	1	1	100



3.3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Alokasi Anggaran : Rp. 11.566.369.968,-
Realisasi : Rp. 8.467.590.577,- (73,21%)
Keluaran :

Tersedianya gaji dan tunjangan ASN selama 12 Bulan pada RSUD Sabu Raijua.

2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Alokasi Anggaran : Rp. 155.872.000,-
Realisasi : Rp. 130.377.000,- (83,64%)
Keluaran :

Tersedianya honor Penanggungjawab pengelola keuangan, honor pengadaan barang/jasa, honor pengelola BMD yang menghasilkan pendapatan, honor jasa pengelola BMD yang tidak menghasilkan pendapatan.

2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1)

Alokasi Anggaran : Rp. 132.809.000,-
Realisasi : Rp. 106.266.071,-
Keluaran :

Tersedianya Spanduk 3 buah, Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5 Paket, Perjalanan Dinas untuk Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 7 kali.

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 84.815.400,-
Realisasi : Rp. 80.730.000,- (95,18%)
Keluaran :

Tersedianya Alat/Bahan Instalasi Listrik dan Elektronik pada RSUD Sabu Raijua.

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 99.826.970,-
Realisasi : Rp. 95.755.200,- (95,92%)
Keluaran :

Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Paket, Alat Listrik 1 Paket, Pompa 1 buah, Alat Kantor dan Rumah Tangga 1 paket, Komputer dan peralatan komputer 1 unit.

3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Alokasi Anggaran : Rp. 33.962.350,-
Realisasi : Rp. 33.962.350,- (100,00%)
Keluaran :

Tersedianya Peralatan pendingin 1 paket, dapur 1 paket, rumah tangga lainnya 1 paket.

4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 57.780.000,-
Realisasi : Rp. 57.757.500,- (99,96%)
Keluaran :

Tersedianya Makan Minum Rapat Pegawai Rumah Sakit 1.926 kotak.



- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 Alokasi Anggaran : Rp. 169.974.800,-
 Realisasi : Rp. 168.300.265,- (99,01%)
 Keluaran :
 Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan Resume dokter 3 warna 10 buku, form lab 15 buku, form radiologi 10 buku, kartu nama pasien 500 lembar, map radiologi 250 buah, map RM 1000 buah, resep 300 buku, kartu stok 100 lembar, penggandaan 362.666 lembar.
- 6) Penyelenggaraan Konsultasi dan Koordinasi
 Alokasi Anggaran : Rp. 76.256.000,-
 Realisasi : Rp. 67.099.015,- (87,99%)
 Keluaran :
 Terlaksananya Kegiatan koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah Kerja sama penyediaan Dokter Spesialis di Universitas Udayana Denpasar Bali 2 kali, Konsultasi dan koordinasi peningkatan SDM ke Provinsi 8 kali, Konsultasi RSUD menuju BLUD di BPKP Provinsi NTT, Kerja Sama RSUD dengan PT. Taspen di PT. Taspen Kupang, Konsultasi terkait pelayanan pasien umum di RUSD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang, Koordinasi penyediaan SDM Dokter Spesialis di Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Pemeriksaan laboratorium hasil pengolahan IPAL RSUD.
- 7) Penyelenggaraan Perjalanan Dalam Kota
 Alokasi Anggaran : Rp. 2.040.000,-
 Realisasi : Rp. 1.020.000,- (50%)
 Keluaran :
 Terlaksananya kegiatan perjalanan dinas lokal OPD Pengasuh Stunting 3 kali.

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 Alokasi Anggaran : Rp.3.900.000,-
 Realisasi : Rp.3.000.000,- (76,92%)
 Keluaran :
 Tersedianya Materai sebanyak 300 lembar
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
 Alokasi Anggaran : Rp. 457.000.000,-
 Realisasi : Rp. 370.281.600,- (81,02%)
 Keluaran :
 Tersedianya iuran listrik, telepon 12 bulan dan penambahan daya 1 paket.
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 Alokasi Anggaran : Rp. 2.622.056.175,-
 Realisasi : Rp. 2.549.898.000,- (97,25%)
 Keluaran :
 Tersedianya Alat kebersihan/bahan pembersih 1 paket, Alat dan bahan untuk kegiatan kantor 1 paket, Jasa medis non kapitasi 12 bulan

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Penyediaan jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 Alokasi Anggaran : Rp. 280. 680.000,-
 Realisasi : Rp. 272.905.440,- (97,23%)
 Keluaran :
 Tersedianya Jasa Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 2 sebanyak 3 unit, Roda 4 sebanyak 6 unit, Roda 4 double gardan sebanyak 2 unit.



- 2). Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan
Alokasi Anggaran : Rp. 91.110.000,-
Realisasi : Rp. 70.710.000,- (77,61%)
Keluaran :
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, IPAL 1 unit, Genzet 1 unit, Bahan Bakar dan Pelumas untuk Genzet 325 liter, Printer 3 unit, AC 15 unit, PC 13 unit.

6. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten\Kota

- 1) Pengembangan Rumah Sakit
Alokasi Anggaran : Rp. 1.158.407.565,-
Realisasi : Rp. 998.373.642,- (86,19%)
Keluaran :
Terlaksananya, Visitasi ijin operasional Pembangunan 3 kali, Pembangunan Selasar Rawat Inap 1 paket, Perencanaan Rawat Inap 1 paket, Pembangunan Gedung rawat inap 1 paket, Pengawasan Gedung Rawat Inap 1 paket.
- 2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
Alokasi Anggaran : Rp. 827.000.000,-
Realisasi : Rp. 740.226.868,- (89,51%)
Keluaran :
Tersedianya Jasa Pengawasan Rehabilitasi Gedung Rawat Inap Kelas III 1 paket, Rehabilitasi rawat inap kelas III 1 unit.
- 3) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Alokasi Anggaran : Rp. 1.451.381.220,-
Realisasi : Rp. 1.201.427.214,- (82,78%)
Keluaran :
Tersedianya Alat Kesehatan 1 paket, Alat kedokteran umum 1 paket.
- 4) Pengadaan obat-obatan
Alokasi Anggaran : Rp. 1.650.000.000,-
Realisasi : Rp. 1.567.838.960,- (95,02%)
Keluaran :
Tersedianya BHP Lab Hematologi 1 paket, BHP Lab Kimia 1 Paket, BHP Rawat Inap 1 paket, Obat Emergency 1 paket, Obat Ruang Operasi 1 paket, Obat Rujukan 1 paket, Obat Rawat Jalan 1 paket, Obat Rawat Inap 1 paket, Obat Spesialistik 1 paket.
- 5) Pengadaan Bahan Habis Pakai
Alokasi Anggaran : Rp. 425.650.000,-
Realisasi : Rp. 366.504.710,- (86,10%)
Keluaran :
Tersedianya Jasa Pengisian Oksigen 1.317 tabung, BHP Lab Hematologi 1 paket, BHP CSSD 1 paket, BHP Emergency 1 paket, BHP Kamar Jenazah 1 paket, BHP Lab Kimia 1 paket, BHP Radiologi 1 paket, BHP Rawat Jalan 1 paket, BHP Ruang Operasi 1 paket, BHP Instalasi Gizi 1 Paket, Biaya Pengiriman Oksigen 1.050 tabung.
- 6) Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Alokasi Anggaran : Rp. 50.000.000,-
Realisasi : Rp. 38.660.500,- (77,32%)
Keluaran :
Tersedianya Jasa Pemeliharaan Gedung dan Bangunan RSUD Sabu Raijua 1 paket.



7) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Alokasi Anggaran : Rp. 20.000.000,-
Realisasi : Rp. 5.100.000,- (25,50%)
Keluaran :
Tersedianya Jasa Pemeliharaan Rutin Alat Kesehatan Berupa Jasa Servis Alat kesehatan pada RSUD Sabu Raijua 1 paket.

8) Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
Alokasi Anggaran : Rp. 366.900.000,-
Realisasi : Rp. 319.500.000,- (87,08%)
Keluaran :
Tersedianya Jasa Pemeliharaan Prasarana Gedung dan Bangunan RS 1 Paket, Service Alat Kesehatan 1 Paket, Pengisian Oksigen 1.046 Tabung, Pengiriman Tabung Oksigen 1.046 Tabung.

7. Penyedia Layanan Kesehatan Untuk UKM/UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Operasional Pelayanan Rumah Sakit

Alokasi Anggaran : Rp. 551.509.380,-
Realisasi : Rp. 485.517.356,- (88,03%)
Keluaran :

Tersedianya Perjalanan dinas pendampingan pasien rujukan 101 kali, Bahan Bakar/pelumas keperluan Dapur (Nutrisionis) 6.000 liter, Tabung Gas Elpiji 30 tabung, Makanan dan Minuman Pasien yang terdiri dari sayur-sayuran, buah-buahan, susu, daging dan kacang-kacangan 1 paket, uji lab air limbah 1 paket, Jasa Kontribusi asosiasi 1 tahun, Perjalanan Dinas Visitasi dokter spesialis penunjang 1 kali.

8. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM

1) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar

Alokasi Anggaran : Rp. 2.845.750.000,-
Realisasi : Rp. 2.537.500.000,- (89,17%)
Keluaran :

Tersedianya Honor spesialis kontrak PPDS/PDGS 12 bulan untuk 1 orang, spesialis kontrak Anestesi 3 bulan, spesialis kontrak PPDS/PDGS Bedah 2 bulan, spesialis kontrak PPDS/PDGS obgyn 1 bulan, Tenaga Paramedis 12 bulan untuk 29 orang, Tenaga Paramedis sebelum PPPK 5 bulan untuk 10 orang, Insentif Dokter Spesialis PNS 12 bulan untuk 1 orang, Insentif Dokter Spesialis PPDS/PDGS 12 bulan untuk 2 orang, Jasa Tenaga Kebersihan 12 bulan untuk 22 orang, Tenaga Security 12 bulan untuk 12 orang, Tenaga Non Medis (sopir) 12 bulan 4 orang, Juru Masak 12 bulan dari 8 orang.

3.4. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Penjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
1	Meningkatnya layanan kesehatan menuju SARAI sehat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Terpenuhnya layanan kesehatan yang memenuhi standar	Persentase layanan kesehatan yang memenuhi standar	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yang Memenuhi Standar	Rehabilitasi pemeliharaan rumah sakit	Ya
							Pengadaan sarana fasilitas pelayanan Kesehatan	Ya
							Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan Kesehatan	Ya
							Pengadaan alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Ya
							Pengadaan obat dan vaksin	Ya
							Pengadaan bahan habis pakai	Ya
							Pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Ya
							Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medic fasilitas pelayanan Kesehatan	Ya
							Operasional pelayanan rumah sakit	Ya
					Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Yang Menerapkan Standar Pelayanan	Jumlah kegiatan operasional pelayanan kesehatan	



3.5. Permasalahan dan Solusi

➤ **Permasalahan :**

Dalam penyelenggaraan fungsinya, Rumah Sakit Umum Daerah Sabu Raijua masih memiliki kekurangan dari segi sumber daya manusia maupun sarana prasarana. Rumah Sakit Umum Daerah Sabu Raijua belum memiliki Dokter Spesialis lain seperti Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Spesialis Radiologi serta peralatan kesehatan yakni peralatan kesehatan Gawat Darurat dan Rawat Inap Intensif. Dari Segi Pengelolaan keuangan terdapat realisasi anggaran kurang dari 80% pada beberapa sub kegiatan yang dikarenakan efisiensi tiket dan akomodasi perjalanan dinas serta pemeliharaan rutin/rehabilitasi sarana prasarana yang disesuaikan dengan kebutuhan

➤ **Solusi :**

- 1) Berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk pengadaan Sumber Daya Manusia melalui sistem Pendayagunaan Dokter Spesialis Kementerian Kesehatan dan Pengadaan sarana prasarana menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)
- 2) Lebih cermat dalam perencanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan sisa anggaran disetor ke kas daerah

3.6. Kebijakan Strategis yang di tetapkan Tidak ada

Tidak ada

3.7. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Pansus memberikan Catatan bahwa rencana peningkatan status Rumah Sakit Umum Daerah Menia masih terkendala sejumlah persyaratan, termasuk persyaratan jumlah tempat tidur rumah sakit yang belum mencapai 100 buah. Untuk itu, Pansus memberikan Rekomendasi agar Bupati Sabu Raijua terus mendorong dan mendukung OPD terkait dalam upaya memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Dukungan dimaksud termasuk dukungan kebijakan dan alokasi anggaran juga koordinasi dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.	Pemerintah dalam hal ini RSUD Sabu Raijua pada Tahun 2023 berencana melakukan rehabilitasi ruang rawat inap kelas III dan menambah Gedung Rawat Inap yang baru untuk dapat menambah tempat tidur rumah sakit.	Diharapkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terus berjalan sesuai standart dan dapat meningkatkan status rumah sakit dari kelas D ke kelas C.



UPTD Puskesmas Ledunu

3.1 Capaian Pelaksanan Program dan Kegiatan

Urusan **Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan** di Kabupaten Sabu Raijua yang dilaksanakan oleh Puskesmas Ledunu Setda Kabupaten Sabu Raijua, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 1.950.983.981** dan realisasi **Rp. 1.564.689.785,- (80,20%)**, adapun rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
I	Program Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.950.983.981	1.564.689.785	80,20
1.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.917.017.981	1.533.523.785	79,99
	1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	90.660.000	88.860.000	98,01
	2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	88.000.000	87.600.000	99,55
	3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	42.400.000	41.200.000	97,17
	4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	25.900.000	23.900.000	92,28
	5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	66.350.000	66.350.000	100
	6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.000.000	1.000.000	100
	7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.000.000	6.400.000	71,11
	8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	474.570.280	255.134.800	53,76
	9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.800.000	2.400.000	50,00
	10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.000.000	7.800.000	86,67
	11) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	8.285.000	8.285.000	100
	12) Pengelolaan Surveilans Kesehatan	52.100.000	27.000.000	51,82
	13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan masalah Kesehatan jiwa dan NAPZA	2.000.000	2.000.000	100
	14) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	97.500.000	85.900.000	88,10
	15) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	611.331.701	604.494.318	98,98
	16) Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensi KLB Ke Laboratorium Rujukan/Nasional	800.000	-	-
	17) Operasional Pelayanan Puskesmas	314.421.000	211.499.667	67,27



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
	18) Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.000.000	2.000.000	100
	19) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis	6.000.000	2.000.000	33,33
	20) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	10.900.000	9.700.000	88,99
2.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	29.166.000	29.166.000	100
	1) Pemeliharaan Rutin Dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	29.166.000	29.166.000	100
3.	Kegiatan Pengembangan Dan Pelaksanaan UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.800.000	2.000.000	41,67
	1) Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	4.800.000	2.000.000	41,67
Jumlah		1.950.983.981	1.564.689.785	80,20

3.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran	Uraian Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Layanan Kesehatan Menuju (SARAI SEHAT)	Presentasi Penduduk Yang memanfaatkan Layanan UKM Tingkat Kabupaten/Kota	%	100	100	100

3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Alokasi : Rp. 90.660.000,-
Anggaran
Realisasi : Rp. 88.860.000,- (98,01%)



- Keluaran :
- Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat untuk Kegiatan Koordinasi Penguatan P4K sebanyak 62 kotak, perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu hamil sebanyak 3 kegiatan di 3 Desa dan 2 Kelurahan.
- 2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
- Alokasi : Rp. 88.000.000,-
- Anggaran
- Realisasi : Rp. 87.600.000,- (99,55%)
- Keluaran :
- Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pengelolaan pelayanan Kesehatan Balita sebanyak 5 di 3 Desa dan 2 Kelurahan.
- 3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- Alokasi : Rp. 42.400.000,-
- Anggaran
- Realisasi : Rp. 41.200.000,- (97,17%)
- Keluaran :
- Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pengelolaan pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan dasar sebanyak 2 kegiatan di 20 Sekolah.
- 4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- Alokasi : Rp. 25.900.000,-
- Anggaran
- Realisasi : Rp. 23.900.000,- (92,28%)
- Keluaran :
- Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pengelolaan pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sebanyak 6 kegiatan tersebar di desa dan sekolah.
- 5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- Alokasi : Rp. 66.350.000,-
- Anggaran
- Realisasi : Rp. 66.350.000,- (100%)
- Keluaran :
- Tersedianya Snack Kegiatan Edukasi Lansia sebanyak 58 Kotak, perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Sebanyak 2 kegiatan di 3 Desa dan 2 Kelurahan.
- 6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- Alokasi : Rp. 1.000.000,-
- Anggaran
- Realisasi : Rp. 1.000.000,- (100%)
- Keluaran :
- Tersedianyaperjalanan dinas dalam rangka kegiatan pengelolaan pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sebanyak 26 kasus



- 7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis
 Alokasi : Rp. 9.000.000,-
 Anggaran
 Realisasi : Rp. 6.400.000,- (71,11%)
 Keluaran :
 Tersedianyaperjalanan dinas dalam rangka kegiatan pengelolaan pelayanan Kesehatan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis sebanyak 3 kali Kegiatan di 3 Desa dan 2 Kelurahan.
- 8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
 Alokasi : Rp. 474.570.280,-
 Anggaran
 Realisasi : Rp. 255.134.800,- (53,76%)
 Keluaran :
 Tersedianya bahan-bahan lainnya untuk Penyiapan PMT Lokal bumil KEK, Gizi kurang, dan Pelatihan Pembuatan Makanan Tambahan PMT Lokal, makanan dan minuman rapat untuk Rapat konseling pranikah di Kecamatan, Rapat validasi dan evaluasi Gikia sebanyak 109 kotak, perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pengelolaan pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat sebanyak 5 di 3 Desa dan 2 Kelurahan
- 9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
 Alokasi : Rp. 4.800.000,-
 Anggaran
 Realisasi : Rp. 2.400.000,- (50,00%)
 Keluaran :
 Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka pengelolaan pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga sebanyak 1 Kegiatan
- 10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 Alokasi Anggaran : Rp. 9.000.000,-
 Realisasi : Rp. 7.800.000,- (86,67%)
 Keluaran :
 Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan sebanyak 4 Kegiatan di 3 Desa dan 2 Kelurahan.
- 11) Pengelolaan Pelayanan Promisi Kesehatan
 Alokasi Anggaran : Rp. 8.285.000,-
 Realisasi : Rp. 8.285.000,- (100%)
 Keluaran :
 Tersedianya spanduk 2 lembar dan leaflet 60 lembar, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pengelolaan Pelayanan Promisi Kesehatan sebanyak 2 Kegiatan di Desa dan Sekolah.
- 12) Pengelolaan Pelayanan Surveilans Kesehatan
 Alokasi Anggaran : Rp. 52.100.000,-
 Realisasi : Rp. 27.000.000,- (51,82%)
 Keluaran :
 Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan sebanyak 3 Kegiatan di 3 Desa dan 2 Kelurahan.



- 13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
 Alokasi Anggaran : Rp. 2.000.000,-
 Realisasi : Rp. 2.000.000,- (100%)
 Keluaran :
 Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA sebanyak 1 kegiatan di 3 Sekolah.
- 14) Pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular
 Alokasi Anggaran : Rp. 97.500.000,-
 Realisasi : Rp. 85.900.000,- (88,10%)
 Keluaran :
 Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular sebanyak 11 kegiatan tersebar di Desa dan Sekolah.
- 15) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
 Alokasi Anggaran : Rp. 611.331.701
 Realisasi : Rp.604.494.318 (98,98%)
 Keluaran :
 Tersedianya Honor bendahara barang selama 12 bulan, Bangunan dan Konstruksi sebanyak 9 item, bahan habis pakai sebanyak 1 paket, Alat Tulis Kantor sebanyak 27 jenis, Bahan Cetak sebanyak 12.345 lembar, Materai sebanyak 107 lembar, Peralatan Listrik sebanyak 7 jenis, Bendera sebanyak 3 lembar, bahan pembersih JKN Ledeuunu sebanyak 18 item, obat jkn ledeunu sebanyak 1 paket, Jasa Tenaga Kesehatan sebanyak 1 paket, jasa sewa tukang sebanyak 1 paket, Jasa pemeliharaan roda 4 sebanyak 1 unit, Jasa pemeliharaan ac sebanyak 4 unit, Perjalanan Dinas Dalam Kota sebanyak 6 kegiatan, alat pendingin (AC) dan kipas angin sebanyak 8 unit, Meubeler sebanyak 2 unit, alat Kesehatan sebanyak 1 paket, laptop sebanyak 2 unit, printer sebanyak 2 unit, Studio Audio (Wirrless) 1 unit;
- 16) Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensi KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
 Alokasi Anggaran : Rp. 800.000,-
 Realisasi : Rp. 0 (0%)
 Keluaran :
- 17) Operasional Pelayanan Puskesmas
 Alokasi Anggaran : Rp. 314.421.000,-
 Realisasi : Rp. 211.499.667,- (67,27%)
 Keluaran :
 Tersedianya Makanan Minuman untuk Kegiatan Rapat Lokakarya mini bulanan, lokajarya mini lintas sector, jasa tenaga kesehatan untuk Insenif UKM sebanyak 12 bulan, tagihan Paket internet Pustu dan Puskesmas sebanyak 12 bulan, Perjalanan Dinas dalam Kota sebanyak 1 kegiatan, Perjalanan dinas paket meeting dalam kota sebanyak 1 kegiatan
- 18) Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
 Alokasi Anggaran : Rp. 2.000.000,-
 Realisasi : Rp. 2.000.000,- (100%)



Keluaran :
Tersedianya Perjalanan Dinas dalam Kota sebanyak 1 di 3 Desa dan 2 Kelurahan.

19) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis

Alokasi Anggaran : Rp. 6.000.000,-
Realisasi : Rp. 2.000.000,- (33,33%)
Keluaran :

Tersedianya Perjalanan Dinas dalam Kota sebanyak 1 kegiatan di 2 Desa dan 2 Kelurahan.

20) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria

Alokasi Anggaran : Rp. 10.900.000,-
Realisasi : Rp. 9.700.000,- (88,99%)
Keluaran :

Terbayarnya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebanyak 3 kegiatan di 2 Kelurahan dan 3 Desa.

2. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untyk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota

1) Pemeliharaan Rutin Dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Alokasi Anggaran : Rp. 29.166.000,-
Realisasi : Rp. 29.166.000,- (100%)
Keluaran :

Tersedianya Jasa Pemeliharaan Rutin Dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sebanyak 1 Paket

3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Bimbingan Teknis dan Superfisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Alokasi Anggaran : Rp. 4.800.000,-
Realisasi : Rp. 2.000.000,- (41,67%)
Keluaran :

Tersedianya Perjalanan Dinas Dalam Kota untuk Pemberdayaan Kader Masyarakat untuk Melakukan Kegiatan Investigasi Kontak TBC dan Pemberdayaan Kader Masyarakat dalam Pencegahan Penyakit Menuar TBC.



3.4 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran strategis	Program			Kegiatan			Kesesuaian (ya/tidak)
		Uraian program	Target kinerja program	Indikator kinerja program	Uraian kegiatan	Target kinerja kegiatan	Indikator kinerja kegiatan	
1	Meningkatkan Layanan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan Kesehatan pada layanan UKM dan UKP rujukan dalam kurun waktu 1 tahun	Presentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Pelayanan penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Presentasi Penduduk Yang memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Tingkat Kabupaten/Kota	Ya



3.5 Permasalahan dan Solusi

Tidak Ada

3.6 Kebijakan Strategi yang ditetapkan

Tidak Ada

3.7 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun sebelumnya

Tidak Ada



UPTD Puskesmas Daieko

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan di Kabupaten Sabu Raijua yang dilaksanakan oleh Puskesmas Daieko Setda Kabupaten Sabu Raijua, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 2.990.686.715,-** dan realisasi sebesar **Rp. 2.629.021.262,- (88%)**. Adapun rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
I.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.990.686.715	2.629.021.262	88,00
1.	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	2.932.520.715	2.570.855.262	88,00
	1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	153.800.000	150.200.000	97,66
	2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	49.200.000	41.700.000	84,76
	3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	78.000.000	77.600.000	99,49
	4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	5.000.000	5.000.000	100
	5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	54.025.000	54.025.000	100
	6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	16.000.000	15.200.000	95,00
	7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	34.000.000	22.000.000	64,71
	8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	611.975.040	461.045.040	75,34
	9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olahraga	12.600.000	12.600.000	100
	10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	17.200.000	16.800.000	97,67
	11) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	22.370.000	16.370.000	73,18
	12) Pengelolaan Surveilans Kesehatan	35.000.000	33.600.000	96,00
	13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Dan Napza	-	-	-
	14) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular	126.700.000	84.100.000	66,38
	15) Pengambilan Dan Pengiriman Spesimen Penyakit KLB Ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	2.100.000	1.900.000	90,48
	16) Operasional Pelayanan Puskesmas	361.159.000	271.212.621	75,10
	17) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.301.391.675	1.255.502.601	96,47



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
	18) Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Dan Pemberian Obat Massal)	11.000.000	11.000.000	100
	19) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	12.000.000	12.000.000	100
	20) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	29.000.000	29.000.000	100
II	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	29.166.000	29.166.000	100
	1) Pemeliharaan Rutin Dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	29.166.000	29.166.000	100
III	Kegiatan Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (Ukkm) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.000.000	29.000.000	100
	1) Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	29.000.000	29.000.000	100
Jumlah		2.990.686.715	2.629.021.262	88,00

3.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran	Uraian Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Layanan Kesehatan Menuju (SARAI SEHAT)	Presentasi Penduduk Yang memanfaatkan Layanan UKM Tingkat Kabupaten/Kota	%	100	100	100

3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
 - 1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Alokasi Anggaran : Rp. 153.800.000
Realisasi : Rp. 150.200.000,- (97,66%)



- Keluaran :
- Tersedianya dinas dalam rangka pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu hamil sebanyak 5 kegiatan yang terdiri dari Kegiatan (ANC, PNC, Rapat Koordinasi P4K, Kunjungan Bumil Resti dan Kelas Ibu Hamil) di 10 desa;
- 2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Balita

Alokasi Anggaran : Rp. 49.200.000,-

Realisasi : Rp. 41.700.000,- (84,76%)

Keluaran :

Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu balita sebanyak 4 Kegiatan
 - 3) Pengelolaan Pelayanan Usia Pendidikan Dasar

Alokasi Anggaran : Rp. 78.000.000,-

Realisasi : Rp. 77.600.000,- (99,49%)

Keluaran :

Tersedianya dinas dalam rangka Pengelolaan Pelayanan Usia Pendidikan Dasar sebanyak 4 kegiatan yang terdiri dari (Pelaksanaan Skrining bagi Remaja di Desa, Skrining Kesehatan Bagi Remaja Putri di Sekolah, TK/PAUD transport, transport SD, SMP dan SMA) di 54 sekolah dan 10 Desa.
 - 4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia produktif

Alokasi Anggaran : Rp. 5.000.000,-

Realisasi : Rp. 5.000.000,- (100%)

Keluaran :

Tersedianya dinas dalam rangka Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sebanyak 2 kegiatan
 - 5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Alokasi Anggaran : Rp. 54.025.000,-

Realisasi : Rp. 54.025.000,- (100%)

Keluaran :

Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sebanyak 2 Kegiatan
 - 6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Alokasi Anggaran : Rp. 16.000.000,-

Realisasi : Rp. 15.200.000,- (95%)

Keluaran :

Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat sebanyak 2 Kegiatan
 - 7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Alokasi Anggaran : Rp. 34.000.000,-

Realisasi : Rp. 22.000.000,- (64,71%)

Keluaran :

Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis sebanyak 1 kegiatan yang meliputi 10 desa
 - 8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Alokasi Anggaran : Rp. 611.975.040,-

Realisasi : Rp. 461.045.040,- (75,34%)



- Keluaran :
- Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat sebanyak 5 kegiatan, Makanan dan Minuman Pelatihan tim pelaksana dalam penyiapan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil kek dan balita gizi kurang tingkat kab/kota dan puskesmas
- 9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga
 Alokasi Anggaran : Rp. 12.600.000,-
 Realisasi : Rp. 12.600.000,- (100%)
 Keluaran :
- Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga sebanyak 1 kegiatan
- 10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 Alokasi Anggaran : Rp. 17.200.000,-
 Realisasi : Rp. 16.800.000,- (97,67%)
 Keluaran :
- Tersedianya dinas dalam rangka Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan sebanyak 3 yang meliputi 10 Desa;
- 11) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
 Alokasi Anggaran : Rp. 22.370.000,-
 Realisasi : Rp. 16.370.000,- (73,18%)
 Keluaran :
- Tersedianya dinas dalam rangka Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan sebanyak 2 kegiatan yang tersebar di desa dan sekolah, Makan Dan Minum (snack) Kegiatan Aksi Bergizi dan Pembinaan kesehatan olahraga dan pengukuran kesehatan jasmani
- 12) Pengelolaan Surveilans Kesehatan
 Alokasi Anggaran : Rp. 35.000.000,-
 Realisasi : Rp. 33.600.000,- (96%)
 Keluaran :
- Tersedianya dinas dalam rangka Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Sebanyak 3 kegiatan yang Meliputi 10 desa
- 13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
 Alokasi Anggaran : Rp. 0,-
 Realisasi : Rp. 0,- (100%)
 Keluaran : -
- 14) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
 Alokasi Anggaran : Rp. 126.700.000,-
 Realisasi : Rp. 84.100.000,- (66,38%)
 Keluaran :
- Tersedianya dinas dalam rangka Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular sebanyak 9 kegiatan yang tersebar di Desa dan Sekolah.
- 15) Pengambilan Dan Pengiriman Spesimen Penyakit potensi KLB ke laboratorium rujukan/nasional
 Alokasi Anggaran : Rp. 2.100.000,-
 Realisasi : Rp. 1.900.000,- (90,48%)



- Keluaran :
Tersedianya dinas dalam rangka Kegiatan Pengambilan Dan Pengiriman Spesimen Penyakit potensi KLB ke laboratorium rujukan/nasional sebanyak 21 kasus
- 16) Operasional Pelayanan Puskesmas
Alokasi Anggaran : Rp. 361.159.000,-
Realisasi : Rp. 271.212.621,- (75,10%)
Keluaran :
Tersedianya dinas dalam rangka Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas, insentif bagi tenaga Kesehatan puskesmas, makan, minum dan snack bagi peserta minlok puskesmas dan lintas sector, paket internet di 10 pustu, Transport peserta Kegiatan Minilok Puskesmas sebanyak 18 orang selama 12 kali
- 17) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Alokasi Anggaran : Rp. 1.301.391.675,-
Realisasi : Rp. 1.255.502.601,- (96,47%)
Keluaran :
Tersedianya honor penyimpanan barang (bendahara barang) JKN Puskesmas selama 12 bulan, bahan-bahan bangunan dan konstruksi sebanyak 18 item, Peralatan medis habis pakai sebanyak 44 item, alat tulis kantor sebanyak 31 jenis, bahan Cetak 2 buku, Materai 10.000 sebanyak 90 lembar, alat Listrik sebanyak 8 jenis, bendera ibu hamil 220 Lembar, peralatan kebersihan dan bahan pembersih sebanyak 22 jenis, obat-obatan sebanyak 54 jenis, papan nama ruangan 52 papan, jasa tenaga Kesehatan selama 12 bulan, jasa tenaga penanganan sarana dan prasarana umum (Jasa tukang) sebanyak 95 orang/hari, tagihan Listrik (Pulsa Listrik) selama 12 bulan, tagihan Air selama 12 bulan, Jasa pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit, Jasa pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 sebanyak 4 unit, Jasa pemeliharaan computer sebanyak 6 unit, perjalanan dinas dalam kota sebanyak 8 kali, Alat rumah tangga (Lemari) 3 Unit, Alat Ukur (Meja) 2 Unit, Peralatan Studio Audio 1 Unit, alat Kesehatan umum lainnya sebanyak 26 jenis, Personal Computer (Laptop) sebanyak 3 unit, peralatan computer lainnya (printer) sebanyak 2 unit.
- 18) Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Dan Pemberian Obat Massal
Alokasi Anggaran : Rp. 11.000.000,-
Realisasi : Rp. 11.000.000,- (100%)
Keluaran :
Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Dan Pemberian Obat Massal sebanyak 10 Desa.
- 19) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis
Alokasi Anggaran : Rp. 12.000.000,-
Realisasi : Rp. 12.000.000,- (100%)



Keluaran :

Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis di 10 Desa.

20) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria

Alokasi Anggaran : Rp. 29.000.000,-

Realisasi : Rp. 29.000.000,- (100%)

Keluaran :

Tersedianya Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria Sebanyak 3 Kegiatan

2 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Kewenangan Daerah Kabupaten Kota

1 Pemeliharaan Rutin Dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Alokasi Anggaran : Rp. 29.166.000,-

Realisasi : Rp. 29.166.000,- (100%)

Keluaran :

Tersedianya Jasa Pemeliharaan Rutin Dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sebanyak 1 Paket

3 Kegiatan Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (Ukbn) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1 Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (Ukbn)

Alokasi Anggaran : Rp. 29.000.000,-

Realisasi : Rp. 29.000.000,- (100%)

Keluaran :

Tersedianya Transport kader TBC selama 12 Bulan dan Pemberdayaan Kader PHBS.



3.4 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN (YA/TIDAK)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
1	Meningkatnya Layanan Kesehatan (SARAI SEHAT)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan pada layanan UKM dan UKP rujukan dalam kurun waktu	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat Kabupaten/kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya pelayanan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Ya



3.5 Permasalahan dan Solusi

Tidak ada

3.6 Kebijakan Strategi yang ditetapkan

Tidak Ada

3.7 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun sebelumnya

Tidak Ada



UPTD Puskesmas Eilogo

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan **Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan** di Kabupaten Sabu Raijua yang dilaksanakan oleh UPTD Puskesmas Eilogo Kabupaten Sabu Raijua, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 1.982.575.073,-** dan realisasi sebesar **Rp. 1.907.875.695,- (96,23%)**. Adapun rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
I.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.982.575.073	1.907.875.695	96,23
1.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.910.209.073	1.835.509.695	96,09
	1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	235.300.000	235.200.000	99,96
	2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	85.000.000	84.400.000	99,29
	3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	26.900.000	26.900.000	100
	4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	4.800.000	4.800.000	100
	5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	79.200.000	79.200.000	100
	6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.200.000	1.000.000	83,33
	7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.800.000	4.800.000	54,55
	8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	192.700.000	150.130.000	77,91
	9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	21,600.000	21,600.000	100
	10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	49.800.000	49.600.000	100
	11) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	6.000.000	6.000.000	100
	12) Pengelolaan Surveilans Kesehatan	18.300.000	3.500.000	19,13
	13) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	87.800.000	85.400.000	97,27



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
	14) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	764.700.073	760.215.245	99,41
	15) Pengambilan dan Pengiriman specimen Penyakit Potensi KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional	8.000.000	8.000.000	100
	16) Operasional Pelayanan Puskesmas	295.209.000	289.664.000	98,12
	17) Investigasi Awal Kejadian tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) dan Pemberian Obat Massal	4.500.000	4.500.000	100
	18) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	6.000.000	6.000.000	100
	19) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	14.400.000	14.400.000	100
II	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	29.166.000	29.166.000	100
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	29.166.000	29.166.000	100
III	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan BersumberDaya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten Kota	43.200.000	43.200.000	100
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Masyarakat BersumberDaya Masyarakat (UKBM)	43.200.000	43.200.000	100
Total		1.982.575.073	1.907.875.695	96,23

3.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran	Uraian Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Layanan Kesehatan Menuju (SARAI SEHAT)	Presentasi Penduduk Yang memanfaatkan Layanan UKM Tingkat Kabupaten/Kota	%	100	100	100



3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Alokasi Anggaran : Rp. 235.300.000,-
Realisasi : Rp. 235.200.000,- (99,96%)
Keluaran :
Tersedianya makanan dan minuman rapat (snack) untuk kegiatan Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) sebanyak 1 kali dalam setahun, Perjalanan Dinas dalam rangka kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil sebanyak 7 kegiatan.
- 2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Alokasi Anggaran : Rp. 85.000.000,-
Realisasi : Rp. 84.400.000,- (99,29%)
Keluaran :
Tersedianya Perjalanan Dinas dalam rangka kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan Balita sebanyak 3 kegiatan.
- 3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
Alokasi Anggaran : Rp. 26.900.000,-
Realisasi : Rp. 26.900.000,- (100%)
Keluaran :
Tersedianya Perjalanan Dinas dalam rangka kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar sebanyak 2 kegiatan.
- 4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
Alokasi Anggaran : Rp. 4.800.000,-
Realisasi : Rp. 4.800.000,- (100%)
Keluaran :
Tersedianya Perjalanan Dinas dalam rangka kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan Pada Usia Produktif sebanyak 2 kegiatan.
- 5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
Alokasi Anggaran : Rp. 79.200.000,-
Realisasi : Rp. 79.200.000,- (100%)
Keluaran :
Tersedianya Perjalanan Dinas dalam rangka kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia Lanjut sebanyak 1 kegiatan.
- 6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Alokasi Anggaran : Rp. 1.200.000,-
Realisasi : Rp. 1.000.000,- (83,33%)
Keluaran :
Tersedianya Perjalanan Dinas dalam rangka kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sebanyak 1 kali.



- 7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
 Alokasi Anggaran : Rp.8.800.000,-
 Realisasi : Rp. 4.800.000,-(54,55%)
 Keluaran :
 Tersedianya Perjalanan Dinas dalam rangka kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sebanyak 1 kegiatan 225 orang .
- 8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
 Alokasi Anggaran : Rp. 192.700.000,-
 Realisasi : Rp. 150.130.000,- (77,91%)
 Keluaran :
 Tersedianya Jasa PMT Lokal Balita Gizi Kurang dan Bumil Kek Selama 90 Hari, Makanan dan Minuman (Snack) untuk Kegiatan Pelatihan Tim Pelaksana dalam Penyiapan PMT Lokal dan Rapat Validasi Data GIKIA, Perjalanan Dinas dalam rangka kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat sebanyak 2 kegiatan.
- 9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
 Alokasi Anggaran : Rp. 21.600.000,-
 Realisasi : Rp. 21.600.000,- (100%)
 Keluaran :
 Tersedianya Perjalanan Dinas dalam rangka kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan Kerja dan Olahraga sebanyak 9 kali di 12 desa.
- 10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 Alokasi Anggaran : Rp. 49.800.000,-
 Realisasi : Rp. 49.800.000,- (100%)
 Keluaran :
 Tersedianya Perjalanan Dinas dalam rangka kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan sebanyak 4 Kegiatan.
- 11) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
 Alokasi Anggaran : Rp. 6.000.000,-
 Realisasi : Rp. 6.000.000,- (100%)
 Keluaran :
 Tersedianya Perjalanan Dinas dalam rangka kegiatan pengelolaan pelayanan Promosi Kesehatan sebanyak 2 kegiatan.
- 12) Pengelolaan Surveilans Kesehatan
 Alokasi Anggaran : Rp 18,300.000,-
 Realisasi : Rp. 3,500.000,- (100%)
 Keluaran :
 Tersedianya Perjalanan Dinas dalam rangka kegiatan pengelolaan Surveilans Kesehatan sebanyak 2 Kegiatan.
- 13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
 Alokasi Anggaran : Rp. 87.800.000,-
 Realisasi : Rp. 85.400.000,- (97,27%)
 Keluaran :
 Tersedianya Perjalanan Dinas dalam rangka kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular sebanyak 12 kegiatan.



- 14) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
 Alokasi Anggaran : Rp. 764.700.073,-
 Realisasi : Rp. 760.215.245,- (99,41%)
 Keluaran :
- Tersedianya honor penyimpan barang (bendahara barang) JKN Puskesmas selama 12 bulan, bahan-bahan bangunan dan konstruksi sebanyak 9 item, bahan-bahan lainnya sebanyak 2 item, bahan medis habis pakai sebanyak 19 item, alat tulis kantor sebanyak 17 item, bahan cetak (penggandaan) sebanyak 65. 506 lembar, Materai sebanyak 100 lembar, alat Listrik sebanyak 4 item, peralatan kebersihan dan bahan pembersih sebanyak 17 item, obat-obatan sebanyak 41 item, jasa tenaga Kesehatan selama 12 bulan, jasa tenaga penanganan sarana dan prasarana umum (Jasa tukang) sebanyak 114 orang/hari, tagihan Listrik (Pulsa Listrik) selama 12 bulan, Jasa pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit, Jasa pemeliharaan computer sebanyak 8 unit, perjalanan dinas dalam kota sebanyak 8 kali, alat pendingin (Kipas angin) sebanyak 3 Buah, alat rumah tangga lainnya (home use) sebanyak 2 item, alat pemadam kebakaran sebanyak 1 item, alat Kesehatan umum lainnya sebanyak 17 item, Personal computer unit lainnya (Laptop) sebanyak 1 unit, peralatan personal computer (stavolt) sebanyak 1 buah, peralatan computer lainnya (printer) sebanyak 2 unit
- 15) Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensi KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
 Alokasi Anggaran : Rp. 8.000.000,-
 Realisasi : Rp. 8.000.000,- (100%)
 Keluaran :
- Tersedianya Perjalanan Dinas dalam rangka kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Potensi KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional sebanyak 1 kegiatan.
- 16) Operasional Pelayanan Puskesmas
 Alokasi Anggaran : Rp. 295.209.000,-
 Realisasi : Rp. 289.664.000,- (98,12%)
 Keluaran :
- Tersedianya makanan dan minuman rapat untuk kegiatan rapat lintas sektor sebanyak 3 kali, makanan dan minuman rapat untuk kegiatan rapat minilokakarya sebanyak 12 kali, Perjalanan Dinas dalam rangka kegiatan operasional pelayanan puskesmas sebanyak 12 kali, Paket Internet untuk Puskesmas dan Pustu sebanyak 12 Kali, Jasa Tenaga Kesehatan sebanyak 12 Bulan.
- 17) Investigasi Awal Kejadian Tidak di Harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal.
 Alokasi Anggaran : Rp. 4.500.000,-
 Realisasi : Rp. 4.500.000,- (100%)
 Keluaran :
- Tersedianya Perjalanan Dinas dalam rangka kegiatan Investigasi Awal Kejadian tidak di Harapkan (Kejadian Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal sebanyak 1 Kegiatan.



- 18) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis
Alokasi Anggaran : Rp. 6.000.000,-
Realisasi : Rp. 6.000.000,- (100%)
Keluaran :
Tersedianya Perjalanan Dinas dalam rangka kegiatan pengelolaan pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis sebanyak 1 Kali 20 Kasus.
- 19) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
Alokasi Anggaran : Rp. 14.400.000,-
Realisasi : Rp. 14.400.000,- (100%)
Keluaran :
Tersedianya Perjalanan Dinas dalam Rangka Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria sebanyak 4 kali.

2. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Alokasi Anggaran : Rp. 29.166.000,-
Realisasi : Rp. 29.166.000,- (100%)
Keluaran :
Tersedianya Jasa Pemeliharaan Rutin Dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sebanyak 1 Paket



3.4 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN (YA/TIDAK)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
1	Meningkatnya Layanan Kesehatan (SARAI SEHAT)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan pada layanan UKM dan UKP rujukan dalam kurun waktu	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat Kabupaten/kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya pelayanan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Ya



3.5 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Puskesmas bekerja sesuai data proyeksi yg ditetapkan terlalu tinggi menurut standar kementerian untuk semua item program ada;
2. Puskesmas mengejar target semua kegiatan KIA berbasis kasus yg kejadiannya fluktuatif

Solusi

1. Evaluasi capaian SPM setiap bulan di puskesmas dan setiap 3 bulan dengan dinas;
2. Konsultasi perubahan anggaran dgn dinas;
3. Analisis perkembangan kasus penyakit di tingkat puskesmas secara maksimal untuk dapat disesuaikan dengan standar proyeksi;
4. Upaya rapat perencanaan melibatkan semua pengelola program esensial di puskesmas pada triwulan ke 3.

3.6 Kebijakan Strategi yang ditetapkan

Tidak Ada

3.7 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun sebelumnya

Tidak Ada



UPTD Puskesmas Bolou

3.1 Capaian Pelaksanan Program dan Kegiatan

Urusan **Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan** di Kabupaten Sabu Raijua dilaksanakan oleh Puskesmas Bolou Setda Kabupaten Sabu Raijua, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 1.958.163.820-** dan realisasi sebesar **Rp. 1.658.880.982,- (84,72%)**. Adapun rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.946.163.820	1.646.880.982	84,62
1.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	29.166.000	29.166.000	100
	1) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	29.166.000	29.166.000	100
2.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.916.997.820	1.617.714.982	84,39
	1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	112.250.000	112.250.000	100
	2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	72.600.000	69.600.000	95,87
	3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	84.100.000	83.900.000	99,76
	4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	15.200.000	15.200.000	100
	5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	56.000.000	56.000.000	100
	6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.000.000	1.000.000	100
	7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.400.000	3.600.000	81,82
	8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	372.939.500	221.288.350	59,34
	9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	18.000.000	18.000.000	100
	10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	31.200.000	31.200.000	100
	11) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	19.500.000	18.500.000	94,87



	12) Pengelolaan Surveilans Kesehatan	83.600.000	54.300.000	64,95
	13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	3.000.000	3.000.000	100
	14) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	86.400.000	76.100.000	88,08
	15) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	618.119.320	558.342.743	90,33
	16) Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	2.300.000	2.300.000	100
	17) Operasional Pelayanan Puskesmas	313.389.000	270.533.889	86,33
	18) Infestigasi Awal Kejadian Tidak di Harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal	4.000.000	4.000.000	100
	19) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	1.600.000	1.600.000	100
	20) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	17.400.000	17.000.000	97,70
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	12.000.000	12.000.000	100
1.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.000.000	12.000.000	100
	1) Bimbingan Teknis dan Superfisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12.000.000	12.000.000	100
Jumlah		1.958.163.820	1.658.880.982	84,72

3.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran	Uraian Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Layanan Kesehatan Menuju (SARAI SEHAT)	Presentasi Penduduk Yang memanfaatkan Layanan UKM Tingkat Kabupaten/Kota	%	100	100	100



3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Alokasi Anggaran : Rp. 29.166.000,-
Realisasi : Rp. 29.166.000,- (100%)
Keluaran :
Tersedianya jasa kalibrasi dalam rangka kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebanyak 1 paket setahun.

2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Alokasi Anggaran : Rp 112.250.000,-
Realisasi : Rp 112.250.000,- (100 %)
Keluaran :
Tersedianya makanan dan minuman rapat untuk kegiatan pertemuan koordinasi penguatan P4K sebanyak 1 kali dalam setahun, perjalanan dinas dalam kota dalam rangka Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebanyak 4 kegiatan, perjalanan dinas dalam kota paket meeting dalam kota dalam rangka Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebanyak 1 kegiatan.
- 2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Alokasi Anggaran : Rp. 72.600.000,-
Realisasi : Rp. 69.600.000,- (95,87%)
Keluaran :
Tersedianya perjalanan dinas dalam kota dalam rangka kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita sebanyak 5 kegiatan di 8 desa dan 2 Kelurahan.
- 3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
Alokasi Anggaran : Rp. 84.100.000,-
Realisasi : Rp. 83.900.000,- (99,76%)
Keluaran :
Tersedianya perjalanan dinas dalam kota dalam rangka kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar sebanyak 4 kegiatan di Sekolah (Paud/TK/SD/SMP/SMA), 8 Desa dan 2 Kelurahan.
- 4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
Alokasi Anggaran : Rp. 15.200.000,-
Realisasi : Rp. 15.200.000,- (100%)
Keluaran :
Tersedianya perjalanan dinas dalam kota dalam rangka kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sebanyak 6 kegiatan di Sekolah (SD/SMP/SMA), 8 Desa dan 2 Kelurahan.



- 5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
Alokasi Anggaran : Rp. 56.000.000,-
Realisasi : Rp. 56.000.000,- (100%)
Keluaran :
Tersedianya makanan dan minuman rapat dalam rangka kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut untuk kegiatan Edukasi Lansia di Posyandu Lansia sebanyak 1 kali dalam setahun di 8 Desa dan 2 Kelurahan, perjalanan dinas dalam kota dalam rangka kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sebanyak 2 kegiatan di 8 Desa dan 2 Kelurahan.
- 6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Alokasi Anggaran : Rp. 1.000.000,-
Realisasi : Rp. 1.000.000,- (100%)
Keluaran :
Tersedianya perjalanan dinas dalam kota dalam rangka Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sebanyak 1 kegiatan dengan jumlah 5 kasus.
- 7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Alokasi Anggaran : Rp. 4.400.000,-
Realisasi : Rp. 3.600.000,- (81,82%)
Keluaran :
Tersedianya perjalanan dinas dalam kota dalam rangka kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tuberkulosis sebanyak 2 kegiatan dengan penemuan kasus TBC 10 kasus dan investigasi kasus TBC 8 kasus.
- 8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat.
Alokasi Anggaran : Rp. 372.939.500,-
Realisasi : Rp. 221.288.350,- (59,34%)
Keluaran :
Tersedianya bahan lainnya dalam rangka kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat sebanyak 1 kegiatan selama setahun, makanan dan minuman rapat dalam rangka kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat sebanyak 2 kegiatan, makanan dan minuman rapat pada fasilitas pelayanan urusan Kesehatan sebanyak 2 kegiatan, perjalanan dinas dalam kota dalam rangka kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat sebanyak 4 kegiatan di 8 Desa serta 2 Kelurahan.
- 9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Alokasi Anggaran : Rp. 18.000.000,-
Realisasi : Rp. 18.000.000,- (100%)
Keluaran :
Tersedianya perjalanan dinas dalam kota dalam rangka kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga sebanyak 1 kegiatan di 8 Desa serta 2 Kelurahan.
- 10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Alokasi Anggaran : Rp. 31.200.000,-
Realisasi : Rp. 31.200.000,- (100%)



- Keluaran :
- Tersedianya perjalanan dinas dalam kota dalam rangka kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan sebanyak 4 kegiatan di 8 Desa serta 2 Kelurahan.
- 11) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
- Alokasi Anggaran : Rp. 19.500.000,-
- Realisasi : Rp. 18.500.000,- (94,87%)
- Keluaran :
- Tersedianya alat/bahan untuk kegiatan kantor, bahan cetak dalam rangka kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan sebanyak 200 lembar, alat/bahan untuk kegiatan kantor perlengkapan dinas dalam rangka kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan sebanyak 1 kegiatan, makanan dan minuman rapat dalam rangka kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan sebanyak 4 kegiatan, perjalanan dinas dalam kota dalam rangka kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan sebanyak 4 kegiatan.
- 12) Pengelolaan Surveilans Kesehatan
- Alokasi Anggaran : Rp. 83.600.000,-
- Realisasi : Rp. 54.300.000,- (64,95%)
- Keluaran :
- Tersedianya perjalanan dinas dalam kota dalam rangka kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan sebanyak 4 kegiatan di 8 Desa dan 2 Kelurahan.
- 13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza
- Alokasi Anggaran : Rp. 3.000.000,-
- Realisasi : Rp. 3.000.000,- (100%)
- Keluaran :
- Tersedianya perjalanan dinas dalam kota dalam rangka kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza sebanyak 1 kegiatan di 15 Sekolah.
- 14) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- Alokasi Anggaran : Rp. 86.400.000,-
- Realisasi : Rp. 76.100.000,- (88,08%)
- Keluaran :
- Tersedianya perjalanan dinas dalam kota dalam rangka kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular sebanyak 9 kegiatan di Sekolah (Paud/TK/SD/SMP/SMA), 8 Desa dan 2 Kelurahan.
- 15) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- Alokasi Anggaran : Rp. 618.119.320,-
- Realisasi : Rp. 558.342.743,- (90,33%)
- Keluaran :



Tersedianya jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan (honorarium bendahara barang) dalam rangka kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Sebanyak 12 bulan, Bahan-Bahan Lainnya dalam rangka kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Sebanyak 1 paket dan 20 buah tempat sampak injak tertutup, alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor dalam rangka kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Sebanyak 26 Item, alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak dalam rangka kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Sebanyak 42.073 lembar, Materai 151 lembar, listrik dalam rangka kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Sebanyak 2 Item, Jaminan Kesehatan Masyarakat Sebanyak 19 item, obat-obatan dalam rangka kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Sebanyak 1 paket, jasa tenaga kesehatan dalam rangka kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Sebanyak 12 bulan untuk 68 tenaga nakes dan non nakes, air dalam rangka kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Sebanyak 111 tangki untuk 12 bulan, tagihan listrik dalam rangka kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Sebanyak 1 paket untuk 12 bulan, Jasa pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan dalam rangka kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Sebanyak 1 paket, Jasa Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin dalam rangka kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Sebanyak 1 unit, Jasa Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer dalam rangka kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Sebanyak 1 unit, perjalanan dinas dalam kota dalam rangka kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Sebanyak 2 kegiatan, Alat Kantor Lainnya kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Sebanyak 1 unit, Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Sebanyak 6 buah kursi plastic, Alat Kesehatan Umum Lainnya dalam rangka kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Sebanyak 1 paket, Peralatan Personal Computer 3 unit

16) Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional

Alokasi Anggaran : Rp. 2.300.000,-
 Realisasi : Rp. 2.300.000,- (100%)
 Keluaran :

Tersedianya perjalanan dinas dalam kota dalam rangka kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional sebanyak 1 kegiatan.

17) Operasional Pelayanan Puskesmas

Alokasi Anggaran : Rp. 313.389.000,-
 Realisasi : Rp. 270.533.889,- (86,33%)
 Keluaran :

Tersedianya makanan dan minuman rapat dalam rangka kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas sebanyak 2 kegiatan, jasa tenaga Operasional Pelayanan Puskesmas sebanyak 1 paket, Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas sebanyak 14 lokasi 12 kali, Perjalanan dinas dalam kota dalam rangka kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas sebanyak 12 kali untuk 16 petugas pustu.



- 18) Investigasi Awal Kejadian Tidak di Harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal
 Alokasi Anggaran : Rp. 4.000.000,-
 Realisasi : Rp. 4.000.000,- (100%)
 Keluaran :
 Tersedianya perjalanan dinas dalam kot dalam rangka kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak di Harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal sebanyak 1 kegiatan 40 kasus.
- 19) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis
 Alokasi Anggaran : Rp. 1.600.000,-
 Realisasi : Rp. 1.600.000,- (100%)
 Keluaran :
 Tersedianya perjalanan dinas dalam kota dalam rangka kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis sebanyak 1 kegiatan 8 kasus.
- 20) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
 Alokasi Anggaran : Rp. 17.400.000,-
 Realisasi : Rp. 17.000.000,- (97,70%)
 Keluaran :
 Tersedianya perjalanan dinas dalam kota dalam rangka kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria sebanyak 4 kegiatan di 8 Desa dan 2 Kelurahan.

3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Bimbingan Teknis dan Superfisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
 Alokasi Anggaran : Rp. 12.000.000,-
 Realisasi : Rp. 12.000.000,- (100%)
 Keluaran :
 Tersedianya perjalanan dinas paket meeting dalam kota dalam rangka kegiatan Bimbingan Teknis dan Superfisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) sebanyak 1 kegiatan di 8 Desa dan 2 Kelurahan.



3.4 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN (YA/TIDAK)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
1	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya sistem pelayanan publik yang profesional dan fasilitatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Terlaksananya pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Penyediaan kebutuhan penunjang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Penunjang Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Ya
2	Terwujudnya sistim pelayanan publik yang profesional dan fasilitatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Terlaksananya koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya	Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dan Masyarakat	Terlaksananya Pelaporan dan Evaluasi terkait Penyelenggaraan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah	Ya
				Terlaksananya rehabilitasi sedang, berat, ringan fasilitas pemerintahan.	Rehabilitasi Gedung Kantor	Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dan Masyarakat	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kantor	Ya



		Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Terlaksananya koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya	Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dan Masyarakat	Terlaksananya Rapat Forkopimda di Tingkat Kabupaten	Ya
--	--	---------------------------------------	--	--	--	---	---	----



3.5 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

1. Puskesmas bekerja sesuai data proyeksi yg ditetapkan terlalu tinggi menurut standar kementerian untuk semua item program yang ada,
2. Puskesmas mengejar target semua kegiatan berbasis kasus yg kejadiannya fluktuatif,
3. Data ril di lapangan terkadang tidak dapat menjangkau data proyeksi sehingga capaiannya rendah.
4. Keterlambatan juknis dan penyesuaian anggaran kembali sesuai perubahan juknis dari kementerian di pertengahan semester kegiatan menjadi salah satu kendala yg sulit dihindari Puskesmas.
5. Perubahan juknis yg menyatukan beberapa kegiatan secara kolaboratif membuat beberapa kegiatan yg berhubungan dengan SPM, tidak terakomodir dalam anggaran.

Solusi:

1. Evaluasi capaian SPM setiap bulan di Puskesmas dan setiap 3 bulan dengan dinas,
2. Konsultasi perubahan anggaran dengan dinas,
3. Menyusun RUK/RPK jauh hari sebelum entry di dinas untuk tahun berikutnya
4. Analisis perkembangan kasus penyakit di tingkat puskesmas secara maksimal untuk dapat disesuaikan dengan standar proyeksi.
5. Upaya rapat perencanaan melibatkan semua pengelola program esensial di Puskesmas pd triwulan ke 3

3.6 Kebijakan Strategi yang ditetapkan

Tidak Ada

3.7 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun sebelumnya

Tidak Ada



UPTD Puskesmas Eimadake

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan di Kabupaten Sabu Raijua dilaksanakan oleh UPTD Puskesmas Eimadake Kabupaten Sabu dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 1.635.649.579,-** dan realisasi sebesar **Rp. 1.528.530.154,- (93,45%)**, adapun rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
I	Program Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.635.649.579	1.528.530.154	94,45
1.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.635.649.579	1.499.364.154	97,63
	1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	112.880.000	109.780.000	97,25
	2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	74.100.000	72.600.000	97,98
	3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	81.400.000	81.300.000	99,90
	4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	12.400.000	10.600.000	85,48
	5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	48.000.000	48.000.000	100
	6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.200.000	7.000.000	97,22
	7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	18.400.000	18.400.000	100
	8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	158.815.000	158.315.000	99,90
	9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	28.800.000	28.800.000	100
	10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	25.600.000	22.000.000	93,02
	11) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	8.120.000	8.120.000	89,64
	12) Pengelolaan Surveilans Kesehatan	41.000.000	10.800.000	26,24
	13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	1.300.000	1.300.000	100
	14) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	88.600.000	84.600.000	91,03
	15) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	578.876.599	576.259.645	99,55
	16) Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit KLB Ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	10.000.000	10.000.000	100
	17) Operasional Pelayanan Puskesmas	271.792.000	225.089.509	82,82
	18) Investigasi Kejadian Awal Tidak di Harapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massall	11.600.000	11.600.000	100



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
	19) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkolosis	6.000.000	6.000.000	100
	20) Penglolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	12.000.000	8.800.000	73,33
	21) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	9.600.000	-	-
2	Penyediaan Fasilitas pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangna Daerah Kabupaten/Kota	29.166.000	29.166.000	100
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	29.166.000	29.166.000	100
Jumlah		1.635.649.579	1.528.530.154	93,45

3.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran	Uraian Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Layanan Kesehatan Menuju (SARAI SEHAT)	Presentasi Penduduk Yang memanfaatkan Layanan UKM Tingkat Kabupaten/Kota	%	100	100	100

3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Alokasi Anggaran : Rp. 77.820.000,-

Realisasi : Rp. 65.700.000,- (88,43%)

Keluaran :

Tersedianya Makanan Minuman untuk Kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan P4K dan Pembentukan Forum Peduli KIA Pendukung P4K, perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu hamil sebanyak 12 kegiatan

2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Alokasi Anggaran : Rp. 86.710.000,-

Realisasi : Rp. 86.427.500,- (99,67%)

Keluaran :

Tersedianya makanan dan minuman harian pasien dan pendamping Selama Berada di Rumah Tunggu Kehamilan (RTK), perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pengelolaan pelayanan ibu bersalin sebanyak 5 kegiatan .



- 3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Alokasi Anggaran : Rp. 7.200.000,-
Realisasi : Rp. 4.600.000,- (63,89%)
Keluaran :
Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pengelolaan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir sebanyak 3 kegiatan
- 4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Alokasi Anggaran : Rp. 34.600.000,-
Realisasi : Rp. 34.600.000,- (100%)
Keluaran :
Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pengelolaan pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan dasar sebanyak 4 kegiatan
- 5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Alokasi Anggaran : Rp. 34.400.000,-
Realisasi : Rp. 34.400.000,- (100%)
Keluaran :
Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pengelolaan pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sebanyak 2 kegiatan
- 6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Alokasi Anggaran : Rp. 2.400.000,-
Realisasi : Rp. 2.400.000,- (100%)
Keluaran :
Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa sebanyak 2 kegiatan
- 7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Alokasi Anggaran : Rp. 20.400.000,-
Realisasi : Rp. 20.400.000,- (100%)
Keluaran :
Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pengelolaan pelayanan Kesehatan orang Terduga tuberkolosis sebanyak 3 kegiatan
- 8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan resiko terinfeksi HIV
Alokasi Anggaran : Rp. 6.400.000,-
Realisasi : Rp. 6.400.000,- (100%)
Keluaran :
Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV sebanyak 4 kali Pelayanan
- 9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa
Alokasi Anggaran : Rp. 56.100.000,-
Realisasi : Rp. 55.300.000,- (98,57%)
Keluaran :
Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa sebanyak 3 Kegiatan.



- 10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
 Alokasi Anggaran : Rp. 210.250.000,-
 Realisasi : Rp. 210.050.000,- (99,90%)
 Keluaran :
 Tersedianya Makanan Minuman untuk Kegiatan Refresing kader, belanja perjalanan dinas dalam rangka kegiatan; pengelolaan pelayanan Kesehatan gizi Masyarakat sebanyak 11 Kegiatan, perjalanan dinas paket meeting dalam kota transportasi kader Bina Keluarga Balita.
- 11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
 Alokasi Anggaran : Rp. 31.300.000,-
 Realisasi : Rp. 31.300.000,- (100%)
 Keluaran :
 Tersedianya Makanan Minuman untuk Kegiatan pengukuran kebugaran jasmani pada ASN, perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pengelolaan pelayanan Kesehatan kerja dan olahraga sebanyak 3 Kegiatan.
- 12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lingkungan
 Alokasi Anggaran : Rp. 25.800.000,-
 Realisasi : Rp. 24.000.000,- (93,02%)
 Keluaran :
 Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pengelolaan pelayanan Kesehatan Lingkungan sebanyak 6 Kegiatan di 8 desa
- 13) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
 Alokasi Anggaran : Rp. 28.950.000,-
 Realisasi : Rp. 25.950.000,- (89,64%)
 Keluaran :
 Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan sebanyak 6 Kegiatan di 8 desa dan 13 sekolah
- 14) Pengelolaan Surveilans Kesehatan.
 Alokasi Anggaran : Rp. 14.400.000,-
 Realisasi : Rp. 14.400.000,- (100%)
 Keluaran :
 Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pengelolaan Surveilans Kesehatan sebanyak 3 Kegiatan di 8 desa dan 13 sekolah
- 15) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan masalah Kesehatan jiwa (ODMK)
 Alokasi Anggaran : Rp. 1.600.000,-
 Realisasi : Rp. 1.600.000,- (100%)
 Keluaran :
 Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan masalah Kesehatan jiwa (ODMK) sebanyak 1 kali pelayanan
- 16) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
 Alokasi Anggaran : Rp. 4.800.000,-
 Realisasi : Rp. 4.800.000,- (100%)



- Keluaran :
- Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pengelolaan pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA sebanyak 2 kegiatan
- 17) Pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular
- Alokasi Anggaran : Rp. 123.800.000,-
- Realisasi : Rp. 112.700.000,- (91,03%)
- Keluaran :
- Tersedianya Makanan Minuman untuk Kegiatan Rapat Koordinasi terpadu lintas program/lintas sector tentang pencegahan dan pengendalian penyakit sebanyak 4 dalam 1 tahun, perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pelayanan Kesehatan Penyakit menular dan tidak menular sebanyak 18 kegiatan 8 desa dan 13 sekolah.
- 18) Pengelolaan Pelayanan jaminan Kesehatan Masyarakat
- Alokasi Anggaran : Rp. 577.717.580,-
- Realisasi : Rp. 576.764.051,- (63,57%)
- Keluaran :
- Tersedianya honor bendahara barang selama 12 bulan, bahan Bangunan dan konstruksi sebanyak 11 item, bahan habis pakai sebanyak 1 paket, alat tulis kantor sebanyak 22 item, bahan cetak (penggandaan) sebanyak 42.102 lembar, alat listrik sebanyak 12 item, alat dan bahan pembersih sebanyak 19 item, bahan obat-obatan sebanyak 1 paket, jasa/upah tukang sebanyak 1 paket, jasa Tenaga kesehatan sebanyak 1 Paket, tagihan listrik sebanyak 3 paket, tagihan air sebanyak 160 kali, Jasa pemeliharaan kendaraan operasional 1 paket, perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 4 kegiatan, papan nama pustu sebanyak 3 unit, mebel sebanyak 2 unit, alat rumah tangga (spon) sebanyak 3 unit, alat Kesehatan sebanyak 1 paket, personal computer sebanyak 5 unit .
- 19) Operasional Pelayanan Puskesmas
- Alokasi Anggaran : Rp. 39.450.700,-
- Realisasi : Rp. 39.435.400,- (99,96%)
- Keluaran :
- Tersedianya Alat atau bahan penggandaan format laporan sebanyak 10.169 lembar, Makanan dan minuman rapat minilokarya bulanan selama 12 bulan, perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pelayanan rapat minilokarya di puskesmas selama 12 bulan.

2. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

- 1) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
- Alokasi Anggaran : Rp. 127.694.670,-
- Realisasi : Rp. 112.108.760,- (87,79%)
- Keluaran :
- Tersedianya honor tenaga kesehatan dan administrasi keuangan selama 12 bulan, insentif UKM Selama 5 Bulan sebanyak 72 petugas .



3.4 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Penjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN (YA/TIDAK)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
1	Meningkatnya Layanan Kesehatan (SARAI SEHAT)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan pada layanan UKM dan UKP rujukan dalam kurun waktu	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat Kabupaten/kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya pelayanan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Ya



3.5 Permasalahan dan Solusi

Tidak ada

3.6 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Tidak ada

3.7 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tidak ada



UPTD Puskesmas Seba

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan di Kabupaten Sabu Raijua yang dilaksanakan oleh Puskesmas Seba Setda Kabupaten Sabu Raijua, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 4.446.853.385,-** dan realisasi sebesar **Rp. 3.927.464.121,- (88,32%)**. Adapun rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
I.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	4.446.853.385	3.927.464.121	88,32
1.	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	4.396.083.385	3.876.694.121	88,19
	1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	208.800.000	208.000.000	99,62
	2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	132.000.000	130.300.000	98,71
	3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	95.800.000	90.000.000	93,95
	4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	9.300.000	7.100.000	76,34
	5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	64.800.000	64.200.000	99,07
	6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	4.000.000	4.000.000	100,00
	7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.200.000	4.200.000	100,00
	8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	776.410.180	416.935.180	53,70
	9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olahraga	36.000.000	36.000.000	100
	10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10.600.000	10.600.000	100
	11) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	22.690.000	22.690.000	100
	12) Pengelolaan Surveilans Kesehatan	53.200.000	32.900.000	61,84
	13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Dan Napza	3.000.000	3.000.000	100



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
	14) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular	161.400.000	136.400.000	84,51
	15) Pengambilan Dan Pengiriman Spesimen Penyakit KLB Ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	2.100.000	2.100.000	100
	16) Operasional Pelayanan Puskesmas	419.461.000	349.347.608	83,28
	17) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2.354.522.205	2.321.121.333	98,58
	18) Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Dan Pemberian Obat Massal	2.000.000	2.000.000	100
	19) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	4.000.000	4.000.000	100
	20) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	31.800.000	31.800.000	100
II	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	29.170.000	29.170.000	100
	Pemeliharaan Rutin Dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	29.170.000	29.170.000	100
III	Kegiatan Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (Ukbn) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.600.000	21.600.000	100
	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	21.600.000	21.600.000	100
Jumlah		4.446.853.385	3.927.464.121	88,32

3.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran	Uraian Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Layanan Kesehatan Menuju (SARAI SEHAT)	Presentasi Penduduk Yang memanfaatkan Layanan UKM Tingkat Kabupaten/Kota	%	100	100	100



3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Alokasi Anggaran : Rp. 208.800.000
Realisasi : Rp. 208.000.000,- (99,62%)
Keluaran :
Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu hamil sebanyak 3 kegiatan yang terdiri dari Kegiatan (ANC, PNC dan Kelas Ibu Hamil) di 17 desa dan 1 kelurahan;
- 2) Pengelolaan Pelyanan Kesehatan Ibu Balita
Alokasi Anggaran : Rp. 132.000.000,-
Realisasi : Rp. 130.300.000,- (98,71%)
Keluaran :
Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu balita sebanyak 5 Kegiatan yang terdiri dari (Kunjungan lapangan bumil Kurang Energi Kronik, Anemia, Bumil risti, bayi Berat Lahir rendah, dan Bayi Balita dengan masalah Gizi, Pelayanan imunisasi rutin, Sweeping imunisasi rutin, Dofu Imunisasi, dan BIAS) di 17 desa 1 kelurahan;
- 3) Pengelolaan Pelayanan Usia Pendidikan Dasar
Alokasi Anggaran : Rp. 95.800.000,-
Realisasi : Rp. 90.000.000,- (93,95%)
Keluaran :
Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka Pengelolaan Pelayanan Usia Pendidikan Dasar sebanyak 6 kegiatan yang terdiri dari (Pelaksanaan Skrining bagi Remaja di Desa, Skrining Kesehtan Bagi Remaja Putri di Sekolah, TK/PAUD transport, transport SD, SMP dan SMA) di 28 sekolah dan 17 Desa 1 Kelurahan.
- 4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia produktif
Alokasi Anggaran : Rp. 9.300.000,-
Realisasi : Rp. 7.100.000,- (76,34%)
Keluaran :
Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sebanyak 4 kegiatan yang terdiri dari (Edukasi bimbingan perkawinan/konseling pranikah di Gereja, penyuluhan KB dan Kesehatan reproduksi, Penyuluhan Kespro, dan Penyuluhan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak) yang tersebar di desa dan sekolah..
- 5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
Alokasi Anggaran : Rp. 64.800.000,-
Realisasi : Rp. 64.200.000,- (99,07%)
Keluaran :
Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sebanyak 1 (Kegiatan Edukasi Lansia di Posyandu lansia (senam lansia/demensia, edukasi gizi dll) yang di lakukan sebanyak 12 kali.



- 6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
 Alokasi Anggaran : Rp. 4.000.000,-
 Realisasi : Rp. 4.000.000,- (100%)
 Keluaran :
 Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat sebanyak 10 kasus.
- 7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
 Alokasi Anggaran : Rp. 4.200.000,-
 Realisasi : Rp. 4.200.000,- (100%)
 Keluaran :
 Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis sebanyak 2 kegiatan yang terdiri dari (Investigasi kontak TBC dan Penemuan Kasus TB Mangkir) kegiatan di lakukan di 17 desa 1 Kelurahan
- 8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
 Alokasi Anggaran : Rp. 776.410.180,-
 Realisasi : Rp. 416.935.180,- (53,70%)
 Keluaran :
 Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat sebanyak 5 kegiatan yang terdiri dari (Rapat validasi dan evaluasi data Gikia, Pelaksanaan Kelas ibu balita, Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumil KEK, Pelatihan tim pelaksana dalam penyiapan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil kek dan bakita gizi kurang tingkat kab/kota dan puskesmas, Makanan dan Minuman Pelatihan tim pelaksana dalam penyiapan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil kek dan balita gizi kurang tingkat kab/kota dan puskesmas
- 9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga
 Alokasi Anggaran : Rp. 36.000.000,-
 Realisasi : Rp. 36.000.000,- (100%)
 Keluaran :
 Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga sebanyak 2 kegiatan yang terdiri dari (Pemeriksaan kesehatan pekerja pada kelompok kerja di Pos UKK dan transport kader), transport kader Pos UKK sebanyak 10 grup dengan jumlah kader 2 orang selama 12 kali
- 10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 Alokasi Anggaran : Rp. 10.600.000,-
 Realisasi : Rp. 10.600.000,- (100%)
 Keluaran :
 Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan sebanyak 3 kegiatan yang terdiri dari (Inspeksi kesehatan lingkungan untuk sarana air bersih (Jamban dan Rumah Sehat), Inspeksi kesehatan lingkungan untuk Tempat-Tempat Umum dan TPM dan Pengambilan dan Pemeriksaan E-Coli Bakteriologis pada Depot Air Minum (Damiu) di 17 Desa 1 Kelurahan;



- 11) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
 Alokasi Anggaran : Rp. 22.690.000,-
 Realisasi : Rp. 22.690.000,- (100%)
 Keluaran :
 Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan sebanyak 2 kegiatan yang terdiri dari (Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting, Aksi Bergizi, Bumil Sehat, Aktifkan Posyandu, dan Pembinaan kesehatan olahraga dan pengukuran kesehatan jasmani) yang tersebar di desa dan sekolah, Makan Dan Minum (snack) Kegiatan Aksi Bergizi dan Pembinaan kesehatan olahraga dan pengukuran kesehatan jasmani
- 12) Pengelolaan Surveilans Kesehatan
 Alokasi Anggaran : Rp. 53.200.000,-
 Realisasi : Rp. 32.900.000,- (61,84%)
 Keluaran :
 Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Sebanyak 3 kegiatan yang terdiri dari (Otopsi verbal kematian maternal, Otopsi verbal kematian neonatal dan Penyelidikan Epidemiologi (PE) penyakit menular) di 17 desa 1 kelurahan
- 13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
 Alokasi Anggaran : Rp. 3.000.000,-
 Realisasi : Rp. 3.000.000,- (100%)
 Keluaran :
 Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA sebanyak 1 kegiatan (Pelaksanaan Skrining Masalah Kesehatan Jiwa di sekolah) di 17 desa 1 kelurahan
- 14) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
 Alokasi Anggaran : Rp. 161.400.000,-
 Realisasi : Rp. 136.400.000,- (84,51%)
 Keluaran :
 Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular sebanyak 9 kegiatan terdiri dari (Posbindu, Skrining perilaku merokok pada usia 10-18 tahun di sekolah, Penemuan kasus hepatitis B(HBsAg reaktif) pada bayi usia 9-12 bulan, Pelacakan kasus kusta, Pemberian Obat Pencegah Masal (POPM) kecacingan untuk pencegahan penyakit di posyandu, Pemberian Obat Pencegah Masal (POPM) kecacingan untuk pencegahan penyakit di SD, Penyemprotan/pengasapan foging dan Pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) / Pelepasan liaran nyamuk Wolbachia) yang tersebar di Desa dan Sekolah
- 15) Pengambilan Dan Pengiriman Spesimen Penyakit potensi KLB ke laboratorium rujukan/nasional
 Alokasi Anggaran : Rp. 2.100.000,-
 Realisasi : Rp. 2.100.000,- (100%)
 Keluaran :
 Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka Kegiatan Pengambilan Dan Pengiriman Spesimen Penyakit potensi KLB ke laboratorium rujukan/nasional sebanyak 21 kasus



- 16) Operasional Pelayanan Puskesmas
 Alokasi Anggaran : Rp. 419.461.000,-
 Realisasi : Rp. 349.347.000,- (83,28%)
 Keluaran :
 Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas, insentif bagi tenaga Kesehatan puskesmas, makan, minum dan snack bagi peserta minlok puskesmas dan lintas sector, paket internet di 16 pustu, Transport peserta Kegiatan Minilok Puskesmas sebanyak 10 orang selama 12 kali
- 17) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
 Alokasi Anggaran : Rp. 2.354.522.205,-
 Realisasi : Rp. 2.321.121.333,- (98,58%)
 Keluaran :
 Tersedianya Honor bendahara barang selama 12 bulan, Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi sebanyak 11 item, bahan habis pakai sebanyak 1 paket, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebanyak 24 item, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebanyak 132.253 lembar, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebanyak 1 item, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor sebanyak 4 item, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik sebanyak 8 item, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas sebanyak 2 item, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (bahan pembersih) sebanyak 15 item, obat jkn seba sebanyak 1 paket, Jasa Tenaga Kesehatan sebanyak 1 paket, jasa sewa tukang sebanyak 1 paket, jasa pemasangan meteran sebanyak 1 paket, Jasa Tagihan Telepon, Jasa Air 250.000 Liter (50 Tengki), Jasa Penerangan Kantor, pulsa Wifi/internet berlangganan, Jasa pemeliharaan roda 4 sebanyak 4 unit, roda 2 sebanyak 4 unit, Jasa pemeliharaan ac sebanyak 5 unit Jasa laptop sebanyak 10 unit, alat penyimpanan (Brankas), CCTV, Papan Pengumuman, Meja 1/2 Biro dan Daun Pintu, alat pendingin (Kipas Angin), Dispenser sebanyak 2 unit, Bantal sebanyak 5 buah, Mesin Cuci sebanyak 1 buah, Spon sebanyak 7 buah, alat Kesehatan sebanyak 1 paket, Jasa personal computer sebanyak 3 unit, printer sebanyak 1 unit, laptop sebanyak 1 unit.
- 18) Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Dan Pemberian Obat Massal
 Alokasi Anggaran : Rp. 2.000.000,-
 Realisasi : Rp. 2.000.000,- (100%)
 Keluaran :
 Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Dan Pemberian Obat Massal sebanyak 20 kasus
- 19) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis
 Alokasi Anggaran : Rp. 4.000.000,-
 Realisasi : Rp. 4.000.000,- (100%)
 Keluaran :
 Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis di 17 Desa 1 Kelurahan



- 20) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
Alokasi Anggaran : Rp. 31.800.000,-
Realisasi : Rp. 31.800.000,- (100%)
Keluaran :

Tersedianya Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria Sebanyak 3 Kegiatan yang terdiri dari (Pemeriksaan massal kasus malaria (Mass Blood Survey), Survei Vektor/ Jentik Malaria dan DBD (Survei Reseptivitas) dan surveilans migrasi malaria di bandara/Pelabuhan)

2 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Kewenangan Daerah Kabupaten Kota

- 1 Pemeliharaan Rutin Dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Alokasi Anggaran : Rp. 29.170.000,-
Realisasi : Rp. 29.170.000,- (100%)
Keluaran :

Tersedianya Jasa Pemeliharaan Rutin Dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sebanyak 1 Paket

3. Kegiatan Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (Ukbn) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 1 Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (Ukbn)
Alokasi Anggaran : Rp. 21.600.000,-
Realisasi : Rp. 21.600.000,- (100%)
Keluaran :

Tersedianya Transport bagi kader TBC sebanyak 2 orang selama 6 Bulan



3.4 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN (YA/TIDAK)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
1	Meningkatnya Layanan Kesehatan (SARAI SEHAT)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan pada layanan UKM dan UKP rujukan dalam kurun waktu	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat Kabupaten/kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya pelayanan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Ya



3.5 Permasalahan dan Solusi

Tidak ada

3.6 Kebijakan Strategi yang ditetapkan

Tidak Ada

3.7 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun sebelumnya

Tidak Ada



3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Penyelenggara **Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** di Kabupaten Sabu Raijua dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sabu Raijua, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 112.939.325.622,-** dan realisasi sebesar **Rp. 97.616.546.141,- (86,43)**. Adapun rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.870.481.996	9.654.244.970	88,81
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.700.000	4.435.000	77,81
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.700.000	4.435.000	77,81
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.320.959.981	3.864.406.673	89,43
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.740.169.981	3.360.280.673	89,84
	2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	575.390.000	499.966.000	86,89
	3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.400.000	4.160.000	77,04
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.800.000	1.260.000	70,00
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.800.000	1.260.000	70,00
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	180.352.000	121.188.460	67,20
	1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	48.950.000	48.950.000	100,00
	2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	131.402.000	72.238.460	54,98
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.152.231.375	1.122.095.546	97,38
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.650.000	5.866.000	88,21
	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	348.083.375	347.245.375	99,76
	3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.680.000	7.980.000	58,33
	4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.900.000	22.900.000	100,00
	5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	760.918.000	738.104.171	97,00



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.990.383.140	3.561.824.956	89,26
	1) Pengadaan Mebel	26.408.640	26.408.640	100,00
	2) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.963.974.500	3.535.416.316	89,19
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74.472.500	46.612.000	62,59
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	4.979.000	99,58
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.500.000	31.400.000	53,68
	3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.480.000	7.753.000	91,43
	4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.492.500	2.480.000	99,50
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.144.583.000	932.422.335	81,46
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	512.438.000	300.622.335	58,67
	2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	632.145.000	631.800.000	99,95
II.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	6.240.120.000	6.084.355.000	97,50
1.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.030.450.000	5.024.735.000	99,89
	1) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	150.000.000	145.820.000	97,21
	2) Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung air Lainnya	4.530.450.000	4.529.015.000	99,97
	3) Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	350.000.000	349.900.000	99,97
2.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.209.670.000	1.059.620.000	87,60
	1) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	200.000.000	58.950.000	29,48



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
	2) Pembangunan Bendung Irigasi	142.770.000	138.470.000	96,99
	3) Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	100.000.000	99.950.000	99,95
	4) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	526.900.000	526.000.000	99,83
	5) Operasional Unit Pengelola Irigasi	240.000.000	236.250.000	98,44
III.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	6.156.613.590	5.385.033.840	87,47
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	6.156.613.590	5.385.033.840	87,47
	1) Pembangunan SPAM jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4.894.314.700	4.491.945.340	91,78
	2) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	37.500.000	-	0,00
	3) Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	60.437.400	56.362.500	93,26
	4) Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	717.761.490	395.546.000	55,11
	5) Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	446.600.000	441.180.000	98,79
IV.	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	90.600.000	-	0,00
1.	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	90.600.000	-	0,00
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	90.600.000	-	0,00
V.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.365.420.000	3.346.430.000	99,44
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.365.420.000	3.346.430.000	99,44
	1) Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	3.202.340.000	3.202.130.000	99,99
	2) Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	163.080.000	144.300.000	88,48



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
VI.	Program Pengembangan Pemukiman	553.890.000	526.537.000	95,06
1.	Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	553.890.000	526.537.000	95,06
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	553.890.000	526.537.000	95,06
VII.	Program penataan bangunan gedung	121.209.600	51.548.000	42,53
1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian izin Mendirikan Bangunan(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	19.344.771.821	17.342.059.962	89,65
	1) Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	92.792.000	26.738.000	28,81
	2) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	19.420.000	17.310.000	89,13
	3) Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	8.997.600	7.500.000	83,36
VIII.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	16.750.000	10.840.000	64,72
1.	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	16.750.000	10.840.000	64,72
	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	16.750.000	10.840.000	64,72
IX	Program Penyelenggaraan Jalan	85.365.122.436	72.407.837.331	84,82
1.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	85.365.122.436	72.407.837.331	84,82
	1) Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.227.250.000	1.177.300.000	95,93



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
	2) Pembangunan Jalan	30.799.469.795	24.290.707.230	78,87
	3) Rekonstruksi Jalan	35.845.646.641	30.773.804.101	85,85
	4) Pembangunan Jembatan	8.551.800.000	7.452.750.000	87,15
	5) Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1.082.596.000	910.556.000	84,11
	6) Rekonstruksi Jalan Strategis Desa	7.858.360.000	7.802.720.000	99,29
X.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	159.118.000	149.720.000	94,09
1.	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota	26.600.000	22.400.000	84,21
	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	26.600.000	22.400.000	84,21
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	132.518.000	127.320.000	96,08
	Sistem Informasi Penataan Ruang	132.518.000	127.320.000	96,08
Jumlah		113.228.145.622	97.794.942.141	86,37



3.2. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	%	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		I	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)			
				1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	RP. 5.030.450.000 Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	RP. 5.024.735.000 Meningkatnya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	99,89
				a	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	150.000.000 Tersedianya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air	145.820.000 Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	97,21
				b	Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung air Lainnya	4.530.450.000 Terbangunnya Embung dan Bangunan Penampung air Lainnya	4.529.015.000 Jumlah Embung dan Bangunan Penampung air Lainnya yang di bangun	99,97
				c	Rehabilitasi Bendungan	350.000.000 Terehabilitasinya Embung dan	349.900.000 Jumlah Embung dan Bangunan	99,97
				2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya	Rp. 1.209.670.000 Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah	Rp. 1.209.670.000 Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah	87,60
				a	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi	200.000.000 Tersedianya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	58.950.000 Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi	29,48
b	Pembangunan Bendung Irigasi	142.770.000 Terlaksananya Pembangunan Bendung Irigasi	138.470.000 Jumlah Pembangunan Bendung Irigasi	96,99				
c	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	100.000.000 Terlaksananya Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	99.950.000 Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatkan	99,95				



				d	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	526.900.000 Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	526.000.000 Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan yang di rehabilitasi	99,83
				e	Operasional Unit Pengelola Irigasi	240.000.000 Terlaksananya Operasional Unit Pengelola Irigasi	236.250.000 Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang dioperasikan	98,44
				II	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
				1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	6.156.613.590 Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	5.385.033.840 Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	87,47
				a	Pembangunan SPAM jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4.894.314.700 Terlaksananya Pembangunan SPAM jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4.491.945.340 Jumlah SPAM jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang dibangun	91,78
				b	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	60.437.400 Terlaksananya Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	56.362.500 Jumlah Kerja Sama SPAM yang difasilitasi	93,26
				c	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	717.761.490 Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	395.546.000 Jumlah SPAM di Kawasan Perdesaan yang beroperasi dan dipelihara	55,11
				d	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	446.600.000 Terlaksananya Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	441.180.000 Jumlah Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang dibangun	98,79
				III	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			



				1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.365.420.000 Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.346.430.000 Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	99,44
				a	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	3.202.340.000 Terlaksananya pembangunan / Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	3.202.130.000 Jumlah Sub Sistem Pengolahan Setempat yang di bangun	99,99
				b	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	163.080.000 Terlaksananya Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	144.300.000 Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	88,48
				IV	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN			
				1	Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	553.890.000 Terlaksananya Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	526.537.000 Meningkatnya Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	95,06
				a	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	553.890.000 Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	526.537.000 Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten yang dibangun	95,06
				V	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			



				1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	121.209.600 Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	51.548.000 Meningkatnya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten, Pemberian izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	42,53
				a	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	92.792.000 Terlaksananya Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	26.738.000 Jumlah Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	28,81
				b	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	19.420.000 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	17.310.000 Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten yang dievaluasi	89,13
				C	Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	8.997.600 Terlaksananya Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	7.500.000 Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	83,36
				VI	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
				1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	16.750.000 Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	10.840.000 Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	64,72



			a	Monitoring Penataan / Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	16.750.000 Terlaksananya Monitoring Penataan / Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	10.840.000 Jumlah Penataan / Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan yang di monitoring	64,72
			VII	Program Penyelenggaraan Jalan			
			1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	85.365.122.436 Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	72.407.837.331 Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	84,82
			a	<i>Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan</i>	1.227.250.000 Tersedianya Dokumen <i>Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan</i>	1.177.300.000 Jumlah Dokumen <i>Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan</i>	95,93
			b	<i>Pembangunan Jalan</i>	30.799.469.795 Terlaksananya <i>Pembangunan Jalan</i>	24.290.707.230 Panjang Ruas Jalan yang dibangun	78,87
			c	<i>Rekonstruksi Jalan</i>	35.845.646.641 Terlaksananya <i>Rekonstruksi Ruas Jalan</i>	30.773.804.101 <i>Panjang Ruas Jalan yang direkonstruksi</i>	85,85
			d	<i>Pembangunan Jembatan</i>	8.551.800.000 Terlaksananya <i>Pembangunan Jembatan</i>	7.452.750.000 Jumlah Jembatan yang dibangun	87,15
			e	<i>Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan / Jembatan</i>	1.082.596.000 Terlaksananya <i>Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan</i>	910.556.000 Jumlah Jalan/Jembatan yang di awasi	84,11
			f	<i>Rekonstruksi Jalan Strategis Desa</i>	7.858.360.000 Terlaksananya <i>Rekonstruksi Jalan Strategis Desa</i>	7.802.720.000 Jumlah Jalan Strategis Desa yang di Rekonstruksi	99,29
			VIII	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			



				1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	26.600.000 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	22.400.000 Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten	84,21
				a	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	26.600.000 Terlaksananya Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	22.400.000 Jumlah Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	84,21
				2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	132.518.000 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	127.320.000 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten	96,08
				a	Sistem Informasi Penataan Ruang	132.518.000 Tersedianya Sistem Informasi Penataan Ruang	127.320.000 Jumlah Sistem Informasi Penataan Ruang	96,08



3.3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Alokasi Anggaran : Rp. 5.700.000,-

Realisasi : Rp. 4.435.000, - (77,81 %)

Keluaran :

Tersedianya makan minum rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah selama 12 Bulan

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Alokasi Anggaran : Rp. 3.740.169.981,-

Realisasi : Rp. 3.360.280.673, - (89,84 %)

Keluaran :

Tersedianya gaji dan tunjangan selama 12 Bulan

2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Alokasi Anggaran : Rp. 575.390.000,-

Realisasi : Rp. 499.966.000, - (86,89 %)

Keluaran :

Terbayarnya honorarium Pengguna Anggaran selama 12 Bulan bagi 1 orang, honorarium bendahara pengeluaran selama 1 tahun bagi 1 orang, honorarium Pengurus barang selama 12 Bulan bagi 1 orang, honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan selama 12 Bulan bagi 1 orang, honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selama 12 Bulan bagi 5 orang, honorarium Admin Sirup selama 1 tahun bagi 1 orang, honorarium Pejabat Pembuat Komitmen selama 12 Bulan bagi 5 orang, honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa selama 12 Bulan bagi 2 orang.

3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Alokasi Anggaran : Rp. 5.400.000,-

Realisasi : Rp. 4.160.000, - (77,04 %)

Keluaran :

Tersedianya makan minum rapat Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD selama 12 bulan

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Alokasi Anggaran : Rp. 1.800.000,-

Realisasi : Rp. 1.260.000, - (70,00 %)

Keluaran :

Tersedianya makan minum rapat Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD selama 12 bulan

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Alokasi Anggaran : Rp. 48.950.000,-

Realisasi : Rp. 48.950.000, - (100 %)

Keluaran :

Tersedianya pakaian dinas beserta atribut bagi ASN sebanyak 37 stel



- 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Alokasi Anggaran : Rp. 131.402.000,-
Realisasi : Rp. 72.238.460, - (54,98 %)
Keluaran :
Tersedianya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan untuk 12 Orang

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 6.650.000,-
Realisasi : Rp. 5.866.000, - (88,21 %)
Keluaran :
Tersedianya alat listrik dan elektornik sebanyak 12 jenis
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 348.083.375,-
Realisasi : Rp. 347.245.375, - (99,76 %)
Keluaran :
Tersedianya alat tulis kantor sebanyak 45 jenis, Lemari arsip sebanyak 2 buah, Gorden 8 paket, 6 jenis alat laboratorium, 3 unit PC, 3 unit laptop dan 5 unit Printer.
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 13.680.000,-
Realisasi : Rp. 7.980.000, - (58,33 %)
Tersedianya kebutuhan makan minum rapat selama 1 tahun untuk 12 kali rapat 38 orang dalam rangka pelaksanaan tugas.
- 4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Alokasi Anggaran : Rp. 22.900.000,-
Realisasi : Rp. 22.900.000, - (100 %)
Keluaran :
Tersedianya barang cetak dan penggandaan, berupa Cetak 200 buku dan penggandaan sebanyak 53.000 Lembar
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Alokasi Anggaran : Rp. 760.918.000,-
Realisasi : Rp. 738.104.171 (97,00%)
Keluaran :
- Tersedianyan Perjalanan Dinas Ke Jakarta Dalam Rangka Konsultasi, Asistensi, Sinkronasi dan Harmonisasi DAK Bidang Jalan dan Jembatan, Perjalanan Dinas Ke Jakarta Dalam Rangka Konsultasi, Asistensi, Sinkronasi dan Harmonisasi DAK Bidang Cipta Karya, Perjalanan Dinas Ke Jakarta Dalam Rangka Konsultasi, Asistensi, Sinkronasi dan Harmonisasi DAK Bidang Sumber Daya Air, Perjalanan Dinas Ke Jakarta Dalam Rangka Konsultasi Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, Perjalanan Dinas ke Jakarta Dalam Rangka Rapat Evaluasi DAK Air Minum dan Sanitasi Bidang Cipta Karya, Perjalanan Dinas ke Kupang dalam Rangka Konsultasi, Asistensi, Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan, Perjalanan Dinas ke Kupang dalam Rangka Konsultasi, Asistensi, Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Bidang Cipta Karya, Perjalanan Dinas ke Kupang dalam Rangka Konsultasi, Asistensi, Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Bidang Sanitasi, Perjalanan Dinas ke Kupang dalam Rangka Konsultasi, Asistensi, Sinkronisasi dan Harmonisasi



- DAK Bidang Sumber Daya Air, Perjalanan Dinas ke Kupang dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi bidang Tata Ruang dan Pertanahan
- Terlaksananya kegiatan Musrenbang di 6 Kecamatan.
 - Terlaksananya kegiatan rapat lengkap pamong praja di 6 Kecamatan

6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Pengadaan

Mebel

Alokasi Anggaran : Rp. 26.408.640,-

Realisasi : Rp. 26.408.640, - (100 %)

Keluaran :

Tersedianya lemari arsip jati sebanyak 3 Buah dan 2 buah Meja Biro.

2) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Alokasi Anggaran : Rp. 3.963.974.500,-

Realisasi : Rp. 3.535.416.316, - (89,18 %)

Keluaran :

Terlaksananya Pembangunan 3 unit Gedung kantor, 2 dokumen perencanaan gedung kantor dan pengawasan 3 unit gedung kantor.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Alokasi Anggaran : Rp. 5.000.000,-

Realisasi : Rp. 4.979.000, - (99,58 %)

Keluaran :

Tersedianya materai Rp.10.000,- sebanyak 500 lembar

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Alokasi Anggaran : Rp. 58.500.000,-

Realisasi : Rp. 31.400.000, - (53,68 %)

Keluaran :

Tersedianya air sebanyak 525.000 Liter (105 tanki) dan Penerangan sebanyak 12 Bulan

3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 8.080.000,-

Realisasi : Rp. 7.970.000, - (98,64 %)

Keluaran :

Tersedianya Jasa Pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa service AC 4 unit, printer 5 unit, service laptop 3 unit.

4) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 8.480.000,-

Realisasi : Rp. 7.753.000, - (91,43 %)

Keluaran :

Terlaksananya Jasa Pemeliharaan 5 unit laptop dan 7 buah printer

5) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran

Realisasi Realisasi

Keluaran Keluaran

Tersedianya alat-alat kebersihan Sebanyak 15 jenis.



- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 Alokasi Anggaran : Rp. 512.438.000,-
 Realisasi : Rp. 300.622.335,- (58,57 %)
 Keluaran :
 Terlaksananya Jasa pemeliharaan kendaraan dinas dan alat berat roda 4 sebanyak 3 unit, roda 6 sebanyak 3 unit dan roda 2 sebanyak 21 unit, alat berat 1 unit excavator dan 1 unit buldozer
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 Alokasi Anggaran : Rp. 632.145.000,-
 Realisasi : Rp. 631.800.000,- (99,95 %)
 Keluaran :
 Tersedianya Jasa Pemeliharaan Rehabilitasi 45 unit lampu Jalan area civic center
- 9. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**
- 1) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
 Alokasi Anggaran : Rp. 150.000.000,-
 Realisasi : Rp. 145.820.000,- (97,21 %)
 Keluaran :
 Tersedianya 1 Dokumen Perencanaan Embung
 - 2) Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung air Lainnya
 Alokasi Anggaran : Rp. 4.530.450.000,-
 Realisasi : Rp. 4.529.015.000,- (99,97 %)
 Keluaran :
 Terlaksananya Pembangunan 3 Unit Embung
 - 3) Rehabilitasi Bendungan
 Alokasi Anggaran : Rp. 350.000.000,-
 Realisasi : Rp. 349.900.000,- (99,97 %)
 Keluaran :
 Tersedianya Jasa Pemeliharaan 2 Unit bendung irigasi
- 10. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**
- 1) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
 Alokasi Anggaran : Rp. 200.000.000,-
 Realisasi : Rp. 58.950.000,- (29,48 %)
 Keluaran :
 Tersedianya 1 Dokumen Perencanaan bendung dan jaringan irigasi
 - 2) Pembangunan Bendung Irigasi
 Alokasi Anggaran : Rp. 142.770.000,-
 Realisasi : Rp. 138.470.000,- (96,99 %)
 Keluaran :
 Tersedianya Jasa pengawasan 2 Unit bendung dan 3 buah jaringan irigasi



- 3) Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
Alokasi Anggaran : Rp. 100.000.000,-
Realisasi : Rp. 99.950.000, - (99,95 %)
Keluaran :
Terlaksananya Jasa Peningkatan 1 Unit jaringan irigasi Permukaan
- 4) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
Alokasi Anggaran : Rp. 526.900.000,-
Realisasi : Rp. 526.000.000, - (99,83 %)
Keluaran :
Terlaksananya Rehabilitasi 1 Unit jaringan irigasi Permukaan
- 5) Operasional Unit Pengelola Irigasi
Alokasi Anggaran : Rp. 240.000.000,-
Realisasi : Rp. 236.250.000, - (98,44 %)
Keluaran :
Tersedianya Honor Operasional Unit Pengelola Irigasi selama 12 bulan untuk 16 orang

11. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pembangunan SPAM jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Alokasi Anggaran : Rp. 4.894.314.700,-
Realisasi : Rp. 4.491.945.340, - (91,78 %)
Keluaran :
Terlaksananya Pembangunan 6 unit Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- 2) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat
Alokasi Anggaran : Rp. 37.500.000,-
Realisasi : Rp. 0, - (0 %)
Keluaran :
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan untuk 58 kelompok masyarakat yang menyelenggarakan SPAM
- 3) Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM
Alokasi Anggaran : Rp. 60.437.400,-
Realisasi : Rp. 56.362.500, - (93,26 %)
Keluaran :
Tersedianya 1 unit fasilitasi kerja sama SPAM
- 4) Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan
Alokasi Anggaran : Rp. 717.761.490,-
Realisasi : Rp. 395.546.000, - (55,11 %)
Keluaran :
Terlaksananya operasi dan pemeliharaan 9 unit SPAM berbasis masyarakat
- 5) Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Alokasi Anggaran : Rp. 90.600.000,-
Realisasi : Rp.0, - (0 %)
Keluaran :
Terlayanimya 50 Rumah Tangga melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan



- 12. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**
- 1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
 Alokasi : Rp. 4.894.314.700,-
 Anggaran
 Realisasi : Rp. 4.491.945.340, - (91,78 %)
 Keluaran :
 Tersedianya 1 dokumen perencanaan, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten
- 13. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**
- 1) Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
 Alokasi Anggaran : Rp. 3.202.340.000,-
 Realisasi : Rp. 3.202.130.000, - (99,99 %)
 Keluaran :
 Tersedianya tangki septik tank individual untuk 356 rumah tangga
- 2) Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
 Alokasi Anggaran : Rp. 163.080.000,-
 Realisasi : Rp. 144.300.000, - (88,48 %)
 Keluaran :
 Terlayannya 30 Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
- 14. Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**
- 1) Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 Alokasi Anggaran : Rp. 553.890.000,-
 Realisasi : Rp. 526.537.000, - (95,06 %)
 Keluaran :
 Terlaksananya Pembangunan 2 unit Sistem Jaringan Sarana dan Prasarana Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten
- 15. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**
- 1) Penyelenggaraan Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendaftaran Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG
 Alokasi Anggaran : Rp. 92.792.000,-
 Realisasi : Rp. 26.738.000,- (28,81%)
 Keluaran :
 Terlaksananya Penyelenggaraan Sosialisasi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
- 2) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
 Alokasi Anggaran : Rp. 19.420.000,-
 Realisasi : Rp. 17.310.000,- (89,13%)



- Keluaran :
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung
- 3) Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung Oleh Penilik Bangunan
- Alokasi Anggaran : Rp. 8.997.600,-
Realisasi : Rp. 7.500.000,- (83,36%)
Keluaran :
Terlaksananya Jumlah Bangunan Gedung yang di lakukan oleh Penilik Bangunan 15 unit

16. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
- Alokasi Anggaran : Rp. 16.750.000,-
Realisasi : Rp. 10.840.000,- (64,72%)
Keluaran :
Terlaksananya Monitoring Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kab/Kota

17. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

- 1) Penyusunan Rencana,Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
- Alokasi Anggaran : Rp. 1.227.250.000
Realisasi : Rp. 1.177.300.000 (95,93%)
Keluaran :
Tersedianya 5 dokumen Rencana, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
- 2) Pembangunan Jalan
- Alokasi Anggaran : 30.799.469.795
Realisasi : 24.290.707.230 (78,87)
Keluaran :
Terlaksananya Pembangunan jalan 15.1 KM pada ruas jalan kabupaten
- 3) Rekonstruksi Jalan
- Alokasi Anggaran : 35.845.646.641
Realisasi : 30.773.804.101 (85,85)
Keluaran :
Terlaksananya Rekonstruksi jalan 40.64 KM pada ruas jalan kabupaten
- 4) Pembangunan Jembatan
- Alokasi Anggaran : 8.551.800.000
Realisasi : 7.452.750.000 (87,15)
Keluaran :
Terlaksananya pembangunan 1 unit jembatan
- 5) Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
- Alokasi Anggaran : Rp. 1.082.596.000
Realisasi : Rp. 910.556.000 (84,11)



Keluaran :

Terlaksananya Jasa Pengawasan jalan pada 19 ruas jalan dan 1 unit jembatan

6) Rekonstruksi Jalan Strategis Desa

Alokasi Anggaran : Rp. 7.858.360.000

Realisasi : Rp. 7.802.720.000 (99,29)

Keluaran :

Terlaksananya pembangunan 4 KM rekonstruksi jalan strategis desa

18. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota

1) Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

Alokasi Anggaran : Rp. 26.600.000

Realisasi : Rp. 22.400.000 (84,21%)

Keluaran :

Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kab/kota

19. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

1) Sistem Informasi Penataan Ruang

Alokasi Anggaran : Rp. 132.518.000

Realisasi : Rp. 127.320.000 (96,08%)

Keluaran :

Tersedianya kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kab/kota, (Study Delinasi Wilayah Perkotaan Seba)



3.4. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN (YA/TIDAK)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
1	Menjamin Ketercukupan Pangan, Air dan Energi Menuju Sarai Cukup	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Meningkatnya Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi (62,95%)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ya
					Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ya



2		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan	Meningkatnya Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Ya
3	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Terlaksananya Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Tersedianya Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Ya
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga bersanitasi	Meningkatnya Persentase rumah tangga bersanitasi	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Ya



4		Program Pengembangan Pemukiman	Ruang terbuka hijau persatuan wilayah	Meningkatnya Ruang terbuka hijau persatuan wilayah	Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Ya
5		Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan IMB	Meningkatnya Rasio Kepatuhan IMB	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian izin Mendirikan Bangunan(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian izin Mendirikan Bangunan(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Tersedianya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian izin Mendirikan Bangunan(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Ya
6		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Terlaksananya Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Tersedianya Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Ya
7		Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Meningkatnya Kemantapan Jalan Kabupaten	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota	Tersedianya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota	Ya



8		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tersedianya Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Ya
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Ya



3.5. Permasalahan dan Solusi

➤ Permasalahan :

1. Belum maksimalnya penyerapan anggaran pada sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan disebabkan karena pemanfatannya disesuaikan dengan kebutuhan rill.
2. Belum maksimalnya penyerapan anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor disebabkan karena pemanfatannya disesuaikan dengan kebutuhan rill.
3. Belum maksimalnya penyerapan anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disebabkan karena pemanfatannya disesuaikan dengan kebutuhan rill.
4. Belum maksimalnya penyerapan anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan disebabkan karena pemanfatannya disesuaikan dengan kebutuhan rill.
5. Belum maksimalnya penyerapan anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan disebabkan karena pemanfatannya disesuaikan dengan kebutuhan rill dan adanya perubahan harga satuan barang asesoris perpipaan.

➤ Solusi :

1. Lebih cermat dalam menyusun perencanaan penganggaran dengan memperhatikan rencana kebutuhan.
2. Piutang terhadap pekerjaan dimaksud akan dibayarkan pada anggaran perubahan tahun 2024.
3. Pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan.

3.6. Kebijakan Strategis Yang ditetapkan

Tidak ada

3.7. Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1.	Pansus memberikan Catatan bahwa semangat Dinas PUPR dalam melakukan pembangunan ruas ruas jalan di Kabupaten Sabu Raijua dalam rangka membuka wilayah-wilayah terisolir patut 12 diapresiasi. Hanya saja masih terdapat beberapa pekerjaan ruas jalan yang kualitasnya kurang baik serta tidak dilengkapi	Pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sabu Raijua menindak lanjuti rekomendasi ini dengan melakukan pengawasan secara menyeluruh yang ketat dengan	Agar tercapainya asas manfaat dari pekerjaan tersebut sesuai dengan kualitas ,kuantitas sesuai rujukan spesifikasi yang ada sehingga umur ekonomis



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
	<p>dengan bangunan pelengkap jalan yang memadai sebagai infrastruktur pendukung. Banyak ruas jalan yang baru saja selesai dikerjakan pada tahun anggaran 2022 sudah rusak kembali. Karena itu, Pansus memberi Rekomendasi agar Bupati Sabu Raijua sungguh-sungguh melakukan sistem pengawasan teknis yang ketat dan menyeluruh secara bertahap dan berkelanjutan terhadap setiap kegiatan pembangunan jalan. Dimulai dari tahap perencanaan, tahap pengadaan barang/jasa, tahap pekerjaan fisik sampai dengan masa pemeliharaan. Untuk memastikan terjaminnya kualitas dan mutu pekerjaan di lapangan, Pansus juga merekomendasikan agar Bupati Sabu Raijua lebih rajin lagi turun ke lapangan dalam rangka melakukan sidak terhadap pekerjaan-pekerjaan fisik yang sementara berjalan daripada sekedar menghadiri kegiatan-kegiatan seremonial belaka;</p>	<p>memperhatikan ketepatan kualitas/mutu, kuantitas dan waktu</p>	<p>dari proyek – proyek yang ada dapat bertahan sesuai umur rencana.</p>
2.	<p>Pansus memberikan Catatan bahwa sistem drainase jalan (saluran primer, sekunder, dan tersier) terlihat belum terintegrasi dengan baik dan intensitas pemeliharaan drainase terhadap tingginya endapan atau sumbatan material yang mengakibatkan terjadinya genangan air pada badan-badan jalan di setiap musim penghujan bahkan dengan mudah air meluap dari saluran ke badan-badan jalan sehingga mengakibatkan jalan cepat rusak, terganggunya arus lalu lintas kendaraan dan dampak-dampak buruk lainnya. Untuk itu Pansus memberi Rekomendasi agar Bupati Sabu Raijua memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk melakukan perencanaan secara lebih cermat dan terintegrasi soal bangunan-bangunan pelengkap jalan seperti talud, saluran drainase, tembok penahan jalan, gorong-gorong, dll serta memastikan tersedianya alokasi anggaran yang cukup secara periodik untuk melakukan pemeliharaan terhadap ruas-ruas jalan yang sudah terbangun termasuk pemeliharaan terhadap bangunan-bangunan pelengkap jalan</p>	<p>Pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sabu Raijua menindak lanjuti rekomendasi ini dengan berkomitmen untuk melakukan perencanaan secara cermat dan terintegrasi terkait Pembangunan infrastruktur terutama pada Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dikabupaten Sabu Raijua sesuai dengan anggaran yang tersedia</p>	<p>Agar bangunan yang sudah terbangun terjaga kualitas dan umur pakainya.</p>



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
3.	<p>Pansus memberikan Catatan bahwa apabila perencanaan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak dibuat dalam sistem yang terintegrasi sejak dini maka dikhawatirkan bahwa akan menimbulkan cara pandang yang parsial atau sendiri-sendiri. Hal ini akan berdampak buruk pada kualitas hasil-hasil pembangunan dan penataan ruang secara menyeluruh untuk jangka panjang. Karena itu, perlu adanya kebijakan, regulasi dan langkah – langkah strategis sejak dini melalui koordinasi lintas sektor secara intensif antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, BAPPEDA, Dinas Kominfo, Bagian Hukum serta instansi pemerintah terkait lainnya, dalam rangka untuk mulai melakukan penataan perencanaan pembangunan secara terintegrasi. Untuk itu Pansus merekomendasikan agar Bupati Sabu Raijua membuat kebijakan untuk memastikan tersedianya database perencanaan yang terintegrasi dengan komponen lainnya sebagai basis perencanaan jangka panjang. Database dimaksud seperti misalnya: perencanaan ruas jalan yang terintegrasi dengan sistem informasi geografik, sistem lampu penerangan jalan umum, sistem pengkabelan, sistem perpipaan air minum, sistem drainase, trotoar dan lain-lainnya</p>	<p>Pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sabu Raijua menindak lanjuti rekomendasi ini dengan berkomitemen untuk berkoordinasi dan melibatkan stakeholder terkait dalam melakukan perencanaan dan penataan infrastruktur jaringan yang terintegrasi di Kabupaten Sabu Raijua</p>	<p>Dengan adanya koordinasi antar stakholder dan penataan jaringan yang sudah ada dapat terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan</p>
4.	<p>Pansus memberikan Catatan sehubungan dengan banyaknya lampu penerangan jalan umum yang mati. Untuk itu Pansus merekomendasikan agar Bupati Sabu Raijua segera memerintahkan OPD terkait urusan tersebut untuk melakukan pembenahan. Khusus bagi lampu penerangan jalan umum yang masih menjadi kewenangan pemerintah Provinsi NTT, agar Bupati Sabu Raijua memerintahkan OPD terkait untuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi agar bisa segera dilakukan pembenahan-pembenahan</p>	<p>Pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sabu Raijua telah minindaklanjuti rekomnedasi DPRD dengan melakukan rehabilitasi/pemeliharaan lampu penerangan jalan umum yang rusak akibat badai siklon tropis seroja pada tahun 2021 menggunakan Dana Insentif Daerah tahun 2023 sedangkan lampu jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua melalui Dinas Pekerjaan Umum dan</p>	<p>Manfaat dan fungsi sudah terlaksana</p>

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		Penataan Ruang Kabupaten Sabu Raijua telah berkoordinasi dengan instansi teknis yang bertanggung jawab.	
5.	Pansus memberikan Catatan bahwa seiring dengan perkembangan kota dan kebutuhan masyarakat pengguna jalan maka keberadaan trotoar pada beberapa ruas jalan mulai terasa sangat dibutuhkan. Karena itu, Pansus merekomendasikan agar Bupati Sabu Raijua melalui OPD teknis terkait intensif melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Pusat terkait dengan Peningkatan Jalan dan Penataan Trotoar yang menjadi kewenangan Provinsi dan Pemerintah Pusat	Pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sabu Raijua telah minindaklanjuti rekomendasi DPRD dengan telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Pusat	Agar Pembangunan Peningkatan Jalan dan Penataan Trotoar dapat dilaksanakan sesuai kewenangan masing-masing

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Penyelenggara **Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan** di Kabupaten Sabu Raijua dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sabu Raijua, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.3.204.108.387,-** dan realisasi sebesar **Rp. 2.945.337.156,- (91,92 %)**. Adapun rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.401.102.987	2.146.805.806	91.92
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.706.523.487	1.473.889.251	85.37
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.601.518.487	1.373.125.251	85.74
	2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	105.014.000	100.766.000	95.95
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.350.000	20.350.000	100
	1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	20.350.000	20.350.000	100
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	331.687.100	312.484.355	94.21
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	762.500	761.000	99,80
	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.024.600	29.020.000	99,98
	3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.420.000	3.420.000	100
	4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.250.000	8.247.000	99,96
	5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	290.230.000	271.036.355	93,39
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.478.000	38.995.000	98,78
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	2.990.000	99,67
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.400.000	25.970.000	98,37
	3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	7.790.000	7.770.000	99,74
	4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.288.000	2.265.000	98,99
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	303.055.400	301.087.200	99,35
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.360.000	65.327.200	99,95
	2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	237.695.400	235.760.000	99,19
II.	Program Pengembangan Perumahan	341.094.400	340.167.800	99.73



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
1.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	23.256.000	22.295.000	98.71
	1) Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	12.235.000	12.235.000	100
	2) Pendataan dan Verifikasi Penerima Bagi Korban Bencana Alam Atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	11.030.000	10.730.000	97,28
2.	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau relokasi Program Kabupaten/Kota	24.530.000	23.908.000	94.90
	1) Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	12.265.000	12.265.000	100
	2) Koordinasi untuk Menyepakati Penerima Dan Jenis Pelayanan	12.265.000	11.640.000	94.90
3.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	293.299.400	293.297.800	100
	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	293.299.400	293.297.800	100
III.	Program Kawasan Permukiman	102.111.000	98.753.550	96.71
1.	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan pengembanagan Kawasan Permukiman Kumuh	102.111.000	98.753.550	96.71
		102.111.000	98.753.550	96.71
IV.	Program Peningkatan Prasarana Dan Sarana Utilitas Umum (PSU)	359.800.000	359.610.000	99.95
1.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	359.800.000	359.610.000	99.95
	Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum Untuk Menunjang fungsi Hunian	359.800.000	359.610.000	99.95
Jumlah		3.204.108.387	2.945.337.156	91,92



3.2. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No.	Arah kebijakan	Program	Sasaran Indikator	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup	Program Kawasan Permukiman	Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembanagan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh		Penerbitan Izin dan Pengembangan Kawasan Permukiman			
				√	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jenis	1 Dok	1 Dok
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni			
				√	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	Rumah	0	0



No.	Arah kebijakan	Program	Sasaran Indikator	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				
				√ Jumlah Dokumen RP3KP yang tersusun atau terreview serta terlegalisasi	Jenis	0	0	0
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Urusan Penyelenggaraan PSU	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian				
				√ Jumlah unit Instalasi Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang di Bangun	Paket	12 Unit	12 Unit	100



3.3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan
Alokasi Anggaran : Rp. 1.601.518487,-
Realisasi : Rp. 1.373.123.251,- (85,74 %)
Keluaran : -
Tersedianya Gaji dan Tunjangan 14 Orang ASN
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Alokasi Anggaran : Rp. 105.014.000,-
Realisasi : Rp. 100.766.000,- (95.95 %)
Keluaran :
Terbayarnya Honor bagi 10 Orang Tenaga Administrasi Keuangan

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Alokasi Anggaran : Rp. 20.350.000,-
Realisasi : Rp. 20.350.000,- (100 %)
Keluaran :
Tersedianya Pakaian dinas beserta atributnya untuk es. III sebanyak 3 stell dan es.IV serta staf sebanyak 11 stell

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 762.500,-
Realisasi : Rp. 761.000 (99,80 %)
Keluaran :
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (kabel NYM 3 x 2,5 mm² dan Saklar Ganda)
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 29.024.600,-
Realisasi : Rp. 29.020.000,- (99,98%)
Keluaran :
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Amplop besar biasa coklat 1 pak, Amplop Putih persegi lenen 4 pak, Balpoint Ball Liner 1 lusin, Balpoint Milton 3 lusin, ballpoint pentel 5 buah, Buku agenda keluar masuk 2 buah, Buku ekspedisi 200 lembar 2 buah, Buku folio isi 50 lembar 2 buah, buku kwitansi 100 lembar 3 buah, Catridge hitam 5 buah, Catridge warna 5 buah, Flakban 3 buah, Hekter Besar 5 dos, Hekter kecil 3 dos, Isi hekter besar 5 Dos, Isi pisau cutter besar 3 buah, Isolasi Bening 3 Roll, Isolasi Double Tip 2 buah, Karton Bufalow 1 Pak, Kertas F4 255 Rim, Klip kertas biasa Hitam Kecil 4 dos, lem kertas 1 buah, map batik kertas 3 pak, map folio kertas 3 pak, map odner pidato plastic folio 4 pak, map odner Plastik 4 Pak, pensil 2B Faber Castell 1 lusin, Pisau cutter 4 buah, spidol 3 pak, Tinta Epson L1455 10 Botol)



- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 3.420.000,-
Realisasi : Rp. 3.420.000,- (100%)
Keluaran :
Tersedianya bahan logistik kantor sebanyak 228 dos
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Alokasi Anggaran : Rp. 8.250.000,-
Realisasi : Rp. 8.247.000,- (99.96 %)
Keluaran :
Tersedianya barang cetak 50 Buku dan penggandaan 25.003
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Alokasi Anggaran : Rp. 290.230.000,-
Realisasi : Rp. 271.036.355,- (93.39 %)
Keluaran :
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD bidang perumahan dan kawasan permukiman sebanyak 6 kegiatan, Musrenbang di 6 Kecamatan dan Rapat lengkap pamong praja di 6 Kecamatan

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Alokasi Anggaran : Rp. 3.000.000,-
Realisasi : Rp. 2.990.000,- (96,67 %)
Keluaran :
Tersedianya materai 10.000 Jumlah 300 Lembar
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Alokasi Anggaran : Rp. 26.400.000,-
Realisasi : Rp. 25.970.000,- (98,37 %)
Keluaran :
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik selama 12 bulan
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 7.790.000,-

Realisasi : Rp. 7.770.000,- (99,74 %)
Keluaran : -
Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan Komputer 5 Unit
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 2.228.000,-
Realisasi : Rp. 2.265.000,- (98,99 %)
Keluaran : -
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor sebanyak 11 Jenis (Alat Pel 1 Set, Gayung Timba 2 Buah, kanebo 6 buah, pembersih kaca 2 botol, pengharum ruangan 10 buah, portex Pembersih Kamar Mandi 2 Botol, sapu pel 1 buah, Soklin Lantai 8 Botol, Sunligth 3 Bungkus, Tissue Roll Nice 10 Pak)



- 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 Alokasi Anggaran : Rp. 65.360.000,-
 Realisasi : Rp. 65.327.200,- (99,95 %)
 Keluaran : -
 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan untuk 10 unit kendaraan
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
 Alokasi Anggaran : Rp. 237.695.400,-
 Realisasi : Rp. 235.760.000,- (99,19 %)
 Keluaran : -
 Tersedianya Jasa Pemeliharaan Lampu Jalan Tenaga Surya 51 Unit
- 6. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**
- 1) Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
 Alokasi Anggaran : Rp. 12.235.000,-
 Realisasi : Rp. 12.235.000,- (100 %)
 Keluaran : -
 Tersedianya data Rumah Korban Bencana Yang Belum Tertangani 170 unit
- 2) Pendataan dan Verifikasi Penerima Bagi Korban Bencana Alam Atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
 Alokasi Anggaran : Rp. 11.030.000,-
 Realisasi : Rp. 10.730.000,- (97,28 %)
 Keluaran : -
 Tersediannya Data Calon Penerima Rumah Korban Bencana Kabupaten/kota, 6 dokumen
- 7. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau relokasi Program Kabupaten/Kota**
- 1) Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
 Alokasi Anggaran : Rp. 12.265.000,-
 Realisasi : Rp. 12.265.000,- (100 %)
 Keluaran : -
 Terlaksannya Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana dengan Target 200 orang
- 2) Koordinasi untuk Menyepakati Penerima Dan Jenis Pelayanan
 Alokasi Anggaran : Rp. 12.265.000,-
 Realisasi : Rp. 11.640.000,- (94.90 %)
 Keluaran : -
 Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam Daerah

8. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

1) Pebangunan Rumah Bagi Korban Bencana

Alokasi Anggaran : Rp. 293.299.400,-

Realisasi : Rp. 293.297.800,- (100 %)

Keluaran : -

Terlaksannya Pembangunan 7 unit Rumah Bagi Korban Bencana

9. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan pengembanagan Kawasan Permukiman Kumuh

Alokasi Anggaran : Rp. 102.111.000,-

Realisasi : Rp. 98.753.550,- (96,71 %)

Keluaran : -

Tersedianya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

10. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

1) Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum Untuk Menunjang fungsi Hunian

Alokasi Anggaran : Rp. 359.800.000,-

Realisasi : Rp. 359.610.000,- (99.95%)

Keluaran :

Terlaksananya Sarana Penerangan Jalan Lingkungan 12 Unit



3.4. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN (YA/TIDAK)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup	Program Kawasan Permukiman	100%	Presentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Penerbitan Izin pembangunan dan Pengembanaan kawasan Permukiman Kumuh	100%	Terlaksananya Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Ya
			100%	Presentase Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	100%	Terlaksannya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Tidak



NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN (YA/TIDAK)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			100%	Presentase Penataan dan Peningkatan Kualitas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Penataan dan Peningkatan Kualitas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	100%	Terlaksannya Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Tidak
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	100%	Presentase Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	100%	Terlaksannya Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	YA



3.5. Permasalahan dan Solusi

➤ **Permasalahan :**

- 1 Sejumlah Jabatan Struktural belum terisi khususnya pada Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan Permukiman serta kurangnya tenaga fungsional umum;
- 2 Kurangnya Tenaga Administrasi sehingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi belum maksimal;
- 3 Belum memiliki kompetensi yang memadai
- 4 Minimnya fasilitas pendukung pelaksanaan kegiatan pada OPD.

➤ **Solusi :**

Pengisian Jabatan yang lowong dan rekrutmen tenaga fungsional umum, serta memaksimalkan personil yang ada untuk melaksanakan tugas dan fungsi OPD. Permintaan penambahan sarana prasarana pendukung.

3.6. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Tidak Ada

3.7. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya. Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya dituangkan dalam format sebagai berikut:

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Terhadap kinerja daya serap anggaran secara umum dinilai Sangat Baik. Ke depan agar kualitas perencanaan dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah menindaklanjuti rekomendasi DPRD dan terus meningkatkan Perencanaan agar menjadi lebih baik lagi terutama dalam menjawab persoalan yang ada pada masyarakat.	Penyerapan anggaran yang semakin baik

2.	<p>Pansus memberikan Catatan terhadap sejumlah Jabatan Struktural yang belum terisi khususnya pada Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan Permukiman serta kurangnya tenaga fungsional umum. Untuk itu Pansus merekomendasikan agar Bupati Sabu Raijua segera melakukan Pengisian Jabatan yang lowong dan mengisi tenaga fungsional umum</p>	<p>Menindaklanjuti Catatan terhadap sejumlah Jabatan struktural yang belum terisi Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman telah mengajukan Permintaan untuk mengisi jabatan struktural pada bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta untuk mengisi Jabatan Fungsional Umum.</p>	<p>Masih Kurangnya Pegawai untuk mengisi jabatan Struktural dan Jabatan fungsional Umum</p>
3.	<p>Pansus memberikan Catatan terhadap masih banyaknya rumah tidak layak huni di Kabupaten Sabu Raijua ditambah lagi dengan banyaknya rumah warga yang rusak akibat dampak Badai Seroja namun sampai saat ini tidak tercover oleh dana bantuan akibat kelemahan sistem dan prosedur pendataan yang dilakukan pemerintah. Untuk itu Pansus merekomendasikan agar Bupati Sabu Raijua lebih memaksimalkan lagi fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sehingga dapat menjawab berbagai persoalan kebutuhan rakyat melalui berbagai Program dan Kegiatan yang berhubungan dengan</p>	<p>Menindaklanjuti catatan DPRD Terhadap masih banyaknya rumah tidak layak huni di Kabupaten Sabu Raijua ditambah lagi dengan banyaknya rumah warga yang rusak akibat dampak badai seroja namun sampai saat ini tidak tercover oleh dana bantuan akibat kelemahan sistem dan prosedur pendataan yang dilakukan pemerintah. Maka, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah memperbaiki sistem pendataan Rumah Tidak Layak Huni dan juga Rumah terdampak Bencana sehingga pelayanan terhadap masyarakat lebih tepat sasaran</p>	<p>Masih terdapat Banyak Rumah korban bencana dan rumah tidak layak huni di Kabupaten Sabu Raijua yang belum terdata.</p>

	<p>perumahan rakyat dan penataan kawasan pemukiman, baik melalui koordinasi dengan kementerian ataupun instansi terkait di Pusat serta memaksimalkan alokasi APBD melalui Kegiatan bedah rumah tidak layak huni, penyediaan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah bagi masyarakat, serta penataan kawasan pemukiman kumuh.</p>		
--	---	--	--

5. Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Penyelenggara **Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat** di Kabupaten Sabu Raijua dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sabu Raijua dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sabu Raijua dengan alokasi anggaran sebesar **Rp5.751.520.153,00** dan realisasi sebesar **Rp. 5.405.465.417,00 (93,98%)**. Adapun rincian anggaran dan realisas sebagai berikut:

❖ Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sabu Raijua

No	Program/Kegiatan	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.238.219.353	4.901.174.917	93,57
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.216.102.003	2.913.215.530	90,58
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.112.510.003	2.814.233.530	90,42
	2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	103.592.000	98.982.000	95,55
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	160.858.350	144.879.175	90,07
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.993.250	1.985.000	99,59
	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.452.100	12.448.000	99,97
	3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.100.000	3.122.400	61,22
	4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141.313.000	127.323.775	90,10
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	1.671.809.000	1.654.309.900	98,95
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	100
	2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.680.000	1.725.000	64,37
	3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.666.129.000	1.649.584.900	99,01
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	189.450.000	188.770.312	99,64
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	189.450.000	188.770.312	99,64
II.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	410.195.000	404.678.500	98,66
1.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	384.470.000	382.998.500	99,62



No	Program/Kegiatan	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	1) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah	110.690.000	110.690.000	100
	2) Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	81.650.000	81.445.000	99,75
	3) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kotakendaraan dinas/operasional	33.930.000	33.301.000	98,15
	4) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	91.245.000	91.162.500	99,91
	5) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	66.955.000	66.400.000	99,17
2.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	25.725.000	21.680.000	84,28
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	25.725.000	21.680.000	84,28
III.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	103.105.800	99.612.000	96,61
1.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	103.105.800	99.612.000	96,61
	1) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	103.105.800	99.612.000	96,61
Jumlah		5.751.520.153	5.405.465.417	93,98

3.2. Capaian Kinerja Program sesuai dengan Target Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Arah Kebijakan	Program	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Menciptakan budaya kerja ASN dalam pelayanan menuju SARAI RAMAH	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100 %



	Program Penanggulangan Kebakaran	Menciptakan budaya kerja ASN dalam pelayanan menuju SARAI RAMAH	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%
--	----------------------------------	---	---	------	------	------

3.3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Alokasi Anggaran : Rp3.112.510.003,00

Realisasi : Rp2.814.233.530,00(90,42%)

Keluaran :

Tersedianya Gaji dan tunjangan 31 Orang ASN selama 12 bulan

2) Penyediaan Administrasi Pelayanan Tugas ASN

Anggaran : Rp. 103.592.000,00

Realisasi : Rp. 98.982.000,00 (95,55%)

Keluaran :

Tersedianya Jasa administrasi pelaksanaan Tugas ASN sebanyak 10 dokumen

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 1.993.250,00

Realisasi : Rp. 1.985.000,00 (99,59%)

Keluaran :

Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 4 paket: Senter Cas Besar 3 buah, Senter Lantas 2 buah, Kabel 21 meter (NYM 2 x 2,5 mm²), Terminal 6 colokan 2 buah

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 12.452.100,-

Realisasi : Rp. 12.448.000,- (99,97%)

Keluaran :

Tersedianya 31 jenis: balpoint bold liner 4 lusin, balpoint faster 6 lusin, binder klips kecil 30-70 sheet 1 dos, klips kecil 50-100 sheet 1 dos, buku ekspedisi 200 lembar 1 buah, buku folio isi 50 lembar 21 buah, buku kas umum 1 buah, flakban 6 cm 3 roll, hektek besar Vanko 3 buah, hektek kecil Joyko 4 buah, isi hektek 23/20 1 dos, isi hektek besar great 10 dos, isi hektek kecil great wall 6 dos, isi pisau cutter besar (kenko) 3 buah, Isolasi bening (besar) 2 roll, kertas F4 50 Rim, Kertas Glosy Folio 1 Pak, Kertas HVS Kwarto (sinar dunia)70 gr, Lem kertas (povinal) besar 4 buah, map batik kertas (accord) 2 pak, Map folio kertas 4 pak, map ordner pidato plastik folio 2 pak, map snel hektek kertas 3 pak, map snelhektek plastik 5 pak, pelubang kertas 1 buah, penggaris/mister besi 30 cm 2 buah, penghapus (2b) 3 buah, pisau cutter besar 2 buah, tinta epson (L4150) 24 botol, tinta stempel 1 botol, Tipe X 4 botol



- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Alokasi Anggaran : Rp. 5.100.000,-
 - Realisasi : Rp. 3.122.400,- (61,22%)
 - Keluaran :
 - Tersedianya cetak 40 buku dan penggandaan 15.000 lembar
- 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Anggaran : Rp. 141.313.000,-
 - Realisasi : Rp. 127.323.775,- (90,10 %)
 - Keluaran :
 - Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 4 laporan:
 - Koordinasi dan konsultasi keluar daerah 2 kegiatan
 - Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah 1 kegiatan
 - Pengamanan tempat ibadah pada perayaan paskah, natal, Idul Fitri.

4. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
 - Alokasi Anggaran : Rp. 3.000.000,-
 - Realisasi : Rp. 3.000.000,- (100%)
 - Keluaran :
 - Tersedianya materai sebanyak 300 lembar
- 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Alokasi Anggaran : Rp. 2.680.000,-
 - Realisasi : Rp. 1.725.000,- (64,37%)
 - Keluaran :
 - Tersedianya Jasa Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2 jenis
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Alokasi Anggaran : Rp. 1.666.129.000
 - Realisasi : Rp. 1.649.584.900 (99,01%)
 - Keluaran :
 - Tersedianya 7 jenis Peralatan kebersihan kantor, Honor dan makan minum petugas Voreijder 2 orang, Gaji dan Honor Banpol 83 orang, Honor perwira jaga 6 orang

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Alokasi Anggaran : Rp. 189.450.000
 - Realisasi : Rp. 188.770.312 (99,64%)
 - Keluaran :
 - Tersedianya Jasa pemeliharaan 17 Unit Kendaraan Dinas

6. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan.
 - Alokasi Anggaran : Rp. 110.690.000
 - Realisasi : Rp. 110.690.000 (100%)



Keluaran :
Terlaksananya Monitoring ketentraman, ketertiban umum, penertiban pkl, dan patroli wilayah, Monitoring ketentraman, ketertiban umum, pengamanan dan pengawalan pejabat publik serta pengamanan kegiatan lainnya.

- 2) Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Anggaran : Rp. 81.650.000
Realisasi : Rp. 81.445.000 (99,75%)
Keluaran :

Tersedianya Produk hukum penegakan 10 Kasus di daerah-daratan Raijua;

- 3) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

Anggaran : Rp. 33.930.000
Realisasi : Rp. 33.301.000 (98,15%)
Keluaran :

➤ Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah (2 Kegiatan)

- 4) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat

Anggaran : Rp. 91.245.000
Realisasi : Rp. 91.162.500 (99,91%)
Keluaran :

Tersedianya Bahan cetak 30 lembar, makanan dan minuman rapat 120 dos, snack 80 dos, pakaian dinas lapangan 30 pasang, topi linmas 30 buah, bretel hitam 30 buah, pentungan 30 buah, sepatu pdl linmas 30 pasang, honor narasumber 9 orang, honor sekretaris 1 orang, honor anggota 4 orang, honor ketua 1 orang, pendataan peserta pelatihan linmas 4 kali, transport peserta diklat 30 orang.

- 5) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Anggaran : Rp. 66.955.000
Realisasi : Rp. 66.400.000 (99,17%)
Keluaran :

Terlaksananya kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan, Operasi pekat 6 kali, Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai 6 Kali

7. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

- 1) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Alokasi Anggaran : Rp. 25.725.000
Realisasi : Rp. 21.680.000 (84,28%)
Keluaran :

Tersedianya Perjalanan dinas dalam rangka pengawasan terhadap masyarakat/badan hukum atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perbub 2 kegiatan.



8. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

1) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi Anggaran : Rp. 103.105.800

Realisasi : Rp. 99.612.000 (96,61%)

Keluaran :

Terlaksananya kegiatan kesiap siagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten/ kota 12 laporan, Perjalanan dinas dalam rangka pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kab/kota 3 kegiatan



3.4. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN (YA/TIDAK)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	
1.	Menciptakan Budaya Kerja ASN Dalam Pelayanan Menuju Sarai Ramah	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Presentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban masyarakat	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	Presentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban masyarakat	YA
					Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah pelanggaran dan pengaduan Trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	Presentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	YA
2.	Menciptakan Budaya Kerja ASN Dalam Pelayanan Menuju Sarai Ramah	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	Jumlah Kejadian bencana kebakaran yang tertangani	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian bencana kebakaran yang tertangani	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	YA



Misi III. **Meningkatkan kualitas layanan publik yang profesional dan mewujudkan birokrasi yang bersih, efisien, efektif dan akuntabel.**

Sasaran :

1. **Persentase Gangguan trantib yang dapat diselesaikan** merupakan indikator kinerja untuk mencapai sasaran penanganan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Sabu Raijua yaitu **Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum** target yang ditetapkan pada tahun 2023, kasus gangguan trantib yang terselesaikan, dengan capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2023 kasus kantramtibmas yang tertangani dengan prosentase 100%, realisasi ini sesuai dengan laporan gangguan Trantib dari masyarakat yang ditangani oleh Satpol PP dalam kurun waktu 1 x 24 Jam dengan realisasi anggaran sebesar 98,66%;
2. **Persentase Perda/Perkada yang ditegakan** merupakan salah satu indikator untuk mencapai Sasaran **Terciptanya keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat** yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Sabu Raijua yaitu **Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum** Pada penetapan kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023 kasus pelanggaran perda yang tertangani dengan prosentase 100%, realisasi ini sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan dan tertangani oleh Satpol PP dalam kurun waktu 1x24 jam dan realisasi keuangan sebesar 84,28%;
3. **Capaian Penanganan Bahaya Kebakaran** merupakan salah satu indikator untuk mencapai Sasaran **Terciptanya keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat** yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Sabu Raijua yaitu **Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**, target yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah 100% kasus kebakaran yang tertangani dengan rincian kasus kebakaran sebanyak 65 kasus serta realisasi kinerja 100% dan realisasi anggaran sebesar 96,61%;

Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran merupakan salah satu indikator untuk mencapai tujuan Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan public dan birokrasi yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Sabu Raijua pada proram Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, waktu tanggap respon penanganan kebakaran adalah 15 menit dengan reaksi cepat adalah 100%;

warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana merupakan salah satu indikator untuk mencapai tujuan Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan public dan birokrasi yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Sabu Raijua pada proram Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, prosentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana seluruh kejadian kebakaran tertangani 100%.



3.5. Permasalahan dan Solusi

➤ Permasalahan

1. Capaian realisasi 61,22%.

Permasalahan yang dihadapi adalah: cetakan dan penggandaan yang dilaksanakan disesuaikan dengan kebutuhan riil sehingga terjadi efisiensi anggaran.

2. Capaian realisasi 64,37%

Permasalahan yang dihadapi adalah: jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor disesuaikan dengan kondisi riil barang sehingga terjadi efisiensi anggaran.

➤ Solusi

1. Pada Anggaran 2024 untuk kegiatan tersebut akan lebih cermat dalam penghitungan dan penggunaan anggaran;
2. Pada tahun anggaran 2024 untuk kegiatan tersebut akan lebih cermat dalam perhitungan anggaran dan disesuaikan dengan kondisi barang agar lebih efisien.

3.6. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Tidak ada

3.7. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahunan Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Agar Bupati Sabu Raijua member dukungan dalam pembinaan dan optimalisasi fungsi Linmas. Hal tersebut juga harus disertai dengan kebijakan alokasi anggaran yang cukup.	Sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi DPRD Kabupaten Sabu Raijua dan sudah dilaksanakan Pelatihan Linmas di Kecamatan dengan melaksanakan Bimtek selama 3 hari di Kecamatan Sabu Tengah dan di laksanakan dengan baik.	<ul style="list-style-type: none"> •Tujuan: dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, Satlinmas memegang peran mendasar dalam mendeteksi potensi-potensi konflik dan ketidaknyamanan dalam masyarakat serta membantu kegiatan social. •Masalah yang diselesaikan: dengan adanya pelatihan anggota Satlinmas berjumlah 30 orang pada Kecamatan Sabu Tengah dapat membantu masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat



❖ **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada **Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat** di Kabupaten Sabu Raijua oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sabu Raijua dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 2.649.319.291** dan realisasi sebesar **Rp. 2.397.572.497** atau **90,50 %**. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.649.319.291	1.428.478.283	53,92
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.123.601.771	916.709.535	81,59
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.063.996.771	859.969.535	80,82
	2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	59.605.000	56.740.000	95,19
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.750.000	29.750.000	100
	1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	29.750.000	29.750.000	100
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	121.653.520	117.892.250	96,91
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.068.750	2.055.000	99,34
	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.081.270	45.076.170	99,99
	3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.700.000	1.800.000	66,67
	4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.151.500	10.495.800	86,37
	5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.652.000	58.465.280	98,01
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.694.000	38.694.000	100
	1) Pengadaan Mebel	8.694.000	8.694.000	100
	2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	30.000.000	100
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.707.000	8.686.000	99,76
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.496.000	99,84
	2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.720.000	2.710.000	99,63

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
	3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.487.000	3.480.000	99,80
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	317.580.000	316.746.498	99,74
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	317.580.000	316.746.498	99,74
II.	Program Penanggulangan Bencana	1.009.333.000	969.094.214	96,01
1.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	165.514.000	164.845.950	99,50
	1) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	59.804.000	59.145.950	98,90
	2) Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/Kota	105.710.000	105.700.000	99,99
2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	843.819.000	804.248.264	95,31
	1) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	61.895.000	58.100.000	93,87
	2) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	781.924.000	746.148.264	95,41
Jumlah		2.649.319.291	2.397.572.497	90,50

3.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023, maka sasaran strategis yang akan dicapai adalah :

Arah Kebijakan	Program	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Terselenggaranya penyediaan logistik penyelamatan korban bencana	Penanggulangan Bencana	Masyarakat yang terdampak bencana	Cakupan bencana yang tertangani dan layanan air bersih	2.192	2.192	100%



3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Alokasi Anggaran : Rp. 1.063.996.771,-
Realisasi : Rp. 859.969.535,- (80,82%)
Keluaran :
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Sebanyak 10 orang
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Alokasi Anggaran : Rp. 59.605.000,-
Realisasi : Rp. 56.740.000,- (95,19 %)
Keluaran :
Tersedianya Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebanyak 7 orang.

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Alokasi Anggaran : Rp. 29.750.000,-
Realisasi : Rp. 29.750.000,- (100%)
Keluaran :
Tersedianya Pakaian Dinas beserta kelengkapannya sebanyak 11 paket.

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 2.068.750,-
Realisasi : Rp. 2.055.000,- (99,34%)
Keluaran :
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 8 jenis
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 45.081.270,-
Realisasi : Rp. 45.076.170,- (99,99%)
Keluaran :
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 29 jenis; 9 unit; dan 1 unit personal computer.
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 2.700.000,-
Realisasi : Rp. 1.800.000,- (66,67%)
Keluaran :
Tersedianya bahan logistik sebanyak 90 kotak.
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Alokasi Anggaran : Rp. 12.151.500,-
Realisasi : Rp. 10.495.800,- (86,37%)
Keluaran :
Tersedianya barang cetakan 135 buku dan penggandaan dokumen 27.755 lembar
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Alokasi Anggaran : Rp. 59.652.000,-
Realisasi : Rp. 59.465.280,- (98,01%)
Keluaran :
Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi sebanyak 6 kegiatan

- 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- 1) Pengadaan Mebel
 - Alokasi Anggaran : Rp. 8.694.000,-
 - Realisasi : Rp. 8.694.000,- (100%)
 - Keluaran :
 - Tersedianya barang mebel lemari arsip sebanyak 2 buah
 - 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Alokasi Anggaran : Rp. 30.000.000,-
 - Realisasi : Rp. 30.000.000,- (100%)
 - Keluaran :
 - Tersedianya 1 Unit gedung kantor tempat penyimpanan logistik
- 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Alokasi Anggaran : Rp. 2.500.000,-
 - Realisasi : Rp. 2.496.000,- (99,84%)
 - Keluaran :
 - Tersedianya materai 10.000 sebanyak 250 lembar
 - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Alokasi Anggaran : Rp. 2.720.000,-
 - Realisasi : Rp. 2.710.000,- (99,63%)
 - Keluaran :
 - Tersedianya jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 4 unit
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Alokasi Anggaran : Rp. 3.487.000,-
 - Realisasi : Rp. 3.480.000,- (99,80%)
 - Keluaran :
 - Tersedianya peralatan kebersihan sebanyak 11 jenis
- 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Alokasi Anggaran : Rp. 317.580.000,-
 - Realisasi : Rp. 316.746.498,- (99,74%)
 - Keluaran :
 - Tersedianya Jasa Pemeliharaan kendaraan operasional kantor atau lapangan secara rutin/berkala sebanyak 16 unit
- 7. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**
- 1) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - Alokasi Anggaran : Rp. 59.804.000,-
 - Realisasi : Rp. 59.145.950,- (98,90%)
 - Keluaran :
 - Terlaksananya penyusunan rencana penanggulangan bencana kabupaten/kota sebanyak 4 kegiatan
 - 2) Pengelolaan resiko bencana kabupaten/kota
 - Alokasi Anggaran : Rp. 105.710.000,-
 - Realisasi : Rp. 105.700.000,- (99,99%)
 - Keluaran :
 - Terlaksananya Pengelolaan resiko bencana kabupaten/kota sebanyak 4 kegiatan
- 8. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**
- 1) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 - Alokasi Anggaran : Rp. 61.895.000,-
 - Realisasi : Rp. 58.100.000,- (93,87%)



- Keluaran :
- Terlaksananya respon cepat darurat bencana kabupaten kota sebanyak 2 kegiatan
- 2) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- Alokasi Anggaran : Rp. 781.924.000,-
- Realisasi : Rp. 746.148.264,- (95,41%)
- Keluaran :
- Tersedianya logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota sebanyak 3 roll selang spiral; 10 pcs kikir rantai sensor; 9 pcs rantai sensor; 2.192 reit air bersih; 2 paket pengangkutan logistic; 5 kegiatan.



3.4 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran strategis	Program			Kegiatan			Kesesuaian (ya/tidak)	
		Uraian program	Target kinerja program	Indikator kinerja program	Uraian kegiatan	Target kinerja kegiatan	Indikator kinerja kegiatan		
1.	Meningkatkan Layanan Keselamatan	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Terlaksananya Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana yang di legalisasi	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana yang di legalisasi	Ya	
			Tersedianya Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana		Tersedianya Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Ya	
			Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Ya
			Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Ya	



Dari indikator program kegiatan diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai capaian sebagai berikut :

1. Presentase Penyusunan rencana penanggulangan bencana kabupaten/kota dengan pagu anggaran Rp59.804.000,- dan realisasi Rp59.145.950,- atau capaian sebesar 98,90% dan sisa anggaran Rp658.050,-.
2. Presentase pengelolaan resiko bencana kabupaten/kota dengan pagu anggaran Rp105.710.000,- dan realisasi Rp105.700.000,- atau capaian sebesar 99,99% dan sisa anggaran Rp10.000,-.
3. Presentase Respon cepat darurat bencana kabupaten/kota dengan pagu anggaran Rp61.895.000,- dan realisasi Rp58.100.000,- atau capaian sebesar 93,87% dan sisa anggaran Rp3.795.000,-.
4. Presentase Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota dengan pagu anggaran Rp781.924.000,- dan realisasi Rp746.148.264,- atau capaian sebesar 95,42% dan sisa anggaran Rp35.775.736,-



3.5 Permasalahan dan Solusi

➤ Permasalahan

Kurang partisipatif dari masyarakat didalam menangani bencana.

➤ Solusi

Perlu keterlibatan pemerintah desa untuk memberikan edukasi kepada Masyarakat bahwa bencana merupakan urusan bencana, sehingga dapat meminimalisir korban.

3.6 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan dalam format sebagai berikut:

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
1.	Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023	259/KEP/HK/2023	Tujuan : Untuk mengatasi kekeringan yang terjadi diseluruh daratan Sabu dan Raijua. Masalah yang diselesaikan : Kebutuhan air bersih masyarakat akibat kekeringan yang berkepanjangan dapat terselesaikan.

3.7 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
1.	Agar Bupati Sabu Raijua memberikan teguran dan segera melakukan evaluasi kinerja Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pansus juga memberikan Rekomendasi agar Bupati Sabu Raijua segera memerintahkan Inspektorat Daerah untuk melakukan audit menyeluruh. Audit dimaksud mencakup ketepatan prosedur penanganan bencana, proses pendataan, verifikasi data, sampai kepada proses penyaluran dana serta realisasi penggunaannya. Dan jika ditemukan persoalan hukum, Pansus merekomendasikan agar dilimpahkan kepada Aparat Penegak Hukum.	Telah melakukan penyaluran terhadap dana stimulan bagi korban badai seroja tahun 2021 di Kabupaten Sabu Raijua sebanyak 9.328 penerima.	Tujuan : Agar dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk perbaikan rumah yang rusak akibat badai seroja. Masalah Yang Diselesaikan : Dana tersebut telah dimanfaatkan oleh penerima bantuan untuk memperbaiki rumah yang rusak akibat badai dimaksud.



6. Urusan Sosial

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Penyelenggara Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial di Kabupaten Sabu Raijua dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sabu Raijua, dengan alokasi anggaran **Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial** sebesar Rp. **6.251.096.664,-** dan realisasi sebesar Rp. **5.917.317.662,- (94,66%)**. Adapun pelaksanaan program dan kegiatan dari Urusan Sosial di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 sebagai berikut:

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI	TOTAL REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.471.118.755	2.187.193.844	88,51
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.908.672.600	1.628.555.036	85,32
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.807.522.600	1.529.577.036	84,62
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	101.150.000	98.978.000	97,85
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.650.000	23.650.000	100
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	23.650.000	23.650.000	100
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	262.159.960	259.441.166	98,96
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.162.500	3.150.000	99,60
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.847.460	90.485.000	98,52
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.400.000	14.400.000	100
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.885.000	29.884.800	99,99
	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122.865.000	121.521.366	98,91
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.606.817	44.143.000	98,96
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	4.500.000	100
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.670.817	32.657.000	99,96
	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.110.000	2.110.000	100
	4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.326.000	4.876.000	91,55
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	232.029.378	231.404.642	99,73



	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	147.270.000	146.654.134	99,58
	2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	84.759.378	84.750.508	99,99
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	208.600.000	207.900.000	99,66
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	208.600.000	207.900.000	99,66
	1. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	28.800.000	28.800.000	100
	2. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	179.800.000	179.100.000	99,61
III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	760.326.000	745.095.500	98,00
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	477.028.000	474.817.000	99,54
	Penyediaan Permakanan	477.028.000	474.817.000	99,54
2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	283.298.000	270.278.500	95,40
	1. Pemberian Layanan Kedaruratan	7.456.000	7.422.000	99,54
	2. Penyediaan Alat Bantu	243.216.000	234.765.500	96,53
	3. Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	8.894.000	6.657.000	74,85
	4. Pemberian Layanan Rujukan	23.732.000	21.434.000	90,32
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL	2.497.128.770	2.467.759.318	98,82
1	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	2.528.000	2.469.000	97,67
	1. Rujukan Anak-Anak Terlantar	2.528.000	2.469.000	97,67
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.494.600.770	2.465.290.318	98,83
	1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	307.190.000	306.270.000	99,70



	2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	75.570.770	67.575.318	89,42
	3. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.480.400.000	1.480.220.000	99,99
	4. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	631.440.000	611.225.000	96,80
V	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	313.923.139	309.369.000	98,55
1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	42.649.139	41.140.000	96,46
	1. Penyediaan Makanan	39.249.139	38.310.000	97,61
	2. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	3.400.000	2.830.000	83,24
2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	271.274.000	268.229.000	98,88
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	271.274.000	268.229.000	98,88
JUMLAH		6.251.096.664	5.917.317.662	94,66



3.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Arah Kebijakan	Program	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Tali Asih TKSK dan Jasa Tenaga Penanganan Sosial	47 orang	47 orang	100 %
			Tersedianya Honorarium Tim Koordinasi PKH	8 orang	8 orang	100 %
	Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Permakanan	Tersedianya Sembako Bagi Lansia Terlantar	74 paket	74 paket	100 %
			Tersedianya Paket Sembako Bagi Penyandang Disabilitas	60 paket	60 paket	100 %
		Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pendampingan Klien PMKS	2 kali	2 kali	100 %
		Pemberian Alat Bantu	Tersedianya Bantuan Sosial bagi Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	37 paket	37 paket	100 %
			Tersedianya Alat Bantu berupa Kursi Roda, Tongkat Ketiak,	2 jenis	2 jenis	100 %
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan Dasar	Tersedianya Pendampingan Rujukan Anak Terlantar ke UPTD Kesejahteraan Sosial Anak Riang Naibobot	1 kali	1 kali	100 %
		Pemberian Layanan Rujukan	Tersedianya Pendampingan Terhadap Korban Anak Berhadapan dengan Hukum dan PMKS Lainnya	19 orang	19 orang	100 %
	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Tersedianya Rujukan Anak-Anak Terlantar	1 kali	1 kali	100 %
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data SIKS-NG dan Data Fakir Miskin/Kemiskinan Ekstrem	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100 %
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Kerjasama Pengembangan SPBE dan Bimbingan Teknis Aplikasi SIKS-NG	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100 %
			Tersedianya Laptop	1 Unit	1 Unit	100 %
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Tersedianya Bantuan Sosial Uang bagi Kelompok Usaha Bersama	73 Kelompok	73 Kelompok	100 %
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Tersedianya Bantuan Sosial Uang untuk Rumah Tidak Layak Huni	29 Rumah	29 Rumah	100 %



Arah Kebijakan	Program	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	Penanganan Bencana	Penyediaan Makanan	Jumlah Logistik Yang Disediakan Untuk Korban Bencana Alam	5 Jenis	5 Jenis	100 %
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Barang Non Logistik Yang Disediakan Untuk Korban Bencana Alam	3 Jenis	3 Jenis	100 %
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Kegiatan Koordinasi Dan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pendidikan dan Pelatihan Dasar TAGANA, Rekonsialiasi Simda Logistik, Pengambilan Logistik, Identifikasi Laporan Bencana dan Penyerahan Bantuan bagi korban bencana	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100 %



3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

Alokasi Anggaran : Rp. 1.807.522.600

Realisasi : Rp. 1.529.577.036 (84,62%)

Keluaran :

Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN sebanyak 14 orang selama 12 bulan, tambahan penghasilan bagi ASN selama 12 bulan, gaji dan tunjangan 2 orang PPPK serta tambahkan penghasilan sebanyak 2 orang PPPK

2) Penyediaan Administrasi Kepegawaian Pelaksanaan Tugas ASN

Alokasi Anggaran : Rp. 101.150,000

Realisasi : Rp. 98.978.000 (97,85%)

Keluaran :

Terbayarnya honorarium pengguna anggaran selama 12 bulan, bendahara pengeluaran selama 12 bulan, PPKEU selama 12 bulan, PPTK selama 12 bulan, PP Komitmen untuk 2 paket pekerjaan, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa untuk 1 paket, Pengurus Barang Pengguna selama 12 bulan

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Alokasi Anggaran : Rp. 23,650,000

Realisasi : Rp. 23,650,000(100%)

Keluaran :

Tersedianya pakaian dinas harian untuk ASN sebanyak 14 stel selama

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 3,162,500

Realisasi : Rp. 3,150,000(99,60%)

Keluaran :

Tersedianya 8 jenis komponen instalasi listrik selama 12 Bulan

2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 91,847,460

Realisasi : Rp. 90,485,000(98.52%)

Keluaran :

Tersedianya 38 jenis ATK selama 12 Bulan, 1 Paket Camera CCTV 4 Camera, 3 Unit Laptop, dan 2 paket Papan Informasi

3) Penyediaan bahan logistik kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 14,400,000

Realisasi : Rp. 14,400,000(100%)

Keluaran :

Tersedianya makan minum rapat 13 orang ASN selama 12 Bulan



- 4) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Alokasi Anggaran : Rp.29,885,000
Realisasi : Rp.29,884,800(99,99%)
Keluaran :
Tersedianya Jasa penjilitan sebanyak 60 buku, Banner sebanyak 8 lembar, dan penggandaan sebanyak 94.710 lembar
- 5) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Alokasi Anggaran : Rp. 122,865,000
Realisasi : Rp. 121,521,366(98,91%)
Keluaran :
Terlaksananya perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi 4 kegiatan, perjalanan dinas Musyawarah Perencanaan Pembangunan 1 Kegiatan

4. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
Alokasi Anggaran : Rp. 4,500,000
Realisasi : Rp. 4,500,000(100%)
Keluaran :
Tersedianya materai sebanyak 450 lembar
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Alokasi Anggaran : Rp. 32,670,817
Realisasi : Rp. 32,657,000(99.96%)
Keluaran :
Tersedianya pengadaan air sebanyak 3.670.000 Liter (734 tangki), Penerangan Kantor selama 12 bulan
- 3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 2,110,000
Realisasi : Rp. 2,110,000(100%)
Keluaran :
Tersedianya jasa servis 2 unit printer dan 1 unit laptop
- 4) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 5,326,000
Realisasi : Rp. 4,876,000(91,55%)
Keluaran :
Tersedianya peralatan kebersihan sebanyak 11 jenis selama 12 Bulan

5. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah

- 1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Alokasi Anggaran : Rp. 147,270,000
Realisasi : Rp. 146,654,134(99,58%)
Keluaran :
Tersedianya jasa Pemeliharaan untuk kendaraan roda enam 1 unit, roda empat 3 unit, roda dua 3 unit
- 2) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
Alokasi Anggaran : Rp. 84,759,378
Realisasi : Rp. 84,750,508(99,99%)
Keluaran :
Tersedianya 4 jenis Bahan Bangunan dan Konstruksi : Cat Kayu 6 Kaleng, Cat Tembok KW 1 8 buah, Kuas Cat 6 buah, pembayaran Sewa



Gudang Logistik selama 12 Bulan, Jasa perencanaan bangunan Gedung sebanyak 1 paket

6. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

1) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Alokasi Anggaran : Rp. 28,800,000.-

Realisasi : Rp. 28,800,000.-(100%)

Keluaran :

Tersedianya Tali Asih bagi 6 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

2) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Alokasi Anggaran : Rp. 179,800,000.-

Realisasi : Rp. 179,100,000.-(99,61%)

Keluaran :

Tersedianya Honorarium bagi 8 orang Tim Koordinasi PKH, Transport bagi 41 Tenaga Penanganan Sosial (1 Koordinator kabupaten dan 40 pendamping PKH desa/kelurahan)

7. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

1) Penyediaan Permakanan

Alokasi Anggaran : Rp. 477,028,000.-

Realisasi : Rp. 474,817,000.- (99,54%)

Keluaran :

Tersedianya 74 Paket Sembako Bagi Lansia Terlantar, 60 Paket Sembako Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Perjalanan Dinas Identifikasi dan Validasi data penerima bantuan sosial bagi Lanjut Usia Terlantar dan Disabilitas sebanyak 34 desa, Perjalanan Dinas Monitoring Kegiatan Penyaluran Permakanan bagi Lanjut Usia Terlantar dan Disabilitas sebanyak 33 kali

8. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial

1) Pemberian Layanan Kedaruratan

Alokasi Anggaran : Rp. 7,456,000.-

Realisasi : Rp. 7,422,000.-(99,54%)

Keluaran :

Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah, Koordinasi dan Sinkronisasi PMKS di Kupang sebanyak 2 kali

2) Penyediaan Alat Bantu

Alokasi Anggaran : Rp. 243,216,000.-

Realisasi : Rp. 234,765,500.-(96,53%)

Keluaran :

Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi warga binaan pada Lembaga Pemasarakatan di Kupang sebanyak 1 kali, Identifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial bagi warga binaan Lembaga



pemasyarakatan sebanyak 39 kali, Evaluasi dan monitoring penerima bantuan sosial bagi warga binaan Lembaga pemasyarakatan sebanyak 39 kali, Alat bantu berupa bantuan sosial uang bagi warga binaan Lembaga pemasyarakatan sebanyak 37 paket, 1 unit kursi roda, 1 unit tongkat ketiak

3) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Alokasi Anggaran : Rp. 8,894,000.-

Realisasi : Rp. 6,657,000.- (74,85%)

Keluaran :

Tersedianya Jasa Pendampingan Rujukan anak terlantar ke UPTD Kesejahteraan Sosial Anak Riang Naibobat untuk melanjutkan Pendidikan 1 kali

4) Pemberian Layanan Rujukan

Alokasi Anggaran : Rp. 23,732,000.-

Realisasi : Rp. 21,434,000.- (90,32%)

Keluaran : -

Tersedianya Biaya Pendampingan terhadap korban anak berhadapan dengan hukum dan PMKS lainnya sebanyak 19 kasus

9. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar

1) Rujukan Anak-Anak Terlantar

Alokasi Anggaran : Rp. 2,528,000.-

Realisasi : Rp. 2,469,000.- (97,67%)

Keluaran :

Tersedianya Biaya Rujukan Anak-anak terlantar sebanyak 1 kali

10. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota

1) Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi Anggaran : Rp. 307,190,000.-

Realisasi : Rp. 306,270,000.- (99,70%)

Keluaran : -

Terbayarnya Jasa Penanganan Sosial bagi 63 orang operator SIKs-NG Desa/Kelurahan, 2 orang operator Siks-NG Kabupaten selama 12 bulan, Perjalanan Dinas untuk 2 petugas dalam rangka verifikasi dan validasi data SIKS-NG di 6 kecamatan, Perjalanan Dinas untuk 4 petugas dalam rangka verifikasi dan validasi data fakir miskin/kemiskinan ekstrem di 6 kecamatan

2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi Anggaran : Rp. 75,570,770.-

Realisasi : Rp. 67,575,318.- (89,42%)

Keluaran :

Tersedianya Jasa sewa ekspedisi untuk logistik dari Gudang logistik Dinsos Prov. NTT ke Sabu sebanyak 1 paket, Perjalanan dinas Luar Daerah 3 Kali, Laptop sebanyak 1 unit

3) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Alokasi Anggaran : Rp. 1,480,400,000.-

Realisasi : Rp. 1,480,220,000.- (99,99%)



Keluaran :
Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi bantuan KUBE sebanyak 15 kali, bantuan social untuk Kelompok Usaha Bersama sebanyak 73 KUBE

4) **Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat**

Alokasi Anggaran : Rp. 631,440,000

Realisasi : Rp. 611,225,000 (96,80%)

Keluaran :

Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi bantuan KUBE dan RTLH sebanyak 23 kali, bantuan social untuk Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 29 RTLH, Tidak Terbayarnya bantuan social untuk Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 1 RTLH

11. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

1) **Penyediaan Makanan**

Alokasi Anggaran : Rp. 39,249,139.-

Realisasi : Rp. 38,310,000.-(97,61%)

Keluaran :

Tersedianya 5 Jenis makanan yang disediakan untuk korban bencana alam dan bencana social, 1 unit laptop

12. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

1) **Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana**

Alokasi Anggaran : Rp. 271,274,000

Realisasi : Rp. 268,229,000 (98,88%)

Keluaran :

Tersedianya makan minum piket bagi 35 Taruna Siaga Bencana, Insentif/Tali Asih bagi 35 Tagana, Honor Piket bagi 35 Tagana, sewa kendaraan untuk mengantar peserta diklat Tagana ke dan dari Dinsos Provinsi NTT sebanyak 1 kali, kontribusi Diklat Tagana untuk 22 Tagana, Perjalanan Dinas dalam rangka Rekonsoliasi Simda Logistik di Kupang sebanyak 1 kali, Perjalanan Dinas dalam rangka Bimtek Diklat Tagana di Dinsos Prov. NTT untuk 22 Tagana, Perjalanan Dinas 2 pendamping dalam rangka pendampingan bagi 22 Tagana yang mengikuti Bimtek Diklat Tagana di Dinsos Prov. NTT, Perjalanan Dinas dalam rangka mengambil bantuan di Gudang logistik Dinas Sosial Provinsi NTT sebanyak 1 kali, Perjalanan Dinas dalam rangka rekonsiliasi Simda Logistik di Dinas Sosial Provinsi NTT sebanyak 1 kali, Perjalanan Dinas dalam rangka identifikasi dan verifikasi laporan bencana di 6 kecamatan, Perjalanan Dinas dalam rangka penyerahan bantuan di 6 kecamatan



3.4 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	PROGRAM				KEGIATAN			
	SASARAN STRATEGI	URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENYESUAIAN (YA/TIDAK)
1	Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Lembaga, atau organisasi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Tali Asih TKSK dan pendamping sosial lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Meningkatnya partisipasi aktif TKSK dan pendamping penanganan sosial lainnya	Ya
2	Meningkatnya kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial dan kesejahteraan bagi Penyandang Masalah Sosial yang direhabilitasi	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar	Presentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasar	Penyediaan Permakanan	Tersedianya Permakanan bagi Lansia terlantar, dan Disabilitas	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lansia terlantar dan disabilitas	Ya
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Presentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mendapatkan Layanan Pendampingan	Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi PMKS di Kupang	Meningkatnya pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Ya



					Penyediaan Alat Bantu	Tersedianya Bantuan Sosial Alat bantu bagi Eks Warga Binaan dan pemerlu berkebutuhan khusus	Terpenuhinya kebutuhan dasar PMKS di luar panti	Ya
					Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terlaksananya Pendampingan Rujukan Anak Terlantar ke UPTD Kesejahteraan Sosial Anak Riang Naibobat	Terpenuhinya kebutuhan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar bagi Anak Terlantar	Ya
					Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pendampingan bagi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum dan PMKS lainnya	Terpenuhinya kebutuhan Anak akan kepastian hukum dari kasus kekerasan yang dialami	Ya
3	Menyelenggarakan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	Persentase Keluarga Miskin yang memperoleh Perlindungan dan Layanan Jaminan Sosial	Rujukan Anak-anak Terlantar	Terlaksananya Rujukan Anak Terlantar ke UPTD Kesejahteraan Sosial Anak Riang Naibobat	Terpenuhinya kebutuhan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar bagi Anak Terlantar	Ya
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Keluarga Miskin yang memperoleh Perlindungan dan Layanan Jaminan Sosial	Pendataan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya verifikasi dan validasi data SIKS-NG serta data kemiskinan ekstrem	Tersedianya data SIKS-NG serta data kemiskinan ekstrem yang valid	Ya
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Kerjasama pengembangan SPBE di Kabupaten Banyuwangi	Tersedianya Kerjasama pengembangan SPBE	Ya



					Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Tersedianya Bantuan sosial uang bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Ya
					Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Tersedia Bantuan Rumah Swadaya bagi individu	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Ya
4	Menyelenggarakan Penanganan Bencana	Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam terpenuhi kebutuhan dasarnya	Penyediaan Makanan	Tersedianya makanan untuk Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Terpenuhi kebutuhan dasar korban bencana alam dan bencana sosial	Ya
					Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersedianya tempat penampungan sementara	Terpenuhi kebutuhan dasarnya	Ya
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase Taruna Siaga Bencana yang berpartisipasi aktif saat kesiapsiagaan bencana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan kegiatan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Pendidikan dan Pelatihan Dasar TAGANA di Kupang, Identifikasi dan Verifikasi Laporan bencana, monitoring dan mengantar bantuan bagi korban bencana	Jumlah kegiatan Koordinasi Dan Bimbingan Teknis Pendidikan dan Pelatihan Dasar TAGANA,	Ya



3.5 Permasalahan dan Solusi

➤ **Permasalahan :**

- 1) Program Rehabilitasi Sosial
 - a) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 - Tidak Terlaksananya Layanan Rujukan Bagi Klien PMKS ke UPTD Kesejahteraan Sosial Anak Riang Naibobat di Kupang dikarenakan tidak ada klien yang bersedia untuk tinggal di Panti Asuhan sehingga terjadi efisiensi perjalanan dinas
- 2) Program Penanganan Bencana
 - a) Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
 - Anggaran yang disediakan untuk pembelian 3 paket non logistic bencana alam dan bencana social lebih besar dari harga riil di toko, sehingga terjadi efisiensi anggaran

➤ **Solusi :**

- a. Lebih cermat dalam perencanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan sehingga anggaran yang direncanakan dapat terealisasi dengan baik.
- b. Program/kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena alasan tertentu harus di hilangkan pada perubahan anggaran, sehingga tidak mempengaruhi realisasi belanja.

3.6 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Tidak ada

3.7 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindaklanjut	Tujuan /Masalah yang diselesaikan
1.	Terhadap Kinerja daya serap anggaran secara umum dinilai sangat baik. Ke depan agar kuallitas perencanaan dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menerima Catatan dan rekomendasi DPRD dan menyampaikan ke Bupati Sabu Raijua sebagai Kepala Daerah serta akan mempertahankan dan lebih meningkatkan kualitas perencanaan.	Kualitas perencanaan dipertahankan dan lebih ditingkatkan



B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

1. Urusan Tenaga Kerja

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Penyelenggara **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja** di Kabupaten Sabu Raijua dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sabu Raijua, dengan alokasi anggaran Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja sebesar **Rp. 3.564.627.195,-** dan realisasi sebesar **Rp. 3.213.897.900,- (90,2%)**. Adapun pelaksanaan program/kegiatan dari Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.349.850.847	2.037.439.224	86,7
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.041.390.847	1.730.936.813	84,8
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.940.198.857	1.632.274.813	84,1
	2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	101.192.000	98.662.000	97,5
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.500.000	27.500.000	100
	1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	27.500.000	27.500.000	100
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	212.809.250	212.346.051	99,8
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.681.250	1.680.000	99,9
	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.397.000	65.396.500	100
	3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.640.000	8.640.000	100
	4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.750.000	12.750.000	100
	5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.341.000	123.879.551	99,6
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.370.750	6.325.000	99,3
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.496.000	99,8
	2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.420.000	1.380.000	97,2
	3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.450.750	2.449.000	99,9
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.780.000	60.331.360	97,7
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.780.000	60.331.360	97,7



No	Program/Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
II.	Program Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	247.426.000	233.027.156	94,2
6.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 1) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	247.426.000 247.426.000	233.027.156 233.027.156	94,2 94,2
III.	Program Penempatan Tenaga Kerja	947.710.348	932.401.520	98,4
7.	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 1) Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	943.507.848 29.169.000	928.307.520 28.860.000	98,4 99
	2) Perluasan Kesempatan Kerja	914.338.848	899.447.520	98,4
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	4.202.500	4.094.000	97,4
	1) Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	4.202.500	4.094.000	97,4
IV.	Program Hubungan Industrial	19.640.000	11.030.000	56,2
8.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			
	1) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.820.000	5.890.000	60
	2) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kab./Kota	9.820.000	5.140.000	52,3
	Jumlah	3.564.627.195	3.213.897.900	90,2

3.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Arah Kebijakan	Program	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Diarahkan pada upaya Pemulihan Ekonomi dan penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat serta Sistem Perlindungan Sosial dengan sasaran prioritas	1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat (SARAI MAMPU)	1. Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	30 org	30 org	100%
	2. Program Penempatan Tenaga Kerja		2.1. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 2.2. Perluasan Kesempatan Kerja	90 org	90 org	100%



Arah Kebijakan	Program	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
			2.3. Pelayanan dan informasi pasar kerja	16 desa (496 org)	16 desa (496 org)	100%
			3.1. Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kab./ kota	12 lap 1 keg	12 lap 1 keg	100% 60%
	3. Program Hubungan Industrial		3.2. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kab./ kota	1 keg	1 keg	52,3%

3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Pengadaan Gaji dan Tunjangan

Alokasi : Rp. 1.940.198.857,-

Realisasi : Rp. 1.632.274.813,- (84,1%)

Keluaran :

Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN, sejumlah 17 Orang untuk 12 bulan

2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Alokasi : Rp. 101.192.000,-

Realisasi : Rp. 98.662.000,- (97,5%)

Keluaran :

Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, sejumlah 17 orang



2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Alokasi Anggaran : Rp. 27.500.000,-

Realisasi : Rp. 27.500.000,- (100%)

Keluaran :

Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, sejumlah 17 stel

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 1.681.250,-

Realisasi : Rp. 1.680.000,- (99,9%)

Keluaran :

Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, sejumlah 5 paket, terdiri dari Jek Listrik, Kabel dan Terminal

- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 65.397.000,-

Realisasi : Rp. 65.396.500,- (100%)

Keluaran :

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor sejumlah 2 paket : ATK dan Belanja Modal Printer

- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 8.640.000,-

Realisasi : Rp. 8.640.000,- (100%)

Keluaran :

Tersedianya Bahan Logistik Kantor sejumlah 288, berupa makan dan minum rapat

- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Alokasi Anggaran : Rp. 12.750.000,-

Realisasi : Rp. 12.750.000,- (100%)

Keluaran :

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan sejumlah 40.000 lembar dan 50 buku

- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Alokasi Anggaran : Rp. 124.341.000,-

Realisasi : Rp. 123.879.551,- (99,6%)

Keluaran :

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah sejumlah 20 Kegiatan

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Alokasi Anggaran : Rp. 2.500.000,-

Realisasi : Rp. 2.496.000,- (99,8%)

Keluaran :

Tersedianya Materai sejumlah 250 Lembar

- 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 1.420.000,-

Realisasi : Rp. 1.380.000,- (97,2%)



Keluaran :
Terbayarnya Jasa Pemeliharaan Laptop dan Printer sejumlah 2 Paket ,
leptop 1 Unit, printer 1 unit

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 2.450.750,-
Realisasi : Rp. 2.449.000,- (99,9%)
Keluaran :

Tersedianya peralatan gedung kantor sejumlah 9 paket, berupat alat pel,
ember, kanebo, sapu

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Alokasi Anggaran : Rp. 61.780.000,-
Realisasi : Rp. 60.331.360,- (97,7%)
Keluaran :

Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional kantor sejumlah 9 unit,
berupa roda 4 (empat) 1 Unit dan roda 2 (dua) 8 unit

II. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

6. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi

1) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

Alokasi Anggaran : Rp. 247.426.000,-
Realisasi : Rp. 233.027.156,- (94,2%)
Keluaran :

Terlaksananya pelatihan ketrampilan konstruksi baja ringan bagi 15 orang di Desa Roboaba dan pelatihan pembuatan lemari dan rak aluminium bagi 15 orang di desa Roboaba.

III. Program Penempatan Tenaga Kerja

7. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota

1) Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja

Alokasi : Rp. 29.169.000,-
Anggaran
Realisasi : Rp. 28.860.000,- (98,9%)
Keluaran :

Terlaksananya Penyuluhan dan bimbingan Jabatan di SMA Negeri 1 Sabu Timur, SMA Negeri 1 Liae, dan SMA Negeri 1 Hawu Mehara dengan peserta masing-masing 30 orang

2) Perluasan Kesempatan Kerja

Alokasi Anggaran : Rp. 914.338.848,-
Realisasi : Rp. 899.447.520,- (98,4%)
Keluaran :

Terlaksananya kegiatan Padat Karya Infrastruktur Pedesaan Pembuatan Parit Jebakan Air bagi 496 orang yang berlokasi di 16 desa tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua.



8. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

- 1) Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

Alokasi Anggaran : Rp. 4.202.500,-

Realisasi : Rp. 4.094.000,- (97,4%)

Keluaran :

Terlaksananya Penyampaian Informasi Pasar Kerja Online bagi 1 orang dan/berupa pembuatan kartu AK1

IV. Program Hubungan Industrial

Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi Anggaran : Rp. 9.820.000,-

Realisasi : Rp. 5.890.000,- (60%)

Keluaran :

Terlaksananya monitoring dan evaluasi pada BUMN dan pelaku usaha (UMKM) di Sabu Barat dan Sabu Timur

- 2) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi Anggaran : Rp. 9.820.000,-

Realisasi : Rp. 5.150.000,- (52,3%)

Keluaran :

Terlaksananya monitoring dan evaluasi pada BUMN dan pelaku usaha (UMKM) di Sabu Barat dan tidak ada perselisihan



3.4 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN (YA/TIDAK)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
1	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat (SARAI MAMPU)	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	Persentase jumlah tenaga kerja bersertifikat pelatihan/ kompetensi	Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Terlaksananya pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Persentase jumlah tenaga kerja bersertifikat pelatihan/ kompetensi	Ya
2	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat (SARAI MAMPU)	Program penempatan tenaga kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	Presentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antarkerja dalam wilayah kabupaten	Pelayanan antarkerja di daerah kabupaten/kota	Terlaksananya penempatan dan perluasan tenaga kerja	Persentase Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	Ya
							Persentase Jumlah Tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	Ya



					Pengelolaan informasi pasar kerja	Terlaksananya pengelolaan informasi pasar kerja	Persentase Jumlah laporan informasi pasar kerja onlien	Ya
3	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat (SARAI MAMPU)	Program Hubungan Industrial	Jumlah perselisihan yang dicegah	Presentase perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan Bipartite	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan Perusahaan di daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan Perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan 1(satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	Ya
							Jumlaj perkara perselisihan yang terselesaikan	Ya



3.5 Permasalahan dan Solusi

Tidak ada

3.6 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Tidak ada

3.7 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1.	Bupati Sabu Raijua melakukan penajaman Kembali terhadap prioritas Program dan Kegiatan setiap OPD. Dengan demikian diharapkan agar setiap OPD lebih selektif dan kreatif memilih dan membuat Program dan Kegiatan. Program dan Kegiatan yang berkaitan dengan pelatihan tenaga kerja serta penciptaan lapangan kerja harus diperbanyak;	1. Pemerintah giat melaksanakan pelatihan-pelatihan ketrampilan dan pemberdayaan tenaga kerja serta memfasilitasi untuk berwirausaha untuk penciptaan lapangan kerja. 2. Pemerintah akan mengoptimalkan pengawasan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja	1. Untuk membuka lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran 2. Perlindungan bagi tenaga kerja di bawah umur dan norma keselamatan kerja. 3. Menjamin hak pekerja dan jaminan keselamatan kerja.
2.	Bupati Sabu Raijua mengadakan pengkajian terhadap pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Termasuk melakukan penataan ulang berbagai kebijakan pembangunan serta memastikan bertumbuhnya iklim investasi yang sehat dalam rangka menarik minat investor dan menciptakan lapangan kerja.	3. Untuk menjamin hak-hak pekerja, pemerintah telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Provinsi NTT.	



2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Penyelenggara Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar di Kabupaten Sabu Raijua dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sabu Raijua, dengan alokasi anggaran Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar sebesar **Rp. 1.145.016.340,-** dan realisasi sebesar **Rp. 902.449.321,- (78,82%)**. Adapun pelaksanaan program/kegiatan dari Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
I.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan			
1.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	55.309.000	50.929.579	92,08
	1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupate/Kota	16.272.000	16.107.729	98,99
	2) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	39.037.000	34.821.850	89,20
II.	Program Perlindungan Perempuan	193.999.000	168.920.398	87,07
1.	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	55.770.000	54.770.000	98,21
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	55.770.000	54.770.000	98,21
2.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	108.934.000	87.017.398	79,88
	1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	48.576.000	47.849.398	98,50
	2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	60.358.000	39.168.000	64,89



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
3.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	29.295.000	27.133.000	92,62
III.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	56.780.900	35.248.000	62,08
1.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	56.780.900	35.248.000	62,08
IV.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	153.157.270	116.798.577	76,26
1.	Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	153.157.270	116.798.577	76,26
	1) Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	137.037.270	100.754.577	73,52
	2) Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	16.120.000	16.044.000	99,53
V.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	166.926.170	154.219.218	92,39
1.	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	134.726.170	122.741.218	91,10
	1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	83.919.200	72.737.600	86,68
	2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50.806.970	50.003.618	98,42
2.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	32.200.000	31.478.000	97,76



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	32.200.000	31.478.000	97,76
VI.	Program Perlindungan Khusus Anak	518.844.000	376.333.549	72,53
1.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	93.730.000	93.730.000	100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	93.730.000	93.730.000	100
2.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	352.749.000	226.000.189	64,07
	1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	66.267.000	42.920.600	64,77
	2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	286.482.000	183.079.589	63,91
3.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	72.365.000	56.603.360	78,22
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	72.365.000	56.603.360	78,22
	Jumlah	1.145.016.340	902.449.321	78,82



3.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Arah Kebijakan	Program	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	46 Perangkat Daerah	27 Perangkat Daerah	58,69 %
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	46 Perangkat Daerah	31 Perangkat Daerah	67,39 %
			Terlaksananya Kegiatan Rapat POKJA PUG dan Vokal Poin1	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
	Perlindungan Perempuan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Materi KIE berupa Leaflet, dan Spanduk	1 Paket (Leaflet: 300 Lembar, Spanduk: 3 Lembar)	1 Paket (Leaflet: 300 Lembar, Spanduk: 3 Lembar)	100 %
			Terlaksananya KIE Pencegahan KtP, KtA, TPPO bagi kelompok Masyarakat rentan dan wilayah kasus tinggi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %



Arah Kebijakan	Program	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Tersedianya Belanja Makan Minum Rapat petugas UPTD PPA dan Dinas Sosial PPPA	12 Kali	12 Kali	100 %
			Tersedianya Belanja Pemeliharaan Mobil Perlindungan dan Motor Perlindungan	2 paket	2 Paket	100 %
			Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Program UPTD PPA	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Terlaksananya Layanan Gelar Kasus	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
			Terlaksananya Layanan Penjangkauan Korban	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
			Terlaksananya Layanan Pendampingan Korban	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan kasus KtA, KtP, TPPO, ABH	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %



Arah Kebijakan	Program	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	Peningkatan Kualitas Keluarga	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan bagi Fasilitator dari Lembaga Keagamaan tentang Kursus Pra Nikah Ketahanan Keluarga untuk Percepatan Penurunan Stunting	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
			Terlaksananya Pendampingan Bagi Calon Pasangan Suami Istri Berbasis Ketahanan Keluarga yang Setra Gender sebanyak 2 Calon Pasangan	17 Pasangan	2 Pasangan	11,76%
	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengambilan Data Profil Gender dan Anak	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan pengolahan, analisis, penyajian data gender dan anak dengan BPS	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Bimtek bagi Aktivis PATBM Desa/Kelurahan	60 Orang	60 Orang	100%



Arah Kebijakan	Program	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
			Terlaksananya Sosialisasi Pembentukan Forum Anak Tingkat Kabupaten	100 Orang	80 Orang	80%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100 %
			Terlaksananya Monev PATBM/Desa Kelurahan Layak Anak	12 Desa	12 Desa	100 %
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	100 Orang	100 Orang	100 %
	Perlindungan Khusus Anak	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi dan KIE melalui Penyuluhan	31 Sekolah	31 Sekolah	100 %
			Tersedianya Leaflet KIE	450 Lembar	450 Lembar	100 %
			Tersedianya Spanduk KIE	10 Lembar	10 Lembar	100 %
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	Tersedianya Materi Penyuluhan	12.000 Lembar	12.000 Lembar	95 %



Arah Kebijakan	Program	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
		Kabupaten/Kota				
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Dana DAK Non Fisik di Kementerian PPA RI – Jakarta	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Pengaduan ke Lembaga Layanan Lainnya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan Gelar Kasus	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
			Terlaksananya Layanan Penjangkauan Korban	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
			Terlaksananya Layanan Pendampingan Korban	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
			Terlaksananya Layanan Rumah Perlindungan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Manajemen Kasus dan Penanganan Kasus KtP, KtA, TPPO, ABH	35 Orang	35 Orang	100%
			Terlaksananya Pelatihan Sertifikasi Mediator untuk Petugas UPTD PPA	2 Orang	2 Orang	100%



3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan

Kabupaten/Kota

Alokasi Anggaran : Rp. 16.272.000

Realisasi : Rp. 16.107.729 (98,99%)

Keluaran :

- Tersedianya ATK sebanyak 4 jenis, materi sebanyak 1470 lembar, spanduk 1 lembar, makan minum peserta sebanyak 50 kotak.
- Terbayarnya Honorarium 1 orang narasumber dan Transport peserta sebanyak 42 orang.

2) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

Alokasi Anggaran : Rp. 39.037.000

Realisasi : Rp. 34.821.850(89,20%)

Keluaran :

- Tersedianya ATK sebanyak 4 jenis, penggandaan materi sebanyak 2104 lembar, spanduk sebanyak 1 lembar, makan minum peserta sebanyak 110 kotak, vokal poin sebanyak 70 kotak
- Terbayarnya Honorarium 1 orang narasumber, 1 orang moderator dan Transport peserta Rapat Pokja PUG dan Vokal Poin sebanyak 42 orang.

2. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi Anggaran : Rp. 55.770.000

Realisasi : Rp. 54.770.000(98,21%)

Keluaran :

- Tersedianya Bahan Materi KIE berupa Leaflet sebanyak 300 Lembar, Fotocopy Materi KIE sebanyak 1900 lembar, Spanduk sebanyak 3 lembar, makan minum pelaksanaan KIE Pencegahan KtP, KtA, TPPO bagi kelompok masyarakat rentan dan wilayah kasus tinggi sebanyak 1130 dos
- Terbayarnya uang saku bagi 230 petugas kegiatan KIE Pencegahan KtP, KtA, TPPO bagi kelompok masyarakat rentan dan wilayah kasus tinggi

3. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota

Alokasi : Rp. 48.576.000

Anggaran

Realisasi : Rp. 47.849.398 (98,50%)

Keluaran :

- Tersedianya makan minum rapat petugas UPTD PPA dan Dinas Sosial PPPA selama 12 bulan



- Tersedianya jasa pemeliharaan Mobil perlindungan sebanyak 1 unit selama 1 tahun dan Motor perlindungan sebanyak 1 unit selama 1 tahun
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten /Kota
Alokasi : Rp. 60.358.000
Anggaran
Realisasi : Rp. 39.168.000 (64,89%)
Keluaran :
- Tersedianya makan minum layanan gelar kasus sebanyak 20 dos, layanan pendampingan klien sebanyak 216 dos, penjangkauan klien sebanyak 25 dos.
 - Terbayarnya Visum et Repertum untuk 5 Korban Kekerasan Seksual
 - Terbayarnya Uang saku layanan gelar kasus untuk 20 orang, petugas layanan pendampingan klien sebanyak 19 kasus dan petugas layanan pendampingan klien sebanyak 19 kasus
4. **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
- 1) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
Alokasi : Rp. 29.295.000
Anggaran
Realisasi : Rp. 27.133.000 (92,62%)
Keluaran :
- Tersedianya ATK sebanyak 4 jenis, penggandaan materi pelatihan pencatatan dan pelaporan kasus KtP, KtA, TPPO, ABH sebanyak 2720 lembar, Makan minum bagi peserta pelatihan pencatatan dan pelaporan kasus KtP, KtA, TPPO, ABH sebanyak 90 kotak
 - Terbayarnya Honor narasumber sebanyak 1 orang, sewa gedung selama 3 hari, akomodasi 1 orang narasumber dan transport bagi 25 peserta kegiatan pelatihan pencatatan dan pelaporan kasus KtP, KtA, TPPO, ABH
5. **Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
- 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Alokasi : Rp. 56.780.900
Anggaran
Realisasi : Rp. 35.248.000 (62,08%)
Keluaran :
- Tersedianya ATK sebanyak 3 jenis, penggandaan sebanyak 5415 lembar, spanduk untuk kegiatan Pelatihan bagi Fasilitator dari Lembaga Keagamaan tentang Kursus Pra Nikah Ketahanan Keluarga untuk percepatan penurunan stunting sebanyak 1 lembar, makan minum peserta sebanyak 110 dos
 - Terbayarnya honor 2 orang narasumber, 1 orang moderator dan akomodasi narasumber kegiatan Pelatihan bagi Fasilitator dari Lembaga Keagamaan tentang Kursus Pra Nikah Ketahanan Keluarga untuk percepatan penurunan stunting sebanyak 2 orang.



- Terlaksananya Pendampingan Bagi Calon Pasangan Suami Istri Berbasis Ketahanan Keluarga Yang Setara Gender sebanyak 2 calon pengantin sebanyak 1 kali
 - Terbayarnya transport bagi 45 peserta kegiatan Pelatihan bagi Fasilitator dari Lembaga Keagamaan tentang Kursus Pra Nikah Ketahanan Keluarga untuk percepatan penurunan stunting
- 6. Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
- 1) Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota
- Alokasi : Rp. 137.037.270
- Anggaran
- Realisasi : Rp. 100.754.577 (73,52%)
- Keluaran :
- Terbayarnya perjalanan dinas petugas dalam rangka koordinasi tentang penyusunan profil gender dan anak di Dinas PPPA Provinsi NTT sebanyak 1 kali
 - Terbayarnya perjalanan dinas pengambilan data profil pada 63 desa/kelurahan
 - Tidak Terbayarnya makan minum pertemuan lintas sektor dalam penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak sebanyak 30 orang
 - Terbayarnya pembelian 1 unit laptop
- 2) Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Kewenangan Kabupaten/Kota
- Alokasi : Rp. 16.120.000
- Anggaran
- Realisasi : Rp. 16.044.000 (99,53%)
- Keluaran :
- Terlaksananya kegiatan penyusunan pengolahan, analisis, penyajian data gender dan anak dengan BPS sebanyak 2 kali
- 7. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**
- 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota
- Alokasi : Rp. 83.919.200
- Anggaran
- Realisasi : Rp. 72.737.600 (86,68%)
- Keluaran :
- Tersedianya ATK sebanyak 4 jenis untuk kegiatan Bimtek bagi Aktivistis PATBM Desa/Kelurahan dan 4 jenis ATK untuk kegiatan Sosialisasi pembentukan Forum Anak Tingkat Kabupaten; penggandaan materi Bimtek bagi Aktivistis PATBM Desa/Kelurahan sebanyak 7444 lembar dan penggandaan materi Sosialisasi pembentukan Forum Anak Tingkat Kabupaten sebanyak 2000 lembar; spanduk Bimtek bagi Aktivistis PATBM Desa/Kelurahan sebanyak 1 lembar dan spanduk Sosialisasi pembentukan Forum Anak Tingkat Kabupaten sebanyak 1 lembar; makan minum bagi 75 orang peserta Bimtek bagi Aktivistis PATBM Desa/Kelurahan dan makan minum bagi 50 orang peserta pertemuan gugus tugas Kabupaten Layak Anak dalam penyusunan RAD KLA sebanyak 1 kali, makan minum bagi 50 orang peserta pertemuan gugus tugas Kabupaten Layak Anak dalam penyusunan RAD KLA sebanyak 1 kali, makan minum bagi 100 orang peserta kegiatan Sosialisasi pembentukan Forum Anak Tingkat Kabupaten.



- Terbayarnya Honor 2 orang narasumber Bimtek bagi Aktivistis PATBM Desa/Kelurahan, Honor 1 orang moderator Sosialisasi pembentukan Forum Anak Tingkat Kabupaten, akomodasi 2 orang narasumber Bimtek bagi Aktivistis PATBM Desa/Kelurahan, akomodasi 2 orang narasumber Sosialisasi pembentukan Forum Anak Tingkat Kabupaten, Uang Saku bagi 80 orang peserta Sosialisasi pembentukan Forum Anak Tingkat Kabupaten, Uang Saku bagi 60 orang peserta Bimtek bagi Aktivistis PATBM Desa/Kelurahan
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota
Alokasi : Rp. 50.806.970
Anggaran
Realisasi : Rp. 50.003.618 (98,42%)
Keluaran :
- Tersedianya 7 jenis bahan habis, penggandaan sebanyak 20084 lembar dan *Personal Computer* sebanyak 1 unit
 - Terlaksananya Koordinasi pemenuhan hak anak dan perempuan, pemenuhan hak anak dalam perencanaan penganggaran DAK Non Fisik di Kementerian PPPA sebanyak 1 kali, Monev PATBM/Desa Kelurahan layak anak di 12 desa

8. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

- 1) Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota
Alokasi : Rp. 32.200.000
Anggaran
Realisasi : Rp. 31.478.000 (97,76%)
Keluaran :
- Terlaksananya Sosialisasi PUSPAGA (Pusat Pelayanan Keluarga) dalam rangka penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak
 - Tersedianya 3 jenis ATK untuk kegiatan Sosialisasi PUSPAGA (Pusat Pelayanan Keluarga) dalam rangka penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak
 - Tersedianya penggandaan materi Sosialisasi PUSPAGA (Pusat Pelayanan Keluarga) dalam rangka penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak sebanyak 2040 lembar
 - Tersedianya spanduk kegiatan Sosialisasi PUSPAGA (Pusat Pelayanan Keluarga) dalam rangka penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak sebanyak 1 lembar
 - Tersedianya makan minum Sosialisasi PUSPAGA (Pusat Pelayanan Keluarga) dalam rangka penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak bagi 110 peserta
 - Terbayarnya honor 2 narasumber kegiatan Sosialisasi PUSPAGA (Pusat Pelayanan Keluarga) dalam rangka penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak
 - Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan peningkatan kualitas hidup anak di Kupang sebanyak 1 kali
 - Terbayarnya Uang saku peserta Sosialisasi PUSPAGA (Pusat Pelayanan Keluarga) dalam rangka penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak sebanyak 100 orang



9. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota
Alokasi : Rp. 93.730.000
Anggaran
Realisasi : Rp. 93.730.000 (100%)
Keluaran :
- Terlaksananya KIE pencegahan KtP, KtA, TPPO bagi Masyarakat rentan dan wilayah kasus tinggi
 - Tersedianya *leaflet* sebanyak 450 lembar, penggandaan materi KIE pencegahan KtP, KtA, TPPO bagi Masyarakat rentan dan wilayah kasus tinggi sebanyak 7100 lembar, spanduk KIE pencegahan KtP, KtA, TPPO bagi Masyarakat rentan dan wilayah kasus tinggi sebanyak 10 lembar, makan minum KIE pencegahan KtP, KtA, TPPO bagi Masyarakat rentan dan wilayah kasus tinggi bagi 2305 orang
 - Terlaksananya perjalanan dinas bagi 5 orang petugas pelaksana KIE pencegahan KtP, KtA, TPPO bagi Masyarakat rentan dan wilayah kasus tinggi di 31 sekolah

10. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
Alokasi : Rp. 66.267.000
Anggaran
Realisasi : Rp. 42.920.600 (64,77%)
Keluaran :
- Terbayarnya penggandaan materi Penyuluhan sebanyak 12.000 lembar, spanduk Penyuluhan Melindungi Anak Dari Kekerasan Seksual sebanyak 1 lembar, makan minum bagi 600 peserta Penyuluhan Melindungi Anak Dari Kekerasan Seksual
 - Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi dana DAK NF PPA, Layanan Pengaduan ke Lembaga Layanan Lainnya di Kupang sebanyak 1 kali
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota
Alokasi : Rp.286.482.000
Anggaran
Realisasi : Rp.183.079.589 (63,91%)
Keluaran :
- Terbayarnya Makan minum Layanan gelar kasus bagi 20 orang , Layanan pendampingan korban sebanyak 782 dos, Penjangkauan korban sebanyak 140 dos, Layanan Rumah Perlindungan sebanyak 57 dos
 - Terbayarnya sewa Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak sebanyak 1 unit
 - Terlaksananya perjalanan dinas untuk pendamping dan korban dalam kegiatan pendampingan ke Pengadilan Negeri Kupang sebanyak 5 kali
 - Tersedianya uang saku Layanan gelar kasus bagi 20 orang
 - Terlaksananya kegiatan penjangkauan dan pendampingan korban kekerasan terhadap Anak sebanyak 44 kasus



11. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Kabupaten/ Kota

Alokasi : Rp. 72.365.000

Anggaran

Realisasi : Rp. 56.603.360 (78,22%)

Keluaran :

- Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Manajemen Kasus dan Penanganan Kasus KtP, KtA, TPPO bagi 35 orang petugas di lembaga penyedia layanan;
- Tersedianya 6 Jenis ATK untuk kegiatan Kegiatan Pelatihan Manajemen Kasus dan Penanganan Kasus KtP, KtA, TPPO, penggandaan materi Kegiatan Pelatihan Manajemen Kasus dan Penanganan Kasus KtP, KtA, TPPO sebanyak 1840 lembar, makan minum Kegiatan Pelatihan Manajemen Kasus dan Penanganan Kasus KtP, KtA, TPPO sebanyak 70 dos;
- Terbayarnya Honorarium 1 orang Narasumber Kegiatan Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus KtP, KtA, TPPO; sewa gedung Kegiatan Pelatihan Manajemen Kasus dan Penanganan Kasus KtP, KtA, TPPO selama 2 hari;
- Tersedianya kontribusi Bimtek Mediator untuk 2 petugas UPTD PPA
- Terlaksananya perjalanan dinas 1 orang Narasumber dari dan ke Kupang dalam Kegiatan Pelatihan Manajemen Kasus dan Penanganan Kasus KtP, KtA, TPPO; dalam rangka mengikuti kegiatan Pelatihan Sertifikasi Mediator;
- Tersedianya Transport peserta Pelatihan Manajemen Kasus dan Penanganan Kasus KtP, KtA, TPPO sebanyak 30 orang



3.4 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	PROGRAM				KEGIATAN			
	SASARAN STRATEGI	URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENYESUAIAN (YA//TIDAK)
1.	Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Pelaksanaan PUG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Ya
					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Ya



NO	PROGRAM				KEGIATAN			
	SASARAN STRATEGI	URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENYESUAIAN (YA//TIDAK)
2.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan yang Dilayani	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Materi KIE berupa Leaflet dan Spanduk	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan	Ya
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase Korban Kekerasan yang Dilayani	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Tersedianya Biaya pemeliharaan mobil perlindungan Perempuan dan motor perlindungan bagi Korban Kekerasan	Meningkatnya pelayanan rujukan kasus bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan	Ya
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Gelar Kasus, Layanan Rujukan klien, Layanan penjangkauan dan pendampingan korban, Layanan Medikolegal dan rujukan klien ke Kupang	Meningkatnya pelayanan kasus terhadap perempuan dan anak	Ya



NO	PROGRAM				KEGIATAN			
	SASARAN STRATEGI	URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENYESUAIAN (YA//TIDAK)
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang terlayani	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kasus KtP, KtA, TPPO, ABH bagi Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Meningkatnya kapasitas petugas pemberi layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Ya
3.	Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender	Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk miskin yang terlayani	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Bagi Fasilitator dari Lembaga Keagamaan tentang Kursus Pra Nikah Ketahanan Keluarga untuk Percepatan penurunan stunting dan pendampingan bagi calon pasangan suami istri Berbasis Ketahanan Keluarga yang setara gender	Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Ya



NO	PROGRAM				KEGIATAN			
	SASARAN STRATEGI	URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENYESUAIAN (YA//TIDAK)
4.	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Data SIGA OPD	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabuapten/Kota	Terlaksananya pengambilan Data Terpilah Anak dan Gender di Desa/Kelurahan	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Ya
					Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Pengolahan Analisis, Penyajian Data Gender dan Anak dengan BPS	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Ya
5.	Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	Pemenuhan Hak Anak	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi Aktivistis PATBM Desa/Kelurahan, Sosialisasi Pembentukan Forum Anak Tingkat Kabupaten, Pertemuan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dalam Penyusunan RAD Kabupaten Layak Anak	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Ya



NO	PROGRAM				KEGIATAN			
	SASARAN STRATEGI	URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENYESUAIAN (YA//TIDAK)
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Bahan Habis Pakai dan Operasional lainnya di UPTD PPA, Terlaksananya Koordinasi Pemenuhan Hak Anak di Kupang, dan Terlaksananya monev PATBM Desa/Kelurahan Layak Anak		
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Anak yang mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPAGA) dalam rangka penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak dan Koordinasi program kegiatan peningkatan kualitas hidup anak	Meningkatnya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Ya



NO	PROGRAM				KEGIATAN			
	SASARAN STRATEGI	URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENYESUAIAN (YA//TIDAK)
6.	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah Perlindungan Khusus Anak	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya KIE Pencegahan KtP, KtA, TPPO bagi Kelompok Masyarakat rentan dan wilayah kasus tinggi	Meningkatnya pengetahuan Masyarakat dalam Perlindungan Khusus Anak	Ya
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyuluhan Melindungi Anak dari Kekerasan Seksual, Koordinasi dan sinkronisasi Layanan Pengaduan ke Lembaga Layanan Lainnya di Provinsi NTT	Meningkatnya Layanan bagi Anak yang Memerlukan perlindungan khusus	Ya
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Rumah Perlindungan, Layanan Gelar Kasus, Layanan Penjangkauan dan Pendampingan Korban, Layanan Medikolegal,	Meningkatnya Layanan bagi Anak yang Memerlukan perlindungan khusus	Ya



NO	PROGRAM				KEGIATAN			
	SASARAN STRATEGI	URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENYESUAIAN (YA//TIDAK)
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terlatih	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus KtP, KtA, TPPO, Pelatihan Sertifikasi Mediator,	Meningkatnya Pengetahuan petugas pada Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Ya



3.5 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

1. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

- Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Permasalahan:

Belum Optimalnya penyerapan anggaran pada Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota, dikarenakan:

1. Realisasi anggaran berdasarkan Kasus kekerasan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang dilaporkan
2. Adanya kesalahan pemilihan kode rekening belanja anggaran dak non fisik dan tidak dapat diubah pada perubahan anggaran sehingga tidak terbayarkannya jasa tenaga ahli pada layanan pendampingan kasus kekerasan terhadap Perempuan, namun kegiatan penjangkauan dan pendampingan oleh tenaga ahli kepada korban kekerasan terhadap perempuan tetap dilakukan dan dibayarkan uang saku/makan minum saat pelaksanaan tugas berdasarkan mekanisme APBD.

2. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Belum Optimalnya penyerapan anggaran pada Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, dikarenakan Realisasi Anggaran berdasarkan permintaan pendampingan advokasi dari pasangan calon pengantin yang akan menikah.

c) PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

- Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Belum Optimalnya penyerapan anggaran pada Sub kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota dikarenakan:

- Tidak Terlaksananya kegiatan Pertemuan Lintas sektor dalam penyajian dan pemanfaatan Data gender dan Anak disebabkan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, data gender yang diperoleh dari desa/kelurahan belum memadai, belum adanya kerjasama antara Dinas dan BPS dalam



penyajian data gender karena BPS Kabupaten Sabu Raijua terbentuk pada November 2023.

d) PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

- Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Belum Optimalnya penyerapan anggaran pada Sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dikarenakan adanya kesalahan pengentrian pertanggungjawaban kegiatan penyuluhan melindungi anak dari kekerasan seksual pada kegiatan lain, dan tidak dapat dilakukan perubahan sehingga anggaran kegiatan tersebut tidak terealisasi, sementara kegiatannya telah dilaksanakan.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota
Belum Optimalnya penyerapan anggaran pada Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota, dikarenakan:
 - 1). Realisasi anggaran berdasarkan Kasus kekerasan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang dilaporkan
 - 2). Adanya kesalahan pemilihan kode rekening belanja anggaran dak non fisik dan tidak dapat diubah pada perubahan anggaran sehingga tidak terbayarkannya jasa tenaga ahli pada layanan pendampingan kasus kekerasan terhadap Anak, namun kegiatan penjangkauan dan pendampingan oleh tenaga ahli kepada koban kekerasan terhadap Anak tetap di lakukan dan dibayarkan uang saku/makan minum saat pelaksanaan tugas berdasarkan mekanisme APBD.
Belum Optimalnya penyerapan anggaran pada Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Kabupaten/ Kota dikarenakan adanya efisiensi penggunaan anggaran pada kegiatan pelatihan mediator bagi tenaga pekerja social pada UPTD yaitu pada rekening belanja makan minum, belanja perjalanan dinas dan biaya kontribusi pelatihan.
- **Solusi:**
 - ✚ Lebih cermat dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, sehingga tidak terkendala dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dalam anggaran kas.



- ✚ Lebih meningkatkan fungsi kontrol terhadap dokumen pertanggung jawaban sehingga dapat meminimalisir adanya kesalahan dalam penginputan pertanggungjawaban pada SIPD
- ✚ Melakukan pembenahan pengambilan data terpilah serta lebih cermat dalam melakukan perencanaan strategis dan pengolahan data yang melibatkan BPS Kabupaten Sabu Raijua s dengan memperhatikan kondisi yang ada.



3.6 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Tidak ada

3.7 Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya

NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindaklanjut	Tujuan /Masalah yang diselesaikan
1.	Terhadap Kinerja daya serap anggaran secara umum dinilai Kurang. Ke depan agar kuallitas perencanaan lebih ditingkatkan lagi.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menerima Catatan dan rekomendasi DPRD dan menyampaikan ke Bupati Sabu Raijua sebagai Kepala Daerah serta akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan.	Kinerja daya serap anggaran yang secara umum dinilai kurang maka kedepan kualitas perencanaan lebih ditingkatkan sehingga pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dapat lebih baik.



3. Urusan Pangan

3.1 Capaian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Penyelenggara **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan** di Kabupaten Sabu Raijua dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sabu Raijua dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 8.079.714.391,-** dan realisasi sebesar **Rp. 4.646.304.673,- (57,51%)**. Adapun rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.568.033.441	4.141.592.373	54,72
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.582.365.486	3.189.611.598	48,46
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	191.358.000	191.358.000	100
	2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	155.602.000	150.162.000	96,50
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46.500.000	46.500.000	100
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	46.500.000	46.500.000	100
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	610.578.890	578.159.228	94,69
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.999.750	16.581.000	92,12
	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	296.733.140	294.993.000	99,41
	3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.040.000	41.040.000	100
	4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.000.000	18.000.000	100
	5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	236.806.000	207.545.228	87,64
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.059.500	33.002.000	99,83
	1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000	19.977.000	99,89
	2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.060.000	10.060.000	100
	3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.999.500	2.965.000	98,85
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.171.565	102.961.547	98,22
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	84.180.000	82.984.547	98,58
	2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.991.565	19.977.000	99,92



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
//	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	347.811.650	346.240.400	99,55
1.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	77.311.650	75.740.400	97,97
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	77.311.650	75.740.400	97,97
2.	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	150.500.000	150.500.000	100
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	150.500.000	150.500.000	100
3.	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	120.000.000	120.000.000	100
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	120.000.000	120.000.000	100
///	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	117.509.000	112.876.800	96,06
1.	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	117.509.000	112.876.800	96,06
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	117.509.000	112.876.800	96,06
IV	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	46.360.300	45.595.100	98,35
1.	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	46.360.300	45.595.100	98,35
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	46.360.300	45.595.100	98,35
Jumlah		8.079.714.391	4.646.304.673	57,51

3.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Arah Kebijakan	Program	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	Pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Menjamin Ketercukupan Pangan, Air dan Energi Menuju SARAI CUKUP	Meningkatnya Infrastruktur Lumbung Pangan	100	0	100



Penguatan perekonomian masyarakat berbasis UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing.	Peningkatan Difersifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	66,48	80,55	120,41
	Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah Desa Rawan Pangan	2	2	100
	Pengawasan Keamanan Pangan	Presentase Pangan Segar yang ditemukan dari Pengawasan Keamanan Pangan	86	100	100

3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Alokasi Anggaran : Rp. 6.773.723.486,-
 Realisasi : Rp. 3.189.611.598 (48,46%)
 Keluaran : -

Terlaksananya Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Tunjangan Penghasilan ASN sejumlah 63 orang, selama 12 bulan dan Jasa Administrasi Keuangan 10 orang, selama 12 bulan

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Alokasi Anggaran : Rp. 46.500.000,-
 Realisasi : Rp. 46.500.000 (100,00%)
 Keluaran :

Terlaksananya Belanja Pakaian Dinas sebanyak 26 Stel

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 17.999.750,-
 Realisasi : Rp. 16.581.000 (92,12%)
 Keluaran :

Terlaksananya belanja Komponen Instalasi Listrik sebanyak 1 Paket, berupa : bola lampu, fitting kabel dan pulsa listrik

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 296.733.140,-
 Realisasi : Rp. 294.993.000,- (99,41%)
 Keluaran : -

Tersedianya ATK sebanyak 1 paket, Materai sebanyak 700 lembar, Laptop sebanyak 4 unit, Kursi Plastik sebanyak 100 buah, Meja ½ Biro sebanyak 6 buah, Personal Computer sebanyak 5 unit, Alat Scan sebanyak



- 2 unit dan UPS sebanyak 3 unit
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 Alokasi Anggaran : Rp. 41.040.000,-
 Realisasi : Rp. 41.040.000,- (100,00%)
 Keluaran : -
 Tersedianya Makan dan Minum Rapat sebanyak, sejumlah 144 dos, untuk 12 kegiatan
- 4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 Alokasi Anggaran : Rp. 18.000.000,-
 Realisasi : Rp. 18.000.000,- (100%)
 Keluaran :
 Tersedianya Dokumen sebanyak 200 buku dan Foto Copy Dokumen sebanyak 50.000 lembar
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 Alokasi Anggaran : Rp. 236.806.000,-
 Realisasi : Rp. 207.545.228,- (87,64%)
 Keluaran :
 Terlaksananya Perjalanan Dalam Daerah dan luar Daerah sejumlah 56 kegiatan

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Alokasi Anggaran : Rp. 20.000.000,-
 Realisasi : Rp. 19.977.000,- (99,89%)
 Keluaran :
 Terbayarnya jasa Listrik untuk 12 bulan
- 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Alokasi Anggaran : Rp. 10.060.000,-
 Realisasi : Rp. 10.060.000,- (100,00%)
 Keluaran :
 Terlaksananya servis laptop/pc 10 unit dan service printer sebanyak 4 unit
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 Alokasi Anggaran : Rp. 2.999.500,-
 Realisasi : Rp. 2.965.000,- (98,85%)
 Keluaran : -
 Tersedianya Peralatan dan bahan Kebersihan Kantor berupa kanebo, pembersih kaca, pembersih lantai, pengharum ruangan, portex pembersih kamar mandi, sapu ijuk, tissue roll nice

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 Alokasi Anggaran : Rp. 84.180.000,-
 Realisasi : Rp. 82.984.547,- (98,58%)
 Keluaran :
 Tersedianya jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas (service mobil 2 unit dan motor 5 unit)
- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 Alokasi Anggaran : Rp. 19.991.565,-
 Realisasi : Rp. 19.977.000,- (99,92%)
 Keluaran :
 Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor sebanyak 1 paket, sejumlah 1 gedung



6. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

- 1) Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
Alokasi Anggaran : Rp. 77.311.650,-
Realisasi : Rp. 75.740.400,- (97,97%)
Keluaran :
Tersedianya dokumen Laporan Harga Pangan dan Distribusi Harga Pangan dan NBM, PPH, dan SKPG

7. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

- 1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Alokasi Anggaran : Rp. 150.500.000,-
Realisasi : Rp. 150.500.000,- (100,00%)
Keluaran : -
Tersedianya cadangan Pangan Pemerintah (Beras Premium) sebanyak 12.040 Kg.

8. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

- 1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Alokasi Anggaran : Rp. 120.000.000,-
Realisasi : Rp. 120.000.000,- (100,00%)
Keluaran : -
Terlaksananya Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL 6 unit) dan Kegiatan Pendampingan Pekarangan Pangan Lestari sejumlah 6 kegiatan

9. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
Alokasi Anggaran : Rp. 117.509.000,-
Realisasi : Rp. 112.876.800,- (96,06%)
Keluaran : -
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Kegiatan FSVA



3.4 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran strategis	Program			Kegiatan				Kesesuaian (ya/tidak)
		Uraian program	Target kinerja program	Indikator kinerja program	PROGRAM TERKAIT DENGAN SASARAN (Ya/Tidak)	Uraian kegiatan	Target kinerja kegiatan	Indikator kinerja kegiatan	
	Menjamin Ketercukupan Pangan, Air dan Energi Menuju SARAI CUKUP	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Sarana Produksi	Pendapatan perkapita sector primer	Ya	Penyediaan infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	Tersedianya Penyediaan infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	ya
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	petani/ Peternak dan PPL/ASN Dinas Pertanian dan Pangan		Ya	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	ya



		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			Ya	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Pangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan		ya
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			Ya	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah		ya



3.5 Permasalahan dan Solusi

Tidak ada

3.6 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan dalam format sebagai berikut:

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Peraturan Bupati Sabu Raijua tentang Cadangan Pangan Pemerintah	401.A/KEP/HK/2023 Tanggal 2 Oktober 2023	Pelaksana Penyelenggaraan Cadanga Pangan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua
2.	Edaran Bupati Sabu Raijua terhadap Penyebaran Penyakit RABIES	524/230/DPP-SR/V/2023 Tanggal 31 Mei 2023	Kewaspadaan Penyebaran Penyakit RABIES
3.	Edaran Bupati Sabu Raijua terhadap African Swine Fever (ASF)	524/44/DPP-SR/I/2023 Tanggal 18 Januari 2023	Kewaspadaan ASF
4.	Edaran Bupati Sabu Raijua terhadap Pemberian Ijin Terbatas	524/242/DPP-SR/VII/2023 Tanggal 04 Juli 2023	Pembatasan Pemasukan Ternak Babi Potong, Babi Bibit dan Produk Asal Ternak Babi
5.	Edaran Bupati Sabu Raijua terhadap Pemberian Ijin Terbatas	524/60/DPP-SR/I/2023 Tanggal 30 Januari 2023	Pembatasan Lalu Lintas Ternak Babi dan Produk Asal Ternak Babi

3.7 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD TA sebelumnya

Tidak ada



4. Urusan Pertanahan

3.1 Capaian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Penyelenggara **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan** di Kabupaten Sabu Raijua dilaksanakan oleh Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sabu Raijua dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 288.820.000,-** dan realisasi sebesar **Rp. 178.396.000,- (61,77%)**. Adapun rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
<i>I.</i>	<i>Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</i>	<i>288.820.000</i>	<i>178.396.000</i>	<i>61,77</i>
1.	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	288.820.000	178.396.000	61,77
	1) Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	91.000.000	6.000.000	6,59
	2) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	197.820.000	172.396.000	87,15
Jumlah		288.820.000	178.396.000	61,77



3.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	%	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		I	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KETUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK			
				1	Penyelesaian Masalah Ganti Karugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	288.820.000 Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Karugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah	178.396.000 Meningkatnya Penyelesaian Masalah Ganti Karugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah	61,77
				a	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	91.000.000 Tersedianya Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.000.000 Jumlah Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6,59
				b	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	197.820.000 Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	172.396.000 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	87,15



3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1) Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi : Rp. 91.000.000
Anggaran
Realisasi : Rp. 6.000.000 (6,59%)
Keluaran :

Terlaksananya pensertifikatan tanah Pemda sebanyak 15 bidang

2) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi : Rp. 197.820.000
Anggaran
Realisasi : Rp. 172.396.000 (87,15%)
Keluaran :

Terlaksananya pengukuran tanah Pemda, pengambilan titik koordinat tanah Pemda, penyelesaian permasalahan tanah Pemda di 6 Kecamatan dan Terbayarnya honor Tim penyelesaian masalah tanah di Kabupaten Sabu Raijua



3.4 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN (YA/TIDAK)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
1	Tertatanya Penguasaan Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah dalam kehidupan bermasyarakat	Program Penyelesaian Ganti Ketugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Terlaksananya Penyelesaian Ganti Ketugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Tersedianya Penyelesaian Ganti Ketugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian Masalah Ganti Karugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Karugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyelesaian Masalah Ganti Karugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ya



3.5 Permasalahan dan Solusi

➤ Permasalahan

Belum maksimalnya penyerapan anggaran pada sub kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota disebabkan karena penggantian sertifikat tanah masyarakat terdampak pelebaran jalan disesuaikan dengan luasan bidang tanah.

➤ Solusi

Pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan.

3.6 Kebijakan Strtegis yang ditetapkan

Tidak ada

3.7 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1.	Penyelenggaraan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pertanahan Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Sabu Raijua dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 216.020.000,- dan dilaporkan dalam LKPJ ini terealisasi sebesar Rp. 133.551.920,- (61,82%). Terhadap penyelenggaraan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pertanahan Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Sabu Raijua, Pansus memberikan Catatan dan Rekomendasi sebagai berikut : Terhadap kinerja daya serap anggaran secara umum dinilai Buruk. Ke depan agar kualitas perencanaan lebih ditingkatkan lagi	Pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan menindak lanjuti rekomendasi DPRD dengan melakukan lebih cermat dan berkomitmen untuk merealisasikan setiap program dengan baik.	Realisasi dan daya serap anggaran untuk Penyelenggaraan urusan wajib Non Pelayanan Dasar Pertanahan Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Sabu Raijua adalah yang paling rendah sehingga perlu dilakukan perencanaan program/kegiatan dengan baik.



5. Urusan Lingkungan Hidup

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Penyelenggaraan **Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup** di Kabupaten Sabu Raijua dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sabu Raijua dengan alokasi anggaran Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup sebesar **Rp. 3.177.813.579,-** dan realisasi sebesar **Rp.2.909.871.404,- (91,57%)**. Adapun pelaksanaan Program/Kegiatan dari Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2023 sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.169.157.479,-	1.983.807.280,-	91,46
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.651.589.229,-	1.505.993.264,-	91.18
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.559.625.229,-	1.416.515.264,-	90.82
	2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	91.964.000,-	89.478.000,-	97.30
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41.428.000,-	35.920.000,-	86,70
	1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	22.000.000,-	22.000.000,-	100
	2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	66.562.000,-	62.911.515,-	94.52
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	290.193.700,-	257.083.671,-	88.59
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.881.250,-	4.619.000,-	67.12
	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.745.450,-	67.128.000,-	99,09
	3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.500.000,-	5.070.000,-	37.56
	4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.625.000,-	7.824.200,-	90,72
	5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	193.442.000,-	172.442.471,-	89.14
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.047.300,-	33.800.000,-	99.27
	Pengadaan Mebel	34.047.300,-	33.800.000,-	99.27
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.195.250,-	17.838.000,-	89.33
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,-	4.250.000,-	85.00
	2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.000.000,-	9.525.000,-	86.59
	3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.427.700,-	3.423.000,-	96.86
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.570.000,-	84,157.960,-	99.51



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.570.000,-	84,157.960,-	99.51
II.	Program Perencanaan Lingkungan	449.280.000,-	401.587.963,-	89.38
1.	Penyelenggarakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	449.280.000,- 449.280.000,-	401.587.963,- 401.587.963,-	89.38 89.38
III.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	24.866.000,-	24.730.000,-	99,45
1.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	60.616.000,- 60.616.000,-	59.489.185,- 59.489.185,-	99,14 99,14
2.	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	116.000.000,- 116.000.000,-	115.940.000,- 115.940.000,-	99,95 99,95
IV.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Ijin Lingkungan dan Ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	44.480.000,-	39.380.000,-	88.53
1.	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau kegiatan yang ijin Lingkungan dan Ijin PPLH di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1) Pengawasan Usaha dan/atau kegiatan yang ijin Lingkungan dan Ijin PPLH di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	34.280.000,- 34.280.000,- 10.200.000,-	34.280.000,- 34.280.000,- 5.100.000,-	100 100 50
V.	Program Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	132.375.000,-	127.280.000,-	96.15
1.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	132.375.000,-	127.280.000,-	96.15



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
	1) Peningkatan Kapasitas dan Komptensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat	85.704.000,-	80.790.000,-	94.27
	1) Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	46.671.000,-	46.490.000,-	99.61
VI.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	30.880.000,-	22.720.000,-	73.58
1.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	30.880.000,-	22.720.000,-	73.58
VII.	Program Pengelolaan Sampah	175.025.100,-	159.666.976,-	91.23
1.	Kegiatan Pengelolaan Sampah	166.525.100,-	151.166.976,-	90.78
	1) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	111.783.100,-	99.229.500,-	88.77
	2) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	54.742.000,-	51.937.476,-	94.88
2.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta	8.500.000	8.500.000	100
	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standart Pelayanan Pengelolaan Sampah	8.500.000	8.500.000	100
Jumlah		3.177.813.579,-	2.909.874.404,-	91,57

3.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Arah Kebijakan	Program	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Diarahkan pada perencanaan dan pengendalian Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen KLHS	1 Dok	1 Dok	89.38%
Diarahkan pada peningkatan pengawasan AMDAL dalam perencanaan pembangunan	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	1 Keg	1 Keg	98.14%



		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1 Keg	1 Keg	99.95%
Diarahkan pada Pembinaan dan Pengawasan serta Penyuluhan Lingkungan Hidup bagi masyarakat	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah kegiatan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	1 Keg	1 Keg	100 %
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	1 Keg	1 Keg	100 %
Diarahkan pada peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	Program Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	1 Keg	1 Keg	94.27%
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup di Sekolah Dasar	1 Keg	1 Keg	99.61%
Diarahkan pada peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	Program Penghargaan Lingkungan Hidup	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 Keg	1 Keg	73.58%
Diarahkan pada peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Sampah	Jumlah kegiatan Peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	1 Keg	1 Keg	88.77%
			Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 Keg	1 Keg	94.88%



		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah	Jumlah kegiatan Monitoring dan Evaluasi pemenuhan target dan standart Pelayanan Pengelolaan Sampah	1 Keg	1 Keg	100%
--	--	---	--	-------	-------	------

3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Alokasi Anggaran : Rp. 1.651.559.229,-

Realisasi : Rp. 1.505.993.264,- (91.18%)

Keluaran :

Tersedianya Gaji dan Tunjangan untuk 14 orang ASN selama 12 bulan.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Alokasi Anggaran : Rp. 91.964.000,-

Realisasi : Rp. 89.478.000,- (93.30%)

Keluaran :

Tersedianya honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (Pejabat PPHP), Honor Pengguna Anggaran, Honor PPTK & PPK, Honor Bendahara Pengeluaran, Honor Penyimpan dan Pengurus Barang selama 12 Bulan dan Honor Admini Siru selama 1 Tahun.

2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Alokasi Anggaran : Rp. 22.000.000,-

Realisasi : Rp. 22.000.000,- (100%)

Keluaran :

Tersedianya Pakaian Sipil Harian Pejabat Eselon II 1 orang, Pejabat Eselon III sebanyak 3 stel, Pakaian Dinas Harian sebanyak 10 stel.

2) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi

Alokasi Anggaran : Rp. 66.562.000,-

Realisasi : Rp. 62.911.515,- (94.52%)



Keluaran : -

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Dasar-dasar AMDAL bagi 3 (tiga) orang ASN Dinas Lingkungan Hidup di Pusat Study Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 6.881.250,-

Realisasi : Rp. 4.619.000,-(67.12%)

Keluaran :

Tersedianya 23 jenis alat komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor berupa 1 bh Hanochs LED Premier 50W, 1 bh Fitting Gantung Alisca Mitsui, 1 bh Terminal Sunfree Jupiter 54, 1 bh Isolasi Besar Nasional, 1 roll Kabel Nym 25 Meter, 1 bh Terminal Braco 4L, 4 bh Steker Pluto, 2 bh Tap Konektor, 3 bh Fitting Gantung, 2 bh Lampu Viscom, 1 bh Lampu Meval, 2 bh Steker Mitsui 261 Pluto, 2 bh Terminal Broco 15330 3 Lubang, 2 bks Klem Kabel Visicom no. 10 100pcs, 1 roll Kabel VSC Nym 2x2,5 50 Meter, 3 bh Hanochs LED Avengers 15W, 2 bh Saklar Gandeng, 2 roll Kabel Visicom Nym 3x2,5 50M.

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 67.745.450,-

Realisasi : Rp. 67.128.000,-(99,09%)

Keluaran :

Tersedianya 73 jenis ATK untuk pemakaian selama 12 bulan (1 tahun) berupa 1 bh Kalkulator Casio, 3 bh Penghapus Papan, 1 pak Amplop Merpati, 2 lusin Ball liner pilot biru, 5 btl Lem kertas povinal, 6 bh Catridge 810, 10 bh Catridge 811, 5 roll Lakban Hitam, 4 pak Binder Clip 111 CD, 5 pak Binder Clip 260 CD, 1 roll Isolasi Coklat, 10 bh Pisau Cutter Besar, 9 bh Pembuka Hekter, 3 bh Mistar Besi, 4 pak Isi Cutter, 3 pak Kertas Foto, 5 bh Gunting Kecil, 2 bh Gunting Besar, 9 pak Joyko No. 105, 3 oak Paper Clip, 3 bh Pelubang Kertas, 4 pak Map Batik Kertas, 7 pak Map Snelhecter, 2 dos Map Seagul, 12 bh Hekter Kecil, 6 bh Hekter Besar, 2 box Isi Hekter Besar, 2 box Isi Hekter Kecil, 5 roll Isolasi Bening, 4 bh Buku Agenda, 2 botol Tinta Canon Hitam, 3 pak Pensil Faber Castel, 5 bh Peruncing Pencil, 10 bh Penghapus Pencil, 35 bh Map Odner, 8 bh Tipe X, 19 dos kertas HVS F4,5 bh Isi Cutter L-150, 1 botol Tinta Epson 003



Hitam, 2 pak Balpoint SNOWMAN, 2 pak Amplop putih kecil, 8 pak Pembatas 6021 kertas, 1 pak Balpoin Pilot Biru, 6 pak Map Bening, 3 pak Map kertas Biasa, 3 bh Double Tip, 2 pak Spidol Warna Kecil, 3 pak Pena Standart, 2 pak Push Pins/paku payung, 2 pasang Baterai Alkaline AA, 2 pasang Baterai Alkaline AAA, 1 bh Lem Istimewa Ocikol besar, 3 bh Cutter Joyko, 5 lbr Kertas Karton Kuning, 5 lbr Kertas Karton Biru Muda, 2 bh Flakban Hitam Nanko, 4 btl tinta Epson Hitam 003, 3 btl tinta Epson Merah 003, 3 btl tinta Epson Kuning 003, 3 btl tinta Epson Biru 003, 12 pak Binder Clip Kecil, 12 bh Glue Stick Besar, 3 bh Cutter L-500, 4 bh Cutter A 300, 3 pak Binder Clip No. 200, 1 pak Pena Balliner, 2 pak Trigonal Clips, 4 pak Map Snel Hijau, 2 bh Printer Epson L320, 1 unit LCD Proyektor FH52, 1 bh Scanner Epson DS-410, 1 unit Laptob Acer A514-55 74ZR.

3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 13.500.000,-

Realisasi : Rp. 5.070.000,- (37,56%)

Keluaran : -

Tersedianya makanan sebanyak 879 Kotak Nasi Ayam, 15 kotak Nasi Rendang, 43 kotak Nasi Campur, 59 kotak Nasi ikan, 454 kotak Snack dan 19 botol Es teh.

4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Alokasi Anggaran : Rp. 8.625.000,-

Realisasi : Rp. 7.824.200,- (90,72%)

Keluaran : -

Tersedianya barang cetak dan dokumen dinas berupa 30 buah buku DPA/DPPA, 8 buah dokumen CALK, 5 buah dokumen LAKIP, 9 buah dokumen LKPJ/LPPD, 6 buah dokumen ANJAB, 15 dokumen dokumen Proposal, dan 20.513 lembar FC dokumen kantor dan laporan lainnya.

5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Alokasi Anggaran : Rp. 8.625.000,-

Realisasi : Rp. 7.824.200,- (90,72%)

Keluaran : -

Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan dalam daerah sebanyak 44 kali perjalanan

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Pengadaan Mebel

Alokasi Anggaran : Rp. 34.047.300,-



Realisasi : Rp. 33.800.000,- (99,27%)

Keluaran :

Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berupa : 2 buah Lemari Arsip Kaca Bahan Jati, 5 Buah Meja ½ Biro bahan jati, 6 buah kursi pimpinan biasa biro, 1 buah kursi pimpinan jok putar.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Alokasi Anggaran : Rp.5.000.000,-

Realisasi : Rp.5.000.000,-

Keluaran : -

Tersedianya Meterei 10.000 sebanyak 200 Lembar

2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 11.000.000,-

Realisasi : Rp. 9.525.000,- (86.59%)

Keluaran :

Tersedianya 3 kali service komputer /laptop, 2 kali service printer dan 2 kali service 3 unit AC

3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 3.427.700,-

Realisasi : Rp. 3.423.000,- (99,86%)

Keluaran :

Tersedianya 31 Jenis alat kebersihan dan bahan pembersih berupa 16 ball Tisu Basah, 31 ball Tisu Paseo, 2 ltr Portex 1 L, 2 btl Soklin lantai, 6 bh Kemoceng, 2 bh Sapu Ijuk, 1 bh Serok sampah, 3 klg Stela semprot, 2 btl Wipol, 1 klg Vape semprot Besar, 1 bks Sabun cuci tangan, 1 bks Sunlight, 2 bh Tempat Sampah, 11 lbr Kanebo, 1 ball Tisu Mitu Charming Lily, 1 ball Tisu Cussons Baby Soft, 2 klg Bayfresh Orange, 3 klg Baygon Besar, 1 btl Vixal Botol besar, 14 bks Tisu Montis 250 sheet, 1 set Alat Pel, 1 lbr Kain Meja Tamu, 6 bh Tisu Nice Beauty, 3 bh Stella Matic Blister, 1 bh Pel Penyerap, 1 bh Sapu Air Pelangi, 2 bh Kaset Kaki Welcome, 2 bh Stella Home Matic Caffe Latte 225 MI, 2 bh Stella Matic Revill 225 MI Ungu, 1 btl Holly Hand Soap 550 ml Aloe Vera, 4 bh Dahlia Napthl Toilet 5 Warna. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.



- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Alokasi Anggaran : Rp. 84.570.000,-
Realisasi : Rp. 84.157.960,- (99,51%)
Keluaran :
Terlaksananya service 4 buah sepeda motor, 2 unit mobil, tersedianya pertamax, oli dan terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional yaitu 2 unit mobil dan 4 buah sepeda motor.

6. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
Alokasi Anggaran : Rp. 449.280.000,-
Realisasi : Rp. 401.587.963,- (89.38%)
Keluaran : -
Tersedianya Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Sabu Raijua Periode 2025-2045 berupa : 6 (enam) buah buku Laporan Awal KLHS RPJPD Periode 2025-2045, 6 (enam) buah buku Ringkasan Eksekutif KLHS RPJMD 2025-2045, 6 (enam) buah buku Laporan Pendahuluan KLHS RPJMD 2025-2045, 6 (enam) buah buku Album Peta KLHS RPJMD 2025-2045 dan 3 (tiga) unit *flash Disk*.

7. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
Alokasi Anggaran : Rp.60.616.000,-
Realisasi : Rp.59.489.185,- (99,14%)
Keluaran : -
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke DLH Provinsi NTT dan dan Monev Pencemaran dan Keruskaan LH dan Pemantauan Kualitas Udara di daratan Sabu.

8. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota



- 1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Rehabilitasi

Alokasi Anggaran : Rp.116.000.000,-

Realisasi : Rp.115.940.000,- (99,95%)

Keluaran :

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Kupang dan Monetoring, Evaluasi Pemantauan Kualitas Air dan Udara serta Pelaksanaan Pemantauan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Daratan Sabu yakni : monev Pencemaran dan Kerusakan LH di daratan Sabu, dan Monev Pencemaran dan Kerusakan LH di Raijua

9. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Alokasi Anggaran : Rp.34.280.000,-

Realisasi : Rp.34.280.000,- (100%)

Keluaran :

Terlaksananya Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Sabu Raijua berupa Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota daratan Sabu dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota daratan Raijua

- 2) Koordinasi dn Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH

Alokasi Anggaran : Rp.10.200.000,-

Realisasi : Rp. 5.100.000,- (50%)

Keluaran :

Terlaksananya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) daratan Sabu

10. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.



- 1) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan.

Alokasi Anggaran : Rp.85.704.000,-

Realisasi : Rp.80.790.000,- (94,27%)

Keluaran : -

✚ Tersedianya ATK, Bahan Cetak , Perlengkapan Dinas, Makanan dan Minuman Rapat, Uang Saku untuk kegiatan Penyuluhan Lingkungan Hidup dan Pengumpulan Data Informasi tentang MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional.

✚ Terlaksananya kegiatan Penyuluhan Lingkungan Hidup Daratan Sabu, Penyuluhan Lingkungan Hidup Daratan Raijua, Pengumpulan Data Informasi tentang MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional di daratan Sabu, Pengumpulan Data Informasi tentang MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional di daratan Raijua

- 2) Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

Alokasi Anggaran : Rp.46.671.000,-

Realisasi : Rp.46.490.000,- (99,61%)

Keluaran :

✚ Tersedianya ATK, Bahan Cetak , Perlengkapan Dinas, Makanan dan Minuman Rapat, untuk Sosialisasi dan Pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah.

✚ Terlaksananya kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah:

11. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan.

- 1) Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat /Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Alokasi Anggaran : Rp. 30.880.000,-

Realisasi : Rp. 22.720.000,- (73.58%)

Keluaran : -

Terlaksananya kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat /Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daratan Sabu dan Raijua



12. Kegiatan Pengelolaan Sampah

- 1) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Pers

Alokasi Anggaran : Rp. 111.783.100,-

Realisasi : Rp. 99.229.500,- (88.77%)

Keluaran : -

Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pengolahan Sampah Organik dan Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Sampah di Daratan Sabu

- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

Alokasi Anggaran : Rp. 54.742.000,-

Realisasi : Rp. 51.937.476,- (94.88%)

Keluaran :

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke P3E Denpasar dan Provinsi

13 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak swasta

- 1) Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standart Pelayanan Pengelolaan Sampah

Alokasi Anggaran : Rp. 8.500.000,-

Realisasi : Rp. 8.500.000,- (100%)

Keluaran : -

Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan standart Pelayanan Pengelolaan Sampah di Daratn Sabu



3.4 Analisis antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN (YA/ TIDAK)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang BERKELANJUTAN	Program Perencanaan Lingkungan Hidup						
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Dokumen KLHS	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Penyusunan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Dokumen KLHS RPJPD / RPJMD Kabupaten / Kota	Tersedianya Dokumen RPJPD Kabupaten Periode 2025-2045	YA
2		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Kerusakan Lingkungan	Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Tersedianya Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	YA
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Rehabilitasi	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan	Pelaksanaan Rehabilitasi	Anakan Mangga Mahatir	Pengadaan benih Mangga Mahatir	YA



				Hidup Kabupaten / Kota				
3		Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)						
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase ketaatan Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau kegiatan yang izin Lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemda Kabupaten / Kota	Usaha dan/atau kegiatan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	YA
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan RPPLH	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait PPLH	Penyelesaian/Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait PPLH	Usaha dan/atau kegiatan	Terlaksananya Penyelesaian/ Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait PPLH	YA
4		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LH untuk masyarakat						
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LH untuk Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang memiliki pengetahuan	Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Hidup	Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota Hidup	Terlaksananya Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Hidup	YA



		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	untuk Lembaga Kemasyarakatan	dibidang lingkungan hidup melalui Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup				
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang memiliki pengetahuan dibidang lingkungan hidup melalui Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Sosialisasi GBBLHS di sekolah dasar	Guru dan Siswa	Terlaksananya Sosialisasi GBBLHS di sekolah dasar	YA
5		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat						
		Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan / Filantropi dalam PPLH	Pemberian penghargaan LH tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pemberian penghargaan LH tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Pemberian penghargaan LH tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha / Dunia Pendidikan/Filantropi	Terlaksananya Pemberian penghargaan LH tingkat Daerah Kabupaten / Kota	YA
6		Pengelolaan Sampah						
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kelompok Masyarakat Peduli LH	Persentase Sampah yang terkelola	Sosialisasi dan Bimtek Pengelolaan Sampah Organik	Kelompok Masyarakat Peduli LH	Terlaksananya Sosialisasi dan Bimtek Pengelolaan	YA



							Sampah Organik	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana ke Pemerintah Pusat, Provinsi maupun pihak lain di luar Kab/Kota untuk Pengelolaan Sampah	Pemerintah Pusat, Provinsi maupun pihak lain di luar Kab/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana ke Pemerintah Pusat, Provinsi maupun pihak lain di luar Kab/Kota untuk Pengelolaan Sampah	YA
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standart Pelayanan Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah yang terkelola	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standart Pelayanan Pengelolaan Sampa	Usaha / kegiatan diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Terlaksnanya Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standart Pelayanan Pengelolaan Sampa	YA



3.5 Permasalahan dan Solusi

➤ Permasalahan

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan stakeholder lainnya dalam melakukan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Masih kurangnya dukungan pendanaan program/kegiatan dari Pemerintah Daerah Kabupaten, sehingga ada kegiatan yang tidak dapat diakomodir dan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan target yang terdapat dalam rencana strategis.

➤ Solusi

1. Terus melakukan sosialisasi tentang upaya pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
2. Diharapkan adanya dukungan yang serius dari Pemerintah Kabupaten baik dalam hal pelaksanaan kegiatan maupun pendanaan kegiatan, sehingga dalam pelaksanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dapat sesuai dengan pencapaian indikator baik yang terdapat dalam rencana strategis maupun dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

3.6 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Tidak ada

3.7 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya. Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya dituangkan dalam format sebagai berikut:

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
1.	Direkomendasikan kepada Saudara Bupati ke depan agar fokus kepada beberapa hal, sbb:		
1.	Setiap perencanaan Program pembangunan fisik harus memperhatikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).	Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua sependapat dengan DPRD yang terhormat mewajibkan seluruh usaha dan/atau kegiatan Infrastruktur yang telah berjalan atau dilaksanakan yang wajib mengurus dan memiliki dokumen Persetujuan lingkungan hidup sebagai syarat wajib pembangunan berbasis lingkungan hidup berkelanjutan.	➤ Setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan atau dilaksanakan yang wajib mengurus dan memiliki dokumen lingkungan.



		<p>Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua melalui Dinas Lingkungan Hidup telah menindaklanjuti dengan melakukan Pengawasan ke Lokasi Usaha dan/atau kegiatan dan terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki izin lingkungan DLH merekomendasikan untuk menghentikan sementara kegiatan dan mengurus izin operasional termasuk Dokumen Lingkungan sesuai aturan yang berlaku.</p>	<p>Pengurusan izin lingkungan bagi kegiatan fisik antara lain bangunan jalan dan jembatan, embung, irigasi, pelabuhan laut, badan usaha, tower, pemancar radio, pabrik, pencetakan sawah, tambak, peternakan, bengkel, tokoh, dan rumah makan serta usaha swasta lainnya wajib mengurus Dokumen Persetujuan Lingkungan.</p>
--	--	--	---



6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Penyelenggara Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sabu Raijua dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 2.679.223.637,-** dan realisasi sebesar **Rp. 2.409.565.312,- (89,94%)**. Adapun pelaksanaan program/kegiatan dari Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	2.083.606.507	1.814.511.048	87,09
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.798.735.363	1.530.664.776	85,10
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.736.837.363	1.469.670.776	84,62
	2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	61.898.000	60.974.000	98,51
2.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.000.000	22.000.000	100
	1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22.000.000	22.000.000	100
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.579.000	40.771.460	98,06
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.987.500	1.980.000	99,62
	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.401.500	6.380.500	99,67
	3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.800.000	1.800.000	100
	4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.390.000	30.610.960	97,52
4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.732.144	143.559.000	99,88
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.470.000	3.462.000	99,77
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139.275.144	139.110.000	99,88
	3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	987.000	987.000	100
5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.560.000	77.535.812	99,97
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.100.000	76.075.812	99,97



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
	2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.460.000	1.460.000	100
II	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	208.015.130	208.013.680	100
1	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	208.015.130	208.013.680	100
	1) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	133.727.630	133.726.180	99,99
	2) Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	74.287.500	74.287.500	100
III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	154.272.000	153.860.584	99,73
1.	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	154.272.000	153.860.584	99,73
	1) Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	59.840.000	59.840.000	100
	2) Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	94.432.000	94.020.584	99,56
IV	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	233.330.000	233.180.000	99,94
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	233.330.000	233.180.000	99,94
	1) Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	233.330.000	233.180.000	99,94
Jumlah		2.679.223.637	2.409.565.312	89,94

3.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Arah Kebijakan	Program	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Diarahkan pada peningkatan informasi Administrasi Kependudukan	Penata Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Kepemilikan KTP	60.724	58.338	88,92%
			Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun)	35.006	33.949	96,98%



3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Alokasi Anggaran : Rp. 1.736.837.363
Realisasi : Rp. 1.469.670.776,- (84,62%)
Keluaran :

Tersedianya Gaji dan Tunjangan untuk 17 ASN

- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Alokasi Anggaran : Rp. 61.898.000,-
Realisasi : Rp. 60.974.000,- (98,51%)
Keluaran :

Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Alokasi Anggaran : Rp. 22.000.000,-
Realisasi : Rp. 22.000.000,- (100%)
Keluaran :

Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut untuk 17 ASN

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 1.987.500,-
Realisasi : Rp. 1.980.000,- (99,62%)
Keluaran :

Tersedianya komponen listrik penerangan bangunan kantor sebanyak 3 jenis

- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 6.401.500,-
Realisasi : Rp. 6.380.500,- (99,67%)
Keluaran :

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 24 Jenis dan 1 Unit Mouse

- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Alokasi Anggaran : Rp. 1.800.000,-
Realisasi : Rp. 1.800.000,- (100%)
Keluaran :

Terlaksananya penggandaan sebanyak 2.500 lembar dan jilid 30 buku

- 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Alokasi Anggaran : Rp. 31.390.000,-
Realisasi : Rp. 30.610.960,- (97,52%)
Keluaran :

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD



4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Alokasi Anggaran : Rp. 3.470.000,-

Realisasi : Rp. 3.462.000,- (99,77%)

Keluaran :

Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Materai sebanyak 170 lembar) dan Jasa Pengiriman Barang

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Alokasi Anggaran : Rp. 139.275.144,-

Realisasi : Rp. 139.110.000,- (99,88%)

Keluaran :

Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebanyak air 10 tengki dan listrik 12 bulan

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 987.000,-

Realisasi : Rp. 987.000,- (100%)

Keluaran :

Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebanyak 6 jenis

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Alokasi Anggaran : Rp. 76.100.000,-

Realisasi : Rp. 76.075.812,- (99,97%)

Keluaran :

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebanyak 12 Unit Motor dan 1 Unit Mobil

2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Alokasi Anggaran : Rp. 1.460.000,-

Realisasi : Rp. 1.460.000,- (100%)

Keluaran :

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Komputer sebanyak 2 unit

6. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

1) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk

Alokasi Anggaran : Rp. 133.727.630,-

Realisasi : Rp. 133.726.180,- (99,99%)

Keluaran :

Tersedianya Bahan Cetak KTP-el sebanyak 45 buah dan blanko KIA sebanyak 5.000 keping.



- 2) Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Alokasi Anggaran : Rp. 74.287.500,-
Realisasi : Rp. 74.287.500,- (100%)
Keluaran :
Tersedianya Bahan dan Alat Pendukung Pelayanan Pendaftaran Penduduk berupa kertas sebanyak 42 dos, tinta printer sebanyak 210 botol dan kabel jaringan sebanyak 2 roll.

7. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil

- 1) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
Alokasi Anggaran : Rp. 59.840.000,-
Realisasi : Rp. 59.840.000,- (100%)
Keluaran :
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting sebanyak 1 kegiatan
- 2) Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
Alokasi Anggaran : Rp. 94.432.000,-
Realisasi : Rp. 94.020.584,- (99,56%)
Keluaran :
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi tentang Pelayanan Pencatatan Sipil sejumlah 10 kegiatan

8. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- 1) Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Alokasi Anggaran : Rp. 233.330.000,-
Realisasi : Rp. 233.180.000,- (99,94%)
Keluaran :
Terlaksananya Pelayanan Keliling Adminduk di 58 Desa dan 5 Kelurahan di Kabupaten Sabu Raijua.

3.4 Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program			Kegiatan			Kesesuaian (Ya / Tidak)
		Uraian Program	Target Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Uraian Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik dan Birokrasi	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Pelayanan Administrasi Kependudukan	Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Ya
					Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Ya
					Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Meningkatnya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Ya
					Peningkatan Pelayanan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Pelayanan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pelayanan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Ya
					Fasilitasi terkait PIAK	Meningkatnya Fasilitas terkait PIAK	Tersedianya Fasilitas terkait PIAK	Ya



3.5 Permasalahan dan Solusi

➤ Permasalahan :

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua dalam pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Beban kerja yang tidak seimbang dengan jumlah pegawai yang ada. Jumlah beban pekerjaan yang sangat banyak karena harus memberikan pelayanan kepada Masyarakat dan administrasi harus tetap berjalan sedangkan pegawai hanya berjumlah 26 orang, dimana 2 orang diantaranya menjabat sebagai Pj. Kepala Desa, 1 (satu) orang telah pensiun per 01 November 2023.
2. Peralatan jaringan komputer yang kurang memadai.

➤ Solusi :

1. Menempatkan aparatur sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar pegawai.
3. Mengadakan evaluasi kerja pegawai setiap bulannya.
4. Menambah peralatan jaringan komputer.

3.6 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Tidak ada

3.7 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Direkomendasikan kepada Bupati Sabu Raijua agar memberikan dukungan personil yang cukup kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terkait dengan peningkatan pelayanan sesuai rekomendasi DPRD Dinas Kependudukan telah melaksanakan: 1. Melakukan pengajuan permohonan penambahan personil kepada BKDPP.	1. Pada tahun 2023, Dinas Kependudukan mendapatkan penambahan 2 (dua) orang personil.



7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Penyelenggara Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Sabu Raijua dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sabu Raijua dengan alokasi anggarannya sebesar **Rp. 4.632.995.348-** dan realisasi sebesar **Rp. 4.008.276.607 (86,52%)**. Adapun pelaksanaan program/ kegiatan dari Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.632.995.348	2.447.002.168	52,82
	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.442.863.522	1.999.202.484	81,84
	1) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	136.614.000	134.154.000	98,20
	2) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.306.249.522	1.865.048.484	80,87
	2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	63.250.000	60.550.000	95,73
	1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	33.250.000	33.250.000	100
	2) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	27.300.000	91,00
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	259.680.090	213.761.320	82,32
	1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.865.540	49.266.270	75,95
	2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.990.000	47.550.000	74,31
	3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.476.200	11.315.400	55,26
	4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	107.473.350	102.759.650	95,61
	5) Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	2.875.000	2.870.000	99,83
	4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	56.120.200	56.120.200	100
	1) Pengadaan Mebel	56.120.200	56.120.200	100
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.220.000	19.212.000	99,96
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.492.000	99,68
	2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.720.000	16.720.000	100



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.660.000	98.156.164	92,90
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105.660.000	98.156.164	92,90
2.	PROGRAM PENATAAN DESA	45.663.000	11.547.000	25,29
	1. Penyelenggaraan Penataan Desa	45.663.000	11.547.000	25,29
	1) Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	21.647.000	11.547.000	53,34
	2) Fasilitasi penataan Kewenangan Desa	24.016.000	0	0
3.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA	329.427.600	248.337.200	75,38
	1. Pembinaan dan pengawasan Administrasi Pemerintah Desa	329.427.600	248.337.200	75,38
	1) Fasilitasi penyelenggaraan administrasi Pemerintah Desa	29.635.000	22.080.000	74,51
	2) Fasilitasi penyusunan produk hukum Desa	143.011.600	111.723.200	78,12
	3) Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan Desa	37.170.000	26.415.000	71,07
	4) Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa	24.690.000	16.130.000	65,33
	5) Evaluasi dan pengawasan peraturan Desa	13.740.000	13.400.000	97,53
	6) Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	28.840.000	24.535.000	85,07
	7) Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa	52.341.000	34.054.000	65,06
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN , LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.311.110.936	1.301.390.239	99,26
	1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota	1.311.110.936	1.301.390.239	99,26



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
	1) Identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat	54.987.300	53.616.478	97,51
	2) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	260.368.636	252.133.761	96,84
	3) Peningkatan kapasitas Kelembagaan ,Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,POSYANDU, LPM,dan Karang Taruna),Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	930.000.000	930.000.000	100
	4) Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	65.755.000	65.640.000	99,83
Jumlah		4.632.995.348	4.008.276.607	86,52%

3.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Arah Kebijakan	Program	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Diarahkan pada upaya Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat serta Sistem Perlindungan Sosial	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Menuju SARAI MAMPU	Terwujudnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	58 Desa	58 Desa	58 Desa
	Program Penataan Desa	Meningkatnya Integritas Apratur dalam pelayanan Pemerintahan Menuju SARAI JUJUR	Persentase usulan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa yang disetujui	4 Desa	4 Desa	100
	Program Administrasi Pemerintah-an Desa			2 Desa	2 Desa	100
			Persentase Desa dengan Kriteria (Cepat Berkembang)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100



3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

1) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Alokasi Anggaran : Rp. 136.614.000,-

Realisasi : Rp. 134.154.000,- (98,20%)

Keluaran :

Terbayarnya honorarium pengguna anggaran, bendahara pengeluaran, PPKEU, PPTK, PPKom, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Barang, Admin SIRUP dan Admin SISKEUDES selama 12 Bulan

2) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Alokasi Anggaran : Rp. 2.306.249.522

Realisasi : Rp.1.865.048.484 (80,87%)

Keluaran :

Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 25 orang selama 12 bulan serta tambahan penghasilan bagi ASN selama 12 bulan

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Alokasi Anggaran : Rp. 33.250.000,-

Realisasi : Rp. 33.250.000,- (100%)

Keluaran :

Tersedianya pakaian dinas harian untuk ASN sebanyak 18 stel

2) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Alokasi Anggaran : Rp. 30.000.000,-

Realisasi : Rp. 27.300.000,- (91,00%)

Keluaran :

Terlaksananya sosialisasi peraturan Perundang-undangan

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 64.865.540,-

Realisasi : Rp. 49.266.270,- (75,95%)

Keluaran :

Tersedianya 49 jenis ATK selama 12 bulan.

2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 63.990.000,-

Realisasi : Rp. 47.550.000,- (74,31%)

Keluaran :

Tersedianya makan minum rapat selama 12 bulan

3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Alokasi Anggaran : Rp. 20.476.200,-

Realisasi : Rp.11.315.400,- (55,26%)



- Keluaran :
Tersedianya penjiwaan 345 buku selama 1 Tahun dan Tersedianya penggandaan sebanyak 51.004 lembar 1 Tahun
- 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Alokasi Anggaran : Rp.107.473.350,-
Realisasi : Rp. 102.759.650,- (95,61%)
Keluaran :
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi sebanyak 4 kegiatan selama 1 Tahun, Musyawarah Perencanaan Pembangunan, dan Rapat Lengkap Pamong Praja
- 5) Penyediaan komponen instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 2.875.000,-
Realisasi : Rp. 2.870.000,- (99,83%)
Keluaran :
Tersedianya Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan Kantor sebanyak 6 Jenis
- 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- 1) Pengadaan Mebel
Alokasi Anggaran : Rp. 56.120.200,-
Realisasi : Rp. 56.120.200,- (100%)
Keluaran :
Tersedianya mebeleur sebanyak 3 Jenis (9 Unit)
- 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Alokasi Anggaran : Rp. 2.500,000,-
Realisasi : Rp. 2.492.000,- (99,68%)
Keluaran :
Tersedianya materai sebanyak 200 lembar
- 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 16.720.000,-
Realisasi : Rp. 16.720.000,- (100%)
Keluaran :
Terbayarnya jasa servis 8 unit printer, 4 Unit AC dan 12 unit pc/laptop
- 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Alokasi Anggaran : Rp. 105.660.000,-
Realisasi : Rp. 98.156.164,- (92,90%)
Keluaran :
Tersedianya jasa servis dan bahan bakar untuk kendaraan roda empat 2 unit, roda dua 11 unit.



7. Penyelenggaraan Penataan Desa

- 1) Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa

Alokasi Anggaran : Rp. 21.647.000,-

Realisasi : Rp. 11.547.000,- (53,34%)

Keluaran :

Terlaksananya kegiatan sosialisasi Desa perubahan status sebanyak 5 Desa yakni Desa Menia, Pedaro, Daieko, Bolua dan Kolorae dan konsultasi/ koordinasi ke Provinsi dan dalam Daerah.

- 2) Fasilitasi penataan kewenangan Desa

Alokasi Anggaran : Rp. 24.016.000,-

Realisasi : Rp. 0,- (0%)

Keluaran : -

8. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

- 1) Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Alokasi Anggaran : Rp. 29.635.000,-

Realisasi : Rp. 22.080.000,- (74,52%)

Keluaran :

Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dalam daratan Sabu dan Raijua

- 2) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

Alokasi Anggaran : Rp. 143.011.600,-

Realisasi : Rp. 111.723.200,- (78,12%)

Keluaran :

- Tersedianya produk Hukum yaitu Perda Penataan Desa Kabupaten Sabu Raijua

- Terbayarnya Honorarium Tim Panitia pelaksana sebanyak 24 orang dan perancang ahli sebanyak 4 orang

- 3) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

Alokasi Anggaran : Rp. 37.170.000,-

Realisasi : Rp. 26.415.000,- (71,07%)

Keluaran :

Terlaksananya kegiatan fasilitasi perencanaan pembangunan Desa sebanyak 1 kegiatan berupa perjalanan dalam Daerah.

- 4) Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Alokasi Anggaran : Rp. 24.690.000,-

Realisasi : Rp. 16.130.000,- (65,33%)

Keluaran :

Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan musyawarah Desa di 18 Desa

- 5) Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa

Alokasi Anggaran : Rp. 13.740.000,-

Realisasi : Rp. 13.400.000,- (97,53%)

Keluaran :

Terlaksananya kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa



- 6) Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Alokasi Anggaran : Rp. 28.840.000,-
Realisasi : Rp. 24.535.000,- (85,07%)
Keluaran :
Terlaksananya kegiatan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat
- 7) Fasilitas Pengelolaan keuangan Desa
Alokasi Anggaran : Rp. 52.341.000,-
Realisasi : Rp. 34.054.000,- (65,06%)
Keluaran :
Terlaksananya kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa sebanyak 3 Kegiatan berupa pemberian uang transport peserta, Pembayaran Honorarium Narasumber dan kegiatan konsultasi koordinasi ke KPPN dan BPKP Provinsi.

9. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
Alokasi Anggaran : Rp. 54.987.300,-
Realisasi : Rp. 53.616.478,- (97,51%)
Keluaran :
Terlaksananya identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat sebanyak 3 Kegiatan
- 2) Fasilitas Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
Alokasi Anggaran : Rp. 260.368.636,-
Realisasi : Rp. 252.133.761,- (96,84%)
Keluaran :
Terlaksananya kegiatan Fasilitas Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 2 Kegiatan.
- 3) Peningkatan kapasitas Kelembagaan ,Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,POSYANDU,LPM,dan Karang Taruna),Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
Alokasi Anggaran : Rp. 930.000.000,-
Realisasi : Rp. 930.000.000,- (100%)
Keluaran :
Terlaksananya Peningkatan kapasitas Kelembagaan ,Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,POSYANDU,LPM,dan Karang Taruna),Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat sebanyak 1 Kegiatan
- 4) Fasilitas pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa
Alokasi Anggaran : Rp. 65.755.000,-
Realisasi : Rp. 65.640.000,- (93,83%)
Keluaran :
Terlaksananya Fasilitas pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa sebanyak 2 Kegiatan



3.4 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN (YA/TIDAK)
	URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
Meningkatnya Integritas Apratur dalam pelayanan Pemerintahan Menuju SARAI JUJUR	Program Penataan Desa	Terselenggaranya Penataan Desa	Persentase usulan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa yang disetujui	Pembentukan, penggabungan, penghapusan dan perubahan status desa	5 Desa	Jumlah Desa yang mengalami perubahan status Desa	Ya
					-	Jumlah desa yang mengalami perubahan status dusun	Ya
				Fasilitasi penataan kewenangan desa	-	Jumlah penataan kewenangan Desa	Ya
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Persentase Desa dengan Kriteria (Cepat Berkembang)	Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	1 Kegiatan	Jumlah kegiatan administrasi pemerintahan Desa yang dilaksanakan	Ya
				Fasilitasi penyusunan produk hukum desa	2 Kegiatan	Jumlah kegiatan penyusunan produk hukum Desa yang difasilitasi	Ya
				Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	1 Kegiatan	Jumlah kegiatan fasilitasi perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan	Ya
				Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	3 Kegiatan	Jumlah Desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan dan asset Desanya	Ya



				Pembina-an peningkatan kapasitas apartur pemerintah desa		Jumlah Desa yang mendapat pelatihan	Ya
				Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa	58 Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desanya	Ya
				Evaluasi dan pengawasan peraturan desa	58 Desa	Jumlah Desa yang dievaluasi dan pengawasan yang dilakukan	Ya
				Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	15 Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi pengangkatandan pemberhentian perangkat yang dilaksanakan	Ya
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksana-nya Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	Meningkatnya Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/ kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/ kota	Identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat	58 Desa	Jumlah Desa yang diidentifikasi dan diinventarisasi masyarakat hukum adat	Ya
Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK Posyandu, LPM dan Karang taruna) lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat				7 Lembaga	Jumlah lembaga yang mengikuti peningkatan kapasitas kelembagaan	Ya	



3.5 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Kurangnya penajaman skala prioritas sasaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya.
2. Kurangnya koordinasi dengan berbagai stakeholder yang terkait.
3. Kurangnya pengawasan melekat terhadap kinerja ASN berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing ASN guna tercapainya penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Solusi :

1. Melakukan penajaman skala prioritas sasaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya.
2. Melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder yang terkait.
Melakukan pengawasan melekat terhadap kinerja ASN berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing ASN guna tercapainya penyelenggaraan pemerintah yang baik.

3.6 Kebijakan Strategis yang di tetapkan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan melalui berbagai kebijakan strategis. Adapun kebijakan strategis yang akan dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah

1. Fasilitasi peningkatan kualitas swadaya para pelaku usaha ekonomi produktif melalui Lembaga BUMDes
2. Fasilitasi penataan kelembagaan Masyarakat Desa Melalui peningkatan sarana kesehatan Masyarakat Desa dalam pembangunan
3. Fasilitasi pematapan penyelenggara Pemerintahan Desa melalui BIMTEK dan Sosialisasi.

3.7 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
1.	Terhadap kinerja daya serap anggaran secara umum dinilai Baik. Ke depan agar kualitas perencanaan lebih ditingkatkan lagi;	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa akan meningkatkan kualitas perencanaan yang lebih baik	Untuk meningkatkan kualitas perencanaan yang baik, Dinas PMD akan terus melakukan pembenahan-pembenahan terhadap kinerja daya serap anggaran secara umum
2.	Perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua untuk membangun kawasan desa harus tetap menjadi perhatian khusus. Kantong- kantong kemiskinan dan ketertinggalan infrastruktur pembangunan banyak ada di kawasan pedesaan. Tentu saja prioritas pembangunan desa harus menjadi agenda penting, khususnya dalam rangka untuk mewujudkan visi: "Sabu Raijua Bersatu, Maju dan Bermartabat". Untuk itu	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa telah mengalokasikan anggaran Tahun Anggaran 2023 untuk kegiatan peningkatan kapasitas Aparatur bagi para Perangkat Desa dalam pengelolaan keuangan desa	Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dari para Kepala Desa dan Perangkat Desa



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
	direkomendasikan kepada Bupati agar lebih mengintensifkan lagi koordinasi lintas sektoral, melakukan penajaman kembali terhadap berbagai arah kebijakan Program/ Kegiatan dalam rangka menumbuh-kembangkan kelompok-kelompok ekonomi produktif yang ada di desa-desa serta menugaskan Dinas PMD untuk terus melakukan pendampingan, pelatihan dan pembinaan secara lebih baik lagi dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapasitas Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Aparatur yang ada di desa. Berbagai kegiatan Bimbingan Teknis dan Pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur desa agar TERUS dilakukan dengan lebih sungguh-sungguh lagi dan secara berkesinambungan;		
3.	Terhadap aspirasi-aspirasi masyarakat desa sehubungan dengan rencana pemekaran desa yang telah diusulkan, agar sungguh-sungguh di urus dengan baik. Untuk itu DPRD merekomendasikan agar Bupati Sabu Raijua melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sabu Raijua lebih serius lagi dalam upaya-upaya melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan yang berkaitan dengan rencana pemekaran desa tersebut;	Dinas Pemberdayaan Masyarakat sangat serius dalam upaya pemekaran desa, hal ini dibuktikan dengan telah ditetapkannya penetapan desa sebagai salah satu syarat utama pemekaran desa	
4.	Keberadaan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa sesungguhnya adalah sebagai sarana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) sehingga suatu saat desa diharapkan menjadi mandiri. Untuk itu, DPRD merekomendasikan agar Bupati Sabu Raijua melalui Dinas PMD harus terus melakukan pendampingan dan pembinaan kepada desa agar melalui BUMDes-nya desa-desa mampu memberikan keunggulan komparatif yang berbasis kearifan lokal setempat sehingga desa mampu menjadi mandiri dan memberi dampak nyata pada peningkatan kesejahteraan warganya;	Pelatihan Terkait Pengelolaan BUMDes untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa telah dilakukan oleh Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) namun, sampai dengan saat ini masih terkendala dengan SDM, dimana selalu terjadi pergantian Badan Pengurus	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan tetap melakukan pelatihan terkait pengelolaan BUMDes dan merekrut tenaga pengelola SDM yang memadai; ➢ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada para pengurus BUMDes untuk meningkatkan kapasitas dari masing-masing peserta.
5.	Sehubungan dengan Misi yang menjadikan sektor Pariwisata sebagai sektor unggulan dan menjadi penggerak utama, maka DPRD juga merekomendasikan agar Bupati Sabu Raijua menugaskan Dinas PMD untuk	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa akan terus melakukan persiapan-persiapan terhadap beberapa desa yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata	Dalam rangka mengembangkan desa wisata, Dinas PMD telah melakukan langkah-langkah persiapan terhadap beberapa desa yang mempunyai potensi wisata untuk dijadikan desa wisata lewat anggaran dana desa



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
	mulai mempersiapkan desa-desa yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata		sehingga Misi Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua yang menjadikan sektor Pariwisata sebagai sektor unggulan dan menjadi penggerak utama dapat terlaksana dengan baik
6.	<p>Di tahun 2022 Terdapat desa-desa yang gagal melakukan pencairan Dana Desa tahap 3 dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Desa Raekore, tidak dapat melakukan pencairan Dana Desa Tahap 3 karena tidak melaporkan realisasi penggunaan dana tahap 2; b. Desa Raedewa, tidak dapat melakukan pencairan Dana Desa Tahap 3 karena adanya persoalan hukum indikasi tindak pidana korupsi yang ditangani aparat penegak hukum; c. Desa Dainao dan Desa Ledetalo, walaupun Dana Desa Tahap 3 sudah di kirim ke rekening desa tetapi tidak dicairkan dengan alasan rumitnya pertanggung jawaban di akhir tahun yang waktunya sudah sangat mepet; d. Desa Molie, tidak dapat melakukan pencairan Dana Desa Tahap 3 karena terlambatnya Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap 3 dari desa. <p>Sehubungan dengan hal tersebut di atas, DPRD merekomendasikan agar Bupati Sabu Raijua membuat teguran dan peringatan kepada para Kepala Desa yang terbukti lalai serta lebih memaksimalkan lagi fungsi pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sabu Raijua kepada desa.</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melakukan pendampingan kepada desa-desa yang gagal melakukan pencairan Dana Desa , dimana pada TA. 2022 desa Raekore dan Dainao Kadesnya telah berakir masa jabatan sehingga telah diisi dengan pejabat baru dari unsur ASN sehingga di TA 2023 tidak ada Desa di Kabupaten Sabu Raijua yang gagal salur.</p>	<p>Diharapkan dengan pengisian jabatan tersebut proses pelaksanaan pemerintahan di desa dapat berjalan dengan baik sehingga masyarakat tidak dirugikan</p>



8. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Penyelenggara **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** di Kabupaten Sabu Raijua dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sabu Raijua dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 4,355,422,500,-** dan realisasi sebesar **Rp. 3,779,995,373,- (86,79%)**. Adapun rincian dan realisasi anggaran sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
I.	Program Pengendalian Penduduk	134.428.700	118.098.600	87,85
1.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	134.428.700	118.098.600	87,85
	1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	85.440.000	77.278.600	90,45
	2) Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	34.228.700	26.610.000	77,74
	3) Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	14.760.000	14.210.000	96,27
II.	Program Pembinaan Keluarga Berencana	3.435.397.300	2.957.623.573	86,09
1.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	947.050.000	807.609.500	85,28
	1) Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	435.181.000	349.504.500	80,31
	2) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	6.700.000	5.300.000	79,10
	3) Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	153.520.000	148.540.000	96,76
	4) Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	292.510.000	281.885.000	96,37
	5) Pengendalian Program KKBPK	59.139.000	22.380.000	37,84
2.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	340.200.000	340.200.000	100



No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
	1) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	340.200.000	340.200.000	100
3.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jejaring dan Jejaringnya	1.280.647.300	1.151.730.073	89,93
	1) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	11.600.000	10.591.000	91,30
	2) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	487.317.300	365.803.275	75,06
	3) Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	752.410.000	746.915.798	99,27
	4) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	29.320.000	28.420.000	96,93
4.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	867.500.000	658.084.000	75,86
	1) Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	608.505.000	444.669.000	73,08
	2) Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	258.995.000	213.415.000	82,40
III.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (ks)	785.596.500	704.273.200	89,65
I.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	785.596.500	704.273.200	89,65
	1) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	216.000.000	141.180.000	65,36



No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
	2) Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	16.210.800	15.710.600	96,91
	3) Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	496.800.000	496.800.000	100
	4) Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5.989.900	940.000	15,69
	5) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	50.595.800	49.642.600	98,12
TOTAL		4.355.422.500	3.779.995.373	86,79



3.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Arah kebijakan	Program	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan perkiraan penduduk pengendalian cakupan Kabupaten/Kota daerah	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				
			✓ Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	5	5	100
			Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				
			✓ Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	2	2	100
			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				
			✓ Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	72	72	100
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholder dan Mitra Kerja				
			✓ Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Organisasi	25	25	100
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal				
			✓ Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	210	206	



Arah kebijakan	Program	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)				
			✓ Jumlah laporan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	23	23	100
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Program KKBPK				
			✓ Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Laporan	72	72	100
			Pengendalian Program KKBPK				
			✓ Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	3	3	100
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				
			✓ Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	189	189	100
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				
			✓ Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	12	12	100



Arah kebijakan	Program	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				
			✓ Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang/Akseptor	1276	964	76,08
			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB				
			✓ Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	27	27	100
			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				
			✓ Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	36	36	100
		Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				
			✓ Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	17	17	100
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB				
			✓ Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Desa/Kampung KB	17	17	100
			Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB				
			✓ Jumlah kegiatan pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB di laksanakan	kegiatan	17	13	36,66



Arah kebijakan	Program	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Akseptor/UPPKA)				
			✓ Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Akseptor/UPPKA)	Unit	12	12	100
			Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK,R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				
			✓ Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK,R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang/Kader	115	115	100
			Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				
			✓ Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS yang Memperoleh Biaya Operasional	Orang/Kader	207	207	100



Arah kebijakan	Program	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
			Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				
			✓ Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kelompok	1	1	100
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				
			✓ Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan	4	4	100



3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga

Alokasi Anggaran	: Rp. 85.440.000,-
Realisasi	: Rp. 77.278.600,- (90,45%)
Keluaran	:

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Melalui Dukungan Manajemen Dalam Lingkup Pengelolaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) sebanyak 6 kegiatan berupa pengadaan ATK, penggandaan dokumen, pertemuan dalam rangka koordinasi, sosialisasi dan evaluasi capaian program bangga kencana, honor pengelola DAK Non Fisik BOKB, perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi program Bangga Kencana dan percepatan penurunan Stunting, perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pembinaan administrasi dan pengelolaan program Bangga Kencana.

2) Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga

Alokasi Anggaran	: Rp. 32.228.700,-
Realisasi	: Rp. 26.610.000,- (77,74%)
Keluaran	:

Terlaksananya Kegiatan Pemutakhiran Data Keluarga serta Register dan Registrasi Pelayanan Keluarga Berencana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana sebanyak 2 kegiatan.

3) Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

Alokasi Anggaran	: Rp. 14.760.000,-
Realisasi	: Rp. 14.210.000,- (96,27%)
Keluaran	:

Tersedianya Paket Data Internet Untuk Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB di Balai Penyuluhan Keluarga Berencana, sejumlah 70 paket.

2. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

1) Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholder dan Mitra Kerja

Alokasi Anggaran	: Rp. 435.181.000,-
Realisasi	: Rp. 358.174.500 (82,30%)
Keluaran	:

- Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Program Bangga Kencana Bagi Stakeholder dan Mitra Kerja Tingkat Kecamatan sebanyak 3 kegiatan.
- Terlaksananya Kegiatan yang Mendukung dan Memastikan Pelaksanaan Koordinasi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat Kabupaten sebanyak 9 kegiatan.



- Tersedianya Dukungan Anggaran Untuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten.
- 2) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai kearifan Budaya Lokal
 - Alokasi Anggaran : Rp. 6.700.000
 - Realisasi : Rp. 5.300.000 (79,10%)
 - Keluaran :

Tersedianya Poster dan Leaflet Sebagai Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Bagi Sasaran Prioritas Percepatan Penurunan Stunting sebanyak 206 lembar.
 - 3) Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)
 - Alokasi Anggaran : Rp. 153.520.000
 - Realisasi : Rp. 148.540.000 (96,76%)
 - Keluaran :

Terlaksananya Kegiatan Mini Lokakarya Kecamatan Berupa Kegiatan Pertemuan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan Dalam Rangka Mengawal dan Mengevaluasi Pelaksanaan Pendampingan Keluarga dan Hasil Dari Pelaksanaan dan Pemantauan Pendampingan Keluarga di Tingkat Kecamatan serta Sebagai Wadah Membina (*coach*) Tim Pendamping Keluarga di 6 kecamatan.
 - 4) Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
 - Alokasi Anggaran : Rp. 292.510.000
 - Realisasi : Rp. 251.885.000 (86,11)
 - Keluaran :
 - Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Program Bangga Kencana dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan di Balai Penyuluhan Keluarga Berencana sebanyak 36 kegiatan.
 - Tersedianya Dukungan Daya dan Jasa Guna Menjamin Ketersediaan Listrik dan Air di Balai Penyuluhan Keluarga Berencana.
 - Tersedianya Dukungan Pembiayaan Untuk Membayar Honor Tenaga Pramusaji di Balai Penyuluhan Keluarga Berencana.
 - Terlaksananya Kegiatan Pengolahan Data Program Bangga Kencana di Balai Penyuluhan Keluarga Berencana.
 - 5) Pengendalian Program KKBPK
 - Alokasi Anggaran : Rp. 59.139.000,-
 - Realisasi : Rp. 22.380.000,- (37,84)
 - Keluaran :

Terlaksananya Kegiatan Audit Kasus Stunting sejumlah 1 kegiatan.

3. **Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**

- 1) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
 - Alokasi Anggaran : Rp. 340.200.000
 - Realisasi : Rp. 340.200.000 (100%)



Keluaran :
Terlaksananya Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Oleh Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD di 63 Desa/Kelurahan.

4. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringannya

- 1) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringannya

Alokasi Anggaran : Rp. 11.600.000
Realisasi : Rp. 10.591.000 (91,30%)
Keluaran :

Terlaksananya Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringannya pada 6 Kecamatan sebanyak 20 paket, berupa alat dan obat kontrasepsi dan formulir administrasi pelayanan KB.

- 2) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Alokasi Anggaran : Rp. 487.317.300
Realisasi : Rp. 365.830.275 (75,06%)
Keluaran :

- Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Keluarga sebanyak 25 kegiatan.
- Terlaksananya Kegiatan Penggerakan Pelayanan KB Dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebanyak 12 Kali/Tahun di Setiap Kecamatan.

- 3) Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB

Alokasi Anggaran : Rp. 753.256.000,-
Realisasi : Rp. 732.032.598,- (97,18%)
Keluaran :

- Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Balai Penyuluhan Keluarga Berencana serta Dukungan Perencanaan dan Pengawasannya, sebanyak 3 gedung.
- Tersedianya Kelengkapan Balai Penyuluhan KB Berupa 12 Unit PC (Personal Computer), 4 Unit Printer, 3 Unit Papan Nama Kantor, 3 Unit Dudukan Profil Tank dan Instalasi Air.

- 4) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringannya

Alokasi Anggaran : Rp. 29.320.000,-
Realisasi : Rp. 28.420.000 (96,93%)
Keluaran :

- Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan sebanyak 4 kegiatan.
- Terlaksananya Kegiatan Pertemuan Koordinasi Pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan sebanyak 2 kegiatan.



- Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan KB di Klinik Keluarga Berencana/Fasilitas Pelayanan Keluarga Berencana sebanyak 6 kegiatan.

4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB

1) Intergrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB

Alokasi Anggaran : Rp. 608.505.000,-
 Realisasi : Rp. 444.669.000,- (73,08%)
 Keluaran :

- Terlaksananya Kegiatan Pemberian Edukasi Gizi, Pendampingan dan Pembiasaan Konsumsi Makanan Bergizi Melalui Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT), dalam upaya percepatan penurunan stunting sebanyak 92 kegiatan di 17 Kampung Keluarga Berkualitas.
- Terlaksananya Kegiatan Penguatan Kampung KB di Tingkat Kabupaten sebanyak 1 kegiatan.
- Terlaksananya Kegiatan Pencatatan, Pelaporan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Kegiatan Kampung Berkualitas.

2) Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB

Alokasi Anggaran : Rp. 258.955.000,-
 Realisasi : Rp. 213.415.000,- (82,41%)
 Keluaran :

- Terlaksananya Kegiatan Pertemuan dan Pembinaan Kelompok Kerja sebanyak 4 kegiatan di masing-masing 17 Kampung Keluarga Berkualitas.
- Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan sebanyak 102 kegiatan di 17 Kampung KB.

5. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

1) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Alokasi Anggaran : Rp. 216.000.000,-
 Realisasi : Rp. 141.180.000,- (65,36%)
 Keluaran :

Tersedianya BKB Kit Stunting Sebagai Sarana Edukasi Bagi Orang Tua Bayi/Balita Peserta Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) sebanyak 12 unit.

2) Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Alokasi Anggaran : Rp. 16.210.800,-
 Realisasi : Rp. 15.710.600,- (96,91%)
 Keluaran :

Terlaksananya Kegiatan Orientasi Bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebanyak 3 kegiatan.



- 4) Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- Alokasi Anggaran : Rp. 5.989.900,-
- Realisasi : Rp. 940.000,- (15,69%)
- Keluaran :
- Terlaksananya Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi, Konsultasi dan Konseling, Pembinaan serta Rujukan Konseling Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang Berbasis di Balai Penyuluhan KB sebanyak 2 kegiatan.
- 5) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga
- Alokasi Anggaran : Rp. 50.595.800,-
- Realisasi : Rp. 49.642.600,- (98,12%)
- Keluaran :
- Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan dan Edukasi 1000 HPK dan Pencegahan Stunting Kepada Orang Tua Bayi/Balita sebanyak 26 kegiatan.
 - Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Duta Genre Dalam Ajang Kreatifitas Generasi Berencana Tingkat Provinsi sebanyak 1 kegiatan.
 - Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan Reproduksi dan Generasi Berencana di Kelompok PIK- Remaja sebanyak 10 kegiatan.
 - Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pemahaman Kesehatan Reproduksi dan Stunting Bagi Calon Pengantin sebanyak 9 kegiatan.



3.4 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
1.		Program Pengendalian Penduduk		Presentase Laju Pertumbuhan Penduduk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Ya
2.		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Presentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR</i>)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Advokasi KIE dan Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Organisasi yang mendapatkan advokasi program Bangsa Kencana kepada stankeholder dan mitra kerja	Ya
				Median Usia Kawin Pertama Perempuan Seluruh Wanita Usia 25-49 Tahun	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Meningkatnya keaktifan kader KB	Jumlah kader yang mengikuti Penggerakan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Ya



					Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Ya
					Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Meningkatnya peran serta organisasi masyarakat dalam pembinaan kesertaan ber KB	Jumlah Dokumen hasil integrasi pembangunan listas sektor di kampung KB	Ya
3.		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang Mendapat Pembinaan serta Dukungan Sarana Pendukung Kegiatan	Ya



3.5 Permasalahan dan Solusi

➤ Permasalahan

1. Program Pengendalian Penduduk

Belum maksimalnya penyerapan anggaran pada Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga disebabkan karena tidak semua PPKBD dan Sub PPKBD melakukan Pemutakhiran Data Pengendalian Lapangan di Tingkat Desa.

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana

Belum maksimalnya penyerapan anggaran pada program pembinaan keluarga berencana disebabkan karena masih rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti program KB, belum maksimalnya kegiatan KIE kepada masyarakat melalui berbagai media.

3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Belum maksimalnya penyerapan anggaran pada program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (PPKS) disebabkan karena pelaksanaan orientasi bagi Tim PPKS oleh BKKBN Perwakilan Provinsi NTT baru dilaksanakan pada bulan November 2023 serta Terdapat efisiensi anggaran pada kegiatan pengadaan BKB Kit Stunting.

➤ Solusi

1. Melakukan Evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja beserta hambatan.
2. Meningkatkan Koordinasi dengan Perwakilan BKKBN Propinsi terkait waktu pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas tenaga lini lapangan agar dilaksanakan pada Triwulan I.

3.6 Kebijakan Strategis yang di tetapkan

Tidak ada

3.7 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Terhadap kinerja daya serap anggaran secara umum dinilai buruk, Kedepan agar kualitas perencanaan lebih ditingkatkan lagi	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menerima rekomendasi ini dan akan menyampaikan kepada Bupati sebagai Kepala Daerah.	Telah dilakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas perencanaan terutama pada Program dan Kegiatan yang bersumberdana DAK Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana sesuai Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun 2023



No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
2.	Belum maksimalnya penyerapan anggaran pada program dan kegiatan yang telah direncanakan, menunjukkan buruknya kinerja. Direkomendasikan kepada Bupati Sabu Raijua untuk melakukan pembinaan agar kedepan kualitas perencanaan setiap program dan kegiatan dilakukan dengan lebih cermat dan terukur	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menerima dan menindaklanjuti rekomendasi ini dan akan menyampaikan kepada Bupati sebagai Kepala Daerah.	Telah dilakukan pembinaan dan perbaikan kualitas perencanaan terutama pada Program dan Kegiatan yang bersumberdana DAK Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana sesuai Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun 2023 serta melakukan evaluasi secara periodik terhadap rencana operasional kegiatan dan realisasi anggarannya



9. Urusan Perhubungan

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Penyelenggaraan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan di Kabupaten Sabu Raijua dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sabu Raijua dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 2.445.197.124,-** dan realisasi sebesar **Rp 2.146.095.359,- (87,77%)**. Adapun pelaksanaan program/kegiatan dari Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.445.197.124	2.146.095.359	87,77
1.	Administrasi Keuangan Daerah	1.775.032.204	1.511.325.501	85,14
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.625.592.204	1.364.057.501	83,91
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	149.440.000	147.268.000	98,55
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42.692.000	40,043.057	93,80
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	28.500.000	28.500.000	100
	2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	14.192.000	11.543.057	81,33
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	378.630.670	353.065.304	93,25
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.631.250	1.620.000	99,31
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.023.420	42.937.000	93,29
	3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.520.000	8.467.100	73,50
	4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	319.456.000,-	300.041.204,-	93,92
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46,888,250	43.450.500	92,67
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.130.000	1.690.500	79,37
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.600.000,-	34.700.000,-	97,47
	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.630.000	3.330.000	71,92
	4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.528.250	3.730.000	82,37
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.194.000	10.935.350	97,69
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.194.000	10.935.350	97,69



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
II.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	7.693.366.000	6.572.780.489	85,43
1.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	810.140.000	810.040.000	99,99
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	810.140.000	810.040.000	99,99
2.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3.631.547.000	2.760.370.590	76,01
	1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3.570.951.000	2.710.555.500	75,91
	2) Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	13.500.000	5.000.000	37,04
	3) Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	6.800.000	6.800.000	100
	4) Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	34.856.000	32.575.090	93,46
	5) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5.440.000	5.440.000	100
3.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	35.975.000	33.300.000	92,56
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	35.975.000	33.300.000	92,56
4.	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	2.720.000	2.720.000	100
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	2.720.000	2.720.000	100
5.	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	70.290.000	56.230.000	80
	1) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	50.650.000	36.700.000	72,46
	2) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	5.440.000	5.440.000	100
	3) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	14.200.000	14.090.000	99,23
6.	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.142.694.000	2.910.119.899	92,60



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
	1) Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.138.994.000	2.907.399.899	92,62
	2) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Kabupaten kota	3.700.000	2.720.000	73,51
III	Program Pengelolaan Pelayaran	12.250.737.950	12.145.131.020	99,14
1.	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten /Kota	5.060.000	4.760.000	94,07
	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.060.000	4.760.000	94,07
2.	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	12.031.855.50	11.967.700.820	99,47
	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal	12.031.855.500,-	11.967.700.820,-	99,47
3.	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	128.930.000	128.225.050	99,45
	1) Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	209.742.450	168.590.200	80,38
	2) Pengawasan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	4.080.000	4.080.000	100
	Jumlah	22.389.301.074	20.864.006.868	93,19



3.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Arah kebijakan	Program	Sasaran		Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN									
1	Pembangunan Infrastruktur dan Jaringan Transportasi Yang Menghubungkan Antar Bagian Wilayah dan atau Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Pariwisata dengan Memperhatikan Aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten Kabupaten/ Kota	Terwujudnya Transportasi Lancar	1.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten Kabupaten/ Kota	Kegiatan	1	1	100
a. Jumlah perjalanan monitoring dan evaluasi kondisi fasilitas keselamatan jalan									
b. Jumlah perjalanan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan fasilitas keselamatan jalan									
c. Jumlah perjalanan dinas survey kebutuhan fasilitas keselamatan jalan									
					d. Jumlah pengadaan dan pemasangan rambu dan lampu penerang jalan umum (LPJU)	Unit	68	68	
2		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terwujudnya Transportasi Lancar	1.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kegiatan	1	1	100
					a. Jumlah perjalanan dinas dalam rangka Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan gedung pengujian kendaraan bermotor				
					b. Jumlah penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Kegiatan	2	2	100



No	Arah kebijakan	Program	Sasaran		Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
				1.3	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor a. Jumlah penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	Kegiatan	1	1	100
				1.4	Identifikasi dan Analisis Potensi jumlah kendaraan bermotor wajib Uji a. Jumlah perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan dan analisa data base kendaraan bermotor	Kegiatan	1	1	100
				1.5	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor a. Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan PKB	Kegiatan	1	1	100
				1.6	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor a. Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kegiatan	1	1	100
3		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Terwujudnya Transportasi Lancar	1.7	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan				



No	Arah kebijakan	Program	Sasaran		Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Kabupaten/Kota			a. Jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1	100
4		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terwujudnya Transportasi Lancar	1.8	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin a. Jumlah kegiatan penetapan kebijakan terkait tata Kelola Andalalin yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1	100
5		Audit dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di Jalan	Terwujudnya Transportasi Lancar	1.9	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal a. Jumlah Kegiatan Inspeksi dan Audit Pemantauan Terminal	Kegiatan	3	2	66,66
				1.10	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota a. Jumlah kegiatan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kegiatan	1	1	100



No	Arah kebijakan	Program	Sasaran		Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
				1.11	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum a. Jumlah kegiatan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kegiatan	1	1	100
6		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Transportasi Lancar	1.10	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota a. Jumlah Subsidi BBM yang disediakan b. Jumlah pengadaan kendaraan transportasi perdesaan c. Jumlah perjalanan dinas dalam rangka pengendalian dan pengawasan pembangunan moda darat d. Jumlah perjalanan dinas dalam rangka pengawasan dan penerima manfaat moda darat	Liter Unit Kegiatan Kegiatan	24.800 9 1 1	24.800 9 1 1	100 100 100 1



No	Arah kebijakan	Program	Sasaran		Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
				1.11	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 Kab/Kota a. Jumlah Perjalanan dinas dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 Kab/Kota	Kegiatan	1	1	100
PROGRAM PELAYARAN									
7		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Terwujudnya Pengelolaan Pelayaran	1.12	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten / Kota a. Jumlah Kegiatan pengendalian dan pengawasan jaringan lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Kegiatan	1	1	100



No	Arah kebijakan	Program	Sasaran		Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
8		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terwujudnya Pengelolaan Pelayaran	1.13	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal a. Jumlah fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan pengumpan local yang disediakan	Unit	1	1	100
9		Pembangunan dan Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Terwujudnya Pengelolaan Pelayaran	1.14	Pengawasan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau a. Jumlah kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau b. Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan	Kegiatan Kegiatan	1 1	1 1	100 100



3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Alokasi Anggaran : Rp. 1.625.592.204,-
 - Realisasi : Rp. 1.364.057.501,- (83,91 %)
 - Keluaran :
 - Tersedianya Gaji dan Tunjangan 12 Orang ASN selama 1 Tahun
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Alokasi Anggaran : Rp. 149.440.000,-
 - Realisasi : Rp. 147.268.000,- (98,55 %)
 - Keluaran :
 - Terbayarnya honor jasa administrasi pelaksanaan tugas ASN sebanyak 17 orang

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Alokasi Anggaran : Rp. 28.500.000,-
 - Realisasi : Rp. 28.500.000,- (100 %)
 - Keluaran :
 - Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya sebanyak 19 stel
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Alokasi Anggaran : Rp. 14.192.000,-
 - Realisasi : Rp. 11.543.057,- (81,33 %)
 - Keluaran :
 - Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebanyak 1 Orang

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Alokasi Anggaran : Rp. 1.631.250,-
 - Realisasi : Rp. 1.620.000,- (99,31 %)
 - Keluaran :
 - Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Sebanyak 5 Jenis.
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Alokasi Anggaran : Rp. 46.023.420,-
 - Realisasi : Rp. 42.937.000,- (93,29 %)
 - Keluaran :
 - Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 36 Jenis.
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Alokasi Anggaran : Rp. 11.520.000,-
 - Realisasi : Rp. 8.467.100,- (73,50 %)
 - Keluaran :
 - Tersedianya barang cetak dan penggandaan berupa foto copy sejumlah 23.055 lembar dan buku sebanyak 45 buah



- 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 Alokasi Anggaran : Rp. 319.456.000,-
 Realisasi : Rp. 300.041.204, - (93,92 %)
 Keluaran :
 Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sebanyak 8 Kegiatan
- 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- 1) Pengadaan Mebel
 Alokasi Anggaran : Rp. 11.194.000,-
 Realisasi : Rp. 10.935.350,- (97,69)
 Keluaran :
 Terlaksananya Meja kerja jati sebanyak 1 Unit dan lemari arsip jati sebanyak 2 unit.
- 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 Alokasi Anggaran : Rp. 2.130.000,-
 Realisasi : Rp. 1.690.500, - (79,37 %)
 Keluaran :
 Tersedianya 165 lembar Materai dan 1 paket pengiriman
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Alokasi Anggaran : Rp. 35.600.000,-
 Realisasi : Rp. 34.700.000, - (97,47 %)
 Keluaran :
 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebanyak 2 Jenis, berupa belanja air sebanyak 18 tangki dan belanja tagihan listrik daya 6600 Kwh selama 8 bulan.
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Alokasi Anggaran Rp. 4.630.000,-
 Realisasi : Rp. 3.330.000, - (71,92 %)
 Keluaran :
 Tersedianya Jasa Pemeliharaan peralatan dan Perlengkapan kantor sebanyak 2 Jenis, service laptop/PC sebanyak 2 unit dan service AC sebanyak 3 unit.
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 Alokasi Anggaran Rp. 4.528.250,-
 Realisasi : Rp. 3.730.000, - (82,37 %)
 Keluaran :
 Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor sebanyak 9 jenis, berupa belanja alat-alat kebersihan kantor.
- 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 Alokasi Anggaran : Rp. 190.760.000,-
 Realisasi : Rp. 187.275.647, - (98,17 %)
 Keluaran :
 Tersedianya jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebanyak 12 unit, berupa pemeliharaan mobil 5 unit dan motor 7 unit.



- 7. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**
- 1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 Alokasi Anggaran : Rp. 810.140.000,-
 Realisasi : Rp. 810.040.000, - (99,99 %)
 Keluaran :
 Tersedianya perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota sebanyak 68 unit berupa pengadaan rambu sebanyak 43 unit dan Lampu Penerang Jalan Umum (LPJU) sebanyak 25 Unit.
- 8. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**
- 1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 Alokasi Anggaran : Rp.3.570.951.000,-
 Realisasi : Rp.2.710.555.500,- (75,91 %)
 Keluaran :
 Tersedianya sarana prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor sebanyak 1 unit berupa pembangunan gedung pengujian berkala kendaraan bermotor.
- 2) Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 Alokasi Anggaran : Rp.13.500.000,-
 Realisasi : Rp.5.000.000,- (37,04 %)
 Keluaran :
 Tersedianya dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor sebanyak 450 dokumen
- 3) Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Wajib Uji
 Alokasi Anggaran : Rp.6.800.000,-
 Realisasi : Rp.6.800.000, - (100 %)
 Keluaran :
 Terlaksananya Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Wajib Uji sebanyak 1 kegiatan
- 4) Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 Alokasi Anggaran : Rp. 34.856.000,-
 Realisasi : Rp. 32.575.090, - (93,46 %)
 Keluaran :
 Terlaksananya Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebanyak 2 kegiatan
- 5) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 Alokasi Anggaran : Rp. 5.440.000,-
 Realisasi : Rp. 5.440.000, - (100 %)
 Keluaran :
 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebanyak 1 Kegiatan
- 9. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**
- 1) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
 Alokasi Anggaran : Rp. 35.975.000,-
 Realisasi : Rp. 33.300.000, - (92,56 %)



Keluaran :
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota sebanyak 2 Kegiatan

10. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

- 1) Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
Alokasi Anggaran : Rp. 2.720.000,-
Realisasi : Rp. 2.720.000,- (100 %)
Keluaran :
Terlaksananya kegiatan Penetapan Kebijakan terkait Tata Kelola Andalalin sebanyak 1 Kegiatan

11 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

- 1) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
Alokasi Anggaran : Rp. 50.650.000,-
Realisasi : Rp. 36.700.000,- (72,46 %)
Keluaran :
Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal sebanyak 2 Kegiatan
- 2) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor
Alokasi Anggaran : Rp. 5.440.000,-
Realisasi : Rp. 5.440.000,- (100 %)
Keluaran :
Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor sebanyak 1 Kegiatan
- 3) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
Alokasi Anggaran : Rp. 14.200.000,-
Realisasi : Rp. 14.090.000,- (99,23%)
Keluaran :
Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum sebanyak 1 Kegiatan.

12 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Alokasi Anggaran : Rp.3.138.994.000,-
Realisasi : Rp.2.907.399.899,- (92,62%)
Keluaran :
Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang sebanyak 2 kegiatan berupa pengadaan pick up sebanyak 8 unit, pengadaan micro bus sebanyak 1 unit dan subsidi BBM untuk angkutan anak sekolah sebanyak 24.800 Liter.



- 2) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
 Alokasi Anggaran : Rp. 3.700.000,-
 Realisasi : Rp. 2.720.000,- (73,51 %)
 Keluaran :
- Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota sebanyak 1 kegiatan
- 13. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**
- 1) Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 Alokasi Anggaran : Rp. 5.060.000,-
 Realisasi : Rp. 4.760.000, - (94,07%)
 Keluaran :
- Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1 kegiatan
- 14. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**
- 1) Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pengumpan Lokal
 Alokasi Anggaran : Rp.12.031.855.500,-
 Realisasi : Rp.11.967.700.820,-(99,47 %)
 Keluaran :
- Tersedianya fasilitas pelayanan angkutan pengumpan lokal sebanyak 1 unit
- 15. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**
- 1) Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sunagi dan Danau
 Alokasi Anggaran : Rp. 209.742.450,-
 Realisasi : Rp.168.590.200,- (80,38%)
 Keluaran :
- Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sunagi dan Danau sebanyak 1 kegiatan
- 2) Pengawasan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
 Alokasi Anggaran : Rp. 4.080.000,-
 Realisasi : Rp. 4.080.000,- (100 %)
 Keluaran :
- Terlaksananya Pengawasan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau sebanyak 1 kegiatan



3.4 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN (YA/TIDAK)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
1	Terwujudnya Transportasi Lancar	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Terlaksananya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Ketersediaan Fasilitas LLAJ	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan yang disediakan sebanyak 68 Unit	Ya
					Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang yang disediakan sebanyak 9 Unit	Ya
							Jumlah Subsidi BBM untuk Anak Sekolah yang disediakan sebanyak 24.800 Liter	Ya
2	Terwujudnya Transportasi Lancar	Program Pengelolaan Pelayaran	Terlaksananya Pengelolaan Pelayaran	Terwujudnya Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Tersedianya fasilitas pelayanan angkutan pengumpan lokal	Jumlah Penyediaan Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang (Kapal Bus Air Ro-Ro) yang disediakan sebanyak 1 Unit	Ya



3.5 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- ❖ Masih terbatasnya tenaga administrasi dan teknis sehingga dalam pelaksanaan tupoksi tidak maksimal.
- ❖ Sejumlah Jabatan Struktural belum terisi pada Bidang Lalu lintas dan Angkutan dan Bidang Prasarana dan Keselamatan.
- ❖ Dalam meningkatkan pengetahuan teknis masih terkendala dengan tenaga ASN dan tenaga kontrak yang belum memiliki kokpetensi yang memadai.

Solusi :

- ❖ Pengusulan recruitment tenaga administrasi dan teknis.
- ❖ Pengisian jabatan yang lowong dan memaksimalkan personil yang ada dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD.
- ❖ Perlu dilaksanakan Pendidikan dan pelatihan.

3.6 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Tidak Ada

3.7 Tindak Lanjut Rekomendasi DRPD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DRPD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Direkomendasikan untuk segera menuntaskan persoalan sehubungan terkatung-katungnya penyelesaian dokumen rencana pembangunan bandara Eilode.	<ul style="list-style-type: none">- Terkait dengan terkatung-katungnya penyelesaian dokumen rencana pembangunan bandara di Desa Eilode. Bahwa penyelesaian dokumen harus mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 20 Tahun 2014 Tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara yang membutuhkan waktu cukup lama sehingga terkesan terkatung-katung. Adapun Penyelesaian dokumen Master Plan/Rencana Induk Bandar Udara (RIB) dan Permohonan Penetapan Nama Bandar Udara: Banggu Loni ke Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI untuk mendapatkan persetujuan RIB dan penetapan nama Bandar Udara telah selesai dilakukan.- Saat ini Rencana pembangunan Bandara Udara Banggu Loni sudah sampai pada tahapan pengusulan Penetapan Lokasi (Penlok) Bandara Udara Banggu Loni ke Dirjen Perhubungan Udara	<ul style="list-style-type: none">- SK Penetapan Lokasi Bandara Udara Banggu Loni



No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		<p>dan saat ini sementara menunggu SK Penetapan Lokasi (Penlok) dari Kementerian Perhubungan RI.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebagai langkah upaya lain, secara paralel juga telah diusulkan anggaran untuk Rencana Teknis Terinci (RTT) sisi Udara dan sisi Darat ke Kementerian Perhubungan melalui Unit Pengelola Bandar Udara (UPBU) Kelas III Tardamu Sabu pada Tahun Anggaran 2023. - Rencana Pembangunan Bandara Udara Banggu Loni juga sudah di masukkan dalam Renstra 2025 UPBU Tardamu Kelas III Sabu Raijua dan Juga RPJMN 2025 – 2029 	



10. Urusan Komunikasi dan Informatika

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Penyelenggara Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Sabu Raijua dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua dengan alokasi anggaran **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika** sebesar **Rp. 4.463.121.791,-** dan realisasi sebesar **Rp. 4.202.101.296,- (94,15 %)**. Adapun pelaksanaan program/kegiatan dari Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2.148.357.873	1.983.753.278	92,34
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.642.251.323	1.483.955.853	90,36
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.538.607.323	1.382.957.853	89,88
	2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	103.644.000	100.998.000	97,45
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26.000.000	26.000.000	100
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	26.000.000	26.000.000	100
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	330.156.550	325.049.490	98,45
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.593.750	5.525.000	98,77
	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.798.000	59.984.000	95,52
	3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.600.000	21.080.000	97,59
	4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.061.800	8.494.200	93,74
	5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	231.103.000	229.966.290	99,51
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.243.500	4.243.500	100
	Pengadaan Mebel	4.243.500	4.243.500	100
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.928.500	83.789.000	99,84
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	2.995.000	99,83
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.400.000	69.381.000	99,97
	3) Penyediaan Jasa dan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.080.000	7.970.000	98,64



No	Program/Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
	4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.448.500	3.443.000	99,90
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.780.000	60.715.435	98,28
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Lapangan	61.780.000	60.715.435	98,28
II	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	634.751.989	611.722.123	96,37
1.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	634.751.989	611.722.123	96,37
	1. Pengelolaan Media Komunikasi Publik	26.392.000	24.641.160	93,37
	2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	608.359.989	587.080.963	96,50
III	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	1.680.011.929	1.609.643.895	95,81
1.	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.497.221.894	1.441.168.950	96,26
	1. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	70.562.590	55.302.590	78,37
	2. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.426.659.304	1.385.688.360	97,13
2.	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	182.790.035	168.474.945	92,17
	1. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	62.412.000	51.729.000	82,88
	2. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	66.884.035	65.986.855	98,66
	3. Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	24.380.000	24.280.000	99,59
	4. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	29.114.000	23.639.090	81,19
	Jumlah	4.463.121.791	4.202.101.296	94,15



3.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	%
1	Komunikasi dan Informatika	1. Dinas Komunikasi dan Informatika		Program Aplikasi Informatika			
				1. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota a. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.426.659.304 Tersedianya pelayanan publik di bidang TIK selama 1 tahun	1.385.688.360 Meningkatnya kualitas layanan informasi pemerintah daerah	97,13
				2. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota a. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota b. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	62.412.000 Terlaksananya Evaluasi Pemerintah Daerah (Indeks SPBE 2,6) 66.884.035 Tersedianya peralatan CCTV sebanyak 15 unit	51.729.000 Meningkatnya Indeks SPBE 65.986.855 Meningkatnya Layanan berbasis internet	82,88 98,66



3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Alokasi Anggaran : Rp. 1.538.607.323,-
Realisasi : Rp. 1.382.957.853, - (89,88 %)
Keluaran :
Terbayarnya gaji dan tunjangan selama 12 bulan
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Alokasi Anggaran : Rp. 103.644.000,-
Realisasi : Rp. 100.998.000, - (97,45 %)
Keluaran :
Terbayarnya honorarium Pengguna Anggaran, bendahara pengeluaran, Pengurus barang, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Admin Sirup, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa selama 12 bulan.

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Alokasi Anggaran : Rp. 26.000.000,-
Realisasi : Rp. 26.000.000, - (100 %)
Keluaran :
Tersedianya pakaian dinas beserta atribut bagi ASN sebanyak 14 stel

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 5.593.750,-
Realisasi : Rp. 5.525.000, - (98,77 %)
Keluaran :
Tersedianya alat listrik dan elektornik sebanyak 7 jenis
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 62.798.000,-
Realisasi : Rp. 59.984.000, - (95,52 %)
Keluaran :
Tersedianya alat tulis kantor sebanyak 35 jenis, kursi pimpinan sebanyak 4 buah, rak 5 susun siku besi sebanyak 1 unit dan mesin pemotong rumput sebanyak 1 unit.
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 21.600.000,-
Realisasi : Rp. 21.080.000, - (97,59 %)
Keluaran :
Terpenuhinya kebutuhan makan minum rapat selama 1 tahun sebanyak 720 OK dalam rangka pelaksanaan tugas dan rapat-rapat.



- 4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 Alokasi Anggaran : Rp. 9.061.800,-
 Realisasi : Rp. 8.494.200, - (93,74 %)
 Keluaran :
 Tersedianya barang cetak dan penggandaan, berupa Cetak 87 buku dan penggandaan sebanyak 20.056 Lembar
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 Alokasi Anggaran : Rp. 231.103.000,-
 Realisasi : Rp. 229.966.290,- (99,51 %)
 Keluaran :
 Terlaksananya koordinasi dan konsultasi mengenai kebutuhan bandwidth dan kelengkapan kontrak tahun 2023, Bidang Komunikasi dan Informatika, kerja sama implementasi SPBE di Banyuwangi, manajemen layanan SPBE, pendampingan SPBE, urusan statistik, dukungan jaringan komunikasi Telkomsel, Forum Smart City sesuai undangan Direktorat Jendral Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Audiensi jajaran di Direktorat Jendral Informasi dan Komunikasi Publik cq. Direktorat Pengelolaan Media dalam hal kerja sama pemanfaatan media melalui pengembangan tayangan informasi pada Government Public Relations Televisi (GPR TV), Penganugerahan Keterbukaan Informasi bagi Badan Publik se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, workshop penerapan aplikasi SRIKANDI dan Penyusunan kebijakan Instrumen kearsipan Daerah, Suport akses jaringan komunikasi pada pelaksanaan festival Kelabba Madja, implementasi penggunaan dan pemanfaatan layanan tanda tangan elektronik di lingkup Pemda Kabupaten Sabu Raijua pada BSrE Badan siber dan Sandi Negara, manajemen layanan SPBE, mengikuti persada.id, Musrenbang di 6 Kecamatan dan rapat lengkap pamong praja di 6 Kecamatan

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Mebel
 Alokasi Anggaran : Rp. 4.243.500,-
 Realisasi : Rp. 4.243.500, - (100 %)
 Keluaran :
 Tersedianya lemari arsip jati sebanyak 1 unit.

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 Alokasi Anggaran : Rp. 3.000.000,-
 Realisasi : Rp. 2.995.000, - (99,83 %)
 Keluaran :
 Tersedianya materai Rp.10.000,- sebanyak 300 lembar
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Alokasi Anggaran : Rp. 69.400.000,-
 Realisasi : Rp. 69.381.000, - (99,97 %)
 Keluaran :
 Tersedianya air sebanyak 34 tanki dan listrik sebanyak 60 voucer
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Alokasi Anggaran : Rp. 8.080.000,-
 Realisasi : Rp. 7.970.000, - (98,64 %)



Keluaran :
Terpeliharanya peralatan gedung kantor berupa service AC 4 unit, printer 5 unit, service laptop 3 unit.

4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 3.446.500,-
Realisasi : Rp. 3.443.000, - (99,90 %)
Keluaran :

Tersedianya alat-alat kebersihan Sebanyak 11 jenis.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan

Alokasi Anggaran : Rp. 61.780.000,-
Realisasi : Rp. 60.715.435, - (98,28 %)
Keluaran :

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas melalui penyediaan Bahan Bakar Minyak, Penggantian Suku Cadang, Pembayaran pajak STNK untuk 9 unit motor dinas dan 1 unit mobil dinas.

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah

7. Kabupaten/Kota

1) Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Alokasi Anggaran : Rp. 26.392.000,-
Realisasi : Rp. 24.641.160, - (93,37 %)
Keluaran :

Terlaksananya konsultasi dan koordinasi keterbukaan informasi publik di Kemenkominfo dan Tersedianya pulsa untuk siaran langsung selama 1 tahun.

2) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Alokasi Anggaran : Rp. 608.359.989,-
Realisasi : Rp. 587.080.963, - (96,50 %)
Keluaran :

- Terbayarnya honor Dewan Direksi, Dewan Pengawas dan Penyiar RSPD; iuran jaminan kematian, kecelakaan dan Kesehatan bagi Dewan Pengawas, Dewan Direksi dan penyiar serta ijin frekuensi, iuran ijin penyiaran dan ijin frekuensi selama 1 tahun dan iuran ijin penyiaran dan ijin frekuensi selama 1 tahun.

- Tersedianya bahan bakar untuk jenset, peralatan video sebanyak 1 paket, makan minum hari penyiaran, hari pers dan rapat LPPL dan bidang, laptop livestreaming sebanyak 1 unit, lemari jati 1 unit, Vacum cleaner 1 unit, peralatan video 1 paket dan HP android sebanyak 1 unit.

- Terlaksananya koordinasi dan konsultasi DIP, penyusunan strategi komunikasi pemda di Kemenkominfo, pembentukan media center di Kemenkominfo, mengikuti rakernas persada .id di Denpasar bagi Dirut LPPL RSPD sebanyak 1 kali.



8. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi Anggaran : Rp. 70.562.590,-

Realisasi : Rp. 55.302.590, - (78,37 %)

Keluaran :

- Tersedianya Perlengkapan Vicon : kabel HDMI sebanyak 1 buah dan proyektor/infokus sebanyak 1 unit.
- Terbayarnya honor Tim Pengelola Website Pemda sebanyak 22 orang dan sewa hosting website pemda selama 1 tahun.

- 2) Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Alokasi Anggaran : Rp. 1.426.659.304,-

Realisasi : Rp. 1.385.688.360, - (97,13 %)

Keluaran :

- Terbayarnya jasa internet 150 Mbps.
- Terlaksananya pelatihan mikrotik di Yogyakarta bagi Pejabat Fungsional sebanyak 1 orang dan staf sebanyak 1 orang.
- Terbayarnya honor Tim Jaringan Intra Pemerintah Daerah bagi 7 Orang.
- Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam rangka rakor TIK di Kupang, pengurusan Kontrak bandwidth.
- Tersedianya peralatan jaringan sebanyak 4 jenis, peralatan studio audio sebanyak 3 jenis dan peralatan peralatan computer sebanyak 6 jenis.

9. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi Anggaran : Rp. 62.412.000,-

Realisasi : Rp. 51.729.000, - (82.88 %)

Keluaran :

- Tersedianya makan minum rapat evaluasi SPBE bagi 23 orang.
- Terbayarnya honor koordinasi SPBE sebanyak 19 orang, tim koordinasi SPBE sebanyak 15 orang, Tim pemantauan dan evaluasi SPBE Pemda sebanyak 16 orang, iuran domain dan sewa akun zoom pro selama 1 tahun.
- Terlaksananya koordinasi dan konsultasi manajemen SPBE dan Rakor TIK di Kupang.

- 2) Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik

Alokasi Anggaran : Rp. 66.884.035,-

Realisasi : Rp. 65.986.855, - (98,66 %)

Keluaran :

- Terbayarnya jasa instalasi CCTV pada 2 lokasi.
- Terlaksananya koordinasi dan konsultasi penyusunan instrumen kebijakan SPBE di Diskominfo Prov. NTT
- Tersedianya CCTV sebanyak 16 unit dan peralatan penunjangnya sebanyak 9 jenis; dan peralatan studio audio kabel HDMI sebanyak 2 buah.



- 3) Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah
Alokasi Anggaran : Rp. 24.380.000,-
Realisasi : Rp. 24.280.000, - (99,89 %)
Keluaran :
- Terlaksananya pengambilan data GIS di 6 Kecamatan.
- Tersedianya converter HDMI sebanyak 1 buah, spinter HDMI sebanyak 1 unit dan printer sebanyak 1 unit.
- 4) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
Alokasi Anggaran : Rp. 29.114.000,-
Realisasi : Rp. 23.639.090, - (81,19 %)
Keluaran :
- Terlaksananya sosialisasi penggunaan layanan pusat data nasional bagi 10 orang dan bintek srikandi di Kupang bagi Pej. Fungsional; dan sosialisasi pusat data nasional di Kupang bagi pej. Fungsional sebanyak 1 kali.
- Terbayarnya honor tim sosialisasi penggunaan layanan pusat data nasional bagi 5 orang dan transport peserta sosialisasi bagi 10 orang
- Terlaksananya koordinasi dan konsultasi manajemen SDM SPBE sebanyak 1 kali.



3.4 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN (YA/TIDAK)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
1	Meningkatnya akses teknologi informasi berbasis internet di masyarakat dan Lembaga – Lembaga pemerintah	Program Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ kKota	Terlaksananya pelayanan publik berbasis TIK	Peningkatan Akses Teknologi Informasi berbasis Internet di masyarakat dan lembaga – lembaga pemerintah	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya Akses Layanan Internet di masyarakat dan lembaga – lembaga pemerintah	Tersedianya Akses Teknologi Informasi berbasis Internet di masyarakat dan lembaga – lembaga pemerintah (38 OPD, 63 Desa/Kel)	Ya
		Program E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pelayanan publik berbasis TIK	Peningkatan penerapan pelayanan E-Government bagi OPD	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya pelayanan E-Government bagi OPD	Tersedianya penerapan pelayanan E-Government bagi OPD (46 OPD)	Ya



3.5 Permasalahan dan Solusi

Tidak Ada

3.6 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Tidak Ada

3.7 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1.	<p>Sehubungan dengan Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Siaran Pemerintah daerah (RSPD) Sabu Raijua (Sarai) yang sudah memiliki regulasi sendiri serta memiliki Dewan Pengawas (Dewas) melalui seleksi fit and proper test oleh DPRD, namun gaji Dewan Pengawas yang berada jauh di bawah standar UMR bahkan berada di bawah gaji tenaga kontrak daerah. DPRD berpendapat, keberadaan Dewan Prngawas LPPL RSPD Sarai merupakan posisi yang strategis. Dewan Pengawas berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah daerah dan LPPL RSPD Sarai dalam melaksanakan pengawasan atas kebijakan Dewan Direksi dalam menjalankan dan mengelola manajemen LPPL RSPD Sarai. Karena itu DPRD merekomendasikan agar Bupati Sabu Raijua meninjau kembali aturan menyangkut gaji atau penghasilan Dewan Pengawas dan melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan memperhatikan kepatutan dan kepatutan</p>	<p>Sehubungan dengan gaji Dewan Pengawas (Dewas) LPPL RSPD sudah diakomodir dalam Perubahan Anggaran Tahun 2023</p>	<p>Telah dilakukan realisasi pada perubahan anggaran tahun 2023.</p>



11. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Penyelenggara Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Sabu Raijua dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sabu Raijua, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 4.451.258.800,-** dan realisasi sebesar **Rp. 4.388.889.907,- (98,6%)**. Adapun pelaksanaan program/kegiatan dari Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
I.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	24.424.000	24.192.000	99,1
1.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 1) Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	24.424.000	24.192.000	99,1
II.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	27.026.800	26.349.980	97,5
2.	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	27.026.800	26.349.980	97,5
III	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	98.809.000	87.756.000	88,8
3.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	98.809.000	87.756.000	88,8
IV.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	4.101.335.500	4.053.811.127	98,8
4.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			



No	Program/Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
	1) Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	3.503.514.000	3.476.307.527	99,2
	2) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	597.821.500	577.503.600	96,6
V. 5.	Program Pengembangan UMKM Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	199.663.500	196.780.800	98,6
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	199.663.500	196.780.800	98,6
Jumlah		4.451.258.800	4.388.889.907	98,6

1.2. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Arah Kebijakan	Program	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Diarahkan pada upaya Pemulihan Ekonomi dan penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat serta Sistem Perlindungan Sosial dengan sasaran prioritas	1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat (SARAI MAMPU)	1.1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kab./kota	5 kop	5 kop	100%
	2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan kab./kota		2.1. Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kab./kota	5 kop	4 kop	80%
	3. Program Pendidikan dan latihan perkoperasian		3.1. Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotannya dalam daerah kab/kota	28 org	28 org	100%
	4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro		4.1. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan			



Arah Kebijakan	Program	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
			kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan - Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	3 keg	3 keg	100%
			-Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	75 org	75 org	100%
	5. Program Pengembangan UMKM		5.1. Pengembangan usaha mikro dengan peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	4 jenis usaha (18 org)	4 jenis usaha (18 org)	100%

1.3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

I. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kab.Kota

- 1) Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas koperasi Kewenangan Kab./kota

Alokasi : Rp. 24.424.000,-

Realisasi : Rp. 24.192.000,- (99,1%)

Keluaran :

Terlaksananya pengawasan pada 5 Koperasi.

II. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

2. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota

- 1) Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kab./Kota

Alokasi Anggaran : Rp. 27.026.800,-

Realisasi : Rp. 26.349.980,- (87,5%)

Keluaran :

Terlaksananya penilaian kesehatan bagi 4 koperasi yang melaksanakan RAT.



III. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

3. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kab./Kota

- 1) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
Alokasi Anggaran : Rp. 98.809.000,-
Realisasi : Rp. 87.756.000,- (88,8%)
Keluaran :
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi bagi 28 orang Pengurus Koperasi

IV. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

4. Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan

- 1) Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro
Alokasi Anggaran : Rp. 3.503.514.000,-
Realisasi : Rp. 3.476.307.527,- (99,2%)
Keluaran :
Terlaksananya kegiatan penyaluran bantuan social uang yang direncanakan kepada 458 orang (individu) dan 86 kelompok UMKM, pameran produk tenun ikat Tingkat nasional.
- 2) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan
Alokasi Anggaran : Rp. 597.821.500,-
Realisasi : Rp. 577.503.600,- (96,6%)
Keluaran :
Terlaksananya pelatihan manajemen kewirausahaan, pelatihan pembuatan souvenir berbahan dasar tenun ikat, dan pelatihan pembuatan dodol dan stik dari rumput laut. Sejumlah 75 pelaku usaha, kegiatan serta dengan cakupan 25 orang mengikuti pelatihan manajemen kewirausahaan, 25 orang yang terdiri dari 5 kelompok mengikuti pelatihan pembuatan souvenir, 25 orang mengikuti pelatihan pembuatan dodol dan stik dari rumput laut .

V. Program Pengembangan UMKM

5. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil

- 1) Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi
Alokasi Anggaran : Rp. 199.663.500,-
Realisasi : Rp. 196.780.800,- (98,6%)
Keluaran :
Terlaksananya pemberian bantuan alat bagi 18 orang usaha tenun ikat, bengkel motor, las Listrik dan menjahit. Masing-masing penerima bantuan tenun ikat 4 orang, bengkel motor 3 orang, las Listrik 3 orang dan menjahit 8 orang.



1.4. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN (YA/TIDAK)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
1	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat (SARAI MAMPU)	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan, Kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/ kota	Persentase koperasi yang berkualitas	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan	Persentase koperasi yang berkualitas	Ya
2	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat (SARAI MAMPU)	Program penilaian Kesehatan KSP/USP koperasi	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	Presentase KSP/USP Koperasi yang diawasi	Penilaian Kesehatan koperasi simpan/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota	Terlaksananya penilaian Kesehatan koperasi aktif yang melaksanakan RAT	Persentase Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	Ya
3	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat (SARAI MAMPU)	Program Pendidikan dan Latihan perkoperasian	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	Presentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi	Pendidikan dan Latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Pendidikan dan Latihan perkoperasian	Persentase Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	Ya



4	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat (SARAI MAMPU)	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	Presentase pemberdayaan UMKM	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Terlaksananya temu kemitraan, pameran produk UKM, bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM dan Dekranasda	Presentase Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	Ya
5	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat (SARAI MAMPU)	Program pengembangan UMKM	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	Presentase usaha mikro menjadi usaha kecil/menengah	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Terlaksananya fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	Presentase Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	Ya



1.5. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada

1.6. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Tidak ada

1.7. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1.	Direkomendasikan kepada Saudara Bupati Sabu Raijua agar terus meningkatkan peranan Pemerintah Daerah dalam upaya menumbuh kembangkan koperasi yang sehat di kabupaten Sabu Raijua yang sungguh-sungguh dapat menjadi soko guru perekonomian	1. Pemerintah sepakat dengan rekomendasi Pansus dan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti.	1.1. Dilaksanakannya pengawasan dan pemeriksaan koperasi serta penilaian kesehatan koperasi yang melaksanakan RAT. 1.2. Dilaksanakan pelatihan manajemen pengelolaan koperasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan pengurus tentang penyusunan laporan keuangan koperasi dan laporan RAT. 1.3. Telah mengikutsertakan pelaku ukm dalam pameran ukm tingkat nasional untuk menjual / memperkenalkan produk ukm dengan tujuan untuk menambah pengetahuan dalam berinovasi terhadap produk yang dihasilkan 1.4. Pemberian bantuan sosial uang yang direncanakan bagi pelaku UMKM 1.5. Pemberian bantuan alat untuk 18 orang pelaku usaha tenun ikat, bengkel motor, las Listrik dan menjahit



12. Urusan Penanaman Modal

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Penyelenggara Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal di Kabupaten Sabu Raijua dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp 3.618.187.694,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp 2.844.509.912,-** atau sebesar **78,62%** dan realisasi fisik 100%. Adapun pelaksanaan program/kegiatan dari Urusan Wajib Penanaman Modal Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	2.924.319.894	2.392.684.810	81,82
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.476.279.953	2.015.393.396	81,39
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.307.399.953	1.865.491.396	80,85
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	168.880.000	149.902.000	88,76
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.500.000	27.500.000	100
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	27.500.000	27.500.000	100
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	196.993.250	135.285.858	68,68
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.545.250	2.807.010	61,76
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.694.000	35.687.500	99,98
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.250.000	24.975.000	85,40
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.000.000	2.918.000	22,45
	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114.504.000	68.898.348	60,17
4.	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.233.000	4.144.081	97,90
	1. Pengadaan Mebel	4.233.000	4.144.081	97,90
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.499.000	7.422.500	87,33
	1. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.050.000	5.255.500	86,87
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.449.000	2.167.000	88,49
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210.814.691	202.938.975	96,26
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	205.860.000	202.191.975	98,22



No	Program/Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.954.691	747.000	15,08
II.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	29.252.000	27.819.000	95,10
7.	Penetapan Pemeberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	29.252.000	27.819.000	95,10
	Evaluasi Pelaksanaan pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			
III.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	49.542.000	47.541.481	95,96
8	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	49.542.000	47.541.481	95,96
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal daerah Kab/Kota	49.542.000	47.541.481	95,96
IV.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	8.199.800	6.775.000	82,62
9.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	8.199.800	6.775.000	82,62
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			
V.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	580.124.000	343.689.621	59,24
10.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	580.124.000	343.689.621	59,24
	1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	399.529.000	193.080.621	48,33
	2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	180.595.000	150.609.000	83,40
VI.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	26.750.000	26.000.000	97,20
11.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.750.000	26.000.000	97,20
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	26.750.000	26.000.000	97,20
Jumlah		3.618.187.694	2.844.509.912	78,62



3.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Arah Kebijakan	Program	Sasaran	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya Perekonomian Daerah Menunju Sabu Raijua Maju	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten	100	127	127
	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya Perekonomian Daerah Menunju Sabu Raijua Maju	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah kabupaten/Kota	10,50	50	476
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya Perekonomian Daerah Menunju Sabu Raijua Maju	Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	100	75,18	75,18
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya Perekonomian Daerah Menunju Sabu Raijua Maju	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengendalian	100	193	193
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya Perekonomian Daerah Menunju Sabu Raijua Maju	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten	80	190	237



3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Alokasi Anggaran : Rp 2.307.399.953
Realisasi : Rp 1.865.491.396,- (80,85%)
Keluaran : Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN sebanyak 21 orang selama 12 bulan
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Alokasi Anggaran : Rp 168.880.000
Realisasi : Rp 149.902.000,- (88,76%)
Keluaran : Terbayarnya honor Pelaksana Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebanyak 10 orang.

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Alokasi Anggaran : Rp. 27.500.000,-
Realisasi : Rp. 27.500.000,- (100%)
Keluaran : Tersedianya Pakaian Dinas bagi ASN sebanyak 19 stel

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 4.545.250,-
Realisasi : Rp. 2.807.010,- (61,76%)
Keluaran : Tersedianya komponen instalasi listrik sebanyak 8 jenis
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 35.694.000,-
Realisasi : Rp. 35.687.500,- (99,98%)
Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 2 paket (ATK dan Meterai)
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 29.250.000,-
Realisasi : Rp. 24.975.000,- (85,40%)
Keluaran : Tersedianya makan minum rapat sebanyak 1.300 dos
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Alokasi Anggaran : Rp. 13.000.000,-
Realisasi : Rp. 2.918.000,- (22,45%)
Keluaran : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan sebanyak 2 paket (Jilid : 70 buku, dan Penggandaan dokumen dinas)
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Alokasi Anggaran : Rp. 114.504.000,-
Realisasi : Rp. 68.898.348,- (60,17%)



- Keluaran : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 3 kegiatan
- 4. Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- 1) Pengadaan Mebel
 Alokasi Anggaran : Rp. 4.233.000,-
 Realisasi : Rp. 4.144.081 (97,90%)
 Keluaran : Tersedianya mebel sebanyak 1 paket (1 buah kursi pimpinan)
- 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 1) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Alokasi Anggaran : Rp. 6.050.000,-
 Realisasi : Rp. 5.255.500,- (86,87%)
 Keluaran : Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 2 paket (Service AC dan Peralatan Kantor)
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 Alokasi Anggaran : Rp. 2.449.000,-
 Realisasi : Rp. 2.167.000,- (88,49%)
 Keluaran : Tersedianya Alat kebersihan kantor sebanyak 1 paket
- 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 Alokasi Anggaran : Rp. 205.860.000,-
 Realisasi : Rp. 202.191.975,- (98,22%)
 Keluaran : Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala sebanyak 14 unit (Roda 6: 2 unit, Roda 4: 3 unit, Roda 2: 9 unit)
- 2) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 Alokasi Anggaran : Rp. 4.954.691,-
 Realisasi : Rp. 747.000,- (15,08%)
 Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebanyak 1 unit
- 7. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal**
- 1) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 Alokasi Anggaran : Rp. 29.252.000,-
 Realisasi : Rp. 27.819.000,- (95,10%)
 Keluaran : Terlaksananya kegiatan Evaluasi Penanaman Modal sebanyak 5 kegiatan (Rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi, konsolidasi dan evaluasi PMPTSP di dalam Provinsi)
- 8. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**
- 1) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal daerah Kab/Kota
 Alokasi Anggaran : Rp. 49.542.000,-
 Realisasi : Rp. 47.541.481,- (95,96%)
 Keluaran : Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal sebanyak 1 kegiatan (Pameran di Kupang)



- 9. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**
- 1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 Alokasi Anggaran : Rp. 8.199.800,-
 Realisasi : Rp. 6.775.000,- (82,62%)
 Keluaran : Jumlah Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sebanyak 946 izin
- 10. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**
- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 Alokasi Anggaran : Rp. 399.529.000,-
 Realisasi : Rp. 193.080.621,- (48,33%)
 Keluaran : Terlaksananya Kegiatan pembinaan penanaman modal 2 kegiatan (Bimtek LKPM dan OSS)
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
 Alokasi Anggaran : Rp. 180.595.000,-
 Realisasi : Rp. 150.609.000,- (83,40%)
 Keluaran : Terlaksananya Kegiatan pengawasan penanaman modal terhadap 159 pelaku usaha
- 11. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
- 1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 Alokasi Anggaran : Rp. 26.750.000,-
 Realisasi : Rp. 26.000.000,- (97,20%)
 Keluaran : Jumlah data pelaku usaha yang diolah, dikaji, dan dimanfaatkan sebanyak 84 pelaku usaha (Pelaporan LKPM)



3.4 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN (YA/TIDAK)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
1.	Peningkatan Penanaman Modal di Daerah	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Penanaman Modal yang dilakukan	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Perizinan Penanaman Modal yang dilaksanakan	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi	Ya
2.		Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan promosi penanaman modal yang dilaksanakan	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota	Jumlah kegiatan promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	Terlaksananya Kegiatan Promosi	Ya
3.		Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Moda yang	Persentase Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi	Jumlah kegiatan layanan pendirian badan usaha yang terlayani	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang	Ya



NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN (YA/TIDAK)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
			dilaksanakan		Kewenangan Daerah kab/kota		menjadi Kewenangan Daerah kab/kota	
4.		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan pelaksanaan penanaman modal yang dilaksanakan di Daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengendalian	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Ya
5.		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terinterasi dilaksanakan di Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten	Pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terinterasi pada Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah kegiatan Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang dilaksanakan	Tersedianya data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terinterasi pada Tingkat Daerah Kab/Kota	Ya



3.5 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan :

Adanya efisiensi anggaran pada kegiatan BIMTEK LKPM dan OSS, sehingga anggaran yang tersedia tidak terserap seluruhnya pada Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal.

b. Solusi :

Perencanaan anggaran pada waktu yang akan datang akan dilakukan secara cermat dan disesuaikan dengan kebutuhan.

3.6 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	1. Bidang Penanaman Modal dan PTSP <ul style="list-style-type: none"> - Kemudahan pelayanan perizinan - Pengendalian informasi potensi daerah bagi calon Investor 	RPJMD Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 22 Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Memudahkan pengurusan ijin usaha bagi pengusaha - Memudahkan akses informasi keluar terkait potensi di dalam daerah - Memberi jaminan layak dan halal bagi produksi industri rumah tangga - Meningkatkan produksi dan ekonomi masyarakat - Mengontrol keseimbangan neraca perekonomian daerah - Menjaga kestabilan stock dan harga barang
	2. Bidang Perindustrian <ul style="list-style-type: none"> - Sertifikasi Industri Rumah Tangga - Sabu Raijua satu Rumah Tangga satu Produksi 		
	3. Bidang Perdagangan <ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian export dan impor barang - Perlindungan Konsumen 		

3.7 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun (2022)	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Bidang Penanaman Modal dan PTSP Direkomendasikan kepada Bupati untuk terus melakukan berbagai inovasi kebijakan serta melakukan berbagai terobosan, mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat sehingga dapat menarik masuknya investasi ke Sabu Raijua.	a. Pemerintah telah melakukan Perencanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat dengan memperhatikan skala prioritas yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. b. Pemerintah terus berupaya menarik minat Investasi masuk ke Kabupaten Sabu Raijua. Beberapa langkah yang telah dilakukan adalah: <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Sosialisasi kemitraan berusaha bagi 	a. Perencanaan melibatkan partisipasi masyarakat agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan. b. <ul style="list-style-type: none"> - Untuk meningkatkan kesinambungan usaha. - Meningkatkan kualitas Sumber Daya kelompok



No	Rekomendasi DPRD Tahun (2022)	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		<p>pelaku usaha dengan menghadirkan direktur Bank NTT dan BRI Cabang Sabu dengan beragam fasilitas Fiskal/ pinjaman kepada pelaku usaha yang ingin berinvestasi atau kepada industri yang turut berpartisipasi untuk pengembangan SDM.</p> <p>- Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua juga melalui Dinas PMPTSP terus mendorong dan memotivasi IRT/IKM di Sabu Raijua dengan berbagai bantuan peralatan dan bahan - bahan untuk kegiatan IRT/IKM seperti tenun ikat, penyadap lontar, Peralatan mesin jahit, Rak jualan, tenda bagi pedagang kaki lima.</p>	<p>Mitra dan Peningkatan skala usaha</p> <p>- Memberikan pelayanan perizinan yang cepat, tepat, Murah transparan dan akuntable.</p> <p>c. Perizinan yang cepat, tepat, Murah, transparan dan akuntable.</p>



13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 dilaksanakan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.1.803.097.000** dan realisasi sebesar **Rp. 1.710.425.030 (94,86%)** Adapun rincian anggaran dan realisasi program/kegiatan sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
I	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rp50.647.000	Rp35.357.280	69,81
1.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Rp50.647.000	Rp35.357.280	69,81
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Rp50.647.000	Rp50.647.000	69,81
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.452.450.000	1.400.098.750	96,39
1.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	87.375.000	82.943.750	94,92
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pmberdayaan Perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar.	87.375.000	82.943.750	94,92
2.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	365.075.000	319.786.000	87,59
	Seleksi Atlet Daerah	365.075.000	319.786.000	87,59
3.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.000.000.000	997.360.000	99,73
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1.000.000.000	997.360.000	99,73
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	300.000.000	274.978.000	91,65
4.	Pembinaan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	300.000.000	274.978.000	91,65
	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	274.978.000	91,65
Jumlah		1.803.097.000	1.710.425.030	94,86



3.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Arah Kebijakan	Program	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Diarahkan pada upaya peningkatan sumber daya manusia berkualitas, kesetaraan gender dan pengentasan kemiskinan.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya layanan Pendidikan menuju SARAI PINTAR	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat	65%	11,58 %	17,81%
Diarahkan pada upaya peningkatan sumber daya manusia berkualitas, kesetaraan gender dan pengentasan kemiskinan.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya layanan Pendidikan menuju SARAI PINTAR	Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif	55%	100 %	181,81%
Diarahkan pada upaya peningkatan sumber daya manusia berkualitas, kesetaraan gender dan pengentasan kemiskinan.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Meningkatnya layanan Pendidikan menuju SARAI PINTAR	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepramukaan	50%	50%	100%



3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader

- 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota

Alokasi Anggaran : Rp. 50.647.000

Realisasi : Rp. 35.357.280 (69,81%)

Keluaran :

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program/kegiatan kepemudaan di Kementerian Pemuda dan Olahragadi dan Provinsi.

2. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- 1). Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar

Alokasi Anggaran : Rp. 87.375.000

Realisasi : Rp. 82.943.750 (94,92%)

Keluaran :

- ✚ Terbayarnya honorarium panitia tim pelaksana kegiatan bola kaki tingkat SMP.dan Juri/Wasit.

- ✚ Tersedianya hadiah/piala/medali.

- ✚ Tersedianya pperlengkapan pendukung olahraga (Bola kaki) sebanyak 10 buah dan makan mimum rapat/kegiatan perlombaan bola kaki sebanyak 260 dos.

3. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

- 1) Seleksi Atlet Daerah

Alokasi Anggaran : Rp. 365.075.000

Realisasi : Rp. 319.786.000 (87,59%)

Keluaran :

Terlaksananya Seleksi Atlet 5 Cabang Olahraga (Tinju, Kempo, Silat, Karate, Taekwondo) dan Atlet yang terseleksi adalah 8 Atlet untuk setiap cabang olahraga.

- 2) Pengembangan Organisasi Keolahragaan

Alokasi Anggaran : Rp. 1.000.000.000

Realisasi : Rp. 997.360.000 (99,73%)

Keluaran :

Tersedianya data organisasi olahraga sebanyak 12 organisasi (Bola Kaki, Bola Volly, Tinju, Kempo, Silat, Karate, Taekwondo, Atelitik, Kriket, Futsal, Bulu Tangkis, Tennis Meja) yang dikembangkan oleh KONI.



4. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

- 1) Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi Anggaran : Rp. 300.000.000

Realisasi : Rp. 274.978.000 (91,65%)

Keluaran :

Terlaksananya Pembinaan Organisasi Pramuka Tingkat Daerah/Kota.



3.4 Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN (YA/TIDAK)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	
1	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemuda	Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Aparatur Sipil Negara	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi kepemudaan di Kementerian Pemuda dan Olahraga	YA
2	Meningkatnya kelompok olahraga masyarakat yang aktif	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Siswa SD/SMP dan Kelompok Olahraga	Persentase Kelompok Olahraga Masyarakat yang Aktif	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Aparatur Sipil Negara	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi kepemudaan di Kementerian Pemuda dan Olahraga	YA
					Seleksi Atlit Daerah	Siswa SD/SMP dan Kelompok Olahraga	Terlaksananya Kegiatan Pekan Olahraga Daerah.	YA
					Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Organisasi Olahraga	Terlaksananya Pendataan Organisasi/Kelompok Olahraga	YA
3	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Pramuka	Anggota Pramuka	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepramukaan	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota.	Anggota Pramuka	Terlaksananya pembinaan kegiatan pramuka tingkat Kabupaten/Kota	YA



3.5 Permasalahan dan Solusi

Tidak ada

3.6 Kebijakan Strategis yang di tetapkan

Tidak ada

3.7 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1 (2022)	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Terhadap kinerja daya serap anggaran secara umum dinilai Baik . Ke depan agar kualitas perencanaan lebih ditingkatkan lagi.	Pemerintah Daerah melalui dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua kualitas dari perencanaan di bidang kepemudaan dan olahraga sehingga tugas daerah untuk melaksanakan kebijakan sesuai kewenangan dan mengoordinasikan pelayanan kepemudaan serta melaksanakan kebijakan keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi daerah dan kondisi daerah sesuai undang-undang yang berlaku menjadi prioritas utama program di bidang kepemudaan dan olahraga	Telah dianggarkan urusan kepemudaan dan olahraga pada tahun 2023.



14. Urusan Statistik

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Penyelenggara Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik di Kabupaten Sabu Raijua dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 210.060.000,-** dan realisasi sebesar **Rp. 208.723.690,- (99,36 %)**. Adapun pelaksanaan program/kegiatan dari Urusan Statistik Tahun 2023 sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
I.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
1.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	210.060.000 210.060.000	208.723.690 208.723.690	99,36 99,36
Jumlah		210.060.000	208.723.690	99,36

3.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Ketersediaan data statistik sektoral daerah	Buku	5	5	100

3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Alokasi Anggaran : Rp. 210.060.000,-

Realisasi : Rp. 208.723.690,- (99,36 %)

Keluaran :

- ✓ Tersedianya buku statistik hasil penggandaan sebanyak 337 buku.



- ✓ Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pendistribusian buku statistik bagi Es IV sebanyak 4 kali dan Staf sebanyak 8 kali
- ✓ Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pengambilan data statistik bagi Es II sebanyak 9 kali, Es III sebanyak 17 kali, Es IV sebanyak 16 kali dan Staf sebanyak 63 kali.
- ✓ Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi persiapan publikasi di BPS Kab. Kupang bagi Es III sebanyak 2 kali, Es IV sebanyak 2 kali dan staf sebanyak 1 kali.
- ✓ Terbayarnya honor Tim Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebanyak 9 orang.



3.4 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN (YA/TIDAK)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
1	Meningkatnya kualitas perencanaan daerah sesuai dokumen perencanaan yang ditetapkan	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Data Statistik Sektoral Daerah	Peningkatan pelayanan public tentang informasi pembangunan daerah melalui Sabu Rajua Dalam Angka	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Tersedianya Data Statistik Sektoral Daerah	Tersedianya pelayanan public tentang informasi pembangunan daerah melalui Sabu Rajua Dalam Angka (5 jenis buku sebanyak 337 buku)	Ya



3.5 Permasalahan dan Solusi

Tidak Ada

3.6 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Tidak Ada

3.7 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
	Perlu melakukan koordinasi, konsultasi dengan Kementerian/Lembaga Terkait dalam rangka mempercepat pembentukan Badan Pusat Statistik (BPS) di Kabupaten Sabu Raijua sehingga dapat menjamin ketersediaan data lintas sektoral dalam rangka pengambilan kebijakan di Kabupaten Sabu Raijua	Perlu disampaikan bahwa untuk BPS Kabupaten Sabu Raijua telah berdiri dan ada semenjak pertengahan Tahun 2023	Tahun 2023 Kantor BPS Kabupaten Sabu Raijua telah berdiri



15. Urusan Persandian

3.1 Capaian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Penyelenggara Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Persandian di Kabupaten Sabu Raijua dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 119.060.000,-** dan realisasi sebesar **Rp. 102.104.740,- (85,76 %)**. Adapun pelaksanaan program/kegiatan dari Urusan Persandian Tahun 2023 sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	119.060.000	102.104.740	85,76
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	119.060.000	102.104.740	85,76
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	119.060.000	102.104.740	85,76
	Jumlah	119.060.000	102.104.740	85,76



3.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	%	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
1.	Persandian			Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi						
				1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota a. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	119.060.000 Terlaksananya pemanfaatan tanda tangan elektronik di lingkup Pemda Sabu Raijua	102.104.740 Meningkatnya keamanan informasi Pemerintah Daerah	85,76			



3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi Anggaran : Rp. 119.060.000,-

Realisasi : Rp. 102.104.740,- (85,76 %)

Keluaran :

- Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pemanfaatan sertifikat elektronik di Jakarta dan penerapan SMKI dan Penyusunan Kebijakan SMKI di Kominfo Prov NTT.



3.4 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN (YA/TIDAK)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
1	Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya peralatan anti sadap Hytera dan Mesin Penghancur Kertas	Peningkatan keamanan informasi Pemerintah Daerah	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya layanan sertifikat elektronik	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah (layanan sertifikat elektronik)	Ya



3.5 Permasalahan dan Solusi

Tidak ada

3.6 Kebijakan Strtegis yang ditetapkan

Tidak ada

3.7 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tidak ada



16. Urusan Kebudayaan

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Wajib **Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan** di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 dilaksanakan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 980.583.500** dan realisasi sebesar **Rp. 956.226.820 (97,52%)** Adapun rincian anggaran dan realisasi program/kegiatan sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I.	Program Pengembangan Kebudayaan	154.453.500	142.286.820	92,12
1.	Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya dalam DAERAH Kabupaten/Kota	154.453.500	142.286.820	92,12
	1) Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan.	154.453.500	142.286.820	92,12
II.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	80.347.000	80.347.000	100
1.	Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah/Kabupaten	80.347.000	80.347.000	100
	1) Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	80.347.000	80.347.000	100
III.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	745.783.000	733.593.000	98,36
1	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	745.783.000	733.593.000	98,36
	1) Penetapan Cagar Budaya	745.783.000	733.593.000	98,36
JUMLAH		980.583.500	956.226.820	97,52



3.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Arah Kebijakan	Program	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Diarahkan pada upaya peningkatan perekonomian daerah dan masyarakat	Program Pengembangan Kebudayaan	Berkembangnya sektor pariwisata menuju Sarai Beautifull	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	12 Keg	3 Keg	25%
Diarahkan pada upaya peningkatan perekonomian daerah dan masyarakat	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Berkembangnya sektor pariwisata menuju Sarai Beautifull	Cakupan gelar seni budaya	40%	25%	62,5%
Diarahkan pada upaya peningkatan perekonomian daerah dan masyarakat	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Berkembangnya sektor pariwisata menuju Sarai Beautifull	Terlestarikannya cagar budaya	95%	51,04%	53,72%

3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Maslah Yang Dihadapi Serta Solusi Permasalahannya

1. Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota

- 1) Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan.

Alokasi Anggaran : Rp. 154.453.500,-

Realisasi : Rp. 142.286.000 (92,12%)

Keluaran :

Terlaksananya kegiatan Diklat / Bimtek / Pelatihan Tim Ahli Cagar Budaya, kegiatan perlombaan permainan rakyat Tingkat SD,SMP dan SMA/Umum yang diikuti oleh 234 peserta dan hadiah/uang perlombaan permainan rakyat Tingkat SD,SMP dan SMA.

2. Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi Anggaran : Rp. 80.347.000

Realisasi : Rp. 80.347.000 (100%)

Keluaran :

Tersedianya dokumentasi kegiatan ritual adat Bangaliu, ritual adat Buihi, ritual adat Dab'ba, ritual adat di 5 wilayah adat, ritual adat Hole, ritual adat Pelepasan Kowa di 5 wilayah adat dan Tersedianya data benda Kawasan situs cagar budaya di 5 wilayah adat.



3. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

1) Perlindungan Cagar Budaya

Alokasi Anggaran : Rp. 745.783.000,-

Realisasi : Rp. 733.593.000,- (98,36%)

Keluaran :

Terlaksananya pembayaran honor bagi 20 orang juru pelihara situs cagar budaya di 5 wilayah adat dan pembayaran bagi 50 orang pemangku adat di wilayah adat yaitu Sabu Timur 10 orang, Kecamatan Hawu Mehara 11 orang, Kecamatan Sabu Liae 10 orang, Kecamatan Raijua 10 orang dan Kecamatan Sabu Barat 9 orang.



3.4 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN (YA/TIDAK)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	
1	Berkembangnya Sektor Pariwisata Menuju Sarai Beautiful	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Persentase Sanggar Budaya yang dibina	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	Siswa SD dan SMP	Terlaksananya perlombaan permainan rakyat	YA
2.	Berkembangnya Sektor Pariwisata Menuju Sarai Beautiful	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Persentase Sanggar Budaya yang dibina	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	Siswa SD dan SMP	Terlaksananya perlombaan permainan rakyat	YA
3.	Berkembangnya Sektor Pariwisata Menuju Sarai Beautiful	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persentase pemberdayaan tenaga kebudayaan	Perlindungan Cagar Budaya	Aparatur Sipil Negara	Terlaksananya dokumentasi adat dan tersedianya honorarium Dewan Monev dan Juru pelihara situs.	YA



3.5 Permasalahan dan Solusi

Tidak Ada

3.6 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Tidak Ada

3.7 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1 (2022)	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	<p>Urusan Kebudayaan memiliki posisi yang sangat strategis termasuk dalam mendukung sektor pariwisata. Karena itu DPRD merekomendasikan agar Bupati Sabu Raijua melalui OPD terkait lebih fokus dan serius lagi melakukan berbagai upaya-upaya pembenahan pada urusan ini. Hal dimaksud termaksud melakukan penataan ulang terhadap berbagai kebijakan strategis sehubungan penyelenggaraan urusan Kebudayaan. Pembenahan dan pemeliharaan terhadap situs-situs budaya perlu terus dilakukan dengan lebih serius lagi. DPRD juga merekomendasikan agar Bupati Sabu Raijua melalui OPD-OPD terkait melakukan inventarisir ulang terhadap kegiatan-kegiatan budaya lokal yang memiliki potensi nilai jual pariwisata yang pernah ada tetapi mungkin saja sudah nyaris punah saat ini akibat terjangkit arus globalisasi. Kegiatan-kegiatan Budaya perlu lebih diintensifkan dengan dukungan program dan kegiatan seperti perlombaan, pentas seni dan budaya, maupun kegiatan kegiatan dalam rangka menghidupkan kembali sanggar-sanggar budaya dalam rangka menunjang pariwisata daerah.</p>	<p>Pemerintah melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua telah menindaklanjuti rekomendasi ini dengan melaksanakan program dan kegiatan Pentas Seni dan Budaya yang melibatkan Sanggar seni dan Budaya dan para pelajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan tujuan pelestarian dan promosi pariwisata daerah.</p>	<p>Terlaksananya aneka perlombaan kesenian tradisional berupa Petuku Womaka (Gasing), Pebata Gala (Permainan Gobak Sodor) serta terselenggaranya Pentas Seni dan Budaya berupa Tarian Ledo dan Pedo'a yang melibatkan Sanggar Seni dan Pelajar.</p>
	<p>Terhadap kinerja daya serap anggaran secara umum dinilai Baik. Ke depan agar kualitas perencanaan lebih ditingkatkan lagi.</p>	<p>Dinas PKKO Sabu Raijua telah menganggarkan pembiayaan sesuai program dan kegiatan yang direncanakan.</p>	<p>Terbiayainya seluruh program dan kegiatan Bidang Kebudayaan</p>



17. Urusan Perpustakaan

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Penyelenggara Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan di Kabupaten Sabu Raijua dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sabu Raijua, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 13.006.723.557,-** dan realisasi sebesar **Rp.11.773.780.039,- (90,52%)**. Adapun pelaksanaan program/kegiatan dari Urusan Perpustakaan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.646.273.007	1.499.505.851	91,08
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.258.698.365	1.133.775.251	90,08
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.173.526.365	1.049.203.251	89,41
	2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	85.172.000	84.572.000	99,30
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.950.000	15.950.000	100
	1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	15.950.000	15.950.000	100
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	236.203.642	215.386.600	91,19
	1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.661.242	49.370.221	95,57
	2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.480.000	6.480.000	100
	3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.274.400	7.274.200	100
	4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.788.000	152.262.179	89,15
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.101.000	17.101.000	94,48
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	100
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.800.000	1.800.000	100
	3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.857.000	8.857.000	89,85
	4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.944.000	4.944.000	100
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.320.000	117.293.000	99,98
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	117.320.000	117.293.000	99,98



No	Program/Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
II.	Program Pembinaan Perpustakaan	11.360.450.550	10.274.274.188	90,44
6.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.208.184.050	1.206.023.080	99,82
	1) Pengembangan dan Pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik	300.000.000	299.150.000	99,72
	2) Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	520.650.050	520.200.000	99,91
	3) Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	12.466.000	11.635.280	93,34
	4) Pengembangan Bahan Pustaka	175.068.000	175.038.000	99,98
	5) Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	200.000.000	199.999.800	100
7.	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.152.266.500	9.068.251.108	89,32
	1) Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	16.000.000	16.000.000	100
	2) Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.136.266.500	9.052.251.108	89,31
Jumlah		13.006.723.557	11.773.780.039	90,52



3.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Layanan Pendidikan Menuju Sarai Pintar	1. Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik - Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	Kegiatan	1	1	99,72%
	2. Pengembangan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/kota - Jumlah perpustakaan yang dikembangkan di tingkat daerah kabupaten/kota sesuai standar nasional perpustakaan di wilayah kabupaten/kota sesuai kewenangannya	Kegiatan	2	2	99,91%
	3. Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota - Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	Kegiatan	1	1	93,34 %
	4. Pengembangan bahan pustaka - Jumlah bahan perpustakaan tercetak yang dicetak dan diadakan				
	5. Pengelolaan Pengembangan bahan pustaka - Jumlah bahan pustaka yang di lakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	Kegiatan	2	2	99,98 %
	6. Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan khusus serta masyarakat - Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan	Kegiatan	1	1	100 %
	7. Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat – tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota - Jumlah perpustakaan dan pondok baca yang dibangun di tempat – tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Kegiatan	1	1	100 %



3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Alokasi Anggaran : Rp. 1.173.526.365,-

Realisasi : Rp. 1.049.203.251,- (89,41 %)

Keluaran :

Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan sebanyak 11 orang

2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Alokasi Anggaran : Rp. 85.172.000,-

Realisasi : Rp. 84.572.000,- (99,30 %)

Keluaran :

Terbayarkan honoraria ASN sebanyak 9 orang

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah

1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Alokasi Anggaran : Rp. 15.950.000,-

Realisasi : Rp. 15.950.000,- (100 %)

Keluaran :

Tersedianya Pakaian Dinas PDH Eselon II dan III = 3 Stel dan Eselon IV = 7 Stel

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 51.661.242,-

Realisasi : Rp. 49.370.221,- (95,57 %)

Keluaran :

Tersedianya ATK sebanyak: 51 Jenis dan Peralatan Gedung Kantor sebanyak 6 Jenis

2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 6.480.000,-

Realisasi : Rp. 6.480.000,- (100 %)

Keluaran :

Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat yang disediakan : 264 Dos

3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Alokasi Anggaran : Rp. 7.274.400,-

Realisasi : Rp. 7.274.200,- (100%)

Keluaran :

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan : 35 Buku 22498 Lembar

4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Alokasi Anggaran : Rp. 170.788.000,-

Realisasi : Rp. 152.262.179,- (89,15%)

Keluaran :

Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah : 4 Kegiatan dan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah : 2 Kegiatan.



4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Alokasi Anggaran : Rp. 1.500.000,-

Realisasi : Rp. 1.500.000,- (100%)

Keluaran :

Tersedianya Materai dan atau paket pengiriman yang disediakan
Materai 10.000 : 150 lembar.

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Alokasi Anggaran : Rp. 1.800.000,-

Realisasi : Rp. 1.800.000,- (100 %)

Keluaran :

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik yang terbayar : 12
Tangki

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 4.944.000,-

Realisasi : Rp. 4.944.000,- (100 %)

Keluaran :

Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan: 23 Jenis

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Operasional atau kendaraan dinas jabatan

Alokasi Anggaran : Rp. 117.320.000,-

Realisasi : Rp. 117.293.000,- (99,98 %)

Keluaran :

Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional yang
sebanyak 8 Unit

6. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Pengembangan dan Pemeliharaan layanan Perpustakaan elektronik

Alokasi Anggaran : Rp. 300.000.000,-

Realisasi : Rp. 299.150.000,- (99,72 %)

Keluaran :

Tersedianya layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
perpustakaan sebanyak 1 paket

2) Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kab/Kota

Alokasi Anggaran : Rp. 520.650.050,-

Realisasi : Rp. 520.200.000,- (99,91 %)

Keluaran :

Terlaksananya Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan perpustakaan
umum sebanyak 23 kali dan tersedianya perabot layanan perpustakaan
umum sebanyak 1 paket

3) Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan Tingkat
Daerah Kab/Kota

Alokasi Anggaran : Rp. 12.466.000,-

Realisasi : Rp. 11.635.280,- (93,34 %)



- Keluaran :
Terlaksananya peningkatan tenaga perpustakaan sebanyak 1 orang
- 4) Pengembangan bahan pustaka
Alokasi Anggaran : Rp. 175.068.000,-
Realisasi : Rp. 175.038.000,- (99,98 %)
Keluaran :
Tersedianya Pengadaan buku untuk perpustakaan umum yang terdistribusi di 6 Kecamatan dan 63 desa/kelurahan dan pengadaan meubeler untuk perpustakaan umum desa sebanyak 9 perpustakaan desa.
- 5) Pengelolaan dan Pengembangan bahan pustaka
Alokasi Anggaran : Rp. 200.000.000,-
Realisasi : Rp. 199.999.800,- (100 %)
Keluaran :
Tersedianya pengembangan bahan perpustakaan digital (E – Book) untuk layanan perpustakaan umum daerah sebanyak 1 paket

7. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
Alokasi Anggaran : Rp. 16.000.000,-
Realisasi : Rp. 16.000.000,- (100 %)
Keluaran :
Terlaksananya Pelayanan Perpustakaan Keliling : 57 Kali
- 2) Pembangunan dan Pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat – tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
Alokasi Anggaran : Rp. 10.136.266.500,-
Realisasi : Rp. 9.052.251.108,- (89,31 %)
Keluaran :
Terlaksananya pengadaan pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan (Perpustakaan Umum Daerah) sebanyak 1 gedung, pengadaan pembangunan pondok baca di Kecamatan Raijua sebanyak 1 Pondok baca, Dokumen pengawasan pekerjaan pembanunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah sebanyak : 1 dokumen, dan pengadaan pemasangan listrik di Gedung layanan perpustakaan umum daerah sebanyak 1 paket



3.4 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	PROGRAM			KEGIATAN			Kesesuaian (YA/ TIDAK)
		Uraian Program	Target Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Uraian Program	Target Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						
1	Meningkatnya layanan pendidikan menuju Sarai Pintar	Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik	Perpustakaan Umum Daerah	Persentase layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	Pengadaan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Layanan perpustakaan	Perpustakaan Umum Daerah	Tersedianya peralatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk Layanan perpustakaan Umum Daerah	YA
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perpustakaan Umum Daerah	Persentase perpusatakaan yang dikembangkan di tingkat daerah kabupaten/kota sesuai standar nasional perpustakaan di wilayah kabupaten/kota sesuai kewenangannya	Pengadaan Perabot Layanan Perpustakaan Umum Daerah serta Monev dan pelaporan perpustakaan umum	Perpustakaan Umum Daerah	Tersedianya Perabot Layanan Perpustakaan Umum Daerah dan terlaksananya Monev dan pelaporan perpustakaan umum	YA
		Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	ASN Bidang Perpustakaan	Persentase tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	Diklat Manajemen Perpustakaan di Perpustakaan Nasional RI	ASN Bidang Perpustakaan	Terlaksananya Diklat Manajemen Perpustakaan di Perpustakaan Nasional RI	YA



No	Sasaran Strategis	PROGRAM			KEGIATAN			Kesesuaian (YA/ TIDAK)
		Uraian Program	Target Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Uraian Program	Target Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	
		Pengembangan bahan pustaka	Perpustakaan Umum (Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Desa dan TBM)	Persentase bahan perpustakaan tercetak yang dicetak dan diadakan	Pengadaan buku dan pengadaan meubeler untuk Perpustakaan Umum (Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Desa dan TBM)	Perpustakaan Umum (Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Desa dan TBM)	Tersedianya Pengadaan buku dan pengadaan meubeler untuk Perpustakaan Umum (Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Desa dan TBM)	YA
		Pengelolaan Pengembangan bahan pustaka	Perpustakaan Umum Daerah	Persentase bahan pustaka yang di lakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	Pengadaan Bahan pustaka digital (E – Book) untuk layanan perpustakaan umum daerah	Perpustakaan Umum Daerah	Tersedianya Bahan pustaka digital (E – Book) untuk layanan perpustakaan umum daerah	Y A
		Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan khusus serta masyarakat	Sekolah Dasar (SD) dan masyarakat	Persentase lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan	Pelayanan perpustakaan keliling untuk masyarakat	Sekolah Dasar (SD) dan masyarakat	Terlaksananya Pelayanan perpustakaan keliling untuk masyarakat	YA
		Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat – tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Perpustakaan umum daerah dan Pondok baca di kecamatan Raijua	Persentase perpustakaan dan pondok baca yang dibangun di tempat – tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten	Pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum daerah dan pembangunan pondok baca	Perpustakaan umum daerah dan Pondok baca di kecamatan Raijua	Terbangunnya gedung fasilitas layanan perpustakaan umum daerah dan pembangunan pondok baca	YA



3.5 Permasalahan dan Solusi

➤ **Permasalahan :**

- a. Terjadinya perubahan ruang lingkup pekerjaan dengan mengoptimalkan sisa dana dengan penambahan kegiatan baru dalam menunjang asas fungsi dan manfaat bangunan perpustakaan daerah
- b. Terjadi kondisi pemeriksaan oleh pihak Aparat Penegak Hukum (APH) Kepolisian Sabu Raijua terkait penyelidikan penggunaan material lokal (pasir dan batu pecah) yang tidak berijin dari penambang, yang menyebabkan kegiatan lapangan terhenti akibat kekosongan material lokal.
- c. Keterlambatan akibat sistem aplikasi SIPD yang tidak bisa langsung melakukan penginputan amandemen nilai kontrak yang baru, sehingga sejak penetapan amandemen pada bulan Juli 2023 tidak bisa diinput dalam sistem SIPD, dan baru pada bulan Oktober baru bisa dilakukan penyesuaian nilai kontrak dalam sistem SIPD, sehingga akibat ketidakpastian akan nilai dan item pekerjaan yang ditambahkan tersebut pihak rekanan tidak bisa melakukan kegiatan pada item terbaru.

➤ **Solusi :**

Pihak ketiga terus melakukan upaya percepatan dan bertanggungjawab dalam proses penyelesaian pekerjaan pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah.

3.6 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Pembudayaan gemar membaca masyarakat umum dan Siswa – siswi pada satuan pendidikan dasar	UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 48 (Pembudayaan Kegemaran Membaca)	Perlu dukungan dana untuk Pengadaan Bahan Bacaan yang bermutu dan menyediakan fasilitas pendukung sesuai Kebutuhan Masyarakat
2	Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	DPA UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 48 (Pembudayaan Kegemaran Membaca)	Perlu dukungan dana untuk Pengadaan Bahan Bacaan yang bermutu dan menyediakan fasilitas pendukung sesuai Kebutuhan Masyarakat
3	Membangun Gedung Perpustakaan Daerah	UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 48 (Pembudayaan Kegemaran Membaca)	Menyediakan ruang baca yang representatif



3.7 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Direkomendasikan kepada Bupati agar ke depan kualitas perencanaan lebih ditingkatkan lagi.	Menyusun strategi dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti anggaran, waktu dan sumber daya yang tersedia	Penyusunan perencanaan dengan metode yang tepat yang sesuai dan efektif



18. Urusan Kearsipan

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan wajib bukan Pelayanan Dasar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.202.194.300** dari realisasi sebesar **Rp. 73.025.139 (36,12 %)** adapun rincian anggaran dan realisasi program/kegiatan sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
1	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab/Kota	115.265.800	14.892.600	12,92 %
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses arsip Statis	115.265.800	14.892.600	12,92 %
2	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/kota	86.928.500	58.132.539	66,87%
	Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN	86.928.500	58.132.539	66,87%
	JUMLAH	202.194.300	73.025.139	36,12%

3.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Integritas Aparatur dalam Pelayanan Pemerintahan Menuju Sarai Jujur	1. Akuisisi, Pengelolaan Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kegiatan	2	1	12,92%
	2. Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN	Kegiatan	1	1	66,87%

3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota

1) Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis

Alokasi Anggaran : Rp. 115.265.800

Realisasi : Rp. 14.892.600 (12,92%)

Keluaran :

Terlaksananya Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis sebanyak 1 Kegiatan.



2. Penyediaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat Kabupaten/Kota

Alokasi Anggaran : Rp. 86.928.500

Realisasi : Rp. 58.132.539 (66,87%)

Keluaran :

Terlaksananya Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten /kota melalui JIKN sebanyak 1 Kegiatan.



3.4 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	PROGRAM			KEGIATAN			Kesesuaian (YA/ TIDAK)
		Uraian Program	Target Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Uraian Program	Target Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						
1	Meningkatnya Integritas Aparatur dalam pelayanan pemerintahan menuju Sarai Pintar	Akuisisi pengelolaan preservasi, dan akses arsip statis	Tenaga Pengelola Arsip	Persentase Arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, mpreservasi dan akses arsip statis	Pendataan dan penataan arsip di Kecamatan	Tenaga Pengelola Arsip	Terlaksananya Pendataan dan penataan arsip di Kecamatan	YA
		Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN	Tenaga Pengelola Arsip	Persentase Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN	Kegiatan Bimbingan teknis Aplikasi Srikandi	Tenaga Pengelola Arsip	Terlaksananya Kegiatan Bimbingan teknis Aplikasi Srikandi	YA



3.5 Permasalahan dan Solusi

➤ **Permasalahan:**

Penggunaan Aplikasi Srikandi belum bisa dilaksanakan karena belum dirampungkannya empat (4) instrumen dalam aplikasi tersebut yakni : Tata naskah dinas, Jadwal retensi arsip (JRA), Klasifikasi arsip dan Klasifikasi arsip dan akses arsip dinamis. Jadwal retensi arsip (JRA) merupakan salah satu instrumen penting dan instrumen tersebut baru dikirim oleh ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) setelah Bulan Desember.

➤ **Solusi :**

Melakukan percepatan penerapan Aplikasi Srikandi sehingga dapat mengubah tata kelola persuratan dan kearsipan di pemerintahan

3.6 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Pendataan dan Penataan Arsip OPD	Perbup Sabu Raijua Nomor 6 Tahun 2012	Perlu adanya Kebijakan agar dokumen atau Arsip Daerah tertata dengan baik

3.7 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Direkomendasikan kepada Bupati agar ke depan kualitas perencanaan lebih ditingkatkan lagi.	Menyusun strategi dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti anggaran, waktu dan sumber daya yang tersedia	Penyusunan perencanaan dengan metode yang tepat yang sesuai dan efektif



C. URUSAN PILIHAN

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Penyelenggara **Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan** di Kabupaten Sabu Raijua dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sabu Raijua, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 4.912.341.291,-** dan realisasi sebesar **Rp. 4.538.536.567,- (92,39%)**. Adapun pelaksanaan program/kegiatan dari Urusan Kearsipan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	2.241.066.065	1.807.865.424	80,67
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.875.000	-	-
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.200.000	-	-
	2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.675.000	-	-
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.479.340.945	1.195.090.719	80,79
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.355.983.945	1.081.227.719	79,74
	2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	123.357.000	113.863.000	92,30
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.750.000	21.750.000	100
	1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	21.750.000	21.750.000	100
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	543.320.520	418.708.275	77,06
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.912.500	1.530.000	80,00
	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.370.820	83.441.000	97,74
	3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.860.000	5.310.000	18,40
	4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.029.200	7.928.800	98,75
	5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.000.000	981.600	98,16
	6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	418.148.000	319.516.875	76,41
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.193.100	26.000.000	99,26
	1) Pengadaan Mebel	26.193.100	26.000.000	99,26



No	Program/Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.494.000	74.848.000	92,99
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.040.000	3.031.000	99,70
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.660.000	63.002.000	97,44
	3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.170.000	3.150.000	51,05
	4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.624.000	5.665.000	85,52
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.092.500	71.468.430	90,36
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.930.000	67.828.430	90,52
	2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.162.500	3.640.000	87,45
8.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.976.946.836	3.862.951.200	97,13
	1) Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	3.927.069.836	3.825.806.200	97,42
	2) Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	49.877.000	37.145.000	74,47
9.	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	2.920.888.150	2.842.759.150	97,33
	1) Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	2.901.248.150	2.823.459.150	97,32
10.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	19.640.000	19.300.000	98,27
	1) Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	19.640.000	19.300.000	98,27
Jumlah		9.138.901.051	8.513.575.774	93,16%



3.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Arah Kebijakan	Program	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Pemulihan ekonomi dan penguatan sistem kesehatan masyarakat serta sistem perlindungan sosial	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Menjamin ketercukupan pangan, air dan energi menuju SARAI cukup	1. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah sarana perikanan tangkap yang diadakan	8 jenis	8 jenis	100%
			2. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil Jumlah kelompok yang mengalami peningkatan	6 kelompok	6 kelompok	100%
Pemulihan ekonomi dan penguatan sistem kesehatan masyarakat serta sistem perlindungan sosial	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Menjamin ketercukupan pangan, air dan energi menuju SARAI cukup	1. Pemberian pendampingan kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Jumlah sarana budidaya yang diadakan	7 jenis	7 jenis	100%
			2. Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam satu daerah kabupaten/kota Jumlah data perikanan yang tersedia	2 dokumen	2 dokumen	100%



3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Alokasi Anggaran : Rp. 4.200.000,-
Realisasi : Rp. 0 ,- (0%)
Keluaran :
Tersusunnya anggaran induk dan perubahan, renstra dan renja
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Alokasi Anggaran : Rp. 6.675.000,-
Realisasi : Rp. 0 ,- (0%)
Keluaran :
Tersusunnya LPPD, LKPJ, LAKIP dan Laporan Keuangan

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Alokasi Anggaran : Rp. 1.355.983.945,-
Realisasi : Rp. 1.081.227.719,- (79,74%)
Keluaran : Tersedianya Gaji dan tunjangan 13 ASN
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Alokasi Anggaran : Rp. 123.357.000,-
Realisasi : Rp 113.863.000,- (92,30%)
Keluaran
Terbayarnya honor Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Honor Pengguna Anggaran, Honor PPKeu, Honor Pejabat Pembuat Komitmen, Honor Pejabat Pengadaan, Honor Admin SiRUP, Honor Pejabat Pelaksana Tugas Kegiatan (PPTK) Sekretariat, Honor PPTK Bidang Tangkap, Honor PPTK Bidang Budidaya, Honor Pengelola Barang Milik Daerah.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Alokasi Anggaran : Rp. 21.750.000,-
Realisasi : Rp. 21.750.000 ,- (100%)
Keluaran : Tersedianya pakaian dinas untuk 13 ASN

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 1.912.500,-
Realisasi : Rp. 1.530.000,- (80,00 %)
Keluaran :
Tersedianya 10 buah lampu dan 4 buah kabel rol, 3 pcs jek listrik, 20 meter kabel NYM
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 85.370.820,-
Realisasi : Rp. 83.441.000,- (97,74%)



Keluaran :

Tersedianya ATK berupa 175 rim kertas F4 70 gram, 30 pak map kertas folio, 25 pak map snelhecter kertas, 50 pak map snelhecter plastik, 12 dos ballpoint, 20 dos isi hekter kecil, 4 pak spidol permanent, 6 pak amplop kabinet putih besar, 6 buah lem kertas, 5 pak map batik kertas, 10 buah buku folio 50 lembar, 6 dos klip kertas merah, 4 dos klip kertas biasa, 4 dos klip kertas warna, 6 buah hekter besar, 6 buah hekter kecil, 15 dos isi hekter besar, 2 pak map odner pidato plastik, 6 buah cutter besar, 10 buah penghapus pensil, 3 buku kwitansi, 8 buah lakban 4 cm, 6 buah isolasi bening, 7 buah catridge warna, 10 buah catridge hitam, 30 dos amplop besar, 20 botol tinta printer, 2 buku surat masuk keluar, 5 buah pembuka hekter, 4 buah map file, 1 rim kertas folio bergaris, 35 buah Kursi Fernekel, 1 Unit Laptop Acer Aspire, 1 unit printer Epson L3110, 1 unit AC, 1 unit Proyektor/Infokus Epson

3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 28.860.000,-

Realisasi : Rp. 5.310.000,- (18,40%)

Keluaran

Tersedianya makanan dan minuman rapat sejumlah 177 porsi

4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Alokasi Anggaran : Rp. 8.029.200,-

Realisasi : Rp. 7.928.800,- (98,75%)

Keluaran :

Tersedianya dokumen kantor yang digandakan sebanyak 22.964 lembar dan 76 buku

5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Alokasi Anggaran : Rp. 1.000.000,-

Realisasi : Rp. 981.600,- (98,16%)

Keluaran :

Tersedianya bahan bacaan sebanyak 5 buah buku

6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Alokasi Anggaran : Rp. 418.148.000,-

Realisasi : Rp. 319.516.875,- (76,41%)

Keluaran :

Terlaksananya koordinasi pada saat musrenbang 16 kali, rapat lengkap pamong praja 6 kali, Rapat Konsultasi dan koordinasi kelautan dan perikanan di Jakarta dalam rangka kampung budidaya 4 kali, koordinasi dan konsultasi bidang kelautan dan perikanan TA. 2023 di Jakarta 4 kali, Mengikuti rapat konsolidasi teknis pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan di Bali 3 kali, melakukan konsultasi kegiatan pembangunan bidang kelautan dan perikanan serta mendampingi Bupati Sabu Raijua beraudensi dengan Dirjen Perikanan Tangkap dan Dirjen Perikanan Budidaya di Jakarta 3 kali, , dalam rangka konsultasi alur pengiriman perijinan produk hasil perikanan domestik di Kupang 4 kali, dalam rangka koordinasi dan konsultasi pelaksanaan CPIB di bidang budidaya perikanan dan bidang



pengelolaan ruang laut di Prov. NTT 6 kali, dalam rangka konsultasi dan koordinasi pelaksanaan lomba masak ikan di Prov. NTT, dalam rangka mengikuti kegiatan FGD dan pengumpulan data pada DKP Prov. NTT 4 kali, konsultasi dan koordinasi kegiatan TA. 2024 di DKP Prov. NTT 6 kali, kegiatan validasi data statistik semester II bidang budidaya perikanan di DKP Prov. NTT 6 kali, koordinasi dan konsultasi program kegiatan bidang kelautan dan perikanan di Kupang 6 kali, koordinasi dan konsultasi verifikasi data bantuan untuk budidaya rumput laut tahun 2022 di DKP Prov. NTT 6 kali, kegiatan validasi data kusuka bidang perikanan budidaya di Kupang 3 kali, Koordinasi dan konsultasi bidang budidaya perikanan di DKP Prov. NTT 4 kali, kegiatan validasi data garam di DKP Prov. NTT 4 kali, koordinasi dan konsultasi bantuan premi asuransi nelayan di DKP Prov. NTT 4 kali, kegiatan validasi data statistik semester I TA. 2023 di Kupang 6 kali, monev bantuan sarana dan prasarana Ketinting, Rumput Laut, Tali Ikat Rumput Laut, Jukung, Gabus, Para-para bidang kelautan dan perikanan TA. 2022 5 orang

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Mebel
 Alokasi Anggaran : Rp. 26.193.100,-
 Realisasi : Rp. 26.000.000,- (99,26%)
 Keluaran :
 Tersedianya kursi fernekel 14 buah, kursi putar 3 buah, rak jati 1 buah, lemari arsip jati 2 buah, meja kerja jati 2 buah

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 Alokasi Anggaran : Rp. 3.040.000,-
 Realisasi : Rp. 3.031.000,- (99,70%)
 Keluaran :
 Tersedianya Materai sebanyak 233 Lembar
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Alokasi Anggaran : Rp. 64.660.000,-
 Realisasi : Rp. 63.002.000,- (97,44%)
 Keluaran :
 Terbayarnya 16 unit tangki air dan Listrik 12 bulan, air minum isi ulang sebanyak 96 galon.
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Alokasi Anggaran : Rp. 6.170.000,-
 Realisasi : Rp. 3.150.000,- (51,05%)
 Keluaran :
 Terbayarnya service 6 unit AC, service printer 1 unit dan service laptop 1 unit
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 Alokasi Anggaran : Rp. 6.624.000,-
 Realisasi : Rp. 5.665.000,- (85,52%)



Keluaran :
Tersedianya Alat pel 2 set, kanebo 10 buah, kemoceng 5 buah, keset kaki jaring 3 buah, keset kecil 2 buah, pembersih kaca 12 buah, pembersih lantai 20 botol, pengharum ruangan 2 buah, sabu cair 20 buah, sapu lantai 3 buah, sapu lidi 2 buah, sikat WC 3 buah, tempat sampah 3 buah, tissue 42 buah, wipol 20 buah, tissue basah 30 buah

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Alokasi Anggaran : Rp. 74.930.000,-
Realisasi : Rp. 67.828.430,- (90,52%)
Keluaran :
Terbayarnya pemeliharaan 7 unit kendaraan roda 2 dan 1 unit kendaraan roda 4
- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Alokasi Anggaran : Rp. 4.162.500,-
Realisasi : Rp. 3.640.000,- (87,45%)
Keluaran :
Tersedianya cat kayu 2 kg, cat tembok 10 kg, tripleks 16 lembar, seng 15 lembar, paku 5 kg

8. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
Alokasi Anggaran : Rp. 3.927.069.836,-
Realisasi : Rp. 3.825.806.200 (97,42%)
Keluaran :
Tersedianya 90 unit cool box, Fish Finder 25 unit, Jukung Aluminium 9 unit, mesin ketinting 45 unit, Perahu ketinting 5 paket, 122 pcs pukat monofilamen, 118 pcs pukat multyfilamen, Boat spon eva (Insentif Fiskal Tahun Berjalan Kesejahteraan Masyarakat) 5 unit, Motor Tempel 15 PK (Insentif Fiskal Tahun Berjalan Kesejahteraan Masyarakat) 5 unit, Perahu Ketinting (Insentif Fiskal Tahun Berjalan Kesejahteraan Masyarakat) 20 paket, belanja bantuan sosial 1 paket
- 2) Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
Alokasi Anggaran : Rp. 49.877.000,-
Realisasi : Rp. 37.145.000,- (74,47%)
Keluaran :
Tersedianya papan nama kelompok 6 unit, ATK untuk kelompok nelayan kecil, sertifikat 6 lembar, makan minum untuk peningkatan kelas kelompok 34 porsi, snack untuk peningkatan kelas kelompok 34 porsi, perjalanan dinas 6 kali



9. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

- 1) Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Alokasi Anggaran : Rp. 2.901.248.150,-

Realisasi : Rp. 2.823.459.150,- (97,32%)

Keluaran :

Tersedianya bibit rumput laut (dari luar daerah untuk uji adaptasi) 2.000 kg, bibit ikan lele 10.000 ekor, paket budidaya ikan lele 30 paket, Gabus 250 buah, para-para 80 unit, sampan 18 unit, tali PE 2 mm 12.150 kg, tali PE 6 mm 10.500 kg, bahan material promosi hasil produk kelautan dan perikanan berupa bakso ikan 20 kg, stik rumput laut 20 kg, manisan rumput laut 20 plastik, dodol rumput laut 40 pak, dan puding rumput laut 225 cup, kegiatan lomba masak ikan 5 paket, paket pembuatan pakan ikan, belanja bantuan sosial 2 paket

10. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

- 1) Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi Anggaran : Rp. 19.640.000,-

Realisasi : Rp. 19.300.000,- (98,27%)

Keluaran :

Tersedianya data perikanan sejumlah 2 dokumen



3.4 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN (YA/TIDAK)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	
1	Menjamin kecukupan pangan, air dan energi menuju SARAI cukup	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (1.787,57 ton)	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	8 jenis	Jumlah sarana perikanan tangkap yang diadakan	Ya
2	Menjamin kecukupan pangan, air dan energi menuju SARAI cukup	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (1.787,57 ton)	Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil	6 kelompok	Jumlah kelompok yang mengalami peningkatan	Ya
3	Menjamin kecukupan pangan, air dan energi menuju SARAI cukup	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (7.886,02 ton)	Pemberian pendampingan kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	7 jenis	Jumlah sarana budidaya yang diadakan	Ya
4	Menjamin kecukupan pangan, air dan energi menuju SARAI cukup	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (7.886,02 ton)	Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam satu daerah kabupaten/kota	2 dokumen	Jumlah data perikanan yang tersedia	Ya



3.5 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Kurangnya SDM pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sabu Raijua

Solusi :

Penambahan jumlah ASN di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sabu Raijua

3.6 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Tidak ada

3.7 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut
1	Terhadap kinerja daya serap anggaran secara umum dinilai Baik, ke depan agar kualitas perencanaan lebih ditingkatkan lagi	- Bahwa terkait catatan dan rekomendasi pansus DPRD terhadap kinerja daya serap anggaran dinilai baik maka kami Pemerintah mengucapkan terima kasih dan kualitas perencanaan lebih ditingkatkan lagi, sama dengan harapan Pemerintah karena itu akan menjadi perhatian



2. Urusan Pariwisata

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Penyelenggara Urusan Pilihan Pariwisata di Kabupaten Sabu Raijua dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sabu Raijua, dengan alokasi anggaran **Urusan Pilihan Pariwisata** sebesar **Rp.8.445.817.082,-** dan realisasi sebesar **Rp.7.306.470.323,- (86,51%)**. Adapun pelaksanaan program/kegiatan dari Urusan Pilihan Pariwisata di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.827.729.047	1.466.264.883	80,22
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.390.909.417	1.054.297.901	75,80
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.259.193.417	932.061.901	74,02
	2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	131.716.000	122.236.000	92,80
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19.800.000	19.800.000	100
	1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan.	19.800.000	19.800.000	100
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	329.176.380	306.938.532	93,24
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penanganan Bangunan Kantor	1.124.000	1.120.000	99,64
	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.431.380	97.365.300	99,93
	3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.260.000	10.500.000	79,19
	4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.747.000	12.424.600	78,90
	5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201.614.000	185.528.632	92,02
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.623.250	5.623.250	100
	1) Penyediaan Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor	3.000.000	2.990.000	99,67
	2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	2.623.250	2.619.000	99,84
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	82.220.000	79.619.450	96,84



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	77.020.000	74.459.450	96,68
	2) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5.200.000	5.160.000	99,23
II.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	4.195.002.000	3.712.727.463	88,50
1.	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	3.349.795.000	2.970.908.867	88,69
	1) Perencanaan pengembangan daya Tarik wisata kabupaten/kota	1.676.000.000	1.344.132.000	80,20
	2) Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1.595.000.000	1.575.516.867	98,78
	3) Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	78.795.000	51.350.000	65,17
2.	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	845.207.000	741.728.596	87,76
	1) Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	257.030.000	232.915.925	90,62
	2) Monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	25.500.000	18.300.000	71,76
	3) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	562.677.000	490.512.671	87,17
III	Program Pemasaran Pariwisata	1.573.607.800	1.469.340.322	93,37
1.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.573.607.800	1.469.340.322	93,37
	1) Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	120.588.000	60.004.272	49,76
	2) Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/kota	1.453.019.800	1.409.336.050	96,99



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
IV.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	343.762.000	291.774.071	84,88
1	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	343.762.000	291.774.071	84,88
	1) Fasilitasi pendanaan dan pembiayaan	140.727.000	113.957.371	80,98
	2) Penyediaan Infrastruktur	203.035.000	177.816.700	87,58
V.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	505.716.235	366.363.584	72,44
1.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	505.716.235	366.363.584	72,44
	1) Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	227.462.000	180.367.584	79,30
	2) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	233.228.235	185.996.000	79,75
	3) Fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	45.026.000	0	0
Jumlah		8.445.817.082	7.306.470.323	86,51

3.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Arah Kebijakan	Program	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Diarahkan pada upaya peningkatan daya saing dan perekonomian rakyat berbasis pariwisata	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Berkembangnya Sektor Pariwisata Menuju Sarai Beautiful	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	100	100	100
	2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota					
	3. Pemasaran Pariwisata					



3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Alokasi Anggaran : Rp. 1.259.193.417,-
Realisasi : Rp. 932.061.901,-(74,02%)
Keluaran :
Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 12 orang selama 12 Bulan
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Alokasi Anggaran : Rp. 131.716.000,-
Realisasi : Rp. 122.236.000,-(92,80%)
Keluaran :
Terbayarnya Tenaga Administrasi Keuangan sebanyak 10 orang selama 12 bulan

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 3) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Alokasi Anggaran : Rp. 19.800.000,-
Realisasi : Rp. 19.800.000,- (100%)
Keluaran :
Tersedianya Pakaian Dinas Harian sebanyak 12 stel

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Alokasi Anggaran : Rp. 1.124.000
Realisasi : Rp. 1.120.000,- (99,64%)
Keluaran :
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik sebanyak 5 Jenis
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 97.431.380,-
Realisasi : Rp. 97.365.300,- (99,93%)
Keluaran :
Tersedianya Alat Tulis Kantor sebanyak 54 Jenis
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 13.260.000,-
Realisasi : Rp. 10.500.000,- (79,19%)
Keluaran :
Tersedianya makan minum rapat pegawai sebanyak 442 kotak
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Alokasi Anggaran : Rp. 15.747.000,-
Realisasi : Rp. 12.424.600,- (78,90%)
Keluaran :
Tersedianya Jilid DPA, DPPA, Laporan Kinerja Kinerja Bulanan sebanyak 47 Buku dan Foto Copy Bahan Kantor sebanyak 50.140 Lembar
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Alokasi Anggaran : Rp. 201.614.000,-
Realisasi : Rp. 185.528.632,-(92,02%)
Keluaran :
Terlaksanannya kegiatan Koordinasi dan konsultasi kegiatan Kepariwisata keluar 4 kali daerah dan dalam daerah sebanyak 4 Kegiatan



4. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 3.000.000,-
Realisasi : Rp. 2.990.000,- (99,67%)
Keluaran :
Tersediannya Materai 10.000 sebanyak 300 Lembar
- 2) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Alokasi Anggaran : Rp. 2.623.250,-
Realisasi : Rp. 2.619.000,- (99,84%)
Keluaran :
Tersediannya Alat Kebersihan Kantor Sebanyak 12 Jenis

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
Alokasi Anggaran : Rp. 77.020.000,-
Realisasi : Rp. 74.459.450,- (96,68%)
Keluaran :
Tersedianya pemeliharaan kendaraan sebanyak 5 unit 2 Roda empat dan 3 Kendaraan Roda Dua
- 2) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
Alokasi Anggaran : Rp. 5.200.000,-
Realisasi : Rp. 5.160.000,- (99,23)
Keluaran :
Terbayarnya pemeliharaan Printer 4 unit dan AC 4 unit

6. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

- 1) Perencanaan pengembangan daya Tarik wisata kabupaten/kota
Alokasi Anggaran : Rp. 1.676.000.000,-
Realisasi : Rp. 1.344.132.000,- (80,20%)
Keluaran :
Tersedianya DED lokasi objek wisata Pantai Mahera dan revisi DED pantai Napae dan terlaksananya pembangunan sarana penerangan tempat wisata 42 unit
- 2) Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
Alokasi Anggaran : Rp. 1.595.000.000,-
Realisasi : Rp. 1.575.516.867,- (98,78%)
Keluaran :
Terbangunya fasilitas umum MCK 2 unit di objek wisata bukit senyum dan pantai mahera, lopo 28 unit di 14 lokasi objek wisata.
- 3) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
Alokasi Anggaran : Rp. 78.795.000,-
Realisasi : Rp. 51.350.000,- (65,17%)
Keluaran :
Terlaksananya monitoring pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota sejumlah 8 kegiatan

7. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

- 1) Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Alokasi Anggaran : Rp. 257.030.000,-
Realisasi : Rp. 232.915.925,- (90,62%)



- Keluaran :
- Tersedianya *Beanbag* dan tenda 20 set, alat dan bahan kebersihan 10 item, Pembelian Tagihan Listrik Pada Lokasi Obyek wisata Pantai Napae, Gua Liemadira dan taman doa skeber : 12x, pembayaran tagihan air taman doa skyber dan pantai napae 24x, dan belanja modal rambu penunjuk lokasi wisata 12 unit
- 2) Monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota
 Alokasi Anggaran : Rp. 25.500.000,-
 Realisasi : Rp. 18.300.000,- (71,76%)
 Keluaran :
 Terlaksananya Survei lokasi pemasangan rambu penunjuk lokasi wisata di 25 titik
- 3) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 Alokasi Anggaran : Rp. 562.677.000,-,
 Realisasi : Rp.490.512.671,- (87,17%)
 Keluaran :
 Terlaksananya Kegiatan pembentukan kelompok sadar wisata di 6 desa, terbayarnya honorarium juru pelihara objek wisata sebanyak 20 orang selama 12 bulan , Perjalanan dinas luar daerah dan dalam provinsi NTT sejumlah 2 kegiatan, Terbayarnya Jasa Sewa Sanggar Ade Ina
8. **Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**
- 1) Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
 Alokasi Anggaran : Rp.120.588.000,-,
 Realisasi : Rp.60.004.272,-(49,76)
 Keluaran :
 Terlaksananya penguatan promosi objek wisata pada kegiatan API 2022 dan pendaftaran kegiatan festival kelabba madja pada KEN sejumlah 2 objek wisata
- 2) Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/kota
 Alokasi Anggaran : Rp. 1.453.019.800,-
 Realisasi : Rp. 1.409.336.050,- (96,99%)
 Keluaran :
 Terlaksananya kegiatan festival Kelabba Madja 3 dan festival Niki Madja
9. **Pelaksanaan Ekosistem Ekonomi Kreatif**
- 1) Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan
 Alokasi Anggaran : Rp. 140.727.000,-,
 Realisasi : Rp. 113.957.371,- (80,98%)
 Keluaran :
 Terlaksananya penyerahan bantuan alat pembuatan aksesoris bagi 6 pokdarwis dan bantuan sosial bagi 1 sanggar seni
- 2) Penyediaan Infrastruktur
 Alokasi Anggaran : Rp. 203.035.000,-
 Realisasi : Rp. 177.816.700,- (87,58%)
 Keluaran :
 Terlaksananya penyerahan bantuan alat musik gong bagi 6 sanggar seni



10. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

- 1) Pengembangan kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Alokasi Anggaran : Rp. 227.462.000,-
Realisasi : Rp. 180.367.584,- (79,30)
Keluaran :
Terlaksananya studi tiru pengelolaan kriya di Bali yang diikuti : 5 org masyarakat dan Pendataan pelaku ekraf di 6 Daya Tarik Wisata (DTW)
- 2) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
Alokasi Anggaran : Rp. 233.228.235,-
Realisasi : Rp. 185.996.000,-(79,75)
Keluaran :
Terlaksananya kegiatan Pelatihan Pembuatan Aksesoris berbahan dasar batok kelapa dan daun lontar bagi 110 orang dari 11 desa di Sabu dan Raijua
- 3) Fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif
Alokasi Anggaran : Rp. 45.026.000,-
Realisasi : Rp. 0,- (0)
Keluaran :
Tidak terlaksananya Perjalanan dinas luar provinsi NTT



3.4 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN (Ya/Tidak)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
1	Berkembangnya Sektor Pariwisata Menuju Sarai Beautiful	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terwujudnya pengelolaan daya Tarik wisata kabupaten/kota	Meningkatnya destinasi wisata unggulan	Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Terwujudnya kenyamanan bagi pengunjung	Terlaksananya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Ya
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terwujudnya pengelolaan Kawasan strategis pariwisata	Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Pengelolaan Kawasan Startegis Pariwisata	Terwujudnya kenyamanan bagi pengunjung	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Ya
		Pemasaran Pariwisata	Terwujudnya promosi pariwisata didalam dan luar negeri	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan diluar Negeri	Terwujudnya promosi pariwisata di dalam dan luar negeri	Terlaksananya Promosi Pariwisata	Ya



3.5 Permasalahan dan Solusi

➤ **Permasalahan :**

- 1) Terbatasnya Personil yang ada pada Dinas Pariwisata Kabupaten Sabu Raijua sehingga pelaksanaan program dan kegiatan belum maksimal,
- 2) Fokus pengembangan objek wisata yang belum terpusat sehingga pembangunan objek wisata masih menyebar tanpa adanya pembagian prioritas pembangunan.

➤ **Solusi :**

- 1) Mengoptimalkan staf yang ada dalam melaksanakan tugas dan fungsi OPD serta melakukan pengusulan recruitmen tambahan pegawai agar pelaksanaan tugas dapat berjalan maksimal.
- 2) Memfokuskan pembangunan pada objek wisata yang menjadi prioritas utama (sah kepemilikan pemda) untuk dikembangkan sehingga mampu mendatangkan PAD bagi Sabu Raijua

3.6 Kebijakan Strategis Yang ditetapkan (diisi oleh OPD terkait)

Tidak Ada

3.7 Tindak Lanjut Rekomendasi Dprd Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Rekomendasi agar Bupati Sabu Raijua melakukan penajaman kembali dan menata ulang kebijakan keuangan daerah dan memfokuskan pada belanja-belanja prioritas khususnya dalam rangka mewujudkan pencapaian Visi dan Misi. Penataan ulang berbagai kebijakan dimaksud termasuk membangun koordinasi dan sinergitas antar OPD terkait untuk merumuskan berbagai kebijakan yang dapat mendukung pariwisata daerah termasuk memastikan tersedianya alokasi anggaran yang memadai setiap tahunnya untuk kepentingan membangun dan membenahi pariwisata daerah;	Bupati Sabu Raijua meningkatkan/mengintensifkan pembinaan dalam rangka membangun koordinasi antar OPD untuk perumusan kebijakan kepariwisataan daerah terkait dengan : a. Memastikan dukungan anggaran untuk pembangunan kepariwisataan daerah b. Mempartisipasikan OPD dan Stake holder terkait dalam pembangunan kepariwisataan daerah c. Proses perumusan kebijakan kepariwisataan daerah	a. Tersedianya anggaran yang memadai untuk pembangunan pariwisata b. Terbangunnya koordinasi lintas sector dalam pembangunan pariwisata c. Tersedianya dokumen terkait kebijakan pengembangan kepariwisataan di daerah
2.	Direkomendasikan kepada Bupati Sabu Raijua agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan promosi pariwisata seperti festival misalnya, melakukan analisa yang komprehensif untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan serta menciptakan format-format baru	Menugaskan Dinas Pariwisata untuk segera : a. Merancang Perbup yang diperlukan sebagai penjabaran dari Perda Riparda	a. telah dibuatkannya 5 (lima) perbup turunan dari Riparda



	pelaksanaan Program atau Kegiatan yang lebih menjanjikan peningkatan PAD maupun berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat	b. Merencanakan membuat DED pengembangan objek wisata/DTW secara bertahap sesuai dukungan/kapasitas anggaran tersedia	b. telah dibuatkannya DED untuk 1 (satu) objek wisata dan 1 (satu) DED revisi Pantai Napae
3.	Direkomendasikan agar Bupati Sabu Raijua melalui OPD teknis terkait segera melakukan Upaya Upaya percepatan menyelesaikan persoalan destinasi destinasi wisata yang perlu dilakukan percepatan-percepatan penanganan/pembenahannya.	DTW yang diberikan perhatian untuk dikembangkan (sarana dan prasarana) adalah lokasi yang bebas konflik dan telah memiliki pelepasan hak kepada pemerintah seperti : lopo, lampu penerangan dan MCK	Mewujudkan serta mendorong tumbuhnya aspek keindahan dan kenangan sebagai bagian/unsur sapta pesona di obyek-obyek wisata



3. Urusan Pertanian

3.1 Capaian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Penyelenggara Urusan Pilihan Pertanian di Kabupaten Sabu Raijua dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sabu Raijua dengan alokasi anggaran **Urusan Pilihan Pertanian** sebesar **Rp. 7.952.081.551,-** dan realisasi sebesar **Rp. 7.384.883.248,- (92,87%)**.

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
I.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.612.509.251	3.372.627.610	93,36
1.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	2.980.077.500	2.759.584.660	92,60
	1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	426.600.000	418.119.750	98,01
	2) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2.553.477.500	2.341.464.910	91,70
2.	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	455.497.751	445.990.350	97,91
	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, bahan	455.497.751	445.990.350	97,91
	Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil			
3.	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	176.934.000	167.052.600	94,42
	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota lainnya	176.934.000	167.052.600	94,42
II.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.828.245.000	1.680.750.440	91,93
1.	Pengembangan Prasarana Pertanian	78.380.000	73.360.000	93,60
	1) Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	78.380.000	73.360.000	93,60
2.	Pembangunan Prasarana Pertanian	1.749.865.000	1.607.390.440	91,86
	1) Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.021.440.000	878.965.440	86,05
	2) Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	728.425.000	728.425.000	100
III.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	838.180.600	743.365.484	88,69



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
1.	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	194.110.000 194.110.000	194.110.000 194.110.000	100,0 0
2.	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	644.070.600 644.070.600	549.255.484 549.255.484	85,28 85,28
IV.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	219.988.100	215.592.314	98,00
1.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	219.988.100 219.988.100	215.592.314 215.592.314	98,00 98,00
V.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.453.158.600	1.372.577.400	94,45
1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1.453.158.600 1.453.158.600	1.372.577.400 1.372.577.400	94,45 94,45
Jumlah		7.952.081.551	7.384.883.248	92,87

3.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Arah Kebijakan	Program	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Penguatan perekonomian masyarakat berbasis UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Menjamin Ketercukupan Pangan, Air dan Energi Menuju SARAI CUKUP	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	83	450	542,16
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	49,61	1,61	-0,89
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Persentase Lahan Pertanian Bebas Bencana	97	100	100
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Persentase Pertumbuhan dan Peningkatan Kelas Kelompok Tani	93	111,48	119,87



Arah Kebijakan	Program	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Produksi pertanian per hektar per tahun	100	136	136
			Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun	100	124,29	124,29

3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

- 1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi

Alokasi Anggaran : Rp. 426.600.000,-

Realisasi : Rp. 418.119.750,- (98,01%)

Keluaran : -

- Tersedianya Benih Sayur-Sayuran sebanyak 1 Paket, Benih Tembakau sebanyak 5 Paket
- Terlaksananya Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) sebanyak 4 Paket, Sarana Prasarana untuk Kegiatan DBH-CHT sebanyak 1 paket; dan Pengendalian Kegiatan DBH-CHT di daratan Sabu dan Pengendalian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari di daratan Sabu

- 2) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

Alokasi Anggaran : Rp. 2.980.077.500 -,

Realisasi : Rp. 2.759.584.660 (92,60%)

Keluaran : -

Tersedianya, Pupuk untuk Pemeliharaan Lontar Hibrida sebanyak 12 Kg dan 15 Liter, Bibit Sayur-sayuran sebanyak 1 Paket, Benih Jagung Hibrida sebanyak 3.615 Kg, Pupuk Pelengkap sebanyak 355 Kg, Cultivator sebanyak 4 unit, Hand Traktor sebanyak 7 unit, Penggiling Padi sebanyak 6 unit, Mesin Penggiling Jagung sebanyak 4 unit, Perontok Padi sebanyak 5 unit, Pompa Air sebanyak 58 unit, Selang HDPE sebanyak 68 Roll, Tandon Air sebanyak 3 Buah dan Padi sebanyak 2.493 Kg

2. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil

Alokasi Anggaran : Rp. 455.497.751 -,

Realisasi : Rp. 445.990.350 (97,91%)

Keluaran : -

- Terlaksananya Belanja Rehabilitasi Dudukan Tandon sebanyak 1 Paket, Pengolahan Pakan sebanyak 1 Paket, Inseminasi Buatan sebanyak 1 Paket, Pembuatan Bokashi sebanyak 1 Paket.
- Tersedianya Pakan Ternak Babi sebanyak 1 Paket dan Sarana Ranch Raekore (Jagung) sebanyak 1 Paket



- Terbayarnya Honor Petugas RPH dan Unit Pembibitan Ternak Babi, Pengelola Padang dan Pemelihara Ternak sebanyak 8 Orang
- 3. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**
- 1) Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
- Alokasi Anggaran : Rp. 176.934.000 -,
 Realisasi : Rp. 167.052.600 (94,42%)
 Keluaran : -
- Tersedianya laksanaanya Belanja Anakan Ternak Babi sebanyak 6 ekor, Ternak Kambing sebanyak 24 ekor dan Ayam Pedaging sebanyak 3 Paket
- 4. Pengembangan Prasarana Pertanian**
- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
- Alokasi Anggaran : Rp. 78.380.000 -,
 Realisasi : Rp. 73.360.000 (93,60%)
 Keluaran : -
- Terlaksananya Kegiatan Update Data e-Alokasi sebanyak 1 Kegiatan
 - Terlaksananya Monev Bidang Sarpras daratan Sabu dan daratan Raijua
- 5. Pembangunan Prasarana Pertanian**
- 1) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- Alokasi Anggaran : Rp. 1.749.865.000 -,
 Realisasi : Rp. 1.607.390.440 (91,86%)
 Keluaran : -
- Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Perpompaan Menengah sebanyak 48 Paket, Rehap Jaringan Irigasi Tersier sebanyak 1 unit, Pembangunan Embung Pertanian sebanyak 3 unit dan Rehabilitasi Embung Pertanian sebanyak 2 unit
 - Terbayarnya Honor Fasilitator Jaringan Irigasi Tersier sebanyak 1 orang, Fasilitator Pembangunan Embung Pertanian sebanyak 1 orang dan Fasilitator Rehab Embung Pertanian sebanyak 1 orang
- 6. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**
- 1) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
- Alokasi Anggaran : Rp. 194.110.000 -,
 Realisasi : Rp. 194.080.000,- (99,98%)
 Keluaran : -
- Tersedianya Vaksin Ternak sebanyak 128 Botol dan terlaksananya Vaksinasi Ternak di daratan Sabu dan daratan Raijua
- 7. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**
- 1) Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
- Alokasi Anggaran : Rp. 644.070.600 -,
 Realisasi : Rp. 549.255.484,- (85,28%)
 Keluaran : -
- Terlaksananya Kegiatan Operasional Puskesmas 1 unit
 - Terbayarnya Honor Tenaga Medik Veteriner (1 org), Tenaga Paramedik Veteriner (9 org) dan Tenaga Harian Lepas (THL) (1 Org)



8. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

- 1) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Alokasi Anggaran : Rp. 219.988.100 -,

Realisasi : Rp. 215.592.314,- (98,00%)

Keluaran : -

Tersedianya Herbisida sejumlah 1 paket, Insektisida sejumlah 1 paket dan Fungisida sejumlah 1 paket

9. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

- 1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

Alokasi Anggaran : Rp. 1.453.158.600 -,

Realisasi : Rp. 1.372.577.400,- (94,45%)

Keluaran : -

- Terlaksananya Pengolahan Demplot Penyuluh di 6 Kecamatan, Operasional Balai Penyuluh Pertanian di 6 Kecamatan, Penilaian Kelas Kelompok Tani di 63 Desa/Kelurahan, Penyusunan Program Penyuluhan (Programa Desa, Kecamatan dan Kabupaten), Temu Teknis Penyuluh sebanyak 1 Kegiatan, Penyusunan e-RDCK di 6 Kecamatan dan Update data SIMLUH di 6 Kecamatan

- Terbayarnya Honor Penyuluh Kontrak sebanyak 47 Orang



3.4 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran strategis	Program			Kegiatan			Kesesuaian (ya/tidak)
		Uraian program	Target kinerja program	Indikator kinerja program	Uraian kegiatan	Target kinerja kegiatan	Indikator kinerja kegiatan	
	Menjamin Ketercukupan Pangan, Air dan Energi Menuju SARAI CUKUP	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	petani/ Peternak dan PPL/ASN Dinas Pertanian dan Pangan	YA	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Kesehatan Hewan	Tersedianya Penanganan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular	YA
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		YA		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	YA	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		YA		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian		YA	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		YA		Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian	Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	YA	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Sarana Produksi	YA	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya Penggunaan Sarana Pertanian	Tersedianya Pembangunan Jalan Pertanian 2 Km	YA	



Dari indikator sasaran kinerja Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2023 maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Presentase Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian

➤ Berdasarkan tabel diatas, capain kinerja Indikator pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Target pembangunan prasarana pertanian tahun 2023 yaitu 12 unit, terealisasi 55 unit (458,33%)
- Dibandingkan terhadap capaian pembangunan prasarana pertanian tahun 2022, dari target 7 unit terbangun 9 unit (128,57%) menunjukkan capaian tahun 2023 lebih baik dari capaian tahun 2022

➤ Adapun 53 unit prasarana pertanian yang dibangun tahun 2023 terbangun dengan pembiayaan APBD Kabupaten Sabu Raijua 4 unit; yaitu irigasi tersier 1 unit (lokasi desa Nadawawi) dan pembangunan embung pertanian 3 unit (desa Ioborui, desa Eilode dan desa jiwuwu) dan dukungan APBN (melalui kementerian pertanian) 1 unit; yaitu pembangunan embung pertanian (desa matei) serta insentif Viskal daerah 48 unit irigasi perpompaan yang tersebar di kabupaten sabu raijua.

2. Presentase Penurunan Kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular

➤ Berdasarkan tabel diatas, capain kinerja Indikator presentase Penurunan Kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Target presentase Penurunan Kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular tahun 2023 sebesar 49,61%, terrealisasi -0,89%.
- Dibandingkan terhadap presentase Penurunan Kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular tahun 2022 sebesar -83% menunjukkan bahwa capaian tahun 2023 lebih baik -82,11% dari capaian tahun 2022.

➤ Pada tahun 2023 terdapat 1.229 kasus penyakit hewan menular, didominasi oleh penyakit helminthiasis (cacingan pada ternak sapi, babi dan kambing), penyakit scabies (penyakit kulit pada ternak kambing) dan penyakit ORF (inveksi mulut pada ternak kambing, domba dan kuda).

➤ Dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi penurunan penyakit menular ternak dari 1.240 kasus menjadi 1.229 kasus atau berkurang 11 kasus.

3. Presentase Lahan Pertanian bebas bencana pertanian

➤ Berdasarkan tabel diatas, capain kinerja Indikator Presentase Lahan Pertanian bebas bencana pertanian tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Target Presentase Lahan Pertanian bebas bencana pertanian tahun 2023 yaitu 97 %, terealisasi 100%



- Dibandingkan terhadap capaian Presentase Lahan Pertanian bebas bencana pertanian tahun 2022, dari target 96%, terrealisasi 99,6% menunjukkan capaian tahun 2023 lebih baik 1% dari capaian tahun 2022
 - Bahwa pada tahun 2023 tidak ditemukannya luas lahan yang mengalami bencana pertanian (puso/gagal panen) pada tanaman padi, jagung, kacang tanah dan kacang hijau.
4. Presentase Pertumbuhan kelompok tani
- Berdasarkan tabel diatas, capain kinerja Indikator Presentase Pertumbuhan kelompok tani tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Target Presentase Pertumbuhan kelompok tani tahun 2023 yaitu 89%, terealisasi 111,48%
 - Dibandingkan terhadap capaian Presentase Pertumbuhan kelompok tani tahun 2022, dari target 89%, terrealisasi 110,2% menunjukkan capaian tahun 2023 lebih baik 1,28% dari capaian tahun 2022
 - Bahwa pertumbuhan jumlah kelompok tani 111,48% tahun 2023 adalah meliputi 77 kelompok tani baru.
5. Persentase Produksi pertanian (padi, jagung, kacang hijau dan kacang tanah)
- Berdasarkan tabel diatas, capain kinerja Indikator persentase produksi pertanian tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Target Presentase Produksi pertanian pada tahun 2023 yaitu 100%, terealisasi 136,42%
 - Dibandingkan terhadap capaian persentase produksi pertanian tahun 2022, dari target 100%, terrealisasi 130,4% menunjukkan capaian tahun 2023 lebih baik 6,02% dari capaian tahun 2022.
 - Bahwa capaian persentase produksi pertanian pada tahun 2023 sebesar 136,42% merupakan akumulasi dari produksi komoditi padi, jagung, kacang hijau dan kacang tanah sebesar 22.059,01 ton dari target 16.169 ton.
6. Produktivitas pertanian per hektar per tahun (padi, jagung, kacang hijau dan kacang tanah)
- Berdasarkan tabel diatas, capain kinerja Indikator persentase Produktivitas pertanian per hektar per tahun pada tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Target Presentase Produktivitas pertanian per hektar tahun 2023 yaitu 100%, terealisasi 124,29%
 - Dibandingkan terhadap capaian persentase Produktivitas pertanian pada tahun 2022, dari target 100%, terrealisasi 119,84% menunjukkan capaian tahun 2023 lebih baik 4,45% dari capaian tahun 2022.



- Bahwa capaian persentase Produktivitas pertanian pada tahun 2023 sebesar 124,29% merupakan persentase akumulasi dari Produktivitas komoditi padi, jagung, kacang hijau dan kacang tanah sebesar 3,07 ton/ha dari target 2,47 ton/ha.

Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan dikategorikan dalam kriteria **BERHASIL**. Hal ini tidak lepas dari peran Penyuluh Pertanian Lapangan dalam melakukan pendampingan petani/kelompok tani, walaupun belum optimal dan perlu dilakukan pembenahan. Capaian tahun ini menjadi indikator dan dasar untuk mengevaluasi kinerja dan mengambil langkah-langkah strategis untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi di tahun berikutnya dengan mengoptimalkan berbagai sumberdaya yang ada.

3.5 Permasalahan dan Solusi

Tidak ada

3.6 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Tidak ada

3.7 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya. Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya dituangkan dalam format sebagai berikut:

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Direkomendasikan agar Bupati Sabu Raijua melalui OPD terkait menambah anggaran lagi kepada Program/Kegiatan pengadaan ternak babi baik untuk pembibitan yang dikelola oleh OPD terkait maupun untuk dibagikan kepada masyarakat.	-	-



4. Urusan Perdagangan

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Penyelenggara **Urusan Pilihan Perdagangan** di Kabupaten Sabu Raijua dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 2.423.253.000,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 2.180.508.699,-** atau sebesar **89,98%** dan realisasi fisik sebesar 99,89%. Adapun pelaksanaan program/kegiatan dari Urusan Pilihan Perdagangan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
I.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.378.167.400	1.284.800.699	93,23
1.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.237.074.000	1.165.446.004	94,21
	1) Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.237.074.000	1.165.446.004	94,21
2.	Keg. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	141.093.400	119.354.695	84,59
	1) Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	141.093.400	119.354.695	84,59
II.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1.005.453.900	872.024.000	86,73
3.	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	980.643.900	849.594.000	86,64
	1) Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	22.530.000	18.380.000	81,58
	2) Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	51.859.900	50.220.000	96,84
	3) Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kab/Kota	906.254.000	780.994.000	86,18
4.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.810.000	22.430.000	90,41
	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	24.810.000	22.430.000	90,41
III.	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	39.631.700	23.684.000	59,76
5.	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	39.631.700	23.684.000	59,76
	1) Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	39.631.700	23.684.000	59,76
Jumlah		2.423.253.000	2.180.508.699	89,98



3.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Arah Kebijakan	Program	Sasaran	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 dan penguatan perekonomian masyarakat yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya Perekonomian Daerah Menunju Sabu Raijua Maju	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya	100	100	100
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Meningkatnya Perekonomian Daerah Menunju Sabu Raijua Maju	Persentase obyek sasaran Pengawasan barang Beredar dan Pemantauan Harga yang terlaksana pemantauannya	100	100	100
			Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	20	62,78	313
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya Perekonomian Daerah Menunju Sabu Raijua Maju	Persentase alat-alat Ukur, Takar dan Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	2,04	3,57	175




3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya


1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan


1) Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

Alokasi Anggaran : Rp. 1.237.074.000 -,

Realisasi : Rp. 1.165.446.004,- (94,21%)

Keluaran :  Terfasilitasi Pelaku Usaha sebanyak 78 Pelaku usaha (bantuan tenda 18 unit, etalase 30 unit dan rak jualan 30 unit)

 Terlaksananya rehab pasar sebanyak 2 unit (pasar nataga dan pasar eilogo)

 Terbayarnya gaji tenaga kontrak pasar (5 pasar) sebanyak 26 orang selama 12 bulan

2. Keg. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

1) Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Alokasi Anggaran : Rp. 141.093.400 -,

Realisasi : Rp. 119.354.695,- (84,59%)


Keluaran : Terlaksananya pengawasan dan pemantauan kegiatan Gerai maritim dan tol laut di Kab. Sabu Raijua selama 1 tahun sebanyak 12 Voyage/trip dan pengendalian inflasi daerah.


3. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

1) Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Alokasi Anggaran : Rp. 22.530.000 -,

Realisasi : Rp. 18.380.000,- (81,58%)

Keluaran :  Terlaksananya pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang sebanyak 11 kali selama 12 bulan

 Terlaksananya koordinasi Pemda dengan pelaku usaha dalam rangka pengendalian harga barang pokok dan barang penting di Kab. Sabu Raijua

2) Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

Alokasi Anggaran : Rp. 51.859.900 -,

Realisasi : Rp. 50.220.000,- (96,84%)


Keluaran : Terlaksananya pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kab. Sabu Raijua selama 12 bulan

3) Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kab/Kota

Alokasi Anggaran : Rp. 906.254.000 -,

Realisasi : Rp. 780.994.000,- (86,18%)



Keluaran :  Terlaksananya pelaksanaan Operasi pasar murah di Kab. Sabu Raijua dalam rangka pengendalian inflasi daerah sebanyak 6 kecamatan dan pengawasan dan pemantauan barang beredar di Kab. Sabu Raijua

4. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

Alokasi Anggaran : Rp. 24.810.000 -,

Realisasi : Rp. 22.430.000,- (90,41%)

Keluaran : Terlaksananya pengawasan dan pemantauan distribusi pupuk bersubsidi sebanyak 18 kali di Kab. Sabu Raijua

5. Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

1) Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang

Alokasi Anggaran : Rp. 39.631.700 -,

Realisasi : Rp. 23.684.000,- (59,76%)

Keluaran : Terlaksananya pengawasan dan pemantauan kegiatan tera dan tera ulang di Kab. Sabu Raijua sebanyak 4 kali (4 unit peralatan)



3.4 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN (YA/TIDAK)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
	Memacu pertumbuhan sektor produksi, perdagangan dan jasa untuk membuka lapangan kerja baru sehingga mampu meningkatkan produksi masyarakat dan menekan angka pengangguran.	Prog. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan yang dilaksanakan	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah kegiatan sarana distribusi perdagangan yang dilaksanakan	Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Ya
					Keg. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Ya
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan ketersediaan barangkebutuhan pokok masyarakat yang dilaksanakan	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar	Jumlah pemantauan harga dan stok kebutuhan pokok masyarakat yang	Terlaksannya Pemantauan Harga dan Stok kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar	Ya



NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN (YA/TIDAK)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
				pemantauanya	Kabupaten/Kota	dilaksanakan	Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi	
				Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida yang dilaksanakan	Terlaksannya Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Ya
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Jumlah kegiatan Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTTP yang tertera	Tercapainya alat UTTP terverifikasi	Ya



3.5 Permasalahan dan Solusi

➤ **Permasalahan :**

Adanya efisiensi anggaran pada Sub Keg. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang karena Gedung Metrologi belum dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya sehingga anggaran pada belanja tagihan listrik tidak terserap secara maksimal.

➤ **Solusi :**

Perencanaan anggaran pada waktu yang akan datang akan dilakukan secara cermat dan disesuaikan dengan kebutuhan.

3.6 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pengendalian export dan impor barang ❖ Perlindungan Konsumen 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ RPJMD ❖ Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 22 Tahun 2020 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Mengontrol keseimbangan neraca perekonomian daerah ❖ Menjaga kestabilan stock dan harga barang

3.7 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun (2022)	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	<p>Bidang Perdagangan</p> <p>DPRD merekomendasikan kepada Bupati Sabu Raijua agar terus-menerus melakukan upaya-upaya pembenahan yang serius pada urusan Perdagangan agar menjadi semakin baik dari tahun ke tahun. Pembenahan Tata niaga BBM, Tata Niaga Garam, Pemantauan harga 9 bahan pokok, Penataan Pasar, dll.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Persoalan BBM sudah dilakukan pembinaan terhadap APMS untuk memperhatikan takaran minyak saat minyak keluar dari pangkalan APMS ❖ Melakukan monitoring setiap minggu ❖ Pelayanan tera ulang belum dilakukan secara kontinyu karena Dinas belum memiliki tenaga penera/pegawai berhak ❖ Pemerintah sudah melaksanakan pemantauan harga barang penting dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat. 	<p>Memberikan Pelayanan yang transparan dan akuntabel</p>



5. Urusan Perindustrian

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Penyelenggara **Urusan Pilihan Perindustrian** di Kabupaten Sabu Raijua dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua dengan alokasi anggaran sebesar **Rp 8.040.201.450,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp 7.732.310.391,-** atau sebesar **96,17%** dan realisasi fisik sebesar 90,00%. Adapun pelaksanaan program/kegiatan dari Urusan Perindustrian di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
I.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	8.040.201.450	7.732.310.391	96,17
1.	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota	8.040.201.450	7.732.310.391	96,17
	1) Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100.000.000	25.615.000	25,62
	2) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	962.412.000	937.202.777	97,38
	3) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6.977.789.450	6.769.492.614	97,01
Jumlah		8.040.201.450	7.732.310.391	96,17

3.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Arah Kebijakan	Program	Sasaran	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 dan penguatan perekonomian masyarakat yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Meningkatnya Perekonomian Daerah Menuju Sabu Raijua Maju	Persentase Pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	8,36	9,95	119



3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

- 1) Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - Alokasi Anggaran : Rp. 100.000.000,-
 - Realisasi : Rp. 25.615.000,- (25,62%)
 - Keluaran : Terlaksananya penyusunan dokumen RPIK sebanyak 1 dokumen

- 2) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
 - Alokasi Anggaran : Rp. 962.412.000 -,
 - Realisasi : Rp. 937.202.777,- (97,38%)
 - Keluaran :
 1. Tersedianya bantuan tenun ikat untuk 205 IRT
 2. Tersedianya bantuan Pengolahan Pangan untuk 14 IRT
 3. Tersedianya bantuan Penyadap Lontar untuk 85 IRT

- 3) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
 - Alokasi Anggaran : Rp. 6.977.789.450 -,
 - Realisasi : Rp. 6.769.492.614,- (97,01%)
 - Keluaran :
 - ✚Terbayarnya gaji tenaga kontrak pabrik rumput laut, pabrik AMDK dan rumah kemasan sebanyak 13 orang selama 12 bulan
 - ✚Terlaksananya rehab tambak sebanyak 16 unit
 - ✚Terlaksananya rehab gudang garam sebanyak 2 unit (Gudang Hallapaji 4 dan Lohohede 1)
 - ✚Tersedianya Geomembran untuk diserahkan kepada masyarakat sebanyak 440 roll
 - ✚Tersedianya pengadaan Roda 3 untuk diserahkan kepada masyarakat sebanyak 8 unit



3.4 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN (YA/TIDAK)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
	Mengoptimalkan pengelolaan pabrik AMDK dan Pabrik Rumput Laut serta memperluas industri garam dan produksi gula sabu serta produk turunan lainnya	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah kegiatan peningkatan industri yang di laksanakan di Daerah	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota	Terlaksannya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota	Ya



3.5 Permasalahan dan Solusi

➤ **Permasalahan :**

Kegiatan penyusunan RANPERDA RPIK Tahun 2023 awalnya hendak dilaksanakan oleh dinas tanpa melibatkan Perancaang Ranperda karena sebelumnya pernah gagal komunikasi dengan perancang tersebut, namun disarankan oleh Bagian Hukum untuk tetap melibatkan Perancang dari Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT sehingga kegiatan penyusunan RANPERDA RPIK hanya sampai tahap Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Focus Group Discussion yang menyebabkan anggaran yang tersedia pada Sub Keg. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota tidak terserap dengan baik.

➤ **Solusi :**

Perencanaan anggaran pada waktu yang akan datang akan dilakukan secara cermat dan disesuaikan dengan kebutuhan.

3.6 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Bidang Perindustrian - Sertifikasi Industri Rumah Tangga - Sabu Raijua satu Rumah Tangga satu Produksi	RPJMD Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 22 Tahun 2020	Memberi jaminan layak dan halal bagi produksi industri rumah tangga - Meningkatkan produksi dan ekonomi masyarakat



3.7 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun (2022)	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	<p>Bidang Perindustrian</p> <p>1. Merekomendasikan kepada Bupati agar memperbaiki sistem manajemen dan pengelolaan aset serta memperbaiki tambak garam yang ada sehingga dapat berkontribusi dalam peningkatan PAD dan penyerapan tenaga kerja ditingkat masyarakat.</p> <p>2. Sesuai informasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua kepada Pansus saat melakukan pendalaman materi LKPJ, bahwa terdapat aset-aset tambak garam milik Pemda yang berpotensi hilang, oleh karena itu DPRD merekomendasikan kepada Bupati Sabu Raijua :</p> <p>a. Agar secara serius dan sungguh-sungguh berkordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dalam hal ini pihak Kejaksaan sebagai pengacara negara untuk secara dini melakukan upaya-upaya pengamanan terhadap asset-asset Pemda tersebut agar tidak terjadi potensi kerugian daerah yang lebih besar lagi. Asset-asset tambak garam merupakan asset strategis milik Pemda karena merupakan asset penyumbang PAD terbesar bagi daerah ini. Oleh karena itu, DPRD merekomendasikan agar Bupati Sabu Raijua sungguh-sungguh serius melakukan segala daya upaya maksimal pengamanan agar tidak boleh ada satupun asset Pemda yang hilang tanpa ada pertanggungjawaban hukum.</p> <p>b. Memberikan teguran kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan PTSP karena sebagai Pengguna Barang lalai dalam melakukan pengamanan Barang Milik Daerah.</p>	<p>1. Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki manajemen pengeloan aset, baik aset pada tambak garam maupun pabrik-pabrik yang ada. Sistem manajemen pengeloan tambak telah diterapkan mekanisme bagi hasil antara pengelola dan pemerintah. Sementara, terkait dengan perbaikan tambak dilakukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah di tahun 2023. Total tambak yang direhab sebanyak 16 unit, dengan anggaran yang bersumber dari DAU 14 unit dan DID 2 unit.</p> <p>2. a. Pemerintah terus berupaya melakukan pengamanan aset tambak garam yang dikuasai oleh Pemda. Salah satu upaya yang dilakukan dengan cara merehabilitasi tambak yang rusak. Upaya dapat dilakukan secara maksimal jika tersedia anggaran dengan personil yang cukup. Terhadap tambak garam yang tidak direhab dan dikelola pihak lain, upaya persuasive terus dilakukan agar pihak pengelola/perusahaan yang mengelola tambak tersebut melakukan pengelolaan tambak sesuai ketentuan yang berlaku. Secara ekonomis tambak yang sudah rusak memiliki nilai manfaat nol atau tidak memberikan kontribusi ekonomis jika tidak di rehab. Agar tambak yang rusak dapat memberikan kontribusi terhadap PAD maka harus disediakan anggaran yang cukup untuk melakukan perbaikan/rehab.</p> <p>b. Berdasarkan surat instruksi Bupati Sabu Raijua No. 700/37/INSPEK/II/2024 Tanggal 13 Februari 2024 telah dilakukan audit.</p> <p>3. Upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset pabrik-pabrik yang dimiliki terus dilakukan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi siap 100%. Kondisi pabrik sudah mulai menurun dan hampir rusak. Untuk mengembalikan kondisi sebagaimana kondisi awal, perlu anggaran yang cukup.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Terinventarisasinya aset-aset yang ada di Dinas PM dan PTSP dan Perindag ❖ Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih



No	Rekomendasi DPRD Tahun (2022)	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	<p>c. Merekomendasikan kepada Bupati Sabu Raijua mencopot sementara jabatan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan PTSP dan menugaskan Irda melakukan Audit di pada dinas tersebut.</p> <p>3. Merekomendasikan kepada Bupati agar segera mengoptimalkan pemanfaatan pabrik-pabrik sehingga dapat beroperasi dan menyumbang PAD bagi daerah ini. Bupati Sabu Raijua diminta untuk berpikir dan bekerja ekstra serius untuk melakukan terobosan-terobosan serta membuat kebijakan-kebijakan strategis yang tepat guna dan tepat sasaran dalam mengoptimalkan seluruh aset tersedia yang berpotensi menghasilkan PAD. Hal ini penting untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.</p> <p>4. Dalam hasil uji petik Pansus ke lapangan, ditemukan sejumlah persoalan terkait Kegiatan Rehabilitasi Tambak Garam Tahun 2022. Untuk itu, DPRD merekomendasikan kepada Bupati Sabu Raijua untuk berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan sebagai pengacara negara untuk melakukan Pulbaket dan jika terbukti telah terjadi unsur kerugian keuangan daerah pada pekerjaan rehabilitasi 19 tambak garam tersebut supaya dilimpahkan untuk ditangani Aparat Penegak Hukum;</p> <p>5. Dalam rangka upaya perbaikan tata kelola produksi dan tata niaga garam, DPRD merekomendasikan kepada Bupati Sabu Raijua agar membentuk dan menetapkan Unit Pelaksana Teknis Pengelola Garam serta membuat Standar Operasional dan Prosedur yang jelas tentang tata kelola produksi dan penjualan garam.</p>	<p>4. Terhadap hal ini Kegiatan Rehabilitasi Tambak Tahun 2022 telah selesai dilaksanakan. Tambak yang direhabilitasi saat ini telah berproduksi.</p> <p>5. Pengelolaan Tambak Garam telah dilakukan dengan kerja sama bagi hasil antara pemerintah dengan pengelola tambak. Mekanisme penjualan garam dilakukan melalui dinas dan penyetoran pembayaran garam dilakukan melalui rekening PAD Kabupaten Sabu Raijua.</p>	



6. Urusan Transmigrasi

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Penyelenggara Urusan Pilihan Transmigrasi di Kabupaten Sabu Raijua dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sabu Raijua, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 99.344.000,-** dan realisasi sebesar **Rp. 99.118.680,- (99,8%)**. Adapun pelaksanaan program/ kegiatan dari Urusan Transmigrasi di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
<i>I</i>	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	54.738.000	54.614.000	99,8
1	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi 1) Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	54.738.000	54.614.000	99,8
<i>II</i>	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	44.606.000	44.504.680	99,8
2	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1) Koordinasi dan sinkronisasi kerja sama Pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota	44.606.000	44.504.680	99,8
Jumlah		99.344.000	99.118.680	99,8

3.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Arah Kebijakan	Program	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Diarahkan pada upaya Pemulihan Ekonomi dan penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat serta Sistem	1. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat (SARAI MAMPU)	1. Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	1 keg (55 org)	1 keg (55 org)	100%
	2. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi		2. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi berasal dari 1 (satu) daerah kab./ kotqa	2 keg	2 keg	100%

3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi

- 1) Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi
 Alokasi Anggaran : Rp. 54.738.000,-
 Realisasi : Rp. 54.614.000,- (99,8%)



Keluaran :
Terlaksananya rapat dengar pendapat dengan tokoh adat dan Masyarakat di Desa Lobodei dan Desa Huwaga.

2. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi Anggaran : Rp. 44.606.000,-

Realisasi : Rp. 44.504.680,- (99,8%)

Keluaran :

Terlaksananya Perjalanan dinas koordinasi ke Kupang dan Jakarta, serta monitoring dan evaluasi di desa Loboaju.



3.4 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN (YA/TIDAK)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
1	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat (SARAI MAMPU)	Program perencanaan Kawasan transmigrasi	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi Kawasan transmigrasi yang bisa di bangun dan di kerjasamakan dengan daerah lain	Persentase Kawasan transmigrasi yang difasilitasi	Pencadangan tanah untuk Kawasan transmigrasi	Terlaksananya sosialisasi program transmigrasi	Persentase Kawasan transmigrasi yang difasilitasi	Ya
2	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat (SARAI MAMPU)	Program Pembangunan Kawasan transmigrasi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi kerja sama Pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Presentase satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Kerjasama Pembangunan transmigrasi	Presentase satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Ya



3.5 Permasalahan dan Solusi

Tidak ada

3.6 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Tidak ada

3.7 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1.	Direkomendasikan kepada Bupati Sabu Raijua Terhadap kinerja daya serap anggaran secara umum dinilai Sangat Baik . Ke depan agar kualitas perencanaan dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi	Pemerintah sepakat dengan rekomendasi Pansus dan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti.	Rapat dengar pendapat dengan para tokoh adat dan Masyarakat di desa Lobodei dan Huwaga untuk perencanaan Pembangunan lokasi transmigrasi



D. RINGKASAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Administrasi Pemerintahan

a. Bagian Pemerintahan

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sabu Raijua, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 984.003.900,-** dan realisasi sebesar **Rp. 974.780.745,- (99,06%)**. Adapun rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	552.454.900,00	543.609.638	99,00
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	230.424.000	228.093.000	99,98
	1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	295.660.232	295.530.412	99,96
	2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.930.000	22.930.000	100
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	55.372.000	49.333.000	100
	Pelaksanaan Administrasi Tugas ASN	55.372.000	49.333.000	89,09
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19.250.000	19.250.000	100
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	19.250.000	19.250.000	100
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	172.133.400	171.708.950	99,75
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.481.250	1.471.950	99,37
	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.561.690	45.498.000	99,86
	3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.050.000,	10.050.000	100
	4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.250.000	11.238.000	99,89
	5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103.854.000	103.451.000	99,61
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.395.500	8.369.000	99,68



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.600.000	2.598.000	99,92
	2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.875.500	2.871.000	99,84
	3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.920.000	2.900.000	99,31
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.880.000	66.855.688	99,96
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.880.000	43.855.688	99,94
	2) Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung	23.000.000	23.000.000	100
II.	PEMERINTAHAN DAN KESJAHTERAAN RAKYAT	431.549.000	431.171.107	99,91
1.	Administrasi Tata Pemerintahan	431.549.000	431.171.107	99,91
	1) Penataan Administrasi Pemerintahan	91.391.000	91.309.000	99,91
	2) Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	230.552.000	230.552.000	99,97
	3) Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	109.606.000	109.379.056	99,79
	Jumlah	984.003.900,.	974.780.745	99,06

3.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran	Uraian Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Integritas Aparatur dalam Pelayanan Pemerintahan Menuju Sarai Jujur	Penyusunan Dokumen LPPD, LKPJ tepat waktu	Tinggi	100	100	100

3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Alokasi Anggaran : Rp. 295.660.232,-
Realisasi : Rp. 295.530.412,- (99,96%)



Keluaran :

- Tersedianya Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) 35 Dokumen, Laporan Pertanggungjawaban Daerah (LKPJ) 70 Dokumen, Ringkasan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (RLPPD), Dokumen Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebanyak 12 buku.
- Terbayarnya Honorarium Tim Penyusun LPPD & LKPJ dan SPM sebanyak 49 orang.

2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Alokasi Anggaran : Rp. 22.930.000,-

Realisasi : Rp. 22.930.000,- (100%)

Keluaran :

Terlaksananya Rapat Klarifikasi LPPD, LKPJ IKK dan SPM Bersama Perangkat Daerah sebanyak 8 kali

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Pelaksanaan Administrasi Tugas Tugas ASN

Alokasi Anggaran : Rp. 55.372.000,-

Realisasi : Rp. 49.333.000,- (89,09%)

Keluaran :

Terbayarnya Honorarium, Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengurus dan Penyimpan Barang, PPTK, PPKEU dan Admin Sirup selama 12 bulan

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Alokasi Anggaran : Rp. 19.250.000,-

Realisasi : Rp. 19.250.000,- (100%)

Keluaran :

Tersedianya Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebanyak 3 Pasang, Pakaian Dinas Harian (PDH) sebanyak 7 Pasang dan Pakaian Sipil Harian (PSR) sebanyak 1 pasang

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 1.481.250,-

Realisasi : Rp. 1.471.950,- (99,37%)

Keluaran :

Tersedianya alat listrik sebanyak 15 buah

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 45.561.690,-

Realisasi : Rp. 45.498.000,- (99,86%)

Keluaran :

Tersedianya alat tulis kantor sebanyak 46 jenis dan 2 Laptop Acer sebanyak 2 unit.

3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 10.050.000,-

Realisasi : Rp. 10.050.000,- (100 %)

Keluaran : Terlaksananya 6 kali Rapat Camat dan Lurah



- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Alokasi Anggaran : Rp. 11.250.000,-
Realisasi : Rp. 11.238.000,- (99,89%)
Keluaran :
Tersedianya DPA, DPPA, RENJA, CALK, dan Dokumen Kantor lainnya sebanyak 60 Buku dan 22.500 lembar penggandaan.
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Alokasi Anggaran : Rp. 103.854.000,-
Realisasi : Rp. 103.451.000,- (99,61%)
Keluaran :
Terlaksananya Koordinasi Luar Daerah (Jakarta dan Kupang) terkait persiapan EKKPD, Pemuktahiran Data LOKPRI, Pengurusan SK Pejabat Negara, serta Kerjasama MOU Pemerintah Daerah.

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Alokasi Anggaran : Rp. 2.600.000,-
Realisasi : Rp. 2.598.000,- (99,92%)
Keluaran :
Tersedianya materai sebanyak 200 Lembar
- 2) Penyediaan Jasa Kebersihan
Alokasi Anggaran : Rp. 2.875.500,-
Realisasi : Rp. 2.871.000,- (99,84%)
Keluaran :
Tersedianya alat dan bahan Kebersihan Kantor sebanyak 20 Jenis
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 2.920.000,-
Realisasi : Rp. 2.900.000,- (99,31%)
Keluaran :
Terlaksananya Pemeliharaan Kantor Berupa Pembelian Suku Cadang untuk Laptop sebanyak 5 Unit dan PC 2 Unit

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Alokasi Anggaran : Rp. 43.880.000,-
Realisasi : Rp. 43.855.688,- (99,94%)
Keluaran :
Tersedianya Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 7 drum dan Suku cadang Kendaraan Dinas roda dua dan empat
- 2) Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung
Alokasi Anggaran : Rp. 23.000.000,-
Realisasi : Rp. 23.000.000,- (100%)
Keluaran :
Terbayarnya 3 Paket Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Sekretariat Bersama di Kecamatan Sabu Liae, Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor Lurah Ledেকে dan Rumah Dinas Sekcam Ledeeunu di Kecamatan Raijua.



7. Administrasi Tata Pemerintahan

1) Penataan Administrasi Pemerintahan

Alokasi Anggaran : Rp. 91.391.000,-
Realisasi : Rp. 91.309.000,- (99,91%)
Keluaran :

✚ Terlaksananya koordinasi Pemerintahan Umum di 5 Kecamatan daratan Sabu dan Kupang, Koordinasi Persiapan Seminar Sehari HUT SARAI (di Jakarta dan Kupang).

✚ Tersedianya Makan Minum Jamuan Tamu, seminar sehari HUT Kabupaten Sabu Raijua sebanyak 225 orang dan terbayarnya honor Narasumber ,Moderator Seminar.

2) Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

Alokasi Anggaran : Rp. 230.552.000,-
Realisasi : Rp. 230.483.051,- (99,97%)
Keluaran :

Terlaksananya koordinasi Terkait Pembangunan Infrastruktur Pemerintah dikawasan Perbatasan, Pemutakhiran data usulan Renaksi Kawasan LOKPRI tahun 2023 sebanyak 12 kali dan Terlaksananya kegiatan monitoring Daerah Perbatasan Lokasi LOKPRI di Daratan Sabu Raijua sebanyak 6 kali serta Rapat Lengkap Pamong Praja di 6 Kecamatan

3) Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Alokasi Anggaran : Rp.109.606.000,-
Realisasi : Rp.109.379.056,- (99,79%)
Keluaran :

Terlaksananya Fasilitasi Otonomi Daerah yang diselenggarakan sebanyak 2 kegiatan, dan Pengurusan Dokumen/ Kelengkapan SK Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah serta DPRD sebanyak 2 kali



3.4 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN (YA/TIDAK)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
1	Meningkatnya Integritas Aparatur dalam Pelayanan Pemerintahan Menuju Sarai Jujur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Terwujudnya sistem pelayanan publik yang profesional dan fasilitatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Tersusunnya Laporan Capaian Realisasi Kinerja	Penyusunan Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua	Tersedianya Laporan Capaian Realisasi Kinerja	Ya



3.5 Permasalahan dan Solusi

Tidak Ada

3.6 Kebijakan Strategi yang ditetapkan

Tidak Ada

3.7 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun sebelumnya

TidakAda



b. Bagian Kesejahteraan Rakyat

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sabu Raijua, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 2.828.309.550,-** dan realisasi sebesar **Rp. 2.771.609.748,- (98,00 %)**. Adapun rincian anggaran dan realisasi program/kegiatan sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	406.309.400	406.309.400	100
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	68.144.000	66.260.500	97,24
	1) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	68.144.000	66.260.500	97,24
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.500.000	7.500.000	100
	1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	7.500.000	7.500.000	100
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	275.215.400	275.215.400	100
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.331.250	3.331.250	100
	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.901.250	26.901.250	100
	3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.495.000	33.495.000	100
	4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.999.900	12.999.900	100
	5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	198.488.000	198.488.000	100
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
	1) Pengadaan Mebel	0	0	0
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.990.000	7.990.000	100
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.100.000	1.100.000	100
	2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.890.000	6.890.000	100
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.460.000	47.375.760	99,82
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.460.000	47.375.760	99,82



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
II.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2.422.000.150	2.422.000.150	100
1.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	2.422.000.150	2.422.000.150	100
	1) Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	412.500.000	412.500.000	100
	2) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1.387.031.400	1.387.031.400	100
	3) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	662.468.750	662.468.750	100
Jumlah		2.828.309.550	2.771.609.748	98,00

3.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Penjanjian Kinerja

Arah Kebijakan	Program	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Masyarakat	Adanya survey Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	100	100	100

3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Alokasi Anggaran : Rp. 68.144.000,-

Realisasi : Rp. 66.260.500,- (97,24%)

Keluaran :

Terbayarnya jasa Tenaga Administrasi Keuangan sebanyak 7 orang selama 12 bulan

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) **Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya**

Alokasi Anggaran : Rp. 7.500.000-

Realisasi : Rp. 7.500.000--,- (100%)

Keluaran :

Tersedianya pakaian Dinas 5 Stel beserta perlengkapannya Untuk Eselon II dan IV



3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 3.331.250,-

Realisasi : Rp. 3.331.250,- (100%)

Keluaran :

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik sebanyak 5 jenis

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 26.901.250,-

Realisasi : Rp. 26.901.250,- (100%)

Keluaran :

Tersedianya peralatan Gedung Kantor sebanyak 38 jenis

3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 33.495.000,-

Realisasi : Rp. 33.495.000,- (100%)

Keluaran :

Jumlah Makan dan Minum Rapat yang disediakan 770 dos untuk Upacara Hari Besar.

4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Alokasi Anggaran : Rp. 12.999.900,-

Realisasi : Rp. 12.999.900,- (100%)

Keluaran :

Tersedianya barang cetakan 80 buku dan penggandaan 26.000 lembar

5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Alokasi Anggaran : Rp. 198.488.000,-

Realisasi : Rp. 198.488.000,- (100%)

Keluaran :

Terlaksananya Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 8 Kegiatan dan Jumlah Kegiatan Koordinasi keluar Daerah 3 kegiatan

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Pengadaan Mebel

Alokasi Anggaran : Rp. 0

Realisasi : Rp. 0 (0%)

Keluaran :

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Alokasi Anggaran : Rp. 1.100.000,-

Realisasi : Rp. 1.100.000,- (100%)

Keluaran :

Tersedianya Materai sebanyak 110 lembar

2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 6.890.000,-

Realisasi : Rp. 6.890.000,- (100%)

Keluaran :

Tersedianya Peralatan dan Bahan Pembersih Kantor sebanyak 20 jenis



6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Alokasi Anggaran : Rp. 47.460.000,-
Realisasi : Rp. 47.375.760,- (99,82%)
Keluaran :
Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas Operasional sebanyak 5 unit dan Tersedianya Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 2 dan 4 sebanyak 5 unit

7. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

- 1) Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
Alokasi Anggaran : Rp. 412.500.000,-
Realisasi : Rp. 412.500.000,- (100%)
Keluaran :
Terlaksananya fasilitasi kegiatan Pesparawi di Surabaya, Pesparani di Kupang dan MTQ di Alor.
- 2) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
Alokasi Anggaran : Rp. 1.387.031.400,-
Realisasi : Rp. 1.387.031.400,- (100%)
Keluaran :
Tersedianya bantuan Stimulan kepada masyarakat untuk sebanyak 82 KK, gereja sebanyak 54 buah dan masjid 1 buah.
- 3) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
Alokasi Anggaran : Rp. 662.468.750,-
Realisasi : Rp. 662.468.750,- (100%)
Keluaran :
Tersedianya bantuan mahasiswa Tugas Belajar Kedokteran sebanyak 3 orang, mahasiswa umum sebanyak 52 orang dan bantuan uang tunai kepada masyarakat sebanyak 26 Kepala Keluarga.



3.4 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN (YA/TIDAK)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
1	Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	100 %	Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat yang meliputi urusan kepemudaan dan olahraga,parawisata, pendidikan, kebudayaan,perpustakaan,kearsipan, Trantibun linmas	Masyarakat	100 %	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	YA



3.5 Permasalahan dan Solusi

Tidak Ada

3.6 Kebijakan Strategis Yang ditetapkan

Tidak Ada

3.7 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya

NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Terhadap kinerja daya serap Anggaran secara umum dinilai baik. Kedepan agar kualitas perencanaan lebih ditingkatkan lagi.	Realisasi Penyerapan anggaran baik	Tidak ada



c. **Bagian Hukum**

3.1. **Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Urusan Pemerintahan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Sabu Raijua dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.869.871.794,00** dan realisasi sebesar **Rp.751.501.794,00 (86,39)**. Adapun rincian anggaran dan realisasi program/kegiatan sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	317.217.394	294.828.394	92,94
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.844.000	38.844.000	100
	1) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38.844.000	38.844.000	100
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42.212.000	42.212.000	100
	1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.450.000	10.450.000	100
	2) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	31.762.000	31.762.000	100
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	190.739.394	168.350.394	88,26
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	450.000	450.000	100
	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.312.000	59.806.000	86,29
	3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.600.000	3.600.000	100
	4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.516.200	10.516.200	100
	5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.861.194	93.978.194	87,94
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.122.000	5.122.000	100
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	100
	2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.920.000	2.920.000	100
	3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.202.000	1.202.000	100
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.300.000	40.300.000	100



No	Program/Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.300.000	40.300.000	100
II	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	552.654.400	456.673.400	82,63
1.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	552.654.400	456.673.400	82,63
	1) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	213.348.000	159.500.000	74,76
	2) Fasilitasi Bantuan Hukum	209.460.000	167.327.000	79,88
	3) Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	129.846.400	129.846.400	100
	Jumlah	869.871.794	751.501.794	86,39

3.2. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Indikator	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Integritas Aparatur dalam Pelayanan Pemerintahan menuju Sabu Raijua Jujur	Persentase Produk Hukum Daerah yang dicapai	%	100	100	100

3.3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Alokasi Anggaran : Rp.38.844.000,-

Realisasi : Rp.38.844.000,- (100%)

Keluaran :

Terbayarnya jasa tenaga administrasi keuangan sebanyak 6 orang selama 12 bulan.

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya

Alokasi Anggaran : Rp.10.450.000,-

Realisasi : Rp.10.450.000,- (100%)



Keluaran :
Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya sebanyak 8 stel untuk pejabat Eselon III, IV dan Staf

2) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Alokasi Anggaran : Rp.31.762.000,-
Realisasi : Rp.31.762.000,- (100%)
Keluaran :

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan untuk 300 orang

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Alokasi : Rp.450.000,-
Anggaran
Realisasi : Rp.450.000,- (100%)
Keluaran :

Tersedianya komponen instalasi listrik sebanyak 1 paket

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi : Rp.69.312.000,-
Anggaran
Realisasi : Rp.59.806.000,- (86,29%)
Keluaran :

Tersedianya alat tulis kantor dan perlengkapan kantor sebanyak 37 Paket

3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Alokasi : Rp.3.600.000,-
Anggaran
Realisasi : Rp.3.600.000,- (100%)
Keluaran : Tersedianya makan dan minum rapat

Tersedianya makan dan minum rapat RANPERDA sebanyak 120 paket

4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Alokasi : Rp.10.516.200,-
Anggaran
Realisasi : Rp.10.516.200,- (100%)
Keluaran :

Tersedianya penggandaan sebanyak 18.254 Lembar, Jilid Dokumen LHKPN, DPPA, CALK, Berita Daerah, dan Lembaran Daerah

5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Alokasi : Rp.106.861.194,-
Anggaran
Realisasi : Rp.93.978.194,- (87,94%)
Keluaran :

Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi RANPERDA, Rakor Bidang Hukum dan Rapat Lengkap Pamong Praja daratan Sabu 5 Kecamatan



4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Alokasi : Rp.1.000.000,-

Anggaran

Realisasi : Rp.1.000.000,- (100%)

Keluaran : Tersedianya materai 10.000 sebanyak 100 lembar

2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi : Rp.2.920.000,-

Anggaran

Realisasi : Rp.2.920.000,- (100%)

Keluaran :

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor sebanyak 4 unit

2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Alokasi : Rp.1.202.000,-

Anggaran

Realisasi : Rp.1.202.000,- (100%)

Keluaran :

Tersedianya peralatan kebersihan kantor sebanyak 1 paket

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Alokasi : Rp.40.300.000,-

Anggaran

Realisasi : Rp.40.300.000,- (100%)

Keluaran :

Tersedianya Suku Cadang dan BBM Kendaraan Dinas /operasional Kantor sebanyak 3 unit

6. Fasilitas dan Koordinasi Hukum

1) Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah

Alokasi : Rp.213.348.000,-

Anggaran

Realisasi : Rp.159.500.000,- (74,76%)

Keluaran :

Tersedianya Dokumen rancangan peraturan perundang-undangan sebanyak 5 dokumen

2) Fasilitas Bantuan Hukum

Alokasi Anggaran : Rp.209.460.000,-

Realisasi : Rp.167.327.000,- (79,88%)

Keluaran :

Terlaksananya koordinasi kerja sama permasalahan hukum sebanyak 5 kasus

3) Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

Alokasi Anggaran : Rp.129.846.400,-

Realisasi : Rp.129.846.400,- (100%)



Keluaran :
Terlaksanyanya publikasi peraturan perundang-undangan sebanyak 1 dokumen



3.4. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN (YA/TIDAK)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	
1.	Meningkatnya Integritas Aparatur dalam Pelayanan Pemerintahan menuju Sabu Rajjua Jujur	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Terwujudnya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang Tepat Sasaran	Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	OPD	Jumlah Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	YA
					Fasilitasi Bantuan Hukum	OPD	Jumlah Koordinasi Kerjasama Permasalahan Hukum	YA
					Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	OPD	Jumlah Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	YA



3.5. Permasalahan dan Solusi

Tidak Ada

3.6. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Menerbitkan Keputusan Bupati	Keputusan Bupati Nomor 224/KEP/HK/2016 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Hukum Setda Kabupaten Sabu Raijua.	Untuk menjawab/ menyelesaikan persoalan keterlambatan perencanaan dan penerbitan produk hukum daerah.
2.	Pembentukan Panitia RANHAM	Keputusan Bupati Nomor 34/KEP/HK/2023 tentang Pembentukan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023	Penyelesaian persoalan HAM yang terjadi di Kabupaten Sabu Raijua.
3.	Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Tersedianya produk hukum berupa PERDA dan PERBUP secara on line (https://saburaijuakab.jdihn.go.id/backend/)

3.7. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya.

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Terhadap kinerja daya serap anggaran secara umum dinilai Cukup Baik. Ke depan agar kualitas perencanaan lebih ditingkatkan lagi	Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan OPD yang terkait dengan perencanaan anggaran	a. Terciptanya perencanaan efektif, efisien dan transparan; b. Pelaksanaan Program/ kegiatan serta penyerapan anggaran semakin baik.



d. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Sabu Raijua, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 469.625.950,-** dan realisasi sebesar **Rp447.287.433,- (95,24%)**. Adapun rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	208.847.950	201.646.233	96,55
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.484.000	26.880.000	91,17
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29.484.000	26.880.000	91,17
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.600.000	6.600.000	100
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	6.600.000	6.600.000	100
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	121.010.700	116.711.031	96,45
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.725.000	1.678.000	97,28
	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.114.000	20.114.000	100
	3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.760.000	9.420.000	80,10
	4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.565.700	7.555.600	99,87
	5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.846.000	77.943.431	97,62
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.873.250	7.614.000	96,71
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	2.865.000	95,50
	2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.030.000	1.910.000	94,09
	3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.843.250	2.839.000	99,85
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.880.000	43.841.202	99,91
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.880.000	43.841.202	99,91
II	Program Perekonomian dan Pembangunan	260.778.000	245.641.200	94,20
6.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	179.327.000	166.508.400	92,85
	1) Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	53.229.000	49.139.400	92,32
	2) Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	100.584.000	94.992.000	94,37



	3) Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	25.514.000	22.447.000	87,98
7.	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	81.451.000	79.132.800	97,15
	1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	55.832.000	53.582.000	95,97
	2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	25.619.000	25.550.800	99,73
Jumlah		469.625.950	447.287.433	95,24

3.2. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Arah Kebijakan	Program	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan inovasi, produktivitas dan daya saing daerah didukung SDM yang berkualitas dalam menunjang sektor pariwisata	Peningkatan pelaksanaan kebijakan dibidang perekonomian dan sumber daya alam	Menjamin ketercukupan pangan, air dan energi menuju SARAI CUKUP	- Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2	2	100
			- Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2	2	100
			- Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2	2	100
			- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	2	2	100
			- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2	2	100

3.3. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Alokasi Anggaran : Rp. 29.484.000,-
Realisasi : Rp. 26.880.000,- (91,17%)



Keluaran :

- Terbayarnya Honorarium Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan, Pengurus Barang Pengguna, Admin SIRUP selama 12 Bulan

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Alokasi Anggaran : Rp. 6.600.000,-

Realisasi : Rp. 6.600.000,- (100%)

Keluaran :

Tersedianya Pakaian Dinas Harian untuk ASN sebanyak 6 stel selama 12 bulan

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 1.725.000

Realisasi : Rp. 1.678.000,- (97,28%)

Keluaran :

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan sebanyak 2 jenis selama 12 bulan

- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 20.114.000,-

Realisasi : Rp. 20.114.000,- (100%)

Keluaran :

Tersedianya 21 jenis Alat Tulis Kantor selama 12 bulan

- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 11.760.000,-

Realisasi : Rp. 9.420.000,- (80,10%)

Keluaran :

Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat/Lembur sebanyak 314 kotak selama 12 bulan

- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Alokasi Anggaran : Rp. 7.565.700,-

Realisasi : Rp. 7.555.600,- (100%)

Keluaran :

Tersedianya Dokumen Cetak Kantor sebanyak 150 buku dan Dokumen Kantor yang digandakan sebanyak 17.719 lembar

- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Alokasi Anggaran : Rp. 79.846.000,-

Realisasi : Rp. 77.943.000,- (97,62%)

Keluaran :

- Terlaksananya Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 7 Kegiatan: Bidang Perekonomian, Konsultasi & Koordinasi terkait BBM di PT Pertamina, Rapat *Capacity Building* TPID, Rapat Evaluasi TPID, Rapat Koordinasi & Evaluasi Kinerja TPAKD, Rapat Koordinasi & Konsultasi Pembangunan SPBU 1 Harga, dan Rapat Koordinasi GNPIP selama 12 bulan



- Terlaksananya Perjalanan Dinas Musyawarah Perencanaan Pembangunan sebanyak 2 Kegiatan selama 12 bulan

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Alokasi Anggaran : Rp. 3.000.000

Realisasi : Rp. 2.865.000,- (95,50%)

Keluaran :

- Tersedianya Materai sebanyak 220 lembar selama 12 bulan;
- Tersedianya Paket/Dokumen yang dikirim sebanyak 20 paket selama 12 bulan

2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 2.030.000,-

Realisasi : Rp. 1.910.000,- (94,09%)

Keluaran :

Terbayarnya jasa servis: Printer 1 unit, AC 1 unit, Laptop 1 Unit

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 2.843.250,-

Realisasi : Rp. 2.839.000,- (99,85%)

Keluaran :

- Tersedianya Alat Kebersihan sebanyak 5 jenis selama 12 bulan
- Tersedianya Bahan Kebersihan sebanyak 4 jenis selama 12 bulan

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Alokasi Anggaran : Rp. 43.880.000,-

Realisasi : Rp. 43.841.202,- (99,91%)

Keluaran :

Terbayarnya jasa servis, bahan bakar, pajak dan perizinan untuk kendaraan dinas operasional roda empat 1 unit dan roda dua 3 unit selama 12 bulan.

6. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

1) Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

Alokasi Anggaran : Rp. 53.229.000,-

Realisasi : Rp. 49.139.400,- (92,32%)

Keluaran :

- Tersedianya Laporan yang dicetak sebanyak 8 buku dan laporan/dokumen yang digandakan sebanyak 636 lembar selama 12 bulan;
- Tersedianya makan minum rapat sebanyak 30 kotak selama 12 bulan;
- Terbayarnya honorarium tim & sekretariat pelaksana kegiatan untuk 12 orang selama 12 bulan;
- Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam kota – PD Raihawa sebanyak 1 kegiatan selama 12 bulan.



- 2) Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
 Alokasi Anggaran : Rp. 100.584.000,-
 Realisasi : Rp. 94.922.000,- (94,37%)
 Keluaran :
- Tersedianya makan & minum rapat BBM sebanyak 143 kotak selama 12 bulan;
 - Terbayarnya Honorarium Tim & Sekretariat Pelaksana Kegiatan untuk 10 orang selama 12 bulan;
 - Terlaksananya Perjalanan Dinas Biasa – BBM sebanyak 1 kegiatan dan Perjalanan Dinas Dalam Kota – BBM sebanyak 2 kegiatan selama 12 bulan;
- 3) Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
 Alokasi Anggaran : Rp. 25.514.000,-
 Realisasi : Rp. 22.447.000,- (87,98%)
 Keluaran :
- Tersedianya makan minum rapat – TPAKD sebanyak 30 kotak selama 1 tahun;
 - Terlaksananya Perjalanan Dinas Biasa – KUR, Umi sebanyak 1 kegiatan dan Perjalanan Dina Dalam Kota - KUR, Umi sebanyak 2 kegiatan selama 12 bulan.

7. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

- 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
 Alokasi Anggaran : Rp. 55.832.000,-
 Realisasi : Rp. 53.582.000,- (95,97%)
 Keluaran :
- Tersedianya laporan yang dicetak sebanyak 30 buku dan laporan produktivitas yang digandakan sebanyak 13.360 lembar selama 12 bulan;
 - Tersedianya makan minum rakor TPID dan pengamanan produk unggulan sebanyak 172 kotak selama 12 bulan;
 - Terbayarnya honorarium tim & sekretariat pelaksana kegiatan untuk 10 orang selama 12 bulan;
 - Terlaksananya Perjalanan Dinas Biasa – Koordinasi & Konsultasi SDA sebanyak 2 kegiatan dan Perjalanan Dinas Dalam Kota – Produktivitas Produk Unggulan sebanyak 3 kegiatan selama 12 bulan.
- 2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
 Alokasi Anggaran : Rp. 25.619.000,-
 Realisasi : Rp. 25.550.800,- (99,73%)
 Keluaran :
- Tersedianya dokumen/laporan yang dicetak sebanyak 40 buku dan dokumen/laporan yang digandakan sebanyak 5.850 lembar selama 12 bulan;
 - Terlaksananya Perjalanan Dinas Biasa – Bidang Pertambangan sebanyak 2 kegiatan dan Perjalanan Dinas Dalam Kota – Bidang Pertambangan sebanyak 2 kegiatan dalam 12 bulan.



3.4. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
1	Menjamin kecukupan pangan, air, dan energi menuju SARAI CUKUP	Program peningkatan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam	Terwujudnya pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam	Persentase pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BMD dan BLUD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BMD dan BLUD	Persentase pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BMD dan BLUD	Ya
					Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase pelaksanaan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Ya
					Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Persentase pelaksanaan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Ya



					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Ya
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Persentase pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Ya



3.5. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada

3.6. Kebijakan Strategi yang ditetapkan

Tidak ada

3.7. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun sebelumnya

Tidak ada



e. **Bagian Administrasi Pembangunan**

3.1 **Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Urusan Pemerintahan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Sabu Raijua, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 921.467.900,-** dan realisasi sebesar **Rp. 909.412.939,- (98,69%)**. Adapun rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut:

NO	Program/Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	243.478.900	236.821.680	97,27
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.770.000	16.755.000	99,91
	1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.770.000	16.755.000	99,91
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.610.000	37.644.000	97,50
	1) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38.610.000	37.644.000	97,50
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.550.000	11.550.000	100
	1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	11.550.000	11.550.000	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	123.521.150	119.388.200	96,65
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.156.250	2.150.000	99,71
	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.334.900	33.312.000	99,93
	3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.720.000	9.720.000	100,00
	4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.000.000	5.352.400	89,21
	5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.310.000	68.853.800	95,22
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.147.750	9.099.750	99,48
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	3.952.000	98,80
	2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.150.000	2.150.000	100,00
	3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.997.750	2.997.750	100,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.880.000	42.384.730	96,59
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.880.000	42.384.730	96,59
II	Program Perekonomian dan Pembangunan	677.989.000	672.592.009	99,20



NO	Program/Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
7	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	82.560.000	82.300.000	99,69
	1) Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	82.560.000	82.300.000	99,69
8	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	595.429.000	590.292.009	99,14
	1) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	366.034.000	360.972.097	98,62
	2) Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	229.395.000	229.319.912	99,97
		921.467.900	909.413.689	98,69

3.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Arah Kebijakan	Program	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Diarahkan pada peningkatan kualitas pelaksanaan evaluasi dan pengendalian administrasi pembangunan Daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Terwujudnya kualitas evaluasi dan system pengendalian administrasi pembangunan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Ketersediaan data evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan prog/ kegiatan perangkat daerah per triwulan	100	100	100
Diarahkan pada peningkatan kapasitas komponen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Program Perekonomian dan Pembangunan	Terwujudnya kualitas evaluasi dan system pengendalian administrasi pembangunan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Presentase pelaksanaan pengadaan barang/ jasa sesuai standar dan kriteria yang berlaku	100	100	100

3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Alokasi Anggaran : Rp. 16.770.000,-
Realisasi : Rp. 16.755.000,- (99.91%)



Keluaran :
Tersedianya Laporan Capaian Realisasi SKPD Kabupaten Sabu Raijua Periode Tahun 2023 per Triwulan, Semester, dan Tahunan sebanyak 7 Dokumen

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Alokasi Anggaran : Rp. 38.610.000,-

Realisasi : Rp. 37.644.000,- (97.50%)

Keluaran :

Terbayarnya Tenaga administrasi keuangan sebanyak 5 orang (PA dan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengurus dan Penyimpan Barang, PPTK, PPKEU dan Admin Sirup selama 12 Bulan

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Alokasi Anggaran : Rp. 11.550.000,-

Realisasi : Rp. 11.550.000,- (100%)

Keluaran :

Tersedianya Pakaian Dinas sebanyak 9 stel terdiri dari Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk Eselon IV dan Staf, dan Pakaian Sipil Resmi (PSR) untuk Eselon III

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 2.156.250,-

Realisasi : Rp. 2.150.000,- (99.71%)

Keluaran :

Tersedianya komponen listrik sebanyak 4 Jenis

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 33.334.900,-

Realisasi : Rp. 33.312.000,- (99.93%)

Keluaran :

Tersedianya alat tulis kantor dan peralatan kantor sebanyak 40 Jenis.

3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 9.720.000,-

Realisasi : Rp. 9.720.000,- (100%)

Keluaran :

Tersedianya makan Lembur dan minuman penambah daya tahan tubuh sebanyak 432 Paket

4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Alokasi Anggaran : Rp. 6.000.000,-

Realisasi : Rp. 5.352.400,- (89.21%)

Keluaran :

Tersedianya penggandaan sebanyak 28.000 Lembar dan Jilid dokumen DPA, DPPA, Renja, CALK serta Dokumen kantor lainnya

5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Alokasi Anggaran : Rp. 72.310.000,-

Realisasi : Rp. 68.853.800,- (95.22%)



Keluaran :
Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi sebanyak 8 kegiatan terkait Penyusunan, Evaluasi dan Pengantaran Dokumen APBD.

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Alokasi Anggaran : Rp. 4.000.000,-
Realisasi : Rp. 3.952.000,- (98,80%)
Keluaran : Tersedianya Materai sebanyak 400 Lembar

2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp 2.150.000,-
Realisasi : Rp. 2.150.000,- (100%)
Keluaran :

Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki sebanyak 3 Jenis

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 2.997.750.000,-
Realisasi : Rp. 2.997.000,- (99,97%)
Keluaran :

Tersedianya peralatan kebersihan kantor sebanyak 12 Jenis

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Alokasi Anggaran : Rp. 43.880.000,-
Realisasi : Rp. 42.384.730,- (96,59%)
Keluaran :

Tersedianya Belanja Suku Cadang kendaraan dinas yang diperbaharui perizinannya dan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala
Sebanyak 4 Unit

7. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

1) Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Alokasi Anggaran : Rp. 82.560.000,-
Realisasi : Rp. 82.300.000,- (99,69%)
Keluaran :

Tersedianya laporan pelaksanaan pembangunan yang tersusun sebanyak 7 dokumen

8. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

1) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Alokasi Anggaran : Rp. 366.034.000,-
Realisasi : Rp. 360.972.097,- (98,62%)
Keluaran :

Tersedianya Dokumen hasil pengadaan barang dan jasa sebanyak 7 dokumen



- 2) Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
Alokasi Anggaran : Rp. 229.395.000,-
Realisasi : Rp. 229.319.912,- (99,97%)
Keluaran :
Tersedianya Dokumen hasil pengadaan barang dan jasa sebanyak 7 dokumen



3.4 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
1	Menjamin Ketercukupan Pangan,Air dan Energi Menuju SARAI CUKUP	Perekonomian dan Pembangunan	Terwujudnya penayangan SIRUP	Persentase Penayangan SIRUP	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa	Tersedianya dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Ya



3.5 Permasalahan dan Solusi Permasalahan :

Tidak ada

3.6 Kebijakan Strategi yang ditetapkan

Tidak Ada

3.7 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun sebelumnya

Tidak Ada



f. **Bagian Umum Setda Kabupaten Sabu Raijua**

3.1 **Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Urusan Pemerintahan di Kabupaten Sabu Raijua yang dilaksanakan oleh Bagian Umum Setda Kabupaten Sabu Raijua, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 21.500.689.434,-** dan realisasi sebesar **Rp. 19.624.917.593,- (91,28%)**. Adapun rincian anggaran dan realisasi program/kegiatan sebagai berikut :

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)
<i>I.</i>	<i>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	21.500.689.434	19.624.917.593	91,28
1	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.951.807.161 7.855.059.161	6.685.408.734 6.590.832.734	84,07 83,91
	2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	96.748.000	94.576.000	97,75
2	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 1) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	72.750.000 42.750.000	72.750.000 42.750.000	100 100
	2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	30.000.000	100
3	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.899.486.375 30.000.000	1.759.165.295 28.956.000	92,61 96,52
	2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	212.066.475	205.605.100	96,95
	3) penyediaan bahan logistik	9.000.000	9.000.000	100
	4) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	44.974.900	39.042.400	86,81
	5) Fasilitasi kunjungan tamu	557.091.000	494.500.590	88,76
	6) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1.046.354.000	982.061.205	93,86
4	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1) Penyediaan jasa surat menyurat	7.086.681.120 9.400.000	6.814.043.463 7.820.000	96,15 83,19
	2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	670.667.860	615.211.713	91,73
	3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	23.710.000	16.967.000	71,56
	4) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	6.382.903.260	6.174.044.750	96,73



5	PEMELIHARAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.145.773.430	1.112.209.736	97,07
	1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	75.780.000	75.086.446	99,08
	2) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	907.361.000	890.691.290	98,16
	3) Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	99.999.930	95.891.000	95,89
	4) Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	62.632.500	50.541.000	80,69
6	ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	1.927.578.848	1.806.239.385	93,71
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	477.000.848	472.591.256	99,08
	2) Penyediaan pakian dinas dan atribut kelengkapan KDH/ WKDH	29.250.000	29.250.000	100,00
	3) Pelaksanaan medical check up KDH/ WKDH	30.000.000	13.615.000	45,38
	4) Penyediaan dana penunjang operasional KDH/ WKDH	1.391.328.000	1.290.783.129	92,77
7	FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH	1.416.612.500	1.375.100.980	97,07
	1) Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga KDH	685.816.750	665.471.750	97,03
	2) Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga WKDH	643.795.750	622.629.230	96,71
	3) Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat daerah	87.000.000	87.000.000	100,00
TOTAL		21.500.689.434	19.624.917.593	91,28



3.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Arah Kebijakan	Program	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH	Meningkatnya integritas aparatur dalam pelayanan pemerintahan menuju SARAI JUJUR	Tersedianya fasilitas penunjang rumah tangga Kepala Daerah	6 Kegiatan	6 Kegiatan	97,03 %
			Tersedianya fasilitas penunjang rumah tangga Wakil Kepala Daerah	6 Kegiatan	6 Kegiatan	96,71 %
			Tersedianya fasilitas penunjang rumah tangga Sekretaris Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %

3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. Administrasi keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Alokasi Anggaran : Rp. 7.855.059.161,-
Realisasi : Rp. 6.590.832.734,- (83,91%)
Keluaran :
Terbayarnya Gaji dan Tunjangan serta TPP 74 ASN selama 12 bulan
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Alokasi Anggaran : Rp. 96.748.000,-
Realisasi : Rp. 94.576.000,- (97,75%)
Keluaran :
Terbayarnya Jasa Administrasi Keuangan 8 ASN 12 bulan

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Alokasi Anggaran : Rp. 42.750.000,-
Realisasi : Rp. 42.750.000,- (100%)
Keluaran :
Tersedianya pakaian dinas dan PKL 29 stel
- 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Alokasi Anggaran : Rp. 30.000.000,-
Realisasi : Rp. 30.000.000,- (100%)
Keluaran :
Terbayarnya iuran APKASI selama 1 Tahun



3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 30.000.000,-
Realisasi : Rp. 28.956.000,- (96,52%)
Keluaran :
Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 20 jenis
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 212.066.475,-
Realisasi : Rp. 205.605.100,- (96,95%)
Keluaran :
Tersedianya perlengkapan dan ATK yang disediakan 74 jenis, Belanja Modal Tablet sebanyak 1 Unit, Belanja Modal Mimbar/Podium sebanyak 1 Unit, Belanja Modal Peralatan Studio Audio sebanyak 10 Unit
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 9.000.000,-
Realisasi : Rp. 9.000.000,- (100%)
Keluaran :
Tersedianya makan minum / logistik yang disediakan 300 dos
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Alokasi Anggaran : Rp. 44.974.900,-
Realisasi : Rp. 39.042.400,- (86,81%)
Keluaran :
Tersedianya barang cetak dan penggandaan yang disediakan 4 jenis
- 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu
Alokasi Anggaran : Rp. 557.091.000,-
Realisasi : Rp. 494.500.590,- (88,76%)
Keluaran :
Tersedianya souvenir, transportasi, akomodasi dan makan minum tamu pemda 4 jenis
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Alokasi Anggaran : Rp. 1.046.354.000,-
Realisasi : Rp. 982.061.205,- (93,86%)
Keluaran :
Tersedianya kegiatan koordinasi dan konsultasi 2 kegiatan

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Alokasi Anggaran : Rp. 9.400.000,-
Realisasi : Rp. 7.820.000,- (83,19%)
Keluaran :
Tersedia materai sebanyak : 740 Lembar dan paket pengiriman sebanyak 4 kali;
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Alokasi Anggaran : Rp. 670.667.860,-
Realisasi : Rp. 615.211.713,- (91,73%)



- Keluaran :
- Tersedianya jasa telepon internet 4 ruangan selama 12 Bulan;
 - Tersedianya jasa listrik kantor Bupati , Penerangan jalan umum dan Rumah jabatan Sekda selama 12 Bulan;
 - Pelayanan air bersih untuk kantor Bupati dan rumah jabatan selama 12 Bulan.
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Alokasi Anggaran : Rp. 23.710.000,-
 Realisasi : Rp. 16.967.000,- (71,56%)
 Keluaran :
 Belanja service/ pemeliharaan rutin berkala peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 Bulan
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 Alokasi Anggaran : Rp. 6.382.903.260,-
 Realisasi : Rp. 6.174.044.750,- (96,73%)
 Keluaran :
 ➤ Tersedianya Bahan Habis Pakai 9 jenis
 ➤ Terbayarnya Jasa Tenaga Administrasi :Tenaga Sekretaris Pimpinan 5 orang, Tenaga Ahli Staf Khusus Kepala Daerah 3 orang, Tenaga Keamanan dan Sopir, Sopir Pimpinan 5 orang, Ajudan Pimpinan 4 orang, kebersihan 410 orang selama 12 bulan

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 Alokasi Anggaran : Rp. 75.780.000,-
 Realisasi : Rp. 75.086.446,- (99,08%)
 Keluaran :
 ✓ Tersedianya Pajak kendaraan dinas jabatan, Servis, Suku Cadang dan BBM kendaraan dinas jabatan roda 4 2 unit
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 Alokasi Anggaran : Rp. 907.361.000,-
 Realisasi : Rp. 890.691.290,- (98,16%)
 Keluaran :
 Tersedianya Jasa Pemeliharaan :
 ✓ Servis, Suku Cadang dan BBM kendaraan dinas operasional Double Gardan 4 unit
 ✓ Servis, Suku Cadang dan BBM kendaraan dinas operasional roda 4 12 unit
 ✓ Servis, Suku Cadang dan BBM kendaraan dinas operasional roda 4 Pejabat 4 unit
 ✓ Servis, Suku Cadang dan BBM kendaraan dinas operasional roda dua 15 unit
 ✓ Pajak kendaraan roda 2 dan roda empat = 55 Unit
 ✓ Servis, Suku Cadang dan BBM dan Pelumas untuk Genzet Kantor,



- Genzet Rumah Jabatan = 3 unit Genzet
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Alokasi Anggaran : Rp. 99.999.930,-
 - Realisasi : Rp. 95.891.000,- (95,89%)
 - Keluaran :
 - Tersedianya bahan bangunan pemeliharaan Teras Kantor, Toilet Kantor, Atap dan Dinding Kantor Bupati dan Jasa Pemeliharaannya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Alokasi Anggaran : Rp. 62.632.500,-
 - Realisasi : Rp. 50.541.000,- (80,69%)
 - Keluaran :
 - Tersedianya bahan bangunan pemeliharaan dapur, teras belakang Bangunan Gedung Rumah Jabatan Bupati dan dapur Bangunan Gedung Rumah Jabatan Wakil Bupati serta Jasa Pemeliharaannya = 2 Unit Rumah Jabatan
- 6. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Alokasi Anggaran : Rp. 477.000.848,-
 - Realisasi : Rp. 472.591.256,- (99,08%)
 - Keluaran :
 - Terbayarnya Gaji dan Tunjangan serta Tunjangan Operasional Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua = 2 Pejabat Negara
 - 2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Alokasi Anggaran : Rp. 29.250.000,-
 - Realisasi : Rp. 29.250.000,- (100,00%)
 - Keluaran :
 - Tersedianya pakaian dinas dan atribut kelengkapannya untuk Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua = 9 Stel
 - 2) Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Alokasi Anggaran : Rp. 30.000.000,-
 - Realisasi : Rp. 13.615.000,- (45,38%)
 - Keluaran : Tersedianya Pelayanan Medical Chek Up untuk KDH/WKDH
 - 3) Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Alokasi Anggaran : Rp. 1.391.328.000,-
 - Realisasi : Rp. 1.290.783.129,- (92,77%)
 - Keluaran :
 - Tersedianya krans bunga ucapan turut berduka sebanyak 75 buah, iklan ucapan selamat, ucapan turut berduka pada media cetak dan media elektronik, perjalanan dinas untuk Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya, perjalanan dinas dalam kota.



7. Fasilitas Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah

1) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah

Alokasi Anggaran : Rp. 685.816.750,-

Realisasi : Rp. 665.471.750,- (97,03%)

Keluaran :

Terfasilitasinya kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah berupa Alat listrik rumah jabatan : 4 jenis, Alat kebersihan dan bahan pembersih : 10 jenis, Telpon dan Internet untuk Rumah Jabatan Bupati, Biaya Voucher Telepon Bupati, Listrik Rumah Jabatan Bupati, Makan Minum Rumah Jabatan Bupati, Belanja barang modal rumah jabatan : Tenda, Bedset, Meja Kerja Pejabat, Kursi Kerja Pejabat, Peralatan Studio Audio selama 12 bulan

2) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah

Alokasi Anggaran : Rp. 643.795.750,-

Realisasi : Rp. 622.629.230,- (96,71%)

Keluaran :

Tersedianya Alat listrik rumah jabatan : kabel, bola lampu, saklar, terminal; Alat kebersihan dan bahan pembersih : Tisu, sapu, alat pel, bahan pembersih, Pengharum ruangan, ember, tempat sampah; Biaya rekening Telpon dan Internet untuk Rujab Wakil Bupati, Biaya Voucher Telepon Wakil Bupati, Biaya Rekening Listrik Rujab Wakil Bupati, Biaya Makan Minum Rujab Wakil Bupati selama 12 bulan; Belanja barang modal rumah jabatan : Tenda, Bedset, Meja Kerja Pejabat, Kursi Kerja Pejabat, Peralatan Studio Audio.

3) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

Alokasi Anggaran : Rp. 87.000.000,-

Realisasi : Rp. 87.000.000,- (100%)

Keluaran :

Terbayarnta Sewa Rumah Jabatan Sekretaris daerah selama 12 bulan



3.4 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	PROGRAM				KEGIATAN			
	SASARAN STRATEGI	URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENYESUAIAN(YA/TIDAK)
1	Meningkatnya integritas aparatur dalam pelayanan pemerintahan menuju SARAI JUJUR		Pengembangan integritas aparatur dalam pelayanan pemerintahan menuju SARAI JUJUR	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Meningkatnya Pelayanan KDH	Ya
				Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Meningkatnya Pelayanan KDH	Ya
				Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Meningkatnya Pelayanan Sekda	Ya



3.5 Permasalahan dan Solusi

➤ Permasalahan :

- ❖ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, realisasinya 71,56 % disebabkan karena tingkat kerusakan Peralatan dan Perlengkapan cukup berat sehingga kalau pun diperbaiki tidak maksimal dalam pemanfaatannya lagi dan kedepannya diusulkan untuk pengadaan yang baru.
- ❖ Kegiatan administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sub kegiatan Pelayanan Medical Chek Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Realisasinya 45,38 % disebabkan karena tingkat kesibukan Kepala Daerah sehingga tidak dapat melakukan pemeriksaan secara lengkap pada Rumah Sakit Umum yang telah ditentukan.

➤ Solusi :

- ❖ Agar lebih cermat dalam penyusunan anggaran
- ❖ Penyesuaian jadwal kegiatan KDH/WKDH dalam pelaksanaan tugas
- ❖ Belanja medical check up tetap dianggarkan dan perlu dijadwalkan secara baik sehingga KDH/WKDH dan keluarga dapat melakukan medical check up pada Rumah Sakit Umum yang telah ditentukan.

3.6 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Tidak ada

3.7 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tidak ada



g. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintah di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Sabu Raijua, dengan Alokasi anggaran sebesar **Rp.644.348.800,-** dan Realisasi sebesar **Rp. 635.435.607,-** (98,62%) adapun rincian anggaran dan realisasi program/kegiatan sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	644.348.800	635.435.607	98,62
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.444.000	38.969.000	98,80
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39.444.000	38.969.000	98,80
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.450.000	10.450.000	100
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.450.000	10.450.000	100
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	230.473.300	223.816.382	97,11
	1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.359.500,-	22.350.000	99,96
	2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.750.000	3.750.000	100
	3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.799.800	6.799.800	100
	4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	197.564.000	190.916.582	96,64
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.951.500	1.940.000	99,41
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	990.000	99,00
	2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	951.500	950.000	99,84
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.300.000	40.280.225	99,95
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.300.000	40.280.225	99,95
6.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	321.730.000	319.980.000	99,45
	1) Fasilitasi Keprotokolan	24.130.000	23.980.000	99,38
	2) Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	297.600.000	296.000.000	99,46
	Jumlah	644.348.800	635.435.607	98,62

3.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Capaian
Meningkatnya Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Adanya Survei Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	%	100 %	100%



3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Alokasi Anggaran : Rp. 39.444.000,-,-

Realisasi : Rp. 38.969.000,- (98,80%)

Keluaran :

terbayarnya Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel melalui Pembayaran Honor Pengguna Anggaran, Honor Bendahara, Honor Pengurus dan Penyimpan Barang, Honor PPTK, Honor Pejabat Pengadaan, dan Honor Admin Sirup sebanyak 7 orang selama 12 bulan.

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Alokasi Anggaran : Rp. 10.450.000,-

Realisasi : Rp. 10.450.000,- (100%)

Keluaran :

Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya melalui Belanja Pakaian Dinas Harian 8 Stel.

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 22.359.500,-

Realisasi : Rp. 22.350.000,- (99,96%)

Keluaran :

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan sebanyak 29 Paket guna menunjang pelaksanaan pekerjaan.

- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 3.750.000,-

Realisasi : Rp. 3.750.000,- (100%)

Keluaran :

Tersedianya Makan dan Minum untuk ASN dan Tenaga Kontrak sebanyak 250 Paket.

- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Alokasi Anggaran : Rp. 6.799.800

Realisasi : Rp. 6.799.800,- (100%)

Keluaran :

Tersedianya dokumen kantor melalui belanja cetak jilid DPA dan DPPA, RKA dan RKAP, Cetak Undangan Upacara HUT RI dan fotocopy administrasi perkantoran lainnya sebanyak 14.016 Lembar dan 55 Buku.

- 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Alokasi Anggaran : Rp. 197.564.000,-

Realisasi : Rp. 190.916.582,- (96,64%)



Keluaran :
Terlaksananya dan sinkronisasi program melalui perjalanan dinas di 6 Kecamatan Se Kabupaten Sabu Raijua dalam rangka mengikuti Musrenbang Tingkat Kecamatan; Tugas Kehumasan dan Keprotokolan pada Kegiatan Bupati Sabu Raijua; dan Tugas Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan dalam Propinsi (Kupang) dan Luar Propinsi (Jakarta) sebanyak 6 Kegiatan.

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Alokasi Anggaran : Rp. 1.000.000,-

Realisasi : Rp. 990.000,- (99%)

Keluaran :

Tersedianya administrasi perkantoran yang efektif dan efisien melalui belanja materai 10.000 sebanyak 100 Lembar.

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 951.500,-

Realisasi : Rp. 950.000,- (99,84%)

Keluaran :

Tersedianay peralatan kebersihan kantor sebanyak 7 Paket.

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Da

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Alokasi Anggaran : Rp. 40.300.000,-

Realisasi : Rp. 40.280.225,- (99,95%)

Keluaran :

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional melalui service kendaraan roda dua 3 unit dan roda empat 1 unit, penggantian suku cadang, belanja BBM dan pembayaran pajak kendaraan selama 12 bulan.

6. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

1) Fasilitasi Keprotokolan

Alokasi Anggaran : Rp. 24.130.000,-

Realisasi : Rp. 23.980.000,- (99,38%)

Keluaran :

Terlaksananya Tugas Kehumasan dan Keprotokolan pada Kegiatan Bupati Sabu Raijua dan Wakil Bupati Sabu Raijua di Daratan Sabu dan Raijua sebanyak 1 Kegiatan.

2) Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

Alokasi Anggaran : Rp. 297.600.000,-

Realisasi : Rp. 296.000.000,- (99,46%)

Keluaran :

Terfasilitasinya Pemuatan Berita di Mas Media 32 Berita dan Berlanggan Koran Harian Timor Express selama 12 Bulan dan Harian Victory News selama 4 Bulan.



3.4 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN (Ya/Tidak)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
1	Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan public dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Program Peningkatan pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terwujudnya Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Tersedianya Publikasi Berita daerah dan Adventorial Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Publikasi, Dokumentasi, Iklan dan Adventorial Pembangunan Daerah Melalui Mas Media Penyediaan Informasi Publik Pembangunan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Publikasi dan Adventorial Pembangunan Daerah Melalui Media Masaa Penyediaan Informasi Publik Pembangunan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya Publikasi Berita Daerah dan Adventorial Pembangunan Daerah Tersedianya Pemuatan Berita – Berita Pemda Sabu Raijua 	Ya



3.5 Permasalahan dan Solusi

Tidak Ada.

3.6 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Tidak ada

3.7 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Terhadap kinerja daya serap anggaran secara umum dinilai Sangat Baik. Ke depan agar kualitas perencanaan dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi;	Dalam hal kinerja daya serap anggaran, akan tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi kedepannya untuk lebih baik lagi	Terselesaikannya masalah daya serap anggaran



h. Bagian Organisasi

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sabu Raijua, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 550.055.970,-** dan realisasi sebesar **Rp. 541.630.439,- (98,47%)**.

Adapun rincian anggaran dan sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	550.055.970	541.630.439	98,47
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40.680.000	39.975.000	98,27
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40.680.000	39.975.000	98,27
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.550.000	11.550.000	100,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	11.550.000	11.550.000	100,00
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	110.668.920	107.933.021	97,53
	1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.196.920	39.784.000	94,28
	2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000.000	6.000.000	100,00
	3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.950.000	4.923.000	99,45
	4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.522.000	57.226.021	99,49
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.210.000	9.210.000	99,35
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	4.992.000	99,84
	2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.460.000	1.460.000	100,00
	3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.810.250	2.758.000	98,14
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.300.000	40.272.268	99,93
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.300.000	40.272.268	99,93
6.	Penataan Organisasi	337.586.800	332.690.150	98,55
	1) Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	99.283.900	98.749.200	99,46
	2) Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	88.588.900	88.462.560	99,86
	3) Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	149.714.000	145.478.390	97,17
Jumlah		550.055.970	541.630.439	98,47



3.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Arah Kebijakan	Program	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Diarahkan pada Peningkatan kualitas pelaksanaan evaluasi dan pengendalian	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Meningkatkan Integritas Aparatur Dalam Pelayanan Pemerintah menuju Sarai Jujur	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	B (Baik/Tinggi)	CC (Cukup)	CC (Cukup)

3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Alokasi Anggaran : Rp. 40.680.000,-

Realisasi : Rp. 39.975.000,- (98,27%)

Keluaran :

Terbayarkannya Honorarium yang terdiri dari : PA dan bendahara pengeluaran, PPTK, PPKeu, Barang/Jasa dan Pengelolaan BMD selama 12 bulan.

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Alokasi Anggaran : Rp. 11.550.000,-

Realisasi : Rp. 11.550.000,- (100%)

Keluaran :

Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Pakaian Sipil Resmi (PSR) untuk eselon III, IV dan staf.

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 42.196.920,-

Realisasi : Rp. 39.784.000,- (94,28%)

Keluaran :

Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor 22 Jenis

2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 6.000.000,-

Realisasi : Rp. 6.000.000,- (100%)

Keluaran :

Tersedianya Bahan Logistik Kantor untuk 10 orang

3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Alokasi Anggaran : Rp. 4.950.000,-

Realisasi : Rp. 4.923.000,- (99,45%)



Keluaran :
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan berupa Jilid 30 Buku dan Penggandaan 15.000 Lembar

4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Alokasi Anggaran : Rp. 57.522.000,-

Realisasi : Rp. 57.226.021,- (99,49%)

Keluaran :

Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dalam daerah maupun luar daerah sebanyak 6 Kegiatan terdiri dari: Rakor Bidang Organisasi, Rakor Evaluasi Pelayanan Publik, Rakor Tingkat Nasional Bidang Organisasi, dan Evaluasi Anjab dan ABK di Daratan Sabu dan Raijua

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Alokasi Anggaran : Rp. 5.000.000,-

Realisasi : Rp. 4.992.000,- (99,84%)

Keluaran :

Tersedianya Materai 10.000 (500 Lembar)

2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 1.460.000,-

Realisasi : Rp. 1.460.000,- (100%)

Keluaran :

Tersedianya Jasa Service Laptop 2 Unit

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 2.810.250,-

Realisasi : Rp. 2.758.000,- (98,14%)

Keluaran :

Tersedianya bahan pembersih dan peralatan kebersihan 14 jenis

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Alokasi Anggaran : Rp. 40.300.000,-

Realisasi : Rp. 40.272.268,- (99,93%)

Keluaran :

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala 3 unit (2 kendaraan roda dua dan 1 kendaraan dinas roda empat)

6. Penataan Organisasi

1) Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Alokasi : Rp. 99.283.900,-

Anggaran

Realisasi : Rp. 98.749.200,- (99,46%)

Keluaran :

Tersedianya dokumen Evaluasi Kelembagaan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (3 Dokumen)



- 2) Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 Alokasi : Rp. 88.588.900,-
 Anggaran
 Realisasi : Rp. 88.462.560,- (99,86%)
 Keluaran :
 Terlaksananya Kegiatan dan Pelaporan hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata laksana (7 Kegiatan dan 1 Laporan)
- 3) Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
 Alokasi : Rp. 149.714.000,-
 Anggaran
 Realisasi : Rp. 145.478.390,- (97,17%)
 Keluaran :
 Tersedianya dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi sebanyak (3 Dokumen).

3.4 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN (YA/TIDAK)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
1	Meningkatkan Integritas Aparatur dalam Pelayanan Pemerintah Menuju Sarai Jujur	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Penataan Organisasi	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran Yang Berkualitas	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tersedianya Dokumen LKIP, PK dan RKT	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	YA

3.5 Permasalahan dan Solusi

➤ Permasalahan :

Dalam Upaya peningkatan Nilai Evaluasi SAKIP dengan target mendapatkan Nilai B atau terkategori Baik/Tinggi sesuai target RPJMD dan Renstra_PD untuk tahun 2023, belum mencapai target sebagaimana diharapkan.

Beberapa hal yang menjadi penyebab belum tercapainya target sesuai dengan hasil evaluasi adalah :

1. Perencanaan Kinerja

Terdapat ketidakselarasan kinerja pada perencanaan jangka menengah (5 Tahunan) dengan perencanaan jangka pendek (tahunan) yang mengakibatkan capaian kinerja yang dihasilkan belum tergambar dengan baik.

2. Pengukuran Kinerja

- Terdapat indikator kinerja utama yang belum seluruhnya disertai dengan formulasi dan definisi operasional, baik di Level pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.



- Hasil pengukuran kinerja setiap triwulan belum disampaikan di dalam esr.menpan.go.id sehingga belum ada bukti bahwa tindak lanjut telah dilakukan.

3. Pelaporan Kinerja

- Terdapat laporan tentang efisiensi sumber daya belum dijelaskan secara rinci.

Terdapat target pada dokumen PK yang lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya.

➤ **Solusi :**

1. Perencanaan Kinerja

Dalam perencanaan kinerja yang dituangkan kedalam perjanjian Kinerja (PK) setiap tahunnya, akan dicermati kembali keselarasan kinerja pada dokumen perencanaan jangka menengah (5 Tahunan) dengan perencanaan jangka pendek (tahunan).

2. Pengukuran Kinerja

- Dalam Laporan Pengukuran Kinerja, setiap indikator kinerja utama akan disertai dengan formulasi dan definisi operasional, baik di Level pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah.
- Hasil pengukuran kinerja setiap triwulan akan disampaikan di dalam aplikasi esr.menpan.go.id.

3. Pelaporan Kinerja

- Penyusunan Laporan Kinerja akan disertakan dengan laporan tentang efisiensi sumber daya secara rinci.
- Target pada dokumen PK akan memperhatikan realisasi atau tidak lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya.

3.6 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Sabu Raijua dan Renstra Bagian Organisasi Tahun 2021-2026, diarahkan pada pencapaian Misi ke-3 yaitu : Meningkatkan kualitas layanan publik yang profesional dan mewujudkan birokrasi yang bersih, efisien, efektif dan akuntabel, yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dan birokrasi, dengan Sasaran utama : “Meningkatnya Integritas Apratur dalam pelayanan Pemerintahan Menuju SARAI JUJUR”

Kebijakan Strategi yang ditetapkan adalah :

1. Menciptakan dan memperluas kawasan berintegritas dan perilaku birokrasi yang bersih dan bebas dari KKN;
2. Meningkatkan budaya kerja yang disiplin, bertanggungjawab dan berkinerja;
Penataan regulasi daerah.



3.7 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya

Tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya sebagai berikut:

No	Rekomendasi DPRD Tahun (2022)	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Terhadap kinerja daya serap anggaran secara umum dinilai Baik. Ke depan agar kualitas perencanaan lebih ditingkatkan lagi.	Pembahasan program/kegiatan dimulai dari Tahapan penyusunan Ranwal Renja sampai dengan Asistensi RKA	Terwujudnya kualitas perencanaan yang lebih baik pada Bagian Organisasi



2. PENGAWASAN

i. INSPEKTORAT DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 3.051.666.046,-** dan realisasi sebesar **Rp. 2.570.519.844,- (84,23%)**. Adapun rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut:

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kabupaten	2.418.210.046	2.142.149.404	88,58
1.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.872.039.829	1.679.327.347	89,71
	1) Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.798.627.829	1.608.515.347	89,43
	2) Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	73.412.000	70.812.000	96,46
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	163.018.762	145.039.803	88,97
	1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25.400.000	24.200.000	95,28
	2) Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	36.195.000	30.717.000	84,87
	3) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	101.423.762	90.122.803	88,86
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	267.196.655	207.219.160	77,55
	1) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.407.500	1.590.000	66,04
	2) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.954.155	58.332.000	83,39
	3) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.400.000	12.530.000	87,01
	4) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.005.000	10.998.400	99,94
	5) Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169.430.000	123.768.760	73,05
4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.294.800	7.546.000	81,19
	1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	3.992.000	99,80
	2) Sub Kegiatan Penyediaan	5.294.800	3.554.000	67,12



	Jasa Pelayanan Umum Kantor			
5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	106.660.000	103.016.717	96,58
	1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94.920.000	92.221.717	97,16
	2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Laptop, printer, ac)	11.740.000	10.795.000	91,95
II.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	465.911.000	295.833.300	63,50
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	310.911.000	183.433.300	59,00
	1) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	7.855.000	6.345.000	80,78
	2) Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	16.070.000	6345.000	39,48
	3) Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	30.420.000	23.340.000	76,73
	4) Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	155.800.000	121.400.000	77,92
	5) Sub Kegiatan Pengawasan Dana Desa	12.690.000	12.690.000	100
	6) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	88.076.000	13.313.300	15,12
2.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	155.000.000	112.400.000	72,52
	Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	154.890.000	112.400.000	72,57
III.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	167.545.000	132.537.517	79,11
1.	Pendampingan dan Asistensi	167.545.000	132.537.517	79,11
	Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	167.545.000	132.537.517	79,11
	JUMLAH	3.051.666.046	2.570.519.844	84,23

3.2 Capaian Kinerja Program sesuai target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.



Arah Kebijakan	Program	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
"Meningkatkan kualitas layanan publik yang profesional dan mewujudkan birokrasi yang bersih, efisien, efektif dan akuntabel"	Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya Integritas Aparatur dalam pelayanan pemerintahan menuju Sarai Jujur	1. Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan	100 %	100 %	100 %
			2. Cakupan perangkat daerah yang di audit	100 %	100 %	100 %
			3. Meningkatnya perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	100 %	100 %	100 %

3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Alokasi Anggaran : Rp. 73.412.000,-

Realisasi : Rp. 70.812.000,- (96,46%)

Keluaran :

Terbayarnya Honorarium Pengelolah Keuangan sebanyak 7 orang yang terdiri dari: Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan, Jasa Pengelolaan BMD selama 12 bulan

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Alokasi Anggaran : Rp. 25.400.000,-

Realisasi : Rp. 24.200.000,- (95,28%)

Keluaran :

Tersedianya Pakaia Dinas untuk Es. II 1 orang, Es. III 4 orang, Es. IV dan Staf 10 orang : 16 Stel

- 2) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Alokasi Anggaran : Rp. 36.195.000,-

Realisasi : Rp. 30.717.000,- (84,87%)

Keluaran :

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan serta makan minum sosialisasi, Cetak Spanduk 5 lembar (4 M2); Penggandaan 8.250 Lembar dan Makan Minum Sosialisasi (Makan : 250 org; Snack 250 org); Perjalanan Dinas Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di daratan Sabu : 20 org.

- 3) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Alokasi Anggaran : Rp. 101.423.762,-



Realisasi : Rp. 90.122.803,- (88,86%)

Keluaran :

Tersedianya Belanja Bimbingan Teknis : Kontribusi Bimtek : 4 org, Diklat
Penjenjangan Auditor Ahli Muda : 4 org.

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Alokasi Anggaran Rp. 2.407.500,-

Realisasi Rp. 1.590.000,- (66,04%)

Keluaran

Tersedianya Alat/Bahan Alat Listrik : Bateray : 6 pak; jek listrik : 5 pcs;
Kabel NYM 2x2,5mm² : 41 Meter; klem kabel : 2 dos; lackban kabel besar :
2 pcs; Lampu TL, 2x36 watt grille : 2 bh; tang potong kabel : 1 pcs;terminal
3 colokan : 1 bh dan terminal 6 colokan : 4 bh

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 69.954.155,-

Realisasi : Rp. 58.332.000,- (83,39%)

Keluaran :

Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor 45 Jenis

3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 14.400.000,-

Realisasi : Rp. 12.530.000,- (87,01%)

Keluaran :

Tersedianya Bahan Logistik Kantor

4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Alokasi Anggaran : Rp. 11.005.000,-

Realisasi : Rp. 10.998.400,- (99,94%)

Keluaran :

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan berupa : Jilid 59 buku dan
Penggandaan 16.100 Lembar

5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Alokasi Anggaran : Rp. 169.430.000,-

Realisasi : Rp. 123.768.760,- (73,05%)

Keluaran :

Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi 6 Kegiatan : Asistensi
Ranperda APBD, Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan,
Penerimaan LHP dari BPK RI Provinsi NTT, Data LKPD di BPKP RI
Perwakilan Prov. NTT, Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
(Musrenbangcam) di Daratan Sabu Dan Raijua.

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Alokasi Anggaran : Rp. 4.000.000,-

Realisasi : Rp. 3.992.000,- (99,80%)

Keluaran :

Tersedianya Materai 350 Lembar

2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Alokasi Anggaran Rp. 5.294.800,-

Realisasi Rp. 3.554.000,- (67,12%)



Keluaran

Tersedianya Peralatan kebersihan Kantor : 17 Jenis

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Alokasi Anggaran : Rp. 94.920.000,-
Realisasi : Rp. 92.221.717,- (97,16%)
Keluaran :
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala
Kendaraan Roda 4 : 2 unit
Kendaraan Roda 2 : 7 unit
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Laptop, Printer, AC)
Alokasi Anggaran : Rp. 11.740.000,-
Realisasi : Rp. 10.795.000,- (91,95%)
Keluaran :
Terpeliharanya Laptop, Printer dan AC secara rutin/berkala
Laptop : 5 unit; Printer : 3 unit dan AC : 2 unit

6. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- 1) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Alokasi Anggaran : Rp. 7.855.000,-
Realisasi : Rp. 6.345.000,- (80,78%)
Keluaran :
Terlaksananya Audit Pemeriksaan Serentak triwulan I pada 39 OPD dan 6 (enam) Kecamatan se-Kabupaten Sabu Raijua.
- 2) Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
Alokasi Anggaran : Rp. 16.070.000,-
Realisasi : Rp. 6.345.000,- (39,48%)
Keluaran :
Terlaksananya Audit Operasional pada SMP Negeri 2 Sabu Barat; Audit Kinerja pada Puskesmas Daieko dan Pengawasan Pengadaan CPNSD 2023
- 3) Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja
Alokasi Anggaran : Rp. 30.420.000,-
Realisasi : Rp. 23.340.000,- (76,73%)
Keluaran :
Terlaksananya Reviu LAKIP, LPPD dan LKPJ Pemda Kabupaten Sabu Raijua TA. 2023 dan Reviu Paket Pekerjaan Strategis.
- 4) Kegiatan Reviu Laporan Keuangan
Alokasi Anggaran : Rp. 155.800.000,-
Realisasi : Rp. 121.400.000,- (77,92%)
Keluaran :
Terlaksananya : Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pertanian, DAK Fisik bidang Air Minum dan Sanitasi, DAK Fisik Jalan, DAK Fisik Bidang Kelautan/bidang transportasi, DAK Fisik bidang Kesehatan, DAK Fisik bidang Pendidikan, DAK Fisik bidang Perumahan dan Permukiman, DAK Fisik Bidang Rujukan RSUD, KUA PPAS & KUA PPASP, dan LKPD



Pemda TA. 2021; Reviu Pengadaan Barang/Jasa; Reviu Penyerapan Anggaran PBJ Pemda; Reviu RKPD & RKDP.

5) Kegiatan Pengawasan Desa

Alokasi Anggaran : Rp. 12.690.000,-
Realisasi : Rp. 12.690.000,- (100 %)
Keluaran :

Terlaksananya Audit Pengawasan Desa di Desa Roboaba dan Desa Daieko

6) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Alokasi Anggaran : Rp. 88.076.000,-
Realisasi : Rp. 13.313.300,- (15,12%)
Keluaran :

Terlaksananya kegiatan monitoring tindak lanjut hasil temuan Inspektorat Kabupaten Sabu Raijua antara lain : Monitoring tindak lanjut di Desa Roboaba dan Dinas PKKO Kabupaten Sabu Raijua.

7. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

1) Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Alokasi Anggaran : Rp. 154.890.000,-
Realisasi : Rp. 112.400.000,- (72,57%)
Keluaran :

Terlaksananya Audit Dengan Tujuan Tertentu atas permintaan Pimpinan terhadap Beras Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang rusak akibat Badai Seroja Tahun 2021 milik Dinas Sosial Provinsi NTT yang ada pada Gudang Dinsos Kabupaten Sabu Raijua; Audit atas pelaksanaan vaksinasi Covid-19 periode s.d Pebruari 2023; Pemeriksaan Serentak pada 39 OPD dan 6 (enam) Kecamatan; Audit Tujuan Tertentu pada Dinas PMPTSP, Perindag Kabupaten Sabu Raijua terkait Pengelolaan Keuangan pada TA. 2022 dan Audit Tujuan Tertentu di Desa Peddaro. Sedangkan Audit Khusus atas Permintaan APH yaitu Kejaksaan Negeri Sabu Raijua dan Kepolisian yaitu : Audit Khusus pada Desa Dainao; Desa Waduwalla; Desa Halapadji; Desa Deme dan SD GMIT Raedewa

8. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

1) Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Alokasi Anggaran : Rp. 167.545.000,-
Realisasi : Rp. 132.537.517,- (79,11%)
Keluaran :

Terlaksananya kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) di 6 (enam) Kecamatan dan Terlaksananya Kegiatan Pemutakhiran Data TLHP pada Inspektorat Provinsi NTT untuk Semester I dan Semester II di Kupang.



3.4 Analisa Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Profram yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program	Program			Kegiatan			Kese suaian (Ya/ Tidak)
		Uraian Program	Target Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Uraian Program	Target Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	
	Meningkatnya Integritas Aparatur dalam Pelayanan Pemerintahan Menuju Sarai Jujur	Program Penyelenggara-an Pengawasan	100%	1. Prosentase Tindak lanjut hasil pemeriksaan	Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemda; Pengawasan Keuangan ; Reviu Laporan Kinerja ; Reviu Laporan Keuangan; Pengawasan Desa; Monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan TL hasil pemeriksaan APIP serta Pengawasan Internal	100%	Untuk mencapai prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan melakukan kegiatan pengawasan internal (66 laporan) antara lain : - Laporan pengawasan kinerja Pemda (3 laporan) - Laporan Pengawasan keuangan Pemda (6 laporan) - Laporan hasil reviu laporan kinerja (4 laporan) - Laporan hasil reviu laporan keuangan (31 laporan) - Laporan hasil pengawasan desa (6 laporan) - Jumlah hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP (10 dokumen)	Ya
				2. Cakupan Perangkat Daerah yang di Audit	Penyelesaian kerugian negara; Laporan hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100%	Untuk melaksanakan Audit ditetapkan dalam program kerja pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat TA. 2023	Ya
				3. Meningkatnya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Jumlah monitoring Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemda, Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar dan Operasi Penindakan di Daratan Raijua	100%	Untuk meningkatnya perumusan kebijakan pendampingan asistensi dapat dicapai lewat 3 (tiga) kegiatan Tim Monitoring Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemda, Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar dan Operasi Penindakan di daratan Raijua	Ya



3.5 Permasalahan dan Solusi

➤ Permasalahan

- ✚ Adanya Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya Auditor dan juga Tenaga Administrasi;
- ✚ Terdapat beberapa penugasan oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTT terkait Audit Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Covid-19 periode s/d Pebruari 2023; Reviu PAPBJ Triwulan III dan IV; Adanya Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Kejaksaan Negeri Sabu Raijua pada Desa Matei.

➤ Solusi

Mengusulkan untuk melakukan penambahan atau rekrutmen terhadap Tenaga Pemeriksa (Auditor) dan juga Tenaga Administrasi.

3.6 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua untuk mencapai sasaran. Strategi yang dilakukan yaitu :

- a. Pengembangan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis resiko;
- b. Pemetaan SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
- c. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana lewat inventarisasi barang (RKBMD).

3.7 Tindak Lanjut Rekomendasi

Tindak Ada



m. Sekretariat DPRD

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 23.149.331.370.** dan realisasi sebesar **Rp. 21.631.266.407 (93,44 %)** yang digambarkan dalam Tabel 1 dibawah ini sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.699.114.370	11.943.174.863	94,08
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.300.000	1.450.000	23,02
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.300.000	1.450.000	23,02
	2) Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.007.979.122	1.751.252.339	87,24
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.789.055.122	1.538.046.339	85,97
	2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	218.924.000	213.206.000	97,39
	3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	130.012.000	103.871.054	79,92
	1) Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut kelengkapannya	26.100.000	26.100.000	100
	2) Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	103.912.000	77.771.054	74,84
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	325.559.465	320.178.390	98,35
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	11.750.000	11.507.000	97,93
	2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	79.752.500	79.718.000	99,96
	3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.996.000	1.460.000	16,28
	4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	0	0
	5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.489.800	8.486.400	99,96
	6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225.892.000	143.219.758	63,40
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	219.982.750	178.941.435	81,34
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	4.992.000	99,84
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	204.600.000	163.585.435	79,95



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
6.	3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.382.750	10.364.000	99,82
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	585.740.000	528.372.772	90,21
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	253.460.000	234.282.317	92,43
	2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	308.080.000	283.490.455	92,02
	3) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	24.200.000	10.600.000	43,80
7.	4) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Kantor lainnya	-	-	-
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	7.700.938.474	7.536.485.605	97,86
	1) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	7.348.036.074	7.261.030.973	98,82
	2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	152.010.400	132.378.000	87,08
8.	3) Pelaksanaan Midical Check-up DPRD	200.892.000	143.076.632	71,22
	Layanan Administrasi DPRD	1.713.281.724	7.536.485.605	93,30
	1) Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	505.461.000	435.030.000	86,07
II.	2) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.207.820.724	1.163.380.500	96,32
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	10.450.217.000	72.750.000	0,70
1.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	426.991.000	72.750.000	17,04
	1) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	426.991.000	72.72.750.000	17,04
2.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	150.650.000	52.270.000	34,70
	1) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	30.130.000	8.100.000	26,88
	2) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	30.130.000	11.850.000	39,33
	3) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	30.130.000	8.840.000	29,34
	4) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	30.130.000	13.010.000	43,18
	5) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	30.130.000	10.470.000	34,75
3.	Peningkatan Kapasitas DPRD	6.497.128.000	6.376.204.251	98,14



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
	1) Orientasi DPRD	6.047.128.000	5.941.204.251	98,25
	2) Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	300.000.000	285.000.000	95
	3) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	150.000.000	150.000.000	100
4.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.066.840.000	2.899.670.000	94,55
	1) Kunjungan Kerja dalam Daerah	325.200.000	199.690.000	61,41
	2) Pelaksanaan Reses	2.741.640.000	2.699.980.000	98,48
5.	Fasilitasi Tugas DPRD	308.608.000	287.197.293	93,06
	1) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	308.608.000	287.197.293	93,06
Jumlah		23.149.331.370	21.631.266.407	93,44

3.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran	Uraian Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kepada Legislatif	Persentase Hearing/dialog dan koordinasi anggota DPRD dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Kali	13	12	99
		Jumlah rapat komisi, badan anggaran, badan musyawarah, panitia khusus, badan kehormatan, Bapem Perda, rapat pimpinan, dengan masyarakat dan rapat gabungan komisi	Kali	24	24	100

3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Alokasi Anggaran : Rp. 6.300.000,-

Realisasi : Rp. 1.450.000,-(23,02%)

Keluaran :

Terlaksananya kegiatan Lembur PNS : Lembur Penyusunan RKA, RKAP, Laporan LAKIP, Laporan LKPJ, Laporan CALK, Penyelenggaraan Sidang DPRD selama 12 bulan

- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Alokasi Anggaran : -

Realisasi : -



Keluaran : -

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
Alokasi Anggaran : Rp. 1.789.055.122,-
Realisasi : Rp. 1.538.046.339,- (85,97%)
Keluaran
Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 15 orang ASN selama 12 bulan
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Alokasi Anggaran : Rp. 218.924.000,-
Realisasi : Rp. 213.206.000,- (97,39%)
Keluaran :
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam Provinsi dan luar Provinsi sebanyak 6 kali
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Alokasi Anggaran : Rp. 0,-
Realisasi : Rp. 0,- (0%)
Keluaran : -

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Alokasi Anggaran : Rp. 26.100.000,-
Realisasi : Rp. 26.100.000,- (100%)
Keluaran :
Tersedianya Pakaian Dinas : PSL, PDH, dan PSR beserta atribut kelengkapannya untuk 15 orang ASN selama 12 bulan.
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Alokasi Anggaran : Rp. 103.912.000,-
Realisasi : Rp. 77.771.054,- (74,84%)
Keluaran : -
Terlaksananya Kegiatan Asdeski 3 orang 1 kali selama 12 bulan

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 11.750.000,-
Realisasi : Rp. 11.507.000,- (97,93%)
Keluaran :
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor berupa : Isolasi 10 buah, Jek Listrik 6 buah, Kabel NYM 3x2,5 mm² 100 M, Klem kabel 20 dos, lampu TL 2 x 18 watt grille 12 buah, Terminal 6 colokan 10 buah, senter cas besar 3 buah dan baterai 20 pak selama 12 bulan,
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 79.752.500,-
Realisasi : Rp. 79.718.000,- (99,96%)
Keluaran :
Tersedianya Alat Tulis Kantor selama 12 bulan dan 1 unit Personal Computer (PC) HP 280 Pro G4 Small Form Factor PC selama 12 bulan.



- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Alokasi Anggaran : Rp. 8.996.000,-
Realisasi : Rp. 1.460.000,- (16,23%)
Keluaran :
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga berupa Kain meja Tamu + bunga meja + tempat tissue 2 paket, Blender 2 buah dan kompor 3 tungku 1 buah selama 12 bulan
- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 0,-
Realisasi : Rp. 0,- (0%)
Keluaran : -
- 5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Alokasi Anggaran : Rp. 8.489.800,-
Realisasi : Rp. 8.486.400,- (99,96%)
Keluaran :
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan berupa fotocopy 50.000 lembar dan Cetak Baliho 2 kegiatan ukuran 18 M2 selama 12 bulan
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Alokasi Anggaran : Rp. 0,-
Realisasi : Rp. 0,- (0%)
Keluaran :
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Alokasi Anggaran : Rp. 225.892.000,-
Realisasi : Rp. 143.219.758,- (63,40%)
Keluaran :
Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah baik di Jakarta maupun di Kupang untuk 15 orang ASN selama 12 bulan.

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Alokasi Anggaran : Rp. 5.000.000,-
Realisasi : Rp. 4.992.000,- (99,84%)
Keluaran :
Tersedianya Bahan untuk Kegiatan Kantor berupa benda Pos materai 10.000 496 Lembar selama 12 bulan
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Alokasi Anggaran : Rp. 204.600.000,-
Realisasi : Rp. 163.585.435,- (79,95%)
Keluaran :
Terbayarnya jasa pembuatan website PMPTSP dan Video promosi penanaman modal 1 unit, jasa pemasangan CCTV 8 unit, software aplikasi E-Aspirasi 1 paket, pulsa telepon 3 pimpinan DPRD, Air Tengki, pulsa listrik kantor daya 6600 KWH, langganan indihome selama 12 bulan
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 10.382.750,-
Realisasi : Rp. 10.364.000,- (99,82%)
Keluaran :
Tersedianya Alat kebersihan kantor berupa : kanebo, kemoceng, pembersih lantai, pengharum ruangan, sabun cair, sapu ijuk, sapu lidi, tempat sampah, Tissue, clin pembersih kaca, ember cuci tangan, ember nomor 16, gayung timba, keset besar, selama 12 bulan



6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Alokasi Anggaran : Rp. 253.460.000,-
Realisasi : Rp. 234.282.317,- (92,43%)
Keluaran :
Terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional Pimpinan DPRD roda 4 sebanyak 3 unit, terpeliharanya kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD roda 4 sebanyak 3 unit, terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional Sekretariat DPRD roda 4 sebanyak 3 unit, terpeliharanya kendaraan Dinas Sekwan roda 4 sebanyak 1 unit dan terbayarnya pajak kendaraan Dinas sebanyak 16 unit selama 12 bulan
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Alokasi Anggaran : Rp. 308.080.000,-
Realisasi : Rp. 283.490.455,- (92,02%)
Keluaran :
Terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional roda 4 sebanyak 4 unit, terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 2 sebanyak 12 unit, dan terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas selama 12 bulan
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Alokasi Anggaran : Rp. -
Realisasi : Rp. -
Keluaran :
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Alokasi Anggaran : Rp. 24.200.000,-
Realisasi : Rp. 10.600.000,- 43,80%)
Keluaran :
Terpeliharanya peralatan kantor berupa ; service printer 10 unit, service AC 15 unit, keyboard laptop Ect Logitech 2 buah, PC/Notebook 11 unit selama 12 bulan.

7. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD.

- 1) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
Alokasi Anggaran : Rp. 7.348.036.074,-
Realisasi : Rp. 7.261.030.973,- (98,82%)
Keluaran :
Terbayarnya Gaji dan Tunjangan 3 Pimpinan dan 17 Anggota DPRD serta Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD yaitu Tunjangan Badan Kehormatan, Komisi 1, 2, 3, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Tunjangan Transportasi 17 Anggota DPRD dan belanja penunjang operasional 3 Pimpinan DPRD selama 12 bulan.
- 2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
Alokasi Anggaran : Rp. 152.010.400,-
Realisasi : Rp. 132.378.000,- (87,08%)



Keluaran :

Tersedianya Pakaian Dinas dan atribut DPRD sebanyak 20 orang berupa : PDH lengan panjang 20 stel, PSH 20 stel selama 12 bulan.

8. Layanan Administrasi DPRD.

1) Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

Alokasi Anggaran : Rp. 505.461.000,-

Realisasi : Rp. 435.030.000,- (86,07%)

Keluaran :

Tersedianya makanan dan minuman rapat untuk kegiatan rapat Badan Anggaran, rapat Badan Kehormatan, rapat Badan Legislasi Daerah, rapat Badan Musyawarah, Rapat Fraksi, Rapat Gabungan, Rapat Komisi, Rapat Panitia Khusus, rapat Paripurna Istimewa, Rapat Pimpinan, rapat Pleno, Sidang I, II, III dan Pembukaan dan Penutupan Sidang selama 12 bulan.

2) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

Alokasi Anggaran : Rp. 1.207.820.724,-

Realisasi : Rp. 1.163.380.500,- (96,32%)

Keluaran :

Tersedianya kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD berupa : makanan dan minuman jamuan Tamu untuk 3 unit rumah jabatan Pimpinan DPRD, belanja listrik 2500 KWH untuk 3 unit rumah jabatan dan air tanki untuk 3 unit Rumah Jabatan, selama 12 bulan.

9. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD.

1) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah

Alokasi Anggaran : Rp. 426.991.000,-

Realisasi : Rp. 72.750.000,- (17,04%)

Keluaran :

Terlaksananya kegiatan Assesment dan uji publik pembentukan peraturan Daerah dan peraturan DPRD selama 12 bulan.

10. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan.

1) Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum

Alokasi Anggaran : Rp. 30.130.000,-

Realisasi : Rp. 8.100.000,- (26,88%)

Keluaran :

Terlaksananya kegiatan hearing /dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh masyarakat/Tokoh Agama di Bidang Pemerintahan dan Hukum sebanyak 1 kali selama 12 Bulan.

2) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur

Alokasi Anggaran : Rp. 30.130.000,-

Realisasi : Rp. 11.850.000,- (39,33%)

Keluaran :

Terlaksananya kegiatan hearing /dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh masyarakat/Tokoh Agama di Bidang Infrastruktur sebanyak 1 kali selama 12 bulan.

3) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat

Alokasi Anggaran : Rp. 30.130.000,-

Realisasi : Rp. 8.840.000,- (29,34%)

Keluaran :

Terlaksananya kegiatan hearing /dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh masyarakat/Tokoh Agama di Bidang Kesejahteraan Rakyat



- 4) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
Alokasi Anggaran : Rp. 30.130.000,-
Realisasi : Rp. 13.010.000,- (43,18%)
Keluaran :
Terlaksananya kegiatan hearing /dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama di Bidang Perekonomian sebanyak 1 kali selama 12 bulan.
- 5) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
Alokasi Anggaran : Rp. 30.130.000,-
Realisasi : Rp. 10.470.000,- (34,75%)
Keluaran :
Terlaksananya kegiatan hearing /dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama di Bidang Sumber Daya Alam sebanyak 1 kali selama 12 bulan.
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Alokasi Anggaran : Rp. 0,-
Realisasi : Rp. 0,- (0%)
Keluaran : -
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Alokasi Anggaran : Rp. 0,-
Realisasi : Rp. 0,- (0%)
Keluaran : -

11. Peningkatan Kapasitas DPRD.

- 1) Orientasi DPRD
Alokasi Anggaran : Rp. 6.047.128.000,-
Realisasi : Rp. 5.941.204.251,- (98,25%)
Keluaran :
Terlaksananya kegiatan konsultasi dan koordinasi bidang tugas untuk meningkatkan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD baik ke Jakarta maupun ke Kupang sebanyak 30 kali selama 12 bulan
- 2) Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
Alokasi Anggaran : Rp. 300.000.000,-
Realisasi : Rp. 285.000.000,- (95%)
Keluaran :
Terbayarnya Honor Kelompok Tim Pakar/Tim Ahli alat kelengkapan DPRD sebanyak 10 orang selama 12 bulan
- 3) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
Alokasi Anggaran : Rp. 150.000.000,-
Realisasi : Rp. 150.000.000,- (100%)
Keluaran :
Terbayarnya Honor Tenaga Ahli Fraksi DPRD sebanyak 5 orang selama 12 bulan

12. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat.

- 1) Kunjungan Kerja dalam Daerah
Alokasi Anggaran : Rp. 325.200.000,-
Realisasi : Rp. 199.690.000,- (61,41%)



Keluaran :
Terlaksananya kegiatan kunjungan kerja DPRD di dalam Daerah di 6 Kecamatan se Kabupaten Sabu Raijua selama 12 bulan

2) Pelaksanaan Reses

Alokasi : Rp. 2.741.640.000,-

Anggaran

Realisasi : Rp. 2.699.980.000,- (98,48%)

Keluaran :

Terlaksananya kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat / RESES DPRD di 6 Kecamatan se Kabupaten Sabu Raijua berupa : belanja sewa gedung untuk kegiatan Reses, belanja makan minum untuk kegiatan Reses, biaya transportasi lokal untuk angkut masyarakat ke tempat Reses, dan biaya perjalanan Dinas dalam Daerah untuk 20 orang DPRD dan 15 orang ASN, 12 Tenaga Kontrak sebagai pendamping DPRD sebanyak 3 kali selama 12 bulan

13. Fasilitas Tugas DPRD.

1) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

Alokasi : Rp. 308.608.000,-

Anggaran

Realisasi : Rp. 287.197.293,- (93,06%)

Keluaran :

Terlaksananya kegiatan konsultasi dan Koordinasi tentang pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD ke Jakarta dan menghadiri undangan rapat-rapat di luar dan dalam Provinsi NTT selama 12



3.4 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN (YA/TIDAK)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
1	Meningkatnya integritas aparatur dalam pelayanan pemerintahan menuju Sarai Jujur	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Terlaksananya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Aspirasi Masyarakat dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang selaras dengan sasaran RPJMD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terbentuknya Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	YA
				Persentase layanan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang legislasi sesuai SOP	Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Kegiatan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan oleh DPRD	YA
					Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya peningkatan kapasitas DPRD	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas DPRD	YA
					Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase aspirasi Masyarakat dalam Pokok pikiran DPRD	YA
					Fasilitasi Tugas DPRD	Terfasilitasinya Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas DPRD	YA



3.5 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (23,02%)
Disebabkan oleh karena disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan Lembur.
2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi (74,84%)
Disebabkan oleh karena disesuaikan dengan undangan kegiatan Asdeksi dan ketersediaan waktu untuk mengikuti kegiatan.
3. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (16,23%)
Disebabkan oleh karena beberapa item belanja yang ada tidak tepat apabila dijadikan belanja modal sehingga tidak dibelanjakan.
4. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (63,40%)
Disebabkan oleh karena disesuaikan dengan kegiatan urusan Kesekretariatan
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (79,95%)
Disesuaikan dengan kebutuhan riil operasional.
6. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya (43,80%)
7. Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah (61,41%)
Karena Disesuaikan dengan jadwal dan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Solusi :

- 1) Akan disesuaikan dengan kegiatan yang telah direncanakan dan di anggarkan
- 2) Lebih cermat dalam membuat perencanaan sesuai dengan kebutuhan riil.
- 3) Lebih cermat dalam mengkomunikasikan perencanaan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD.

3.6 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

1. Melakukan Perencanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jadwal kegiatan DPRD.
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan anggaran yang disediakan.
3. Melakukan evaluasi secara berkala

3.7 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD

Tidak Ada



3. PERENCANAAN

j. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Sabu Raijua, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 3.371.612.370,-** dan realisasi sebesar **Rp. 3.260.290.810,- (96,70%)**. Adapun rincian anggaran dan realisasi program/kegiatan sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	694.821.870	654.478.455	94,19
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.640.000	67.333.000	99,55
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.904.000	43.645.000	99,41
	2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.736.000	23.688.000	99,80
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	130.522.000	103.333.846	79,17
	1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	26.400.000	26.400.000	100
	2) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20.692.000	7.897.000	38,16
	3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	83.430.000	69.036.846	82,75
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	337.190.870	329.723.780	97,79
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.125.000	5.122.000	99,94
	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.331.970	93.924.450	97,50
	3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.905.000	7.725.000	97,72
	4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.999.900	25.224.700	93,43
	5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.829.000	197.727.630	98,46
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.669.000	20.523.000	99,29
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	2.990.000	99,67
	2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.160.000	8.090.000	99,14
	3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.509.000	9.443.000	99,31



No	Program/Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.800.000	133.564.829	96,23
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	138.800.000	133.564.829	96,23
II.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.168.558.000	1.135.900.821	97,21
6.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	680.294.000	663.376.821	97,51
	1) Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	36.150.000	36.115.000	99,90
	2) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	107.164.000	102.685.649	95,82
	3) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	536.980.000	524.576.172	97,69
7.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	10.684.000	10.337.000	96,75
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	10.684.000	10.337.000	96,75
8.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	248.890.000	233.947.000	94,00
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	248.890.000	233.947.000	94,00
9.	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	228.690.000	228.240.000	99,80
	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	228.690.000	228.240.000	99,80
III.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.450.720.500	1.414.048.534	97,47
10.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	933.265.500	904.767.117	96,95
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	44.878.000	43.747.600	97,48



No	Program/Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
	1) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	57.200.000	56.760.000	99,23
	2) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	148.076.000	146.989.000	99,27
	3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	34.810.000	34.340.000	98,65
	4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	648.301.500	622.930.517	96,09
11.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	195.670.000	193.723.700	99,01
	1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	88.570.000	87.454.300	98,74
	2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	25.780.000	25.770.000	99,96
	3) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	60.640.000	59.859.400	98,71
	4) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	20.680.000	20.640.000	99,81
12.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	321.785.000	315.557.717	98,06
	1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	96.058.000	91.445.140	95,20



No	Program/Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
	2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	27.090.000	27.030.000	99,78
	3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	94.690.000	93.649.337	99,90
	4) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	76.857.000	76.593.240	99,66
	5) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	27.090.000	26.840.000	99,08
IV.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	23.626.000	23.611.000	99,94
13.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	23.626.000	23.611.000	99,94
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	23.626.000	23.611.000	99,94
V.	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	33.886.000	32.252.000	95,18
14.	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	33.886.000	32.252.000	95,18
	Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	33.886.000	32.252.000	95,18
Jumlah		3.371.612.370	3.260.290.810	96,70



3.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Arah Kebijakan	Program	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Diarahkan pada Peningkatan Kualitas dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perencanaan Pembangunan tingkat Provinsi dan Nasional	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah menuju SARAI TRANSPARAN	1.	Persentase Program RPJMD yang diintegrasikan ke Dalam RKPD	%	100 (127 Program)	94,49 (120 Program)	94,49
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		2.	Indeks Inovasi Daerah	Indeks/Skor	25	35,38	141,5
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		3.	Persentase Capaian Kinerja RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	100
			4.	Persentase Capaian Kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA	%	100	100	100
			5.	Persentase Capaian Kinerja RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	100	100



3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Alokasi : Rp. 43.904.000,-
Anggaran
Realisasi : Rp. 43.645.000,- (99,41 %)
Keluaran :
Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (2 Dokumen)
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Alokasi : Rp. 23.736.000,-
Anggaran
Realisasi : Rp. 23.688.000,- (99,80 %)
Keluaran :
Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (4 Laporan)

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Alokasi : Rp. 26.400.000,-
Anggaran
Realisasi : Rp. 26.400.000,- (100 %)
Keluaran :
Tersedianya Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (15 Paket)
- 2) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Alokasi : Rp. 20.692.000,-
Anggaran
Realisasi : Rp. 7.897.000,- (38,16 %)
Keluaran :
Terlaksananya rapat Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (3 orang)
- 3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Alokasi : Rp. 83.430.000,-
Anggaran
Realisasi : Rp. 69.036.846,- (82,75 %)
Capaian/Hasil :
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (5 ASN)

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Alokasi : Rp. 5.125.000,-
Anggaran
Realisasi : Rp. 5.122.000,- (99,94 %)
Keluaran :
Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (8 Paket)



- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 96.331.970,-
Realisasi : Rp. 93.924.450,- (97,50 %)
Keluaran :
Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (54 Paket)
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 7.905.000,-
Realisasi : Rp. 7.725.000,- (97,72 %)
Keluaran :
Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (357 Paket)
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Alokasi Anggaran : Rp. 26.999.900,-
Realisasi : Rp. 25.224.700,- (93,43 %)
Keluaran :
Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (2 Paket)
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Alokasi Anggaran : Rp. 200.829.000,-
Realisasi : Rp. 197.727.630,- (98,46 %)
Keluaran :
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (3 Laporan)
- 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Alokasi Anggaran : Rp. 3.000.000,-
Realisasi : Rp. 2.990.000,- (99,67 %)
Keluaran :
Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (300 Laporan)
 - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 8.160.000,-
Realisasi : Rp. 8.090.000,- (99,14 %)
Keluaran : -
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (1 Laporan)
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 9.509.000,-
Realisasi : Rp. 9.443.000,- (99,31 %)
Keluaran :
Tersedianya Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (1 Laporan)
- 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Alokasi Anggaran : Rp. 138.800.000,-
Realisasi : Rp. 133.564.829,- (96,23 %)



Keluaran :
Tersedianya jasa pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya (14 unit)

6. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

1) Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD

Alokasi Anggaran : Rp. 36.150.000,-

Realisasi : Rp. 36.115.000,- (99,90 %)

Keluaran :

Tersedianya Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (1 Berita Acara)

2) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Alokasi Anggaran : Rp. 107.164.000,-

Realisasi : Rp. 102.685.649,- (95,82 %)

Keluaran :

Tersedianya Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (1 Berita Acara)

3) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi Anggaran : Rp. 536.980.000,-

Realisasi : Rp. 524.576.172,- (97,69 %)

Keluaran :

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (3 Dokumen)

7. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

1) Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah

Alokasi Anggaran : Rp. 10.684.000,-

Realisasi : Rp. 10.337.000,- (96,75 %)

Keluaran :

Terlaksananya Pemanfaatan Data dan Informasi (5 Orang)

8. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

1) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Alokasi Anggaran : Rp. 248.890.000,-

Realisasi : Rp. 233.947.000,- (94 %)

Keluaran :

Terlaksananya Evaluasi dan penyusunan laporan Kinerja Pembangunan Daerah (1 Laporan)

9. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Bidang Pembangunan Daerah

1) Pengelolaan Data Dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

Alokasi Anggaran : Rp. 228.690.000,-

Realisasi : Rp. 228.240.000,- (99,80 %)



Keluaran :

Terlaksananya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang dikelola (2 Dokumen)

10. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

- 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Alokasi Anggaran : Rp. 44.878.000,-

Realisasi : Rp. 43.747.600,- (97,48 %)

Keluaran :

Terlaksananya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD) (2 Dokumen)

- 2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

Alokasi Anggaran : Rp. 57.200.000,-

Realisasi : Rp. 56.760.000,- (99,23 %)

Keluaran :

Terlaksananya Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (2 Laporan)

- 3) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Alokasi Anggaran : Rp. 148.076.000,-

Realisasi : Rp. 146.989.000,- (99,27 %)

Keluaran :

Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD) (3 Dokumen)

- 4) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Alokasi Anggaran : Rp. 34.810.000,-

Realisasi : Rp. 34.340.000,- (98,65 %)

Keluaran :

Terlaksananya Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (3 Laporan)

- 5) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Alokasi Anggaran : Rp. 648.301.500,-

Realisasi : Rp. 622.930.517,- (96,09 %)

Keluaran :

Terlaksananya Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (2 Laporan)



11. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

- 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Alokasi Anggaran : Rp. 88.570.000,-
Realisasi : Rp. 87.454.300,- (98,74 %)
Keluaran :
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD) (1 Dokumen)
- 2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Alokasi Anggaran : Rp. 25.780.000,-
Realisasi : Rp. 25.770.000,- (99,96 %)
Keluaran :
Terlaksananya Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (6 Laporan)
- 3) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Alokasi Anggaran : Rp. 60.640.000,-
Realisasi : Rp. 59.859.400,- (98,71 %)
Keluaran :
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD) (1 Dokumen)
- 4) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Alokasi Anggaran : Rp. 20.680.000,-
Realisasi : Rp. 20.640.000,- (99,81 %)
Keluaran :
Terlaksananya Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (6 Laporan)

12. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

- 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Alokasi Anggaran : Rp. 96.058.000,-
Realisasi : Rp. 91.445.140,- (95,20 %)
Keluaran :
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD) (1 Dokumen)
- 2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Alokasi Anggaran : Rp. 27.090.000,-
Realisasi : Rp. 27.030.000,- (99,78 %)



- Keluaran :
Terlaksananya Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (6 Laporan)
- 3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
Alokasi Anggaran : Rp. 94.690.000,-
Realisasi : Rp. 93.649.337,- (98,90 %)
Keluaran :
Terlaksananya Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (1 Laporan)
- 4) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Alokasi Anggaran : Rp. 76.857.000,-
Realisasi : Rp. 76.593.240,- (99,66 %)
Keluaran :
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD) (1 Dokumen)
- 5) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
Alokasi Anggaran : Rp. 27.090.000,-
Realisasi : Rp. 26.840.000,- (99,08 %)
Keluaran :
Terlaksananya Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (6 Laporan)
- 13. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**
- 1) Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
Alokasi Anggaran : Rp. 23.626.000,-
Realisasi : Rp. 23.611.000,- (99,94 %)
Keluaran :
Terlaksananya Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan baik (1 Laporan)
- 14. Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan**
- 1) Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan
Alokasi Anggaran : Rp. 33.886.000,-
Realisasi : Rp. 32.252.000,- (95,18 %)
Keluaran :
Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan (1 Laporan)



3.4 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN (YA/TIDAK)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Menuju SARAI TRANSPARAN	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Terwujudnya Kualitas Perencanaan	Presentase Program RPJMD yang diintegrasikan ke Dalam RKPD	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kegiatan Forum OPD, Musrenbang dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Berita Acara Forum OPD, Musrenbang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun	Ya
					Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan pembangunan Daerah	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Ya
					Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring , Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Ya
					Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah di	Ya



NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN (YA/TIDAK)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Daerah		Bidang Pembangunan Daerah yang dikelola	
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbang	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbang dan Peraturan yang Terkelola dengan baik	Ya
		Program Pengelolaan Perbatasan	Meningkatnya Koordinasi Pengelolaan Perbatasan	Meningkatnya koordinasi pengelolaan Perbatasan	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Kegiatan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Doumen Hasil Koordinasi , Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Ya
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kinerja RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Presentase Kinerja RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Presentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Ya



NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN (YAITIDAK)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Presentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA dengan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA	Ya
					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Presentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Ya

3.5 Permasalahan dan Solusi

Tidak ada

3.6 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Tidak ada



3.7 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

NO.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	<p>Pansus melihat sinergitas perencanaan Pembangunan masi belum maksimal dan masi rendah, hal ini sangat berpengaruh terhadap efektifitas anggaran dan penyelesaian program pelayanan kepada Masyarakat yang belum sepenuhnya tepat sasaran. Di sisi lain konektivitas dan sinergitas Program antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten masih kurang maksimal. Sebagai contoh, rencana pembangunan Bandara Eilode yang hingga kini terkatung-katung dan tak kunjung menemui titik terang. Untuk itu DPRD merekomendasikan agar Bupati Sabu Raijua menata ulang dan melakukan penajaman kembali berbagai kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan di Kabupaten Sabu Raijua. Memperkuat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sabu Raijua dengan menempatkan Sumber Daya Manusia yang handal</p>	<p>Terkait Catatan / Rekomendasi Pansus dapat kami sampaikan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Sinergitas perencanaan belum maksimal dan masih rendah sehingga berpengaruh terhadap efektifitas anggaran dan penyelesaian program pelayanan kepada Masyarakat yang belum sepenuhnya tepat sasaran' maka dapat kami sampaikan bahwa : dalam melaksanakan fungsi perencanaan Bappeda terus berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi, serta pemangku kepentingan (stakeholder) termasuk sektor swasta, masyarakat, dan atau organisasi non-pemerintah melalui berbagai kegiatan pertemuan/rapat dan pelaksanaan forum koordinasi / kolaborasi. Hal ini agar seluruh kebijakan yang dijabarkan melalui program dan kegiatan tetap selaras dan sesuai dengan kebijakan pemerintah Pusat dan Provinsi yang tertuang dalam dokumen RPJMN / RPJMD. Selain itu terkait dengan dokumen perencanaan daerah yang masih belum tuntas yang salah satu contoh rencana Pembangunan Bandara Eilode dapat kami sampaikan bahwa Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Surat Persetujuan Kelayakan Lokasi Bandar Udara Eilode dan saat ini sedang menunggu Penetapan Lokasi guna proses lebih lanjut. ❖ Dalam hal penentuan kebijakan pemerintah daerah khususnya dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan' dapat disampaikan bahwa pemerintah telah memperhatikan Arah Kebijakan yang tertuang dalam RPJMD yang 	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam penetapan Kebijakan Perencanaan Daerah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua melalui penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD,RPJMD dan RKPd) tetap memperhatikan dan mengacu pada Isu Strategis, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional / Provinsi yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional dan provinsi (RPJPD/RPJMN, RPJMN/RPJMD RKP/RKPD) sehingga dalam pengambilan kebijakan tetap selaras terhadap tujuan pembangunan. - Terkait Perencanaan Pembangunan Bandara Eilode dapat disampaikan bahwa Dokumen Study Kelayakan Bandara Eilode telah disetujui dan saat ini sementara menunggu Penetapan Lokasi dari Kementerian Perhubungan RI. - Melakukan Pelatihan / Bimbingan Teknis bagi ASN Perencana. Selain itu dengan terbatasnya ASN di Kabupaten Sabu Raijua, pemerintah setiap tahun melakukan optimalisasi kebutuhan personil melalui rencana kebutuhan ASN ke BKN dan juga Pemerintah melakukan penempatan CPNS / PPPK maupun mutasi /nota dinas secara bertahap sesuai kebutuhan dan ketersediaan ASN di Kabupaten Sabu Raijua.



NO.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		<p>disnergikan dengan Prioritas dan Tema Pembangunan Nasional maupun Provinsi Nusa Tenggara Timur serta isu strategis, sehingga kebijakan dan pelaksanaan program kegiatan telah disesuaikan dengan kondisi terkini.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pemerintah sependapat dengan rekomendasi DPRD bahwa perlu menempatkan Sumber Daya Manusia yang handal. Untuk itu dengan kondisi yang ada saat ini dimana masih terbatasnya kuantitas SDM khususnya SDM Perencana maka langkah yang diambil adalah dengan memaksimalkan ASN yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan pokok Bappeda serta melakukan Bimtek pendidikan dan pelatihan secara berkala. 	



4. KEUANGAN

k. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sabu Raijua

3.1 Program dan Kegiatan

Urusan pemerintahan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 yang dilaksanakan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sabu Raijua, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 124.139.776.582,-** dan realisasi sebesar **Rp. 105.019.173.657,- (84,60%)**. Adapun rincian anggaran dan realisasi program/kegiatan sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.588.641.779	3.748.938.753	81,70
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.875.577.489	3.222.724.265	83,15
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.470.015.489	2.834.917.265	81,70
	2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	405.562.000	387.807.000	95,62
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	170.016.000	59.094.569	34,76
	1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	47.850.000	47.850.000	100
	2) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	29.240.000	0	0
	3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	92.926.000	11.244.569	12,10
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	380.504.790	312.068.913	82,01
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.137.500	1.969.000	47,59
	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	160.454.290	146.884.000	91,54
	3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.500.000	37.910.000	93,60
	4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.125.000	9.968.400	75,95
	5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	162.288.000	115.337.513	71,07
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.483.500	28.850.500	83,66
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.180.000	6.061.000	74,10



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.200.000	0	0
	3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.750.000	15.642.500	88,13
	4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.353.500	7.147.000	97,19
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.060.000	126.200.506	98,55
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	128.060.000	126.200.506	98,55
II.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	118.230.966.006	100.291.907.499	84,83
1.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.006.864.700	962.963.574	95,64
	1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	30.602.600	30.581.400	99,93
	2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	34.213.300	33.942.000	99,21
	3) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	37.296.000	36.781.000	98,62
	4) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	33.156.000	29.270.000	88,28
	5) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	2.445.250	2.408.000	98,48
	6) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	4.380.500	4.368.000	99,71
	7) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	224.698.950	208.294.525	92,70
	8) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	124.455.000	109.660.649	88,11



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
	9) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	387.561.100	379.800.000	98,00
	10) Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	128.056.000	127.858.000	99,85
2.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	329.817.000	326.255.528	98,92
	1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	115.336.000	114.528.528	99,30
	2) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Transfer Lainnya	39.568.000	39.447.000	99,69
	3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran	29.944.000	29.769.000	99,42
	4) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	144.969.000	142.511.000	98,30
3.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	337.788.921	301.572.250	89,28
	1) Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, pendapatan-LO dan beban	33.210.000	31.483.000	94,80
	2) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	34.580.000	34.236.000	99,01
	3) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	123.659.021	107.591.200	87,01



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
	4) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Propinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang	84.286.000	83.349.450	98,89
	5) Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	62.053.900	44.912.600	72,38
4.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	116.556.495.385	98.701.116.147	84,68
	1) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	98.193.174.100	98.023.857.650	99,83
	2) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	17.895.014.685	208.951.900	1,17
	3) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kab/Kota	468.306.600	468.306.597	100
III.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	440.384.200	360.445.880	81,85
1.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	440.384.200	360.445.880	81,85
	1) Penyusunan Standar Harga	122.853.600	108.522.105	88,33
	2) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	49.337.700	40.763.700	82,62
	3) Penatausahaan Barang Milik Daerah	101.610.000	77.566.140	76,34
	4) Pengamanan Barang Milik Daerah	89.100.000	77.726.035	87,23
	5) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	39.984.000	20.750.000	51,90
	6) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	30.120.900	27.747.900	92,12
	7) Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	7.378.000	7.370.000	99,89



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
IV.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	879.784.597	617.881.525	70,23
1.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	879.784.597	617.881.525	70,23
	1) Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	147.940.000	75.443.000	51,00
	2) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	619.688.597	445.518.525	71,89
	3) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	112.156.000	96.920.000	86,42
	Jumlah	124.139.776.582	105.019.173.657	84,60



3.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Arah Kebijakan	Program	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	
Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelolalayanan pemerintahan yang baik	Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS					
			- Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Dokumen	2	2	1	
			Koordinasi dan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS					
			- Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Dokumen	2	2	1	
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD					
			- Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi	Dokumen	39	39	1	
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD					
			- Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	Dokumen	39	39	1	
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD					
			- Jumlah Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	Dokumen	39	39	1	
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Dearah tentang Penjabaran APBD					
			- Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Dearah tentang Penjabaran APBD yang tersusun	Dokumen	2	2	1	
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Dearah tentang Penjabaran Perubahan APBD					
			- Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Dearah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang tersusun	Dokumen	2	2	1	
			Koordinasi Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran					
- Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Dokumen	2	2	1				
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah								



Arah Kebijakan	Program	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
			- Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	Dokumen	2	2	1
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				
			- Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Dokumen	4	4	100
			Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Transfer Lainnya				
			- Jumlah dokumen hasil koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Transfer Lainnya	Dokumen	65	65	100
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran PFK				
			- Jumlah laporan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran PFK	Laporan	6	6	100
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pengutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait				
			- Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pengutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	8	8	100
			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban				
			- Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Dokumen	39	39	100
			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran				
			- Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Laporan	18	18	100
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				
			- Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	Laporan	40	40	100



Arah Kebijakan	Program	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				
			- Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang tersusun	Dokumen	2	2	100
			Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				
			- Jumlah dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	1	100
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				
			- Jumlah desa penerima bantuan	Desa	58	58	100
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				
			- Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	Laporan	1	1	100
			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Kab/Kota				
			- Jumlah laporan pengelolaan dana bagi hasil kab/kota	Desa	58	58	100
Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola layanan pemerintahan yang baik	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase rekonsiliasi BMD dengan OPD	Penyusunan standar harga				
			- Jumlah standar harga yang disusun	Dokumen	1	1	100
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah				
			- Jumlah RKBMD yang tersusun	Dokumen	2	2	100
			Penatausahaan BMD				
			- Jumlah laporan penatausahaan BMD	Laporan	1	1	100
			Pengamanan BMD				
- Jumlah laporan hasil pengamanan BMD	Laporan	2	2	100			



Arah Kebijakan	Program	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah				
			- Jumlah dokumen hasil optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	2	100
			Penyusunan laporan BMD				
			- Jumlah laporan BMD yang disusun	Laporan	1	1	100
			Pembinaan pengelolaan BMD pemerintah Kab/kota				
			- Jumlah ASN yang mengikuti pembinaan	Orang	2	2	100
Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelolalayanan pemerintahan yang baik	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase capaian pajak daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah				
			- Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	Dokumen	1	1	100
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				
			- Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	1	1	100
			Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah				
			- Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak, subjek pajak dan wajib pajak daerah	Laporan	3	3	100



3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Alokasi Anggaran : Rp. 3.470.015.489,-
Realisasi : Rp. 2.834.917.265 ,- (81,70)
Keluaran :
Terbayarnya gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan sebanyak 33 orang selama 12 bulan
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Alokasi Anggaran : Rp 405.562.000,-
Realisasi : Rp. 387.807.000,- (95,62%)
Keluaran :
Terbayarnya jasa administrasi keuangan sebanyak 15 orang selama 12 bulan

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Alokasi Anggaran : Rp. 47.850.000,-
Realisasi : Rp. 47.850.000,- (100%)
Keluaran :
Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya sebanyak 33 stel
- 2) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Alokasi Anggaran : Rp. 29.240.000,-
Realisasi : Rp. 0,- (0%)
Keluaran : -
Jadwal Bimtek bersamaan dengan jadwal Audit BPKP sehingga akuntansi tidak dapat mengikuti kegiatan BIMTEK
- 3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Alokasi Anggaran : Rp. 92.926.000,-
Realisasi : Rp. 11.244.569,- (12,10%)
Keluaran :
Terlaksananya kegiatan BIMTEK bagi 3 orang

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 4.137.500,-
Realisasi : Rp. 1.969.000,- (47,59 %)
Keluaran :
Tersedianya komponen instalasi listrik yang sebanyak 6 jenis
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 160.454.290,-
Realisasi : Rp. 146.884.000,- (91,54 %)
Keluaran :
Tersedianya ATK sebanyak 36 jenis, peralatan dan mesin yang diadakan sebanyak 6 unit berupa meja $\frac{1}{2}$ biro 2 buah, kursi plastik 50 buah, sofa 1 set, AC 2 buah, laptop 2 unit dan printer 4 unit



- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Alokasi Anggaran : Rp. 40.500.000,-
 - Realisasi : Rp. 37.910.000,- (93,60 %)
 - Keluaran :
 - Tersedianya makanan dan minuman rapat/lembur pegawai 871 dos
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Alokasi Anggaran : Rp. 13.125.000,-
 - Realisasi : Rp. 9.968.400,- (75,95 %)
 - Keluaran :
 - Tersedianya dokumen kantor yang digandakan sebanyak 22.859 lembar dan dokumen kantor yang dicetak 55 dokumen
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Alokasi Anggaran : Rp. 162.288.000,-
 - Realisasi : Rp. 115.337.513,- (71,07 %)
 - Keluaran :
 - Terlaksananya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perangkat daerah

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Alokasi Anggaran : Rp. 8.180.000,-
 - Realisasi : Rp. 6.061.000,- (74,10 %)
 - Keluaran :
 - Tersedianya materai sebanyak 500 lembar dan terkirimnya dokumen sebanyak 26 dokumen gaji
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Alokasi Anggaran : Rp. 1.200.000,-
 - Realisasi : Rp. 0,- (0 %)
 - Keluaran : -
 - Alasan tidak terealisasi karena menggunakan air tangki dari bagian umum
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Alokasi Anggaran : Rp. 17.750.000,-
 - Realisasi : Rp. 15.642.500,- (88,13 %)
 - Keluaran :
 - Terpeliharanya peralatan gedung kantor sebanyak 4 jenis peralatan berupa genset, printer, Air Conditioner (AC) dan PC/Notebook/Laptop
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Alokasi Anggaran : Rp. 7.353.500,-
 - Realisasi : Rp. 7.147.000,- (97,19 %)
 - Keluaran :
 - Tersedianya peralatan kebersihan sebanyak 11 jenis

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Alokasi Anggaran : Rp. 128.060.000,-
 - Realisasi : Rp. 126.200.506,- (98,55 %)



Keluaran :
Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang diperbaharui perizinannya dan diservice sebanyak 32 kendaraan

6. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

- 1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
Alokasi : Rp. 30.602.600,-
Anggaran
Realisasi : Rp. 30.581.400,- (99,93 %)
Keluaran :
Tersedianya dokumen KUA dan PPAS sebanyak 2 dokumen
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
Alokasi : Rp. 34.213.300,-
Anggaran
Realisasi : Rp. 33.942.000,- (99,21 %)
Keluaran :
Tersedianya dokumen Perubahan KUA dan PPAS sebanyak 2 dokumen
- 3) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
Alokasi : Rp. 37.296.000,-
Anggaran
Realisasi : Rp. 36.781.000,- (98,62 %)
Keluaran :
Tersedianya RKA SKPD sebanyak 39 dokumen
- 4) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
Alokasi : Rp. 33.156.000,-
Anggaran
Realisasi : Rp. 29.270.000,- (88,28 %)
Keluaran :
Tersedianya Perubahan RKA SKPD sebanyak 39 dokumen
- 5) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
Alokasi : Rp. 2.445.250,-
Anggaran
Realisasi : Rp. 2.408.000,- (98,48 %)
Keluaran :
Tersedianya DPA SKPD sebanyak 39 dokumen
- 6) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
Alokasi : Rp. 4.380.500,-
Anggaran
Realisasi : Rp. 4.368.000,- (99,71 %)
Keluaran :
Tersedianya Perubahan DPA SKPD sebanyak 39 dokumen
- 7) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Alokasi : Rp. 224.698.950,-
Anggaran
Realisasi : Rp. 208.294.525,- (92,70 %)



Keluaran :
Tersedianya Peraturan Daerah tentang APBD No. 5 tahun 2022 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD No. 36 tahun 2022 sebanyak 2 dokumen

- 8) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

Alokasi : Rp. 124.455.000,-

Anggaran

Realisasi : Rp. 109.660.649,- (88,11 %)

Keluaran :

Tersedianya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD No. 2 tahun 2023 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD No. 39 tahun 2023 sebanyak 2 dokumen

- 9) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

Alokasi : Rp. 387.561.100,-

Anggaran

Realisasi : Rp. 379.800.000,- (98,00 %)

Keluaran :

Tersedianya regulasi bidang anggaran sebanyak 2 dokumen

- 10) Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah

Alokasi : Rp. 128.056.000,-

Anggaran

Realisasi : Rp. 127.858.000,- (99,85 %)

Keluaran :

Terlaksananya koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah sebanyak 2 kegiatan

7. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- 1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

Alokasi Anggaran : Rp. 115.336.000,-

Realisasi : Rp. 114.528.528,- (99,30 %)

Keluaran :

Tersedianya dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah sebanyak 4 dokumen

- 2) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

Alokasi : Rp. 39.568.000,-

Anggaran

Realisasi : Rp. 39.447.000,- (99,69 %)

Keluaran :

Tersedianya dokumen hasil koordinasi fasilitasi asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya sebanyak 65 dokumen

- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran

Alokasi : Rp. 29.944.000,-

Anggaran

Realisasi : Rp. 29.769.000,- (99,42 %)



Keluaran :
Tersedianya dokumen penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran PFK sebanyak 6 laporan

- 4) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait

Alokasi : Rp. 144.969.000,-

Anggaran

Realisasi : Rp. 142.511.000,- (98,30 %)

Keluaran :

Tersedianya dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan SP2D dengan instansi terkait dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D sebanyak 8 dokumen

8. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- 1) Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban

Alokasi : Rp. 33.210.000,-

Anggaran

Realisasi : Rp. 31.483.000,- (94,80 %)

Keluaran :

Tersedianya dokumen hasil rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan – LO dan beban sebanyak 39 dokumen

- 2) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran

Alokasi : Rp. 34.580.000,-

Anggaran

Realisasi : Rp. 34.236.000,- (99,01 %)

Keluaran :

Tersedianya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran sebanyak 18 laporan

- 3) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Alokasi : Rp. 123.659.021,-

Anggaran

Realisasi : Rp. 107.591.200,- (87,01 %)

Keluaran :

Tersedianya Laporan keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemda sebanyak 40 laporan

- 4) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Propinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Alokasi : Rp. 84.286.000,-

Anggaran

Realisasi : Rp. 83.349.450,- (98,89 %)



Keluaran :
Tersedianya rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebanyak 2
dokumen.

- 5) Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Alokasi : Rp. 62.053.900,-

Anggaran

Realisasi : Rp. 44.912.600,- (72,38 %)

Keluaran :

Tersedianya dokumen hasil Tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK
atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebanyak 1
dokumen.

9. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- 1) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

Alokasi : Rp. 98.193.174.100,-

Anggaran

Realisasi : Rp. 98.023.857.650,- (99,83 %)

Keluaran :

Terlaksananya penyaluran bantuan keuangan berupa ADD dan Dana
Desa kepada 58 desa

- 2) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

Alokasi : Rp. 17.895.014.685,-

Anggaran

Realisasi : Rp. 208.951.900,- (1,17 %)

Keluaran :

Teralokasinya dana darurat dan mendesak berupa Bansos yang tidak
direncanakan kepada masyarakat

- 3) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kab/Kota

Alokasi : Rp. 468.306.600,-

Anggaran

Realisasi : Rp. 468.306.597,- (100,00 %)

Keluaran :

Terlaksananya penyaluran dana bagi hasil pajak kepada 58 desa.

10. Pengelolaan Barang Milik Daerah

- 1) Penyusunan Standar Harga

Alokasi Anggaran : Rp. 122.853.600,-

Realisasi : Rp. 108.522.105,- (88,33 %)

Keluaran :

Tersedianya dokumen standar harga BMD sebanyak 1 dokumen.

- 2) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

Alokasi Anggaran : Rp. 49.337.700,-

Realisasi : Rp. 40.763.700,- (82,62 %)

Keluaran :

Tersedianya dokumen RKBMD dan RKPBMMD sebanyak 2 dokumen.



- 3) Penatausahaan Barang Milik Daerah
Alokasi Anggaran : Rp. 101.610.000,-
Realisasi : Rp. 77.566.140,- (76,34 %)
Keluaran :
Tersedianya hasil penatausahaan BMD sebanyak 1 laporan aset.
- 4) Pengamanan Barang Milik Daerah
Alokasi Anggaran : Rp. 89.100.000,-
Realisasi : Rp. 77.726.035,- (87,23 %)
Keluaran :
Terlaksananya kegiatan pengamanan aset sebanyak 2 kegiatan.
Tersedianya hasil penatausahaan BMD sebanyak 1 laporan aset.
- 5) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
Alokasi Anggaran : Rp. 39.984.000,-
Realisasi : Rp. 20.750.000,- (51,90 %)
Keluaran :
Hasil kegiatan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan, pemanfaatan dan penghapusan BMD sebanyak 2 dokumen.
- 6) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Alokasi Anggaran : Rp. 30.120.900,-
Realisasi : Rp. 27.747.900,- (92,12 %)
Keluaran :
Tersedianya laporan BMD sebanyak 1 laporan.
- 7) Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Alokasi Anggaran : Rp. 7.378.000,-
Realisasi : Rp. 7.370.000,- (99,89 %)
Keluaran :
Terlaksananya kegiatan pembinaan pengelolaan BMD sebanyak 3 kegiatan.

11. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- 1) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
Alokasi Anggaran : Rp. 147.940.000,-
Realisasi : Rp. 75.443.000,- (51,00 %)
Keluaran :
Tersedianya hasil analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah sebanyak 1 dokumen.
- 2) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Alokasi Anggaran : Rp. 619.688.597,-
Realisasi : Rp. 445.518.525,- (71,89 %)
Keluaran :
Tersedianya hasil penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah sebanyak 1 laporan.
- 2) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
Alokasi Anggaran : Rp. 112.156.000,-
Realisasi : Rp. 96.920.000,- (86,42 %)



Keluaran :
Tersedianya hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak dan retribusi daerah sebanyak 3 laporan.



3.4 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Program			Kegiatan			Kesesuaian
		Uraian Program	Target Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Uraian Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	
1	Pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah menuju SARAI TRANSPARAN	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersedianya Peraturan daerah tentang APBD dan Perbup tentang penjabaran APBD, Perda tentang perubahan APBD dan Perbup tentang penjabaran perubahan APBD	100%	Ya
					Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	100%	Ya
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersedianya laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban pemda	100%	Ya
					Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah desa penerima bantuan	100%	Ya
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	Persentase Rekonsiliasi BMD dengan OPD	Pengelolaan barang milik daerah	Terciptanya tata kelola BMD yang baik	100%	Ya
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	Persentase Capaian Pajak Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	100%	Ya



3.5 Permasalahan dan Solusi

Tidak ada

3.6 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Tidak ada

3.7 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	<p>Direkomendasikan kepada Bupati Sabu Raijua untuk memberikan perhatian khusus dan sungguh-sungguh pada sektor Pendapatan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk meningkatkan PAD dalam rangka mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat yang masih sangat tinggi sebagai wujud melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab;</p>	<p>Mencermati dan mempedomani UU No. 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maka pada tahun anggaran 2023 pemerintah mengajukan melalui program legislasi daerah untuk tersedianya Perda PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).</p>	<p>Tersedianya kriteria yang mengatur ruang serta kewenangan daerah dalam meningkatkan pendapatan melalui pajak dan retribusi daerah</p>
2	<p>Pengukuran secara objektif atas potensi-potensi pendapatan dari setiap jenis pendapatan yang dikategorikan sebagai PAD melalui kegiatan inventarisasi sumber-sumber pendapatan serta tegas dan disiplin dalam pemungutan serta pencatatannya;</p>	<p>Pemerintah mendorong dan ekstensifikasi</p>	<p>Meningkatnya pendapatan dari objek-objek pajak yang ada serta berupaya menghadirkan objek pajak dan retribusi yang baru sesuai kriteria</p>
3	<p>Secara berkelanjutan terus memperbaharui dan mengembangkan sistem serta prosedur pemungutan pada setiap jenis PAD.</p>	<p>Menghadirkan pembayaran pajak dan retribusi secara online melalui sistem yang terintegrasi</p>	<p>Aksesibilitas / kemudahan akses bagi wajib pajak melalui sistem /online sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak</p>



5. KEPEGAWAIAN

I. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sabu Raijua

3.1 Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sabu Raijua, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 5.253.797.075,-** dan realisasi sebesar **Rp. 4.430.846.588,- (84,34%)**. Adapun rincian anggaran dan realisasi program/kegiatan sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
<i>I.</i>	Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	3,312,234,575	2,721,335,711	82.16
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,420,675,675	1,859,389,282	76.81
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,291,344,675	1,730,533,282	75.52
	2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	129,331,000	128,856,000	99.63
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	462,850,000	439,400,000	94.93
	1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	28,600,000	28,600,000	100
	2) Pemulangan Pegawai yang Pensiun	400,000,000	400,000,000	100
	3) Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam melaksanakan Tugas	20,000,000	0	0.00
	4) Pemindahan Tugas ASN	14,250,000	10,800,000	75.79
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	347,523,900	341,641,774	98.31
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4,487,500	4,475,000	99.72
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45,982,400	42,077,000	91.51
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1,500,000	1,475,000	98.33
	4. Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	10,500,000	8,757,300	83.40
	5. Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	285,054,000	284,857,474	99.93
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15,825,000	15,806,000	99.88
	1) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8,240,000	8,225,000	99.82
	2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7,585,000	7,581,000	99.95
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65,360,000	65,096,655	92.47
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65,360,000	65,098,655	99.60
II.	Program Kepegawaian Daerah	1,589,588,500	1,366,216,118	85.95
1.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	299,447,500	242,212,930	80.89
	1) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	43,822,000	42,544,440	97.08
	2) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	32,998,000	32,299,980	97.88
	3) Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	152,289,500	102,309,129	67.18
	4) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	41,122,000	38,095,201	92.64
	5) Pengelolaan Data Kepegawaian	29,216,000	26,964,180	92.29
2.	Mutasi dan Promosi ASN	731,289,000	708,915,178	96.94
	1) Pengelolaan Mutasi ASN	617,277,000	605,205,152	98.04
	2) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	114,012,000	103,710,026	90.96
3	Pengembangan Kompetensi ASN	491,106,000	348,347,775	70.93
	1) Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	59,364,000	53,844,840	90.70
	2) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	431,742,000	294,502,935	68.21
4.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	67,746,000	66,740,235	98.52
	1) Pembinaan Disiplin ASN	17,650,000	17,545,000	99.41
	2) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	50,096,000	49,195,235	98.20
III.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	351,974,000	343,294,759	97.53



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
1.	Pengembangan Kompetensi Teknis Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	11,924,000 11,924,000	11,908,000 11,908,000	99.87 99.87
2.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	340,050,000 340,050,000	331,386,759 331,386,759	97.45 97.45
Jumlah		5.253,797,075	4.430,846,588	84.34

3.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Arah Kebijakan	Program	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Diarahkan pada peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara	Program Pendidikan Kedinasan	Meningkatnya aparatur yang berpendidikan sesuai kebutuhan struktur kelembagaan pemerintah daerah	Tingkat penempatan aparatur sesuai dengan kompetensinya	278	192	69,06

3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan

Alokasi Anggaran : Rp. 2.291.344.675,-

Realisasi : Rp. 1.730.533.282,- (75.52%)

Keluaran :

Terbayarnya Gaji dan Tunjangan 23 ASN selama 12 bulan

2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Alokasi Anggaran : Rp. 129.331.000,-

Realisasi : Rp. 128.856.000,- (99,63%)



Keluaran

Terbayarnya honorarium 11 orang tenaga administrasi 12 bulan

- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Alokasi Anggaran : Rp. 0,-

Realisasi : Rp. 0,- (0%)

Keluaran : -

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Alokasi Anggaran : Rp. 28.600.000,-

Realisasi : Rp. 28.600.000,- (100,00%)

Keluaran :

Tersedianya pengadaan pakaian dinas 23 stel

- 2) Pemulangan Pegawai yang Pensiun

Alokasi Anggaran : Rp. 400.000.000,-

Realisasi : Rp. 400.000.000,- (100,00%)

Keluaran :

Terbayarnya biaya pemulangan bagi 24 ASN yang pensiun

- 3) Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas

Alokasi Anggaran : Rp. 20.000.000,-

Realisasi : Rp. 0,- (0%)

Keluaran :

Tidak terlaksananya Kegiatan Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas disebabkan tidak adanya ASN yang meninggal dalam tugas.

- 4) Sub Kegiatan Pemindahan Tugas ASN

Alokasi Anggaran : Rp. 14.250.000,-

Realisasi : Rp. 10.800.000,- (75,79%)

Keluaran :

Terlaksananya pemindahan tugas ASN karena mutasi untuk 14 orang

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 4.487.500,-

Realisasi : Rp. 4.475.000,- (99,72%)

Keluaran :

Tersedianya 5 komponen instalasi listrik

- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 45.982.400,-

Realisasi : Rp. 42.077.000,- (91,51%)

Keluaran :

Tersedianya alat tulis kantor serta peralatan dan perlengkapan gedung kantor sejumlah 2 paket

- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 1.500.000,-

Realisasi : Rp. 1.475.000,- (98,33%)



- Keluaran : -
Tersedianya makan minum rapat sebanyak 100 dos
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Alokasi Anggaran : Rp. 10.500.000,-
Realisasi : Rp. 8.757.300,- (83,40%)
Keluaran :
Tersedianya anggaran untuk barang cetakan/jilib sebanyak 75 buku dan penggandaan sebanyak 31.250 lembar
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Alokasi Anggaran : Rp. 285.054.000,-
Realisasi : Rp. 284.857.474- (99,93%)
Keluaran :
Terlaksananya rapat-rapat koodinasi dan konsultasi dalam maupun luar daerah sebanyak 4 kegiatan yakni dalam rangka koordinasi dan konsultasi bidang kepegawaian di dalam Provinsi diluar provinsi, dalam rangka monitoring PNS pada jam kerja di 6 kecamatan se-kabupaten Sabu Raijua, dalam rangka operasi penertiban PNS pada jam kerja di 6 kecamatan se-kabupaten Sabu Raijua serta dalam rangka kegiatan rapat lengkap pamong praja di 6 kecamatan se-kabupaten Sabu Raijua.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 8.240.000,-
Realisasi : Rp. 8.225.000- (99,82%)
Keluaran :
Tersedianya jasa pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor berupa 3 unit AC, 5 unit komputer/laptop dan 4 unit printer
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 7.585.000,-
Realisasi : Rp. 7.581.000- (99,95%)
Keluaran :
Tersedianya 18 jenis peralatan kebersihan kantor

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Alokasi Anggaran : Rp. 65.360.000,-
Realisasi : Rp. 65.098.655- (99,60%)
Keluaran :
Tersedianya jasa pemeliharaan rutin / berkala untuk 10 unit kendaraan dinas / operasional

6. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

- 1) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN



Alokasi Anggaran : Rp. 43.822.000,-
Realisasi : Rp. 42.544.440,- (97,08%)
Keluaran :

Tersedianya dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN sebanyak 1 dokumen.

2) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian

Alokasi Anggaran : Rp. 32.998.000,-
Realisasi : Rp. 32.299.980,- (97,88%)
Keluaran : -

Tersedianya dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian sebanyak 25 dokumen.

3) Fasilitasi Lembaga Profesi ASN

Alokasi Anggaran : Rp. 152.289.500,-
Realisasi : Rp. 102.309.129,- (67,18%)
Keluaran :

Terlaksananya 4 kegiatan kelembagaan profesi ASN

4) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

Alokasi Anggaran : Rp. 41.122.000,-
Realisasi : Rp. 38.095.201,- (92,64%)
Keluaran :

Terlaksananya 3 kegiatan pengembangan system informasi bagi ASN

5) Pengelolaan Data Kepegawaian

Alokasi Anggaran : Rp. 29.216.000,-
Realisasi : Rp. 26.964.180,- (92,29%)
Keluaran :

Terlaksananya 1 kegiatan pengelolaan data ASN

7. Mutasi dan Promosi ASN

1) Pengelolaan Mutasi ASN

Alokasi Anggaran : Rp. 617.277.000,-
Realisasi : Rp. 605.205.152,- (98,04%)
Keluaran :

Terlaksananya kegiatan mutasi dan promosi ASN dalam jabatan fungsional sebanyak 375 ASN dan Ujian Dinas ASN sebanyak 53 ASN, serta Seleksi penerimaan CASN untuk 253 formasi CASN

2) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Alokasi Anggaran : Rp. 114.012.000,-
Realisasi : Rp. 103.710.026,- (90,96%)
Keluaran :

Terlaksananya 2 kegiatan asistensi system kenaikan pangkat PNS

8. Pengembangan Kompetensi ASN

1) Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN

Alokasi Anggaran : Rp. 59.364.000,-
Realisasi : Rp. 53.844.840,- (90,70%)
Keluaran :

Terlaksananya kegiatan penilaian kinerja 2.315 ASN

2) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN



Alokasi Anggaran : Rp. 431.742.000,-
Realisasi : Rp. 294.502.935- (68,21%)
Keluaran :

Terlaksananya 1 kegiatan pemberian bantuan biaya bagi PNS tugas belajar dan ikatan dinas untuk 15 orang ASN

9. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

1) Pembinaan Disiplin ASN

Alokasi Anggaran : Rp. 17.650.000,-
Realisasi : Rp. 17.545.000,-(99,41%)
Keluaran :

Terlaksananya kegiatan penegakan disiplin ASN bagi 20 orang ASN

2) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

Alokasi Anggaran : Rp. 50.096.000,-
Realisasi : Rp. 49.195.235,- (98,20%)
Keluaran :

Terlaksananya 2 kegiatan penyelesaian disiplin ASN

10. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis

1) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

Alokasi Anggaran : Rp. 11.924.000,-
Realisasi : Rp. 11.908.000,- (99,87)
Keluaran :

Terlaksananya 1 kegiatan koordinasi kebutuhan pelaksanaan diklat teknis/fungsional ASN yakni diklat kepemimpinan dan diklat teknis lainnya.

11. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

1) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan

Alokasi Anggaran : Rp. 340.050.000,-
Realisasi : Rp. 331.386.759,- (97,45%)
Keluaran :

Terlaksananya kegiatan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi untuk 3 jabatan pimpinan tinggi pratama dan uji kompetensi jabatan pimpinan tinggi pratama untuk 3 jabatan pimpinan tinggi pratama



3.4 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN (YA/TIDAK)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	
1	Meningkatnya Integritas aparatur dalam pelayanan pemerintahan dalam Sarai jujur	1. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1. Pelaporan Kinerja ASN	1. Persentase Capaian/Tingkat Pelaporan Kinerja ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	ASN	Terlaksananya Penilaian Kinerja ASN	YA
		2. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2. ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	2. Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	ASN	Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	YA

3.5 Permasalahan dan Solusi

Tidak ada

3.6 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Tidak ada

3.7 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tidak Ada



7. Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan

a. Kecamatan Sabu Barat

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 2.742.527.763,-** dan realisasi sebesar **Rp. 2.501.368.030,-(91,21%)**. Adapun rincian anggaran dan realisasi program/kegiatan sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.742.527.763	2.501.368.030	91,21
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.473.074.463	1.317.739.530	89,07
	1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1.405.692.463	1.252.117.530	89,07
	2) Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	67.382.000	65.622.000	97,39
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	59.967.250	56.651.000	77,11
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.793.750	3.787.000	99,82
	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.748.500	19.745.000	99,98
	3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.690.000	21.690.000	100,00
	4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.325.000	5.309.000	99,70
	5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.410.000	6.120.000	65,04
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.379.000	30.492.000	86,19
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.990.000	99,50
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.950.000	20.075.000	81,77
	3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.910.000	4.910.000	100,00
	4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.519.000	3.517.000	99,94
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.620.000	54.546.610	99,87
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	54.620.000	54.546.610	99,87



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	354.504.000	352.318.000	99,38
1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	354.504.000	352.318.000	99,38
	1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	108.204.000	106.018.000	97,98
	2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	246.300.000	246.300.000	100,00
III.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	229.960.000	229.960.000	100,00
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	28.220.000	27.880.000	98,80
	1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	28.220.000	27.880.000	98,80
2.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	201.740.000	201.740.000	100,00
	1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.740.000	1.740.000	100,00
	2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	37.000.000	37.000.000	100,00
	3) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	163.000.000	163.000.000	100,00
Jumlah		2.742.527.763	2.501.368.030	91,21

3.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %	100	98,14



3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Alokasi Anggaran : Rp. 1.405.692.463
Realisasi : Rp 1.252.117.530,- (89,07%)
Keluaran :
Tersedianya gaji dan tunjangan 19 orang ASN
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Alokasi Anggaran : Rp. 67.382.000,-
Realisasi : Rp. 65.622.000,- (97,35%)
Keluaran :
Terbayarnya Honor 10 Orang Tenaga Administrasi Keuangan

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 3.793.750,-
Realisasi : Rp. 3.787.000,-(99,82%)
Keluaran :
Tersedianya kebutuhan instalasi listrik penerangan bangunan Kantor 12 paket
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 19.748.500
Realisasi : Rp. 19.745.000,-(99,98%)
Keluaran :
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 49 jenis
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 21.690.000,-
Realisasi : Rp. 21.690.000,- (100%)
Keluaran :
Tersedianya makanan dan minuman rapat 723 dos
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Alokasi Anggaran : Rp. 5.325.000
Realisasi : Rp. 3.309.000,- (99,70%)
Keluaran :
Terlaksananya Cetak dan Penggandaan sebanyak 15.000 Lembar selama 12 Bulan
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Alokasi Anggaran : Rp. 9.410.000,-
Realisasi : Rp. 6.120.000,- (65,04%)
Keluaran :
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sebanyak 3 kegiatan.

4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Alokasi Anggaran : Rp. 2.000.000,-
Realisasi : Rp. 1.990.000,- (99,50%)



- Keluaran :
Tersedianya Materai 170 lembar
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Alokasi Anggaran : Rp. 24.550.000,-
Realisasi : Rp. 20.075.000,- (81,77%)
Keluaran :
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan dan Air Sebanyak 120.000 Liter (24 tangky).
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 4.910.000
Realisasi : Rp. 4.910.000,- (100%)
Keluaran :
Tersedianya Jasa Pemeliharaan 2 Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 3.519.000,-
Realisasi : Rp. 3.517.000,- (99,94%)
Keluaran :
Tersedianya Peralatan dan bahan kebersihan kantor 14 Jenis.
- 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan.
Alokasi Anggaran : Rp. 54.620.000
Realisasi : Rp. 54.546.610 (99,87%)
Keluaran :
Tersedianya jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas sebanyak 7 unit.
- 6. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**
- 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Alokasi Anggaran : Rp. 108.204.000,-
Realisasi : Rp. 106.018.000,- (97,98%)
Keluaran :
Terlaksananya kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan
- 2) Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
Alokasi Anggaran : Rp. 246.300.000,-
Realisasi : Rp. 246.300.000 (100%)
Keluaran :
Terbayarnya Honor 29 Orang Aparatur Kelurahan selama 12 Bulan
- 7. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**
- 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
Alokasi Anggaran : Rp. 28.220.000
Realisasi : Rp. 27.880.000,- (98,80%)



Keluaran :

Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam Daerah, dalam Rangka Monitoring Pemberdayaan selama 12 Bulan

8. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
Alokasi Anggaran : Rp. 1.740.000
Realisasi : Rp. 1.740.000,- (100%)
Keluaran :
Tersedianya Makan dan Minum Pra Musrenbang dan musrenbang kelurahan 116 Dos.
- 2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Alokasi Anggaran : Rp. 37.000.000,-
Realisasi : Rp. 37.000.000,- (100%)
Keluaran :
Tersedianya Sarana Prasarana di Kelurahan
- 3) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Alokasi Anggaran : Rp. 163.000.000,-
Realisasi : Rp. 163.000.000,- (100%)
Keluaran :
Tersedianya 10 Pokmas/Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan



3.4 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
1	Meningkatnya integritas aparatur dalam pelayanan pemerintahan menuju Sarai Jujur	Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Terwujudnya kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Meningkatnya kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terwujudnya kegiatan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ya
							Jumlah PNS yang dibayar	
							Penyediaan Administrasi dan Tunjangan ASN	Ya
							Jumlah tenaga administrasi yang dibayar	Ya
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
							Jumlah Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	Ya
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor .	
							Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	Ya
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
							Jumlah makan minum rapat yang tersedia	Ya
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
							Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan/Fc dan Jilid yang tersedia.	Ya
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
							Jumlah rapat koordinasi dan Konsultasi lintas SKPD yang dilaksanakan.	Ya
Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
Jumlah jasa surat menyurat/materai yang tersedia.	Ya							
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
Jumlah air dan Listrik yang di sediakan.	Ya							



NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ya
							Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ya
							Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia.	
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,biaya pemeliharaan,pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Ya
							Jumlah Jasa dan biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas yang tersedia	
2		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Ya



NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
			pelayanan publik				Jumlah kegiatan sinergisitas Perencanaan dan Pelaknaan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal terkait yang dilaksanakan.	
							Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Ya
							Jumlah Kegiatan Efektifitas yang dilaksanakan.	
3		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terwujudnya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja Kecamatan	Terwujudnya Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Ya
							Jumlah Kegiatan Monitoring yang dilaksanakan	
							Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Ya
							Jumlah makan minum musyawara Perencanaan Pembangunan yang tersedia.	



NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
1							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Ya
							Jumlah Gedung yang direhab	
							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ya
							Jumlah Kelompok Pemeberdayaan yang tersedia	



3.5 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan :

1. Belum optimalnya kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan, desa dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
2. Belum adanya ukuran standar kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan.
3. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan Sabu Barat belum optimal sehingga kinerja aparatur pemerintahan kurang.
4. Kurang optimalnya koordinasi lintas sektor di wilayah Kecamatan Sabu Raijua.
5. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur desa tentang pelaksanaan pembangunan desa
6. Belum terisinya Jabatan kepala Seksi di kantor Camat Sabu Barat berpengaruh kepada pelayanan masyarakat.

b. Solusi :

1. Pengoptimalan kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan, desa dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
2. Membuat ukuran standar kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan.
3. Mengoptimalkan Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan Sabu Barat sehingga kinerja aparatur pemerintahan lebih baik.
4. Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor di wilayah Kecamatan Sabu Raijua.
5. Mengoptimalkan pembinaan/koordinasi aparatur desa tentang pelaksanaan pembangunan desa
6. Mengupayakan agar mengisi Jabatan kepala Seksi sesuai dengan seksi masing – masing di kantor Camat Sabu Barat guna pelayanan masyarakat.

3.6 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Tidak ada

3.7 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tidak ada



b. Kecamatan Sabu Timur

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 3.509.166.779,-** dan realisasi sebesar **Rp. 3.423.567.671,- (97,56%)**.

Adapun rincian anggaran dan realisasi program/kegiatan sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	2.660.721.049	2.416.632.649	90,83
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.463.569.832	2.219.656.349	90,10
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.388.417.832	2.144.504.349	89,79
	2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	75.152.000	75.152.000	100
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28.600.000	28.600.000	100
	1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	28.600.000	28.600.000	100
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.637.650	61.637.400	100
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.593.750	5.593.500	100
	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.089.000	25.089.000	100
	3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.950.000	22.950.000	100
	4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.049.000	8.049.000	100
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.295.750	33.162.500	99,60
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.190.000	1.190.000,00	100
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.950.000	22.828.000,00	99,47
	3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.920.000	2.920.000	100
	4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.235.750	6.224.400	99,82
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.617.817	73.576.400	99,94
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.360.000	65.334.400	99,96
	2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.257.817	8.242.000	99,81



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	801.690.000	801.630.000	99,99
1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	801.690.000	801.630.000	99,99
	1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	223.890.000	223.850.000	99,98
	2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	577.800.000	577.800.000	100
III.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	433.040.000	431.440.000	99,63
1.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	433.040.000	431.440.000	99,63
	1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	33.040.000	33.040.000	100
	2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	308.800.000	308.800.000	100
	3) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	91.200.000	89.600.000	98,25
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	57.459.000	57.039.000	99,27
A.	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	57.459.000	57.039.000	99,27
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	57.459.000	57.039.000	99,27
	Jumlah	3.952.910.049	3.706.741.649	93,77

3.2 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Alokasi Anggaran : Rp. 2.463.569.832,-

Realisasi : Rp. 2.144.504.349,- (89,79%)

Keluaran :

Tersedianya Gaji dan Tunjangan serta tambahan penghasilan untuk 25 orang ASN untuk 12 Bulan

2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Alokasi Anggaran : Rp. 75.152.000,-

Realisasi : Rp. 75.152.000,- (100%)

Keluaran :

Terbayarnya Honor 10 Orang Tenaga Administrasi Keuangan



2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya
Alokasi Anggaran : Rp. 28.600.000,-
Realisasi : Rp. 28.600.000,- (100%)
Keluaran :
Tersedianya pakaian dinas 23 Stel untuk ASN

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 5.593.750,-
Realisasi : Rp. 5.593.500,- (100%)
Keluaran :
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5 jenis
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 25.089.000,-
Realisasi : Rp. 25.089.000,- (100%)
Keluaran :
Tersedianya penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 26 jenis
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 22.950.000,-
Realisasi : Rp. 22.950.000,- (100%)
Keluaran :
Tersedianya makan dan minum rapat 1.005 Dos
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Alokasi Anggaran : Rp. 8.004.900,-
Realisasi : Rp. 8.004.900,- (100%)
Keluaran :
Tersedianya pengadaan barang cetakan dan Penggandaan 2 Paket

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Alokasi Anggaran : Rp. 1.190.000,-
Realisasi : Rp. 1.190.000,- (100%)
Keluaran :
Tersedianya 48 Laporan
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Alokasi Anggaran : Rp. 22.950.000,-
Realisasi : Rp. 22.828.000,- (99,47%)
Keluaran :
Tersedianya jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik kantor untuk 12 bulan
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 2.920.000,-
Realisasi : Rp. 2.920.000,- (100%)
Keluaran :
Tersedianya Jasa Pemeliharaan 4 Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 6.235,750,-
Realisasi : Rp. 6.224.500,- (99,82%)



Keluaran :

Tersedianya Peralatan dan bahan kebersihan kantor 10 Jenis.

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Alokasi Anggaran : Rp. 65.360.000,-

Realisasi : Rp. 65.334.400,- (99,96%)

Keluaran :

Tersedianya jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas sebanyak 10 unit.

- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Alokasi Anggaran : Rp. 8.257.817,-

Realisasi : Rp. 8.242.000,- (99,81%)

Keluaran :

Tersedianya Jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3 Unit

6. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Alokasi Anggaran : Rp. 223.890.000,-

Realisasi : Rp. 223.850.000,- (99,98%)

Keluaran :

Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 12 Laporan.

- 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Alokasi Anggaran : Rp. 577.800.000,-

Realisasi : Rp. 577.780.000,- (100%)

Keluaran :

Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan untuk 12 Dokumen

7. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

Alokasi Anggaran : Rp. 33.040.000,-

Realisasi : Rp. 33.040.000,- (100%)

Keluaran :

Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan (8 Kegiatan) dan 8 Lembaga

- 2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Alokasi Anggaran : Rp. 308.800.000,-

Realisasi : Rp. 308.800.000,- (100%)

Keluaran :

Terlaksananya Pembangunan 1 Unit Gedung Sarana dan Prasarana

- 3) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Alokasi Anggaran : Rp. 91.200.000,-



Realisasi : Rp. 89.600.000,- (98,25%)

Keluaran :

Tersedianya 2 Pokmas/Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

1) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Alokasi Anggaran : Rp. 57.459.000,-

Realisasi : Rp. 57.039.000,- (99,27%)

Keluaran :

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa untuk 9 orang



3.3 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN (Ya/Tidak)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
1	Meningkatkan kualitas layanan publik yang professional dan mewujudkan birokrasi yang bersih, efisien, efektif dan akuntabel	penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan public	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Ya
		penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan umum	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan umum	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan	penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan umum	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan umum	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan umum	Ya
		pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan	Terwujudnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan	pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan	Terwujudnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan	Ya



3.4 Permasalahan dan Solusi

Tidak ada

3.5 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Tidak ada

3.6 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Adapun Rekomendasi DPRP pada Tahun Anggaran 2022 untuk kecamatan Sabu Timur yaitu agar Ke depan perencanaan Program dan Kegiatan dilakukan dengan lebih cermat dan selektif lagi serta diperlukan komitmen yang sungguh - sungguh dan kerja keras untuk merealisasikan setiap Program dan Kegiatan yang telah direncanakan.	-	-



c. Kecamatan Hawu Mehara

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 532.696.165,-** dan realisasi sebesar **Rp. 505.552.947,- (94,90%)**. Adapun rincian anggaran dan realisasi program/kegiatan sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
I.	Program Kecamatan Hawu Mehara	532.696.165	505.552.947	94,90
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.000.000	22.000.000	100
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	22.000.000	22.000.000	100
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	101.565.050	87.562.000	86,21
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.742.500	6.725.000	99,74
	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.842.750	20.838.500	99,98
	3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.100.000	35.100.000	100
	4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.089.800	7.018.500	98,99
	5) Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	31.790.000	17.880.000	56,24
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.864.860	4.860.000	99,90
	Pengadaan Mebeler	4.864.860	4.860.000	99,90
4	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	44.163.750	34.220.000	77,48
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.490.000	99,60
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.700.000	19.850.000	66,84
	3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.990.000	4.990.000	100
	4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.973.750	6.890.000	98,80
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.307.505	78.215.947	99,98
	1) Penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan ,pajak dan perisinaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	61.780.000	61.755.947	99,96
	2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.200.941	8.140.000	99,26
	3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.326.564	8.320.000	99,92
6	Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	91.045.000	87.965.000	98,62



	Koordinasi/sinergitas Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	91.045.000	87.965.000	96,62
7	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	17.000.000	16.980.000	99,88
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan dan masyarakat yang didukung oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah Kerja Kecamatan	17.000.000	16.980.000	99,88
8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	139.750.000	139.750.000	100
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	139.750.000	139.750.000	100
9	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	34.000.000	34.000.000	100
	1) Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13.600.000	13.600.000	100
	2) Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.200.000	10.200.000	100
	3) Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	10.200.000	10.200.000	100
	Total	532.696.165	505.552.947	94,90

3.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Arah Kebijakan	Program	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Diarahkan pada peningkatan variasi dan kualitas potensi wisata alam dan Budaya	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Berkembangnya pemanfaatan potensi pariwisata daerah	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	100	100	100

3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Alokasi Anggaran : Rp. 22.000.000,-

Realisasi : Rp. 22.000.000,- (100 %)

Keluaran :

Tersedianya Pakaian Dinas PDH untuk III 2 stel dan Pakaian Dinas eselon IV dan staf 15 stel



2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 6.742.500,-
Realisasi : Rp. 6.725.000,- (99,74%)
Keluaran :

Tersedianya peralatan listrik berupa : jek listrik 10 buah, kabel NYM Spesifikasi 3x2,5 mm 110 m, Kontak ganda Spesifikasi Broco 8 buah, lakban kabel besar 2 roll, lampu 23 watt 20 buah, terminal 6 colokan 10 buah.

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 20.842.750,-
Realisasi : Rp. 20.838.500,- (99,98 %)
Keluaran :

Tersedianya peralatan Kantor dan kelengkapan kantor berupa : Amplop cabinet putih besar 5 pak, belpoint biasa /tanda tangan 5 lusin, belpoin snowman f5 11 lusin, buku agenda keluar masuk 2 buah, buku folio isi 50 lembar 10 buah, buku kwarto isi 200 lembar 6 buah, buku tamu 2 buah, catridge hitam 5 buah, catridge canon warna 5 buah, flakban 4cm 6 roll, heker besar vanko 5 buah, heker kecil joyko 5 buah, isi heker 23/10 5 dos, isi heker 23/13 5 dos, isi pisau cater besar kenko 5 buah, isi cater kecil kenko 5 buah, isolasi bening besar 5 roll, isolasi doble tip besar 5 roll, kertas f4 mirage 100 rim, lem kertas inicol besar 5 botol, map batik kertas accord 10 pak, map other pidato plastic folio, 5 pak, map snelheker kertas 10 pak, map snelheker plastik 5 pak, map teka besar 10 buah, pelubang kertas sedang dua buah, pisau cutter besar 5 buah, pisau cater kecil 5 buah, spidol white board hitam 5 pak, tinta Epson L3150 10 botol, tinta printer suntik 200 ml 1 botol, tinta stempel 5 botol,

3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 35.100.000,-
Realisasi : Rp. 35.100.000,- (100 %)
Keluaran :

Tersedianya makan minum Rapat Evaluasi berupa Makan 30 orang x 12 kali dan minum 30 orang x 12 kali dan makan minum koodinasi berupa Makan 35 orang x 12 kali dan minum 35 orang x 12 kali

4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Alokasi Anggaran : Rp. 7.089.800,-
Realisasi : Rp. 7.018.500,- (98,99 %)
Keluaran :

Tersedianya jilid 25 buku dan penggandaan fotocopy 20.716 lembar.

5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Alokasi Anggaran : Rp. 31.790.000,-
Realisasi : Rp. 17.880.000,- (56,24 %)
Keluaran :

Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Pengadaan Mebel
Alokasi Anggaran : Rp. 4.864.860,-
Realisasi : Rp. 4.860.000,- (99,90%)
Keluaran :
Tersedianya 5 buah Lemari Arsip dan 1 buah lemari pintu ayun

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Alokasi Anggaran : Rp. 2.500.000,-
Realisasi : Rp. 2.490.000,- (99,60%)
Keluaran :
Tersedianya materai 10.000 sebanyak 250 lembar.
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Alokasi Anggaran : Rp. 29.700.000,-
Realisasi : Rp. 19.850.000,- (66,84 %)
Keluaran :
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan dan Air Sebanyak 120.000 Liter (24 tangki).
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 4.990.000,-
Realisasi : Rp. 4.990.000,- (100 %)
Keluaran :
Tersedianya peralatan kantor berupa 3 unit printer dan 4 Unit laptop.
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 6.973.750,-
Realisasi : Rp. 6.890.000,- (98,80 %)
Keluaran :
Tersedianya Alat Pembersih Kantor 5 set alat pel, ember 15 buah, Kanebo 15 buah, Keset besar 10 lembar, pembersih kaca 5 botol, pengharum ruangan 20 buah, sapu ijuk 15 buah, soklin lantai 15 botol, tissue roll 25 pak.

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan pajak dan perisinan kendaraan dinas opsional atau lapangan
Alokasi Anggaran : Rp. 61.780.000,-
Realisasi : Rp. 61.755.947,- (99,96%)
Keluaran :
Tersedianya jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas sebanyak 9 unit.
- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Alokasi Anggaran : Rp. 8.200.000,-
Realisasi : Rp. 8.140.000,- (99,26%)
Keluaran :
Tersedianya Jasa pemeliharaan gedung kantor berupa : Cat kayu 25 kg 13 buah,cat tembok No drop 3,cat crystal 20 kg 10 kaleng,kwas besar 8 buah, kwas, cat sedang 7 buah, paku 1 s.d 3 cm 1 kg, paku 5 s.d 10 cm 5 kg, Thinner 2 kaleng.
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor



atau Bangunan Lainnya

Alokasi Anggaran : Rp. 8.326.564,-

Realisasi : Rp. 8.320.000,- (99,92 %)

Keluaran :

Tersedianya jasa pemeliharaan rumah Dinas berupa: cat kayu/besi 10 kaleng, cat tembok 20 kg 7 kaleng, hadle pintu 8 buah, kwas cat besar 5 buah dank was cat sedang 3 buah ,slot tanam 5 buah, tinner 4 kaleng

6. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Alokasi Anggaran : Rp. 91.045.000,-

Realisasi : Rp. 87.965.000,- (96,62%)

Keluaran :

Tersedianya makan minum rapat musrenbangcam 350 orang, snack 700 kotak, spanduk 2,5 meter dan Spanduk 2 ukuran 1,5m, Makan minum tim percepatan penurunan stunting tingkat Kecamatan makan 41 orang, snack 41 orang

7. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- 1) Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

Alokasi Anggaran : Rp. 17.000.000,-

Realisasi : Rp. 16.980.000,- (99,88%)

Keluaran :

Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Di Lakukan Oleh Pemerintah dan Swasta Di Wilayah Kerja Kecamatan Hawu Mehara

8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- 1) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Alokasi Anggaran : Rp. 139.750.000,-

Realisasi : Rp. 139.750.000,- (100%)

Keluaran :

Tersedianya makan dan minum untuk kegiatan HUT RI

- Makan minum karantina 18 orang 4 kali, Snack 18 orang 4 kali, Makan dan minum Latihan 18 orang x 21 kali, Snack 18 orang x 21 kali, Syukuran Makan Tamu Prasmanan 445 orang x 1 kali, Snack 445 orang x 1 kali, Pakaian Olahraga 18 Stel, Pakaian Paskibraka 18 Stel, Honor Pelatih 5 orang dan uang saku peserta 18 orang.

9. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- 1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Alokasi Anggaran : Rp. 13.600.000,-

Realisasi : Rp. 13.600.000,- (100%)

Keluaran :

Tersedianya Dokumen Fasilitasi Admininitrasi Tata Pemerintahan Desa (1 Dokumen)



- 2) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Alokasi Anggaran : Rp. 10.200.000,-
Realisasi : Rp. 10.200.000,- (100%)
Keluaran :
Tersedianya 1 Dokumen fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- 3) Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Alokasi Anggaran : Rp. 10.200.000,-
Realisasi : Rp. 10.200.000,- (100%)
Keluaran :
Tersedianya Laporan hasil koordinasi pendampingan desa (1 Dokumen).



3.4 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN (Ya/Tidak)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
1	Tersediannya sarana prasarana dan fasilitas penunjang wisata untuk meningkatkan kenyamanan dan aksesibilita wisatawan ke kawasan wisata di kabupaten Sabu Raijua	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terwujudnya kenyamanan bagi pengunjung	Meningkatnya destinasi wisata unggulan	Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Terwujudnya kenyamanan bagi pengunjung	Terlaksananya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Ya
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terwujudnya kenyamanan bagi pengunjung	Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Pengelolaan Kawasan Startegis Pariwisata	Terwujudnya kenyamanan bagi pengunjung	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Ya



3.5 Permasalahan dan Solusi

➤ **Permasalahan.**

1. Kurangnya tenaga pelaksana pada kantor Camat Hawu Mehara
2. Banyak kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan yang dilaksanakan oleh dinas teknis, tetapi tidak berkoordinasi dengan pihak Kecamatan melainkan langsung masuk dan beraktifitas/ melakukan kegiatan di Desa.

➤ **Solusi.**

1. Mengusulkan kepada Bapak Bupati untuk menempatkan tenaga professional pada Kantor Camat Hawu Mehara
2. Melakukan koordinasi dengan Instansi Kecamatan sehingga bisa mengetahui dan mengkoordinir setiap kegiatan di Wilayah Kecamatan Hawu Mehara.

3.6 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Tidak ada

3.7 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Terhadap kinerja daya serap anggaran secara umum dinilai sangat baik, Kedepan agar kualitas perencanaan di pertahankan dan lebih di tingkatkan lagi.		



d. Kecamatan Sabu Liae

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sabu Liae Kabupaten Sabu Raijua, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.849.436.643,- dan realisasi sebesar Rp. 1.521.900.602,- (82,28%). Adapun rincian anggaran dan realisasi program/kegiatan sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.836.452.643	1.521.900.602	82,87
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.312.527.393	1.108.229.422	84,43
	1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1.260.339.393	1.056.041.422	83,79
	2) Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	52.188.000	52.188.000	100
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	103.800.750	80.817.600	73,43
	1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.454.500	31.741.000	84,75
	2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.875.000	37.125.000	84,62
	3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.175.000	4.081.600	78,87
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.038.500	20.665.000	81,15
	1) Penyediaan jasa surat menyurat	1.600.000	1.530.000	95,63
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.381.000	16.380.000	57,71
	3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.057.500	2.755.000	90,11
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.460.000	47.128.580	99,30
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.460.000	47.128.580	99,30
	2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.805.000	19.805.000	100
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	106.575.000	68.065.000	53,73
1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	106.575.000	68.065.000	53,73
	1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	66.455.000	62.965.000	94,75



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
	2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40.120.000	5.100.000	12,71
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	38.760.000	38.760.000	100
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	38.760.000	38.760.000	100
	1) Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	38.760.000	38.760.000	100
IV	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	57.605.000	57.605.000	100
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	57.605.000	57.605.000	100
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	57.605.000	57.605.000	100
V	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	131.920.000	83.130.000	61,97
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	131.920.000	83.130.000	61,97
	1) Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	48.960.000	23.800.000	48,61
	2) Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	32.640.000	18.020.000	55,21
	3) Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	50.320.000	41.310.000	82,09
Jumlah		1.831.686.643	1.504.400.602	82,13

3.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Arah Kebijakan	Program	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Kualitas Sistem Pelayanan Publik	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya integritas aparatur dalam pelayanan pemerintahan menuju Sarai Jujur	Tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	100	100
Meningkatkan Kualitas Sistem Pemberdayaan di Desa/Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentasi tingkat desa/kelurahan yang berkembang	Persentasi tingkat desa/kelurahan yang berkembang	100	100	100
Meningkatkan Kualitas Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Terwujudnya program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Terwujudnya program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	100	100



Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur, Perangkat Desa dan masyarakat Desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Terwujudnya program-program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Pelaksanaan pelatihan paskibraka dan upacara 17 Agustus 1945	100	100	100
--	--	--	--	-----	-----	-----

3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Alokasi Anggaran : Rp. 1.260.339.393,-

Realisasi : Rp. 1.056.041.422,- (83,79%)

Keluaran :

Tersedianya Gaji dan Tunjangan serta tambahan penghasilan untuk 14 orang ASN selama 12 Bulan

2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Alokasi Anggaran : Rp. 52.188.000,-

Realisasi : Rp. 52.188.000,- (100%)

Keluaran :

Tersedianya Honorarium Pengelolaan Keuangan untuk 6 orang ASN

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 37.454.500,-

Realisasi : Rp. 31.741.000,- (84,75%)

Keluaran :

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 36 jenis

2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 43.875.000,-

Realisasi : Rp. 37.125.000,- (84,62%)

Keluaran :

Tersedianya makan dan minum rapat 2.700 Dos

3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Alokasi Anggaran : Rp. 5.175.000,-

Realisasi : Rp. 4.081.600,- (78,87%)

Keluaran :

Tersedianya cetak 45 buku dan Penggandaan 15.000 lembar



3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Alokasi Anggaran : Rp. 1.600.000,-

Realisasi : Rp. 1.530.000,- (95,63%)

Keluaran :

Tersedianya materai 10.000 sebanyak 135 lembar

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Alokasi Anggaran : Rp. 28.381.000,-

Realisasi : Rp. 16.380.000,- (57,71%)

Keluaran :

Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik kantor untuk 12 bulan

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 3.057.500,-

Realisasi : Rp. 2.755.000,- (90,11%)

Keluaran :

Tersedianya peralatan kebersihan kantor sebanyak 11 jenis

4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Alokasi Anggaran : Rp. 47.460.000,-

Realisasi : Rp. 47.128.580,- (99,30%)

Keluaran :

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebanyak 6 unit

2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Alokasi Anggaran : -

Realisasi : -

Keluaran :

5. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Alokasi Anggaran : Rp. 106.575.000,-

Realisasi : Rp. 68.065.000,- (84,66%)



Keluaran :

Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 10 kegiatan.

2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Alokasi Anggaran : Rp. 40.120.000,-

Realisasi : Rp. 5.100.000,- (12,71%)

Keluaran :

Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan untuk 14 orang

6. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

1) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan

Alokasi Anggaran : Rp. 38.760.000,-

Realisasi : Rp. 38.760.000,- (100%)

Keluaran :

Terlaksananya sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat antara pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan

7. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

1) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Alokasi Anggaran : Rp. 57.605.000,-

Realisasi : Rp. 57.605.000,- (100%)

Keluaran :

Terlaksananya kegiatan pelatihan Paskibra untuk kegiatan HUT RI ke 73 tingkat Kecamatan Sabu Liae dengan anggota Paskibra sebanyak 3 orang dan 1 orang pelatih

8. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1) Fasilitas administrasi tata pemerintahan desa

Alokasi Anggaran : Rp. 48.960.000,-

Realisasi : Rp. 23.800.000,- (48,61%)

Keluaran :

Tersedianya fasilitas tata pelaksanaan pemerintahan di desa berupa monitoring kegiatan ke desa sebanyak 50 kali



- 2) Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
Alokasi Anggaran : Rp. 32.640.000,-
Realisasi : Rp. 18.020.000,- (55,21%)
Keluaran :
Tersedianya fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di desa berupa monitoring kamtibmas sebanyak 24 kali
- 3) Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
Alokasi Anggaran : Rp. 50.320.000,-
Realisasi : Rp. 41.310.000,- (82,09%)
Keluaran :
Tersedianya fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa berupa monitoring kegiatan sebanyak 20 kali



3.4 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN (Ya/Tidak)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
1	Meningkatnya integritas aparatur dalam pelayanan pemerintahan menuju Sarai Jujur	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dn Instansi Vertikal Terkait	Terwujudnya Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dn Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dn Instansi Vertikal Terkait	Ya
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terwujudnya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja Kecamatan	Terwujudnya Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja Kecamatan	Terlaksananya Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja Kecamatan	Ya
		Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Terwujudnya kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Meningkatnya kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terwujudnya kegiatan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya kegiatan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Ya



		Program Pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Terwujudnya kegiatan Pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Meningkatnya kegiatan Pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terwujudnya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Ya
--	--	--	---	--	--	--	--	----



3.5 Permasalahan dan Solusi

Tidak ada

3.6 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Tidak ada

3.7 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tidak ada



e. Kecamatan Sabu Tengah

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sabu Tengah Kabupaten Sabu Raijua, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 2.015.513.967,-** dan realisasi sebesar **Rp. 1.803.177.856,-(89,46%)**. Adapun rincian anggaran dan realisasi program/kegiatan sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi		%
1.	Penunjang urusan daerah Kabupaten / Kota	2.013.669.967	1.803.177856	89.30
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.525.267.161	1.323.368.976	86,76
	1) Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	1.459.729.161	1.259.180.976	86,26
	2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	65.538.000	64.188.000	97,94
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.000.000	22.000.000	100
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22.000.000	22.000.000	100
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	102.773.800	97.322.500	94,70
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.388.750	3.380.000	99,74
	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.378.050	40.371.500	99,98
	3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.360.000	42.330.000	99,93
	4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.235.000	5.235.000	100
	5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.412.000	6.006.000	52,63
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.398.000	5.398.000	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.398.000	5.398.000	100
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.712.500	21.503.000	87,01
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.995.000	99,75
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.000.000	10.800.000	77,14
	3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.760.000	2.760.000	100



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi		%
5.	4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.952.500	5.948.000	99,92
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.397.506	113.992.380	99,65
6.	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.620.000	54.292.380	99,40
	2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.781.250	9.780.000	99,99
	3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.996.256	49.920.000	99,85
7.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	61.946.000	61.946.000	100
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	61.946.000	61.946.000	100
8.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	56.025.000	56.025.000	100
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	56.025.000	56.025.000	100
8.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	101.150.000	101.130.000	99,98
	1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	101.150.000	101.130.000	99,98
Jumlah		2.015.513.967	1.803.177.856	89,46

3.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Indikator	No	Indikator sasaran	Satuan	Target
1.	Meningkatnya integritas Aparatur dalam pelayanan Pemerintahan menuju Sabu Raijua jujur	1.1	Tingkat kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan public	%	100
		1.2	Terwujudnya program penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum	%	100
		1.3	Terwujudnya program-program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100



3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
Alokasi Anggaran : Rp. 1.459.729.161-
Realisasi : Rp. 1.259.180.976 , - (86,26 %)
Keluaran :
Tersedianya Gaji dan Tunjangan 15 Orang ASN
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Alokasi Anggaran : Rp. 65.538.000,-
Realisasi : Rp. 64.188.000,- (97,94 %)
Keluaran :
Tersedianya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9 Orang

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Alokasi Anggaran : Rp. 22.000.000,-
Realisasi : Rp. 22.000.000,- (100 %)
Keluaran :
Tersedianya pakaian dinas aparaturnya beserta perlengkapannya (13 stel)

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 3.388.750,-
Realisasi : Rp. 3.380.000,- (99,74%)
Keluaran :
Tersedianya 1 paket komponen instalasi listrik
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 40.378.050,-
Realisasi : Rp. 40.371.500,- (99,98%)
Keluaran :
Tersedianya ATK (34 Jenis) dan Peralatan Kantor (3 paket)
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 42.360.000,-
Realisasi : Rp. 42.330.000,- (99,93%)
Keluaran :
Tersedianya Makanan dan minuman rapat/lembur 1.052 dos
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Alokasi Anggaran : Rp. 5.235.000,-
Realisasi : Rp. 5.235.000,- (100%)



- Keluaran :
- Tersedianya barang cetakan 40 Dokumen dan penggandaan 15.450 lembar
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Alokasi Anggaran : Rp. 11.412.000,-
- Realisasi : Rp.6.006.000,- (52,63 %)
- Keluaran :
- Tersedianya Perjalanan Dinas ke luar daerah
- 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Alokasi Anggaran : Rp. 5.398.000,-
- Realisasi : Rp. 5.398.000,- (100%)
- Keluaran :
- Tersedianya Kelengkapan Sarana Prasarana rumah jabatan/dinas
- 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Alokasi Anggaran : Rp. 2.000.000,-
- Realisasi : Rp. 1.995.000,- (99,75%)
- Keluaran :
- Tersedianya materai 10.000 (179 lembar)
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Alokasi Anggaran : Rp. 14.000.000,-
- Realisasi : Rp. 10.800.000,- (77,14 %)
- Keluaran : 380000
- Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan dan Air Sebanyak 380.000 Liter (76 tangki).
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Alokasi Anggaran : Rp. 2.760.000,-
- Realisasi : Rp. 2.760.000,- (100 %)
- Keluaran :
- Tersedianya Jasa pemeliharaan peralatan 4 Unit gedung kantor secara rutin/berkala
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Alokasi Anggaran : Rp 5.952.500,-
- Realisasi : Rp. 5.948.000,- (99,92 %)
- Keluaran :
- Tersedianya peralatan Kebersihan Kantor 12 jenis
- 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Alokasi Anggaran : Rp. 54.620.000,-
- Realisasi : Rp. 54.292.380,- (99.40 %)
- Keluaran :
- Tersedianya Jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala 4 unit



- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Alokasi Anggaran	:	Rp. 9.781.250,-
Realisasi	:	Rp. 9.780.000,- (99,99%)
Keluaran	:	

Tersedianya Jasa pemeliharaan 1 Unit gedung kantor secara rutin/berkala
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Alokasi Anggaran	:	Rp 49.996.256,-
Realisasi	:	Rp. 49.920.000,- (99,85 %)
Keluaran	:	

Tersedianya Jasa pemeliharaan 2 Unit rumah dinas secara rutin/berkala

7. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Alokasi Anggaran	:	Rp. 61.946.000,-
Realisasi	:	Rp. 61.946.000,- (100 %)
Keluaran	:	

Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait, Musrenbang, Stanting, Rapat evaluasi 8 Desa

8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- 1) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Alokasi Anggaran	:	Rp. 56.025.000,-
Realisasi	:	Rp. 56.025.000,- (100%)
Keluaran	:	

Tersedianya Fasilitas Paskibraka 5 Orang dan Pelatih 3 Orang

9. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- 1) Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Alokasi Anggaran	:	Rp. 101.150.000,-
Realisasi	:	Rp. 101.130.000,- (99,98%)
Keluaran	:	

Terlaksananya perjalanan dinas dalam Daerah dalam rangka monitoring dana pemberdayaan



3.4 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN (Ya/Tidak)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
1	Meningkatkan kualitas layanan public yang professional dan mewujudkan birokrasi yang bersih , efisien , efektif dan akuntabel	penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan public	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Ya
		penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan umum	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan umum	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan	penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan umum	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan umum	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan umum	Ya
		pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Terwujudnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Terwujudnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Ya



3.5 Permasalahan dan Solusi

Tidak ada

3.6 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Tidak ada

3.7 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tidak ada



a. Kecamatan Raijua

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Raijua Kabupaten Sabu Raijua, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 1.934.756.513,-** dan realisasi sebesar **Rp. 1.897.445.622,- (98%)**. Adapun rincian anggaran dan realisasi program/kegiatan sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	441.368.993	414.806.000	93,98
1.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.300.000	22.550.000	89,13
	1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25.300.000	22.550.000	89,13
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	124.815.550	122.959.500	98,51
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.925.000	10.005.000	91,58
	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.400.750	43.321.500	100
	3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.500.000	63.930.000	99,12
	4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.989.800	5.703.000	95
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.250.000	8.205.000	99
	1) Pengadaan Mebel	0	0	0,00
	2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.250.000	8.205.000	99
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.803.750	109.741.500	83,90
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	2.993.000	99,77
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.850.000	22.120.000	74,10
	3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.830.000	0	0,00
	4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	96.123.750	84.628.500	88,04
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.199.693	151.350.000	99,44
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.320.000	88.705.000	99,31
	2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.968.750	49.775.000	99,61



No	Program/Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
	3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.910.943	12.870.000	99,68
II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	901.014.000	876.880.000	97,32
1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	901.014.000	876.880.000	97,32
	1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	164.960.000	155.230.000	94,10
	2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	736.054.000	721.650.000	98,04
III.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	400.000.000	400.000.000	100
1.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	400.000.000	400.000.000	100
	1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	316.000.000	316.000.000	100
	2) Pemberdayaan Masyarakat di Desa/kelurahan	84.000.000	84.000.000	1000
IV.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	148.071.000	148.071.000	100
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	148.071.000	148.071.000	100
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	141.071.000	141.071.000	100
	Jumlah	1.934.756.513	1.897.445.622	98

3.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Indikator	No	Indikator sasaran	Satuan	Target
1.	Meningkatnya integritas Aparatur dalam pelayanan Pemerintahan menuju Sabu Raijua jujur	1.1	Tingkat kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik	%	100
		1.2	Terwujudnya program penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum	%	100



3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Alokasi Anggaran : Rp. 25.300.000,-
Realisasi : Rp. 22.550.000,- (89,13%)
Keluaran :
Tersedianya Pakaian Dinas bagi PNS sebanyak 18 Stel

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 10.925.000,-
Realisasi : Rp. 10.005.000,- (91,58%)
Keluaran :
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berupa fitting plafond, Lampu 23 Watt, Lampu TL, kabel, jek listrik dan isolasi.
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 43.400.750,-
Realisasi : Rp. 43.321.500,- (100%)
Keluaran :
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40 Jenis untuk
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 64.500.000,-
Realisasi : Rp. 63.930.000,- (99,12%)
Keluaran :
Tersedianya Makan Minum Rapat Koordinasi tingkat Kecamatan Raijua, Makan Minum Kegiatan Musrembang Kelurahan di Kecamatan Raijua sebanyak 4.390 Dos
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Alokasi Anggaran : Rp. 5.989.800,-
Realisasi : Rp. 5.703.000,- (95%)
Keluaran :
Tersedianya Jasa Cetak 30 Buku Serta Penggandaan 17.400 Lembar

3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Mebel
Alokasi Anggaran : Rp.0,00,-
Realisasi : Rp.0,00,- (0%)
Keluaran : -
- 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Alokasi Anggaran : Rp.8.250.000,-
Realisasi : Rp.8.205.000,- (99%)
Keluaran :
Tersedianya Jasa Pengadaan 1 unit kursi sofa dan 1 unit kursi ruang lobby.



4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Alokasi Anggaran : Rp. 3.000.000,-
Realisasi : Rp. 2.993.000,- (99,77%)
Keluaran :
Tersedianya Materai 10.000 Sebanyak 300 lembar
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Alokasi Anggaran : Rp. 29.850.000,-
Realisasi : Rp. 22.120.000,- (74,10%)
Keluaran :
Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Camat, Kantor Kelurahan Ledeunu, Kantor Kelurahan Ledেকে dan Aula Kecamatan Rajiua
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 1.830.000,-
Realisasi : Rp. 0,00,- (0,00%)
Keluaran :
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 96.123.750,-
Realisasi : Rp. 84.628.500,- (88,04%)
Keluaran :
Tersedianya Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedug Kantor Berupa Belanja Peralatan dan Bahan Pembersih 17 Jenis dan Honor 6 Orang Pengelola Mess Pemda

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Alokasi Anggaran : Rp. 89.320.000,-
Realisasi : Rp. 88.705.000,- (99,31%)
Keluaran :
Tersedianya Jasa Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Roda 2 sebanyak 7 unit dan Roda 4 sebanyak 3 unit
- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Alokasi Anggaran : Rp. 49.968.750,-
Realisasi : Rp. 49.775.000,- (99,61%)
Keluaran :
Tersedianya Jasa Pemeliharaan Rutin/berkala Gedug Kantor dan Bangunan Lainnya berupa Batu Batako, Batu Pecah, Besi, Cat kayu, Cat Tembok, Paku, Semen, Seng, dan Tripleks
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Alokasi Anggaran : Rp. 12.910.943,-
Realisasi : Rp. 12.870.000,- (99,68 %)
Keluaran :
Tersedianya Jasa Pemeliharaan Rutin/berkala Gedug Kantor dan Bangunan Lainnya berupa Balok, seng, Hengsel Kuas, dan Cat Seng.



6. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Alokasi Anggaran : Rp. 164.960.000,-
Realisasi : Rp. 155.230.000,- (94,10%)
Keluaran :
Tersedianya Kegiatan Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait, perjalanan Dinas dalam Daerah
- 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Alokasi Anggaran : Rp. 736.054.000,-
Realisasi : Rp. 721.650.000,- (98,04%)
Keluaran :
Tersedianya Honorarium aparat Kelurahan Ledunu dan Kelurahan Ledeke

7. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Alokasi Anggaran : Rp. 316.000.000,-
Realisasi : Rp. 316.000.000,- (100%)
Keluaran :
Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ledunu (Deker dan Jln Rabat), Kelurahan Ledeke (Jln Rabat dan Rehab Posyandu)
- 2) Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Alokasi Anggaran : Rp. 84.000.000,-
Realisasi : Rp. 84.000.000,- (100%)
Keluaran :
Terbayarnya honorarium 70 orang kader Posyandu

8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- 1) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Alokasi Anggaran : Rp. 148.071.000,-
Realisasi : Rp. 148.071.000,- (100%)
Keluaran :
Tersedianya makan dan minum untuk kegiatan HUT RI
Makan minum karantina 22 orang 3 X 10 Hari, Snack 22 orang 2 X 10 Hari, Syukuran Makan Tamu Prasmanan 75 orang x 1 kali, Snack 75 orang x 1 kali, Pakaian Olahraga 17 Stel, Pakaian Paskibraka 17 Stel, Honor Pelatih 5 orang dan uang saku peserta 17 orang



3.4 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			KEGIATAN			KESESUAIAN (Ya/Tidak)
		URAIAN PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
1	Meningkatkan kualitas layanan public yang professional dan mewujudkan birokrasi yang bersih , efisien , efektif dan akuntabel	Penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten / Kota	penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Ya
		Penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Ya
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Ya
		Penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan umum	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan umum	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan	penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan umum	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan umum	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan umum	Ya



3.5 Permasalahan dan Solusi

Tidak ada

3.6 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Tidak ada

3.7 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tidak ada



8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sabu Raijua, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 12.814.121.224,-** dan realisasi sebesar **Rp. 10.030.613.473,- (78,58%)**. Adapun rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah	1.124.772.889	1.035.110.305	92,03
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	880.779.119	800.070.707	90,84
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	800.159.119	732.389.707	91,53
	2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.	80.620.000	67.681.000	83,95
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	35.630.000	29.376.060	82,45
	1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.	9.350.000	9.350.000	100
	2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi	26.280.000	20.026.060	76,20
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah.	160.707.020	158.044.413	98,34
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	487.500	487.500	100
	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	27.382.520	25.352.000	92,58
	3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	3.300.000	3.300.000	100
	4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	3.595.000	3.467.800	96,46
	5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	125.942.000	125.437.113	99,60
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.906.750	3.906.750	100
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	1.500.000	1.500.000	100
	2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum.	2.406.750	2.406.750	100
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah.	43.750.000	43.712.375	99,91
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	40.300.000	40.272.375	99,93
	2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya.	3.450.000	3.440.000	99,71



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
II.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	1.674.889.850	1.634.271.078	97,57
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	1.674.889.850	1.634.271.078	97,57
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	1.674.889.850	1.634.271.078	97,57
III.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.	9.504.641.000	6.860.971.090	72,19
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.	9.504.641.000	6.860.971.090	72,19
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.	9.492.311.000	6.860.971.090	72,15
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.	12.330.000	12.170.000	98,70
IV.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	7.280.000	7.210.000	99,04
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	7.280.000	7.210.000	99,04
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas.	7.280.000	7.210.000	99,04



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
V.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.	7.330.000	7.200.000	98,23
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.	7.330.000	7.200.000	98,23
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan.	7.330.000	7.200.000	98,23
VI.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.	495.208.000	442.338.000	99,35
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.	495.208.000	442.338.000	99,35
	1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah.	58.150.000	55.450.000	95,36
	2) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah.	47.180.000	47.010.000	99,64
	3) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.	389.878.000	354.000.000	100
JUMLAH		12.814.121.739	10.030.613.473	78,58



3.2 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Arah Kebijakan	Program	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan Pemahaman dan Penguatan Nilai-Nilai Ideologi dan Penguatan Konsensus Nasional dan Berwawasan Kebangsaan.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	Terwujudnya Masyarakat Sabu Raijua yang berwawasan kebangsaan dalam NKRI.	Cakupan Pembinaan Idiologi dan Wawasan kebangsaan di masyarakat.	100%	100%	100%
2.	Peningkatan politik Cerdas dan Berintegritas melalui peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat dan penguatan peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula di 6 (enam) Kecamatan, dan Verifikasi Bantuan Keuangan Parpol, Monev kegiatan Organisasi Politik di Sabu Raijua.	1. Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada 2. Presentase Parpol yang di verifikasi	100%	100%	100%
3.	Peningkatan Pengawasan terhadap keberadaan Ormas dan Penanganan Orang Asing, Lembaga Asing di daerah	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	Terciptanya keamanan ketertiban dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat.	Presentase Ormas /LSM lembaga Asing dan Orang Asing yang di bina.	100%	100%	100%
4.	Peningkatan koordinasi, kerjasama dan konsolidasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi untuk mewujudkan keutuhan dan kesejahteraan masyarakat.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.	Terlaksananya kegiatan Monitoring terkait Kerukunan Umat Beragama di 6 (enam) Kecamatan se Kabupaten sabu Raijua	Cakupan kegiatan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi yang dibina.	100%	100%	100%
5.	Kordinasi dan kerjasama yang efektif dengan aparat keamanan, Forkopimda, Forum-forum (FKDM, FPK, FKUB, Kominda), instansi terkait dalam penanganan masalah strategis dan konflik social, terorisme dan radikalisme di daerah.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di 6 (enam) Kecamatan dan Rapat rutin bersama stakeholder terkait penanganan masalah actual di daerah.	Presentase jumlah konflik social yang tertangani.	100%	100%	100%



3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Alokasi Anggaran : Rp. 800.159.119
Realisasi : Rp. 732.389.707,- (91,53%)
Keluaran :

Terbayarnya gaji dan tunjangan 8 orang ASN pada Kantor Kesbangpol pada Kantor Kesbangpol selama 12 bulan.

2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

Alokasi Anggaran : Rp. 80.620.000,-
Realisasi : Rp. 67.681.000,- (83,95%)
Keluaran :

Terbayarnya honor untuk 8 orang ASN berupa, PA, PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, Admin Sirup dan Simpolgagri pada Kantor Kesbangpol selama 12 bulan.

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

Alokasi Anggaran : Rp. 9.350.000,-
Realisasi : Rp. 9.350.000,- (100%)
Keluaran :

Tersedianya pakaian dinas, berupa PDH Eselon III/a, PDH Eselon IV dan Staf untuk 8 orang selama 12 bulan.

2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi.

Alokasi Anggaran : Rp. 26.280.000,-
Realisasi : Rp. 20.026.060,- (76,20%)
Keluaran :

Tersedianya 1 orang personil ASN yang mengikuti Diklat formal Intelijen.

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Alokasi Anggaran : Rp. 487.500,-
Realisasi : Rp. 487.500,- (100%)
Keluaran :

Tersedianya dan terbelinya alat listrik dan elektronik sebanyak 5 paket selama 12 bulan, berupa Baterai 4 pasang, isolasi 4 buah, kabel NYM 5 meter, klem kabel 1 dos, terminal 1 buah.

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Alokasi Anggaran : Rp. 27.382.520,-
Realisasi : Rp. 25.352.000,- (92,58%)
Keluaran :

Tersedianya 40 paket ATK dan 3 paket belanja modal, berupa 3 buah kursi fernekel, 1 unit kursi pimpinan jok tinggi putar, 1 unit meja biro untuk menunjang pekerjaan administrasi kantor selama 12 bulan.



- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 Alokasi Anggaran : Rp. 3.300.000,-
 Realisasi : Rp. 3.300.000,- (100%)
 Keluaran :
 Tersedianya 110 paket (kotak) makan dan minum berupa makan minum rapat koordinasi lintas sektor terkait masalah aktual kamtibmas, selama 12 bulan.
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 Alokasi Anggaran : Rp. 3.595.000,-
 Realisasi : Rp. 3.467.800,- (96,46%)
 Keluaran :
 Tersedianya kebutuhan barang cetak dan penggandaan dokumen kantor berupa DPA/DPPA 17 buku, cetak laporan kantor 10.000 lembar penggandaan administrasi Kantor dan SPJ Bendahara selama 12 bula.
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 Alokasi Anggaran : Rp. 125.942.000,-
 Realisasi : Rp. 125.437.113,- (99,60%)
 Keluaran :
 Terlaksananya 7 kegiatan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan daerah lainnya berupa: Konsultasi dan koordinasi Bidang tugas Kesatuan Bangsa dan Politik, Politik Dalam Negeri di Kupang, Kordinasi dan Konsultasi terkait Pemilu dan Pilkada di Jakarta, Kordinasi Penanganan Konflik Sosial di Daerah di Kupang, Rapat Kordinasi Forum-Forum di Daerah di Kupang, Rapat Kordinasi terkait Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing di Daerah di Jakarta, Musrenbangcam di 6 Kecamatan, Rapat Lengkap Pamong Praja di 6 Kecamatan.

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 Alokasi Anggaran : Rp. 1.500.000,-
 Realisasi : Rp. 1.500.000,- (100%)
 Keluaran :
 Tersedianya 150 lembar Materai 10.000 selama 12 bulan.
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum.
 Alokasi Anggaran : Rp. 2.406.750,-
 Realisasi : Rp. 2.406.750,- (100%)
 Keluaran :
 Tersedianya 8 jenis peralatan dan bahan kebersihan kantor selama 12 bulan, berupa 1 buah alat pel, 2 buah ember, 3 botol pembersih kaca, 5 botol pengharum ruangan, 3 buah sapu ijuk, 2 botol soklin lantai, 3 buah kanebo, 25 buah tissue rol nice.

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 Alokasi Anggaran : Rp. 40.300.000,-
 Realisasi : Rp. 40.272.375,- (99,93%)



Keluaran :

Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas sebanyak 4 (empat) unit STNK, berupa 1 unit kendaraan roda empat dan 3 unit roda dua.

2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Alokasi Anggaran : Rp. 3.450.000,-

Realisasi : Rp. 3.440.000,- (99,71%)

Keluaran :

Tersedianya Jasa Pemeliharaan peralatan dan mesin berupa, servis printer 2 unit, 1 unit AC, dan 2 unit laptop.

6. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Alokasi Anggaran : Rp. 1.674.889.850,-

Realisasi : Rp. 1.634.271.078,- (97,57%)

Keluaran :

Terlaksananya kegiatan Paskibraka, berupa Honor panitia dan perangkat upacara, uang saku anggota paskibraka, Sewa Penginapan Paskibraka, makan minum Paskibraka, Pakaian dan sepatu paskibraka, tata rias paskibraka, sewa kendaraan paskibraka, pengadaan air tangki, ATK, BBM, obat-obatan paskibraka, sosialisasi 4 (Empat) Konsensus Nasional di 6 (enam) Kecamatan, Terbayarnya Honarium Narasumber Sosialisasi 4 (Empat) Konsensus Nasional, Perjalanan Dinas Sosialisasi 4 (Empat) Konsensus Nasional, makan minum, ATK, spanduk, foto copi, penggandaan sosialisasi, transportasi peserta sosialisasi di 6 Kecamatan, Honor Forum Pembauran Kebangsaan dan Sekretariat FPK Tingkat Kabupaten Sabu Raijua, sosialisasi Pembauran Kebangsaan di 6 (enam) Kecamatan, Terbayarnya Honarium Narasumber Sosialisasi Pembauran Kebangsaan, Perjalanan Dinas Sosialisasi Pembauran Kebangsaan, makan minum, ATK, spanduk, foto copi, penggandaan sosialisasi, transportasi peserta sosialisasi Pembauran Kebangsaan di 6 Kecamatan, Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka mengikuti Diklat Paskibraka di Jakarta, perjalanan dinas luar daerah mengantar calon paskibraka tkt. provinsi di kupang, kordinasi dan konsultasi kegiatan paskibraka di kupang, perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka seleksi calon paskibraka di 5 Kecamatan.

7. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

Alokasi Anggaran : Rp. 9.504.641.000,-

Realisasi : Rp. 6.860.971.090,- (72,19%)

Keluaran :



Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula di 6 (enam) Kecamatan, Perjalanan Dinas kegiatan sosialisasi daratan Sabu dan Raijua, makan minum, ATK, spanduk, foto copi, penggandaan, spanduk, transportasi peserta sosialisasi, Honorarium Narasumber sosialisasi, Perjalanan dinas keluar daerah dalam rangka kordinasi dan konsultasi terkait Dana Hibah Pilkada di Jakarta, Rapat Kordinasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilukada di Kupang, Terlaksananya Pembayaran Honorarium Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Parpol dan Sekretariat Tim, dan Dana Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Dana Hibah Pilkada untuk Bawaslu dan KPU.

- 2) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

Alokasi Anggaran : Rp. 12.330.000,-

Realisasi : Rp. 12.170.000,- (98,70%)

Keluaran :

Terlaksananya kegiatan Perjalanan Dinas Monev kegiatan Organisasi Politik di daratan Sabu Dan Raijua.

8. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

- 1) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Alokasi Anggaran : Rp. 7.280.000,-

Realisasi : Rp. 7.210.000,- (99,04%)

Keluaran :

Terlaksananya Kegiatan Monitoring Kegiatan dan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan di 6 (enam) Kecamatan.

9. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

- 1) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah.

Alokasi Anggaran : Rp. 7.330.000,-

Realisasi : Rp. 7.200.000,- (98,23%)

Keluaran :

Terlaksananya kegiatan Monitoring terkait Kerukunan Umat Beragama di 6 (enam) Kecamatan se Kabupaten sabu Raijua.

10. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.



- 1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah.

Alokasi Anggaran : Rp. 58.150.000,-

Realisasi : Rp. 55.450.000,- (95,36%)

Keluaran :

Terlaksananya Honorarium Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Sekretariat Tim Kabupaten Sabu Raijua, Honorarium Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua, Honorarium Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Sekretariat Tim Kabupaten Sabu Raijua, Rapat rutin bersama stakeholder terkait penanganan masalah aktual di daerah.

- 2) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah.

Alokasi Anggaran : Rp. 47.180.000,-

Realisasi : Rp. 47.010.000,- (99,64%)

Keluaran :

Terlaksananya kegiatan Monitoring Kamtibmas Bersama Unsur TNI/Polri di 6 (enam) Kecamatan dan Monitoring Keamanan dan ketertiban dalam rangka Deteksi Dini, cegah dini dan lapor dini di 6 (enam) Kecamatan, Monitoring Orang Asing dan Lembaga Asing di 6 Kecamatan.

- 3) Pelaksanaan Forum Kordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Alokasi Anggaran : Rp. 389.878.000,-

Realisasi : Rp. 383.391.000,- (98,34%)

Keluaran :

Terlaksananya Rapat Kerjasama/kordinasi antara Pimpinan di daerah terkait upaya penanganan/pencegahan situasi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti Rapat Forum Komunikasi Antar Pimpinan Daerah dalam wilayah NTT dan terbayarnya Honorarium Forkopimda dan sekretariat Forkopimda.

3.4 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2023 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan 1 (satu) Sasaran Utama, yaitu : Terwujudnya Masyarakat sabu Raijua yang berwawasan Kebangsaan dalam NKRI.

Visi Pembangunan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021-2026 sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021-2026 yaitu **Sabu Raijua Bersatu, Maju dan Bermartabat** yang dapat dijabarkan dalam 4 misi Bupati Sabu Raijua untuk dilaksanakan selama 5 tahun. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik selaku penunjang



fungsi pemerintah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mendukung Misi Bupati Sabu Raijua sebagaimana berikut :

Misi ke 3 “Meningkatkan Kualitas Layanan Publik yang Profesional dan Mewujudkan Birokrasi yang Bersih, Efisien, Efektif dan Akuntabel”, dengan Tujuan ke 5: “Meningkatnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat”, melalui agenda pembangunan selama 5 (lima) tahun, khususnya pada Sasaran ke 3 : **“Terwujudnya masyarakat Sabu Raijua yang berwawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI”** pada Strategi ke 4 : “Melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi dan stakeholder lainnya”.

Berdasarkan perhitungan capaian kinerja sasaran yang digambarkan dalam pengukuran pencapaian sasaran sebagai berikut:

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Masyarakat Sabu Raijua yang Berwawasan Kebangsaan dalam NKRI	Prosentasi Kegiatan Pembinaan LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan	100	100	100
	Prosentasi Kegiatan Pembinaan Politik daerah	Kegiatan	100	100	100
	Prosentasi Kegiatan Empat Pilar Kebangsaan	Kegiatan	100	100	100
	Prosentase Kerjasama dengan Aparat Keamanan, Forkopimda, Forum-forum mitra (FKDM, FPK, FKUB, Kominda), instansi terkait dalam penanganan masalah strategis dan konflik social di daerah.	Kegiatan	100	100	100

3.5 Permasalahan dan Solusi

➤ Permasalahan

1. Masih kurangnya tenaga Personil/PNS
2. Belum mempunyai gedung kantor sendiri.
3. Masih kurang/minimnya dana/anggaran dalam rangka kerjasama dengan Aparat Keamanan kaitan dengan Kamtibmas di daerah.
4. Masih Kurangnya Anggaran yang tersedia dalam kaitan dengan Penanganan Masalah Kamtibmas bersama Aparat Keamanan (TNI/Polri) dalam Daerah.

➤ Solusi

1. Mengajukan permohonan penambahan personil ASN kepada Bupati Sabu Raijua.
2. Koordinasi kontinyu serta mengoptimalkan kinerja SDM yang ada.



3. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk kelancaran pelaksanaan tugas kantor.
4. Bekerjasama dengan pihak TNI/Polri, Forum-forum mitra pemerintah daerah (FKUB, FKDM, FPK) dan Kominda serta Instansi terkait dalam meminimalisir / menangani kasus atau persoalan/konflik Sosial yang terjadi di kabupaten Sabu Raijua.

3.6 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan dalam format sebagai berikut :

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor 286/KEP/HK/2021 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Sabu Raijua Masa Bakti 2021-2024.	<ul style="list-style-type: none"> • Permendagri No.2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan dini di Daerah. • Permendagri No.46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permendagri No.2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan dini di Daerah. 	Dalam rangka memperkuat kelembagaan dalam meningkatkan kewaspadaan dini dalam masyarakat di daerah Sabu Raijua.
2.	Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor 130/KEP/HK/2023 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023.	<ul style="list-style-type: none"> • Permendagri No.2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan dini di Daerah. • Permendagri No.46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permendagri No.2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah. 	Dalam rangka memperkuat kelembagaan dalam meningkatkan kewaspadaan dini pemerintahan di daerah Sabu Raijua.
3.	Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor 287/KEP/HK/2021 tentang Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Sabu Raijua Masa Bakti 2021-2024.	<ul style="list-style-type: none"> • Permendagri No. 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah. 	Dalam rangka menghadapi berbagai konflik yang bersifat vertical maupun horizontal yang disebabkan oleh berbagai latar belakang isu ras, suku, budaya dan agama yang dapat mengancam integritas nasional di daerah sabu raijua.
4.	Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor 137/KEP/HK/2023 tentang Forum Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tingkat Kabupaten Sabu Raijua Periode 2023-2028.	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat. 	Dalam rangka menghadapi berbagai konflik social yang bersifat vertical maupun horizontal yang disebabkan oleh berbagai latar belakang isu ras, suku, budaya dan agama yang dapat mengancam integritas nasional demi terciptanya nilai toleransi dan kerukunan antar sesama di daerah.
5.	Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor 129/KEP/HK/2023, tanggal 6 Maret 2023 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Di Kab. Sabu Raijua Tahun 2023.	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. • Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. 	Dalam rangka peningkatan efektifitas, keterpaduan dan sinergisitas dalam pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik melalui sistem koordinasi yang terpadu antara instansi di tingkat kabupaten sabu raijua.



6.	Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor 109/KEP/HK/2023, tentang Pembentukan Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi pada DPRD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023.	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. 	Tujuan Memperkuat sistim dan kapasitas kelembagaan Partai Politik serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan partai politik di Kabupaten sabu Raijua.
7.	Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor 162/KEP/HK/2022, tanggal 18 Mei 2022 tentang Pembentukan Gugus Tugas Daerah Gerakan Revolusi Mental Kabupaten Sabu Raijua Masa Bakti 2022-2024.	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Surat Menteri Dalam negeri Nomor 100/1733/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental di Daerah. 	Tujuan Memperkuat sistim dan kapasitas kelembagaan Partai Politik serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan partai politik di Kabupaten sabu Raijua.
8.	Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor 122/KEP/HK/2023, tanggal 23 Februari 2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi pada DPRD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023.	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. 	Tujuan melaksanakan Gerakan Sabu Raijua melayani, Bersih, Tertib, Mandiri dan Bersatu dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat Sabu Raijua.
9.	Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor 83/KEP/HK/2023, tanggal 18 Februari 2022 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sabu Raijua.	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Kordinasi Pimpinan di Daerah. 	Tujuan membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya masalah-masalah actual dan ancaman stabilitas nasional dan daerah di Kabupaten Sabu Raijua.
10.	Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor 131/KEP/HK/2023, tanggal 18 Februari 2022 tentang Penunjukan Narasumber sosialisasi Pendidikan Politik kepada Masyarakat di Kabupaten sabu Raijua Tahun 2023.	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109). 	Tujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan Pilkada.
11.	Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor 270/KEP/HK/2023, tanggal 16 Juni 2023 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Perangkat Upacara Dalam Rangka Perayaan Hari Ulang Tahun Ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023.	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1999 tentang Panitia Negara Perayaan Haari-hari Nasional Dan Penerimaan Kepada Negara/Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060). 	Tujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat terutama para generasi muda tentang pentingnya 4 (Empat) Konsensus Bangsa dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.



12.	Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor 133/KEP/HK/2023, tanggal 7 Maret 2023 tentang Penunjukan Nara Sumber Sosialisasi 4 (Empat) Konsensus Nasional di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023.	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430). • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060). 	Tujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat terutama para generasi muda tentang pentingnya 4 (Empat) Konsensus Bangsa dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.
13.	Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor 132/KEP/HK/2023, tanggal 7 Maret 2023 tentang Penunjukan Nara Sumber Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023.	<ul style="list-style-type: none"> • Permendagri No.2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan dini di Daerah. • Permendagri No.46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permendagri No.2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan dini di Daerah. 	Dalam rangka memperkuat kelembagaan dalam meningkatkan kewaspadaan dini pemerintahan di daerah Sabu Raijua.

3.7 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Sebelumnya

Tidak Ada



BAB IV

TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas pembantuan yang diterima

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua tidak mendapat tugas pembantuan baik dari Pemerintah Provinsi maupun dari Pemerintah.

B. Tugas pembantuan yang diberikan

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua tidak memberikan tugas pembantuan kekecamatan, kelurahan maupun desa.



BAB V
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

5.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian Kinerja Makro Kabupaten Sabu Raijua menggunakan indikator kinerja makro dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1
Capaian Kinerja Makro Kabupaten Sabu Raijua Dua Tahun Terakhir
(Tahun 2022 – 2023)

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Perubahan (%)	Sumber/Ket
1	2		3	4	5	6
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Point / Indeks	57,90	58,89	1,71	BPS Propinsi Nusa Tenggara Timur/ Data Sosial Ekonomi 2024
2.	Angka Kemiskinan	%	28,73	28,37	-1,25	BPS Propinsi Nusa Tenggara Timur/ Data Sosial Ekonomi 2024
3.	Angka Pengangguran Terbuka	%	3,29	4,06	23,4	BPS Kabupaten Sabu Raijua
4.	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,02	2,62	-13	BPS Kabupaten Sabu Raijua
5.	Pendapatan Per Kapita	Juta Rupiah	16,82	17,55	4,34	sumber data BPS Prov. NTT dalam angka tahun 2024
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	Indeks / Point	0,299	0,303	32,324	BPS Propinsi Nusa Tenggara Timur/Data Sosial Ekonomi 2024



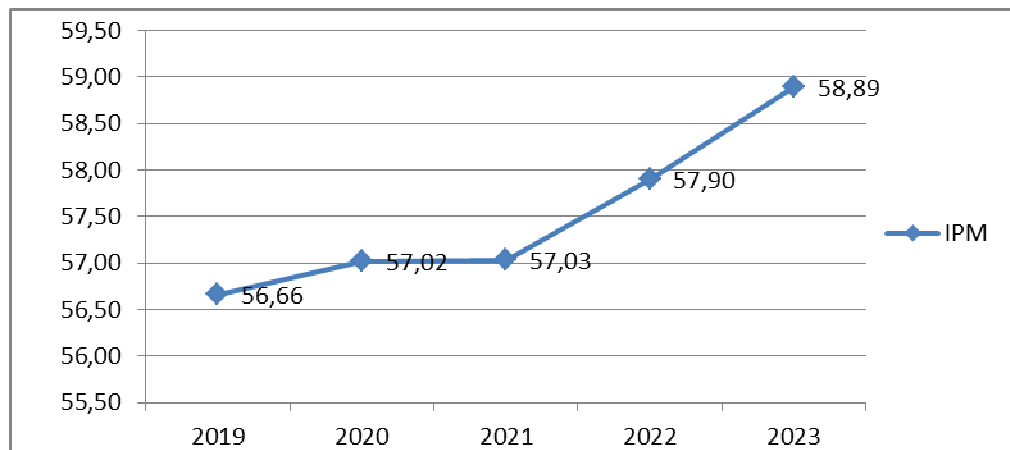
5.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah ukuran perbandingan dari harapan hidup melek huruf, pendidikan dan standar hidup, IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Indeks Pembangunan manusia (IPM) digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi pencapaian negara/ daerah dalam tiga hal yaitu indeks kesehatan (dinyatakan dalam angka harapan hidup), Indeks Pendidikan (indeks melek huruf dan indeks partisipasi sekolah) dan Indeks Pengeluaran (standar hidup layak atau pengeluaran riil per kapita). Pada tahun 2023, evaluasi capaian pembangunan manusia Kabupaten Sabu Raijua yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebesar 58,89 menunjukkan kenaikan 1,71 % atau 0,89 point dibandingkan dengan tahun 2022 dengan nilai IPM sebesar 57,90. Peningkatan ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan pada Indeks kesehatan terkait Usia Harapan Hidup (UHH) yang meningkat dari 60,87 persen di tahun 2022 naik menjadi 61,06 persen, Indeks pendidikan terkait Harapan Lama Sekolah (HLS) meningkat dari 13,17 persen di tahun 2022 menjadi 13,18 persen di tahun 2023, Rata-rata lama sekolah (RLS) meningkat dari 6,77 persen meningkat menjadi 6,98 di tahun 2023 dan indeks Pengeluaran riil perkapita naik dari 5.558 juta di tahun 2022 menjadi 5.899 juta di tahun 2023.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir nilai IPM terus menunjukkan peningkatan positif setiap tahunnya meskipun nilai IPM Kabupaten Sabu Raijua masih dibawah standar yaitu <60 atau masih tergolong rendah yakni Tahun 2019 (56,66), Tahun 2020 (57,02) Tahun 2021 (57,03), Tahun 2022 (57,90) dan Tahun 2023 (58,89) namun seiring dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia pada beberapa tahun terakhir maka menunjukkan pula bahwa kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Sabu Raijua perlahan-lahan meningkat di tiap tahunnya. Adapun grafik yang di gunakan diawah ini adalah grafik IPM tahun 2019-2023:



Grafik 5.1
Perkembangan IPM Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 – 2023



Sumber : Data Sosial Ekonomi Provinsi NTT

5.3. Angka Kemiskinan

Dari data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Sabu Raijua Persentase penduduk miskin di Kabupaten Sabu Raijua sejak 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan dan yang terakhir tahun 2023 berada di angka 28,37 % atau menurun 1,25 % dari tahun 2022. Garis Kemiskinan Kabupaten Sabu Raijua per kapita per bulan meningkat dari Rp.480.844 menjadi Rp.526.831 di tahun 2023 sedangkan indeks kedalaman kemiskinan meningkat dari tahun 2022 sebesar 4,61 menjadi 5,16 ditahun 2023 dalam hal ini menunjukkan bahwa ditahun 2023 tingkat kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan meningkat. Peningkatan juga terjadi pada indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Sabu Raijua tahun 2023 yang pada tahun sebelumnya sebesar 1,26 meningkat menjadi 1,60 di tahun 2023, yang menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin di Kabupaten Sabu Raijua mengalami peningkatan ditahun 2023. Berikut merupakan data angka kemiskinan tahun 2019-2023.



Tabel 5.2
Angka Kemiskinan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Penduduk Miskin (<i>jiwa</i>)	29.490	30.140	30.600	30.000	30.430
2.	Persentase Jumlah Penduduk Miskin	30,52	30,18	30,13	28,73	28,37
3.	Indeks Kedalaman Kemiskinan	6,20	5,88	8,12	4,61	5,16
4.	Indeks Keparahan Kemiskinan	1,78	1,57	2,94	1,26	1,60
5.	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	374.256	403.846	438.492	480.844	526.831

Sumber : Data Sosial Ekonomi dan BPS Kab. Sabu Raijua

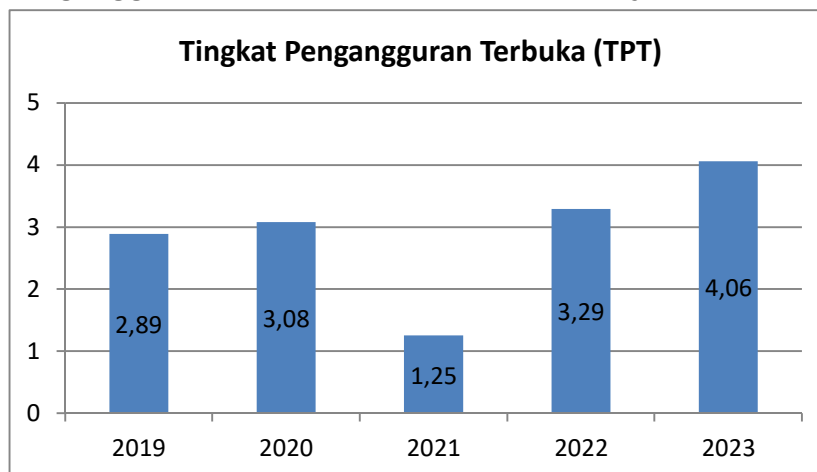
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa meskipun presentasi penduduk miskin (P0) menurun tetapi adanya peningkatan terhadap nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks keparahan kemiskinan (P2) di tahun 2023 naiknya indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan disebabkan oleh cenderung meningkatnya harga bahan pokok kebutuhan masyarakat dan juga harga BBM, hal ini dapat di buktikan dengan naiknya nilai garis kemiskinan yang terus meningkat di tiap tahunnya. Diharapkan program-program pemerintah dari pusat maupun daerah dalam menanggulangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Sabu Raijua dapat menurunkan faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan.

5.4. Angka Pengangguran

Dengan melihat tingkat pengangguran terbuka, secara langsung dapat mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka disuatu wilayah maka dapat mengindikasikan bahwa semakin sempitnya kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Selanjutnya berkaitan dengan Tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang menurut Badan Pusat Statistik merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, maka Pengangguran terbuka adalah termasuk mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Berikut merupakan grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sabu Raijua.



Grafik 5.2
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 – 2023



Sumber : BSP Kab. Sabu Raijua

Dari data diatas menunjukkan bahwa angka pengangguran di Kabupaten Sabu Raijua cenderung meningkat dari tahun 2019 sempat mengalami penurunan hingga 1,25 persen di tahun 2021 namun kembali naik tajam di tahun 2022 sebesar 3,29 persen dan terus bergerak naik hingga 23,4 persen atau mencapai 4,06 persen pada tahun 2023. Hal ini secara umum disebabkan oleh tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja dan masih rendahnya tingkat kualitas kerja dan produktivitas kerja.

5.5. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Yang biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto (PDB) atau pendapatan output perkapita yang digunakan untuk skala nasional PDB dan PDRB yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi regional atau daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Perhitungan PDRB menggunakan dua jenis harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) atau PDRB Nominal merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode tahun tertentu, sementara PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) atau PDRB rill merupakan PDRB yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar dan sampai



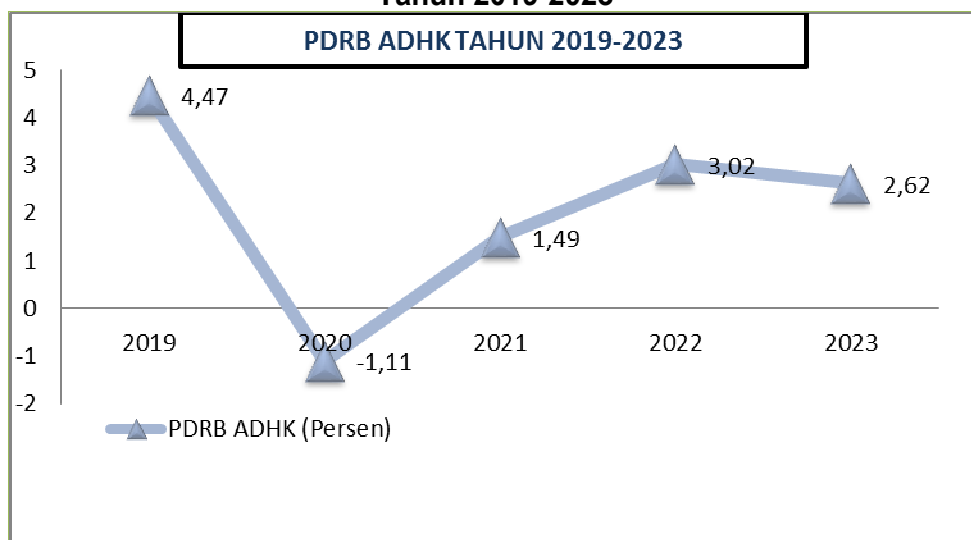
saat ini menggunakan tahun dasar 2010 .

Melalui sumber data statistik Kabupaten Sabu Raijua menunjukkan bahwa hingga tahun 2022 struktur ekonomi sabu rajua masih didominasi pertanian, Kehutanan dan Perikanan diikuti oleh administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial serta konstruksi hal ini didukung oleh sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi dari kegiatan transportasi yang merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi yang paling signifikan yang terdiri dari aktivitas pengangkutan darat, perairan maupun udara.

Data laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Sabu Raijua pada lima tahun terakhir mengalami fluktuasi hal ini ditunjukkan oleh gambaran Pertumbuhan Ekonomi yang ditunjukkan melalui perkembangan PDRB ADHK dari tahun 2019 sebesar 4,47 persen bergerak turun hingga -1,11 persen di tahun 2020 yang disebabkan oleh kasus covid-19 di tahun 2019 sehingga menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi pada hampir semua kategori akibat adanya penutupan pada hampir semua lapangan usaha. Selanjutnya mulai bergerak naik ditahun 2021 pada angka 1,47 % dan terus naik pada tahun 2022 menjadi 3,02 % hingga pada tahun 2023 kembali turun pada angka 2,62 %.

Adapun Pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019-2023 dalam Milyar Rupiah, dapat dilihat pada gambar grafik berikut :

Grafik 5.3
Pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK di Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Sabu Raijua

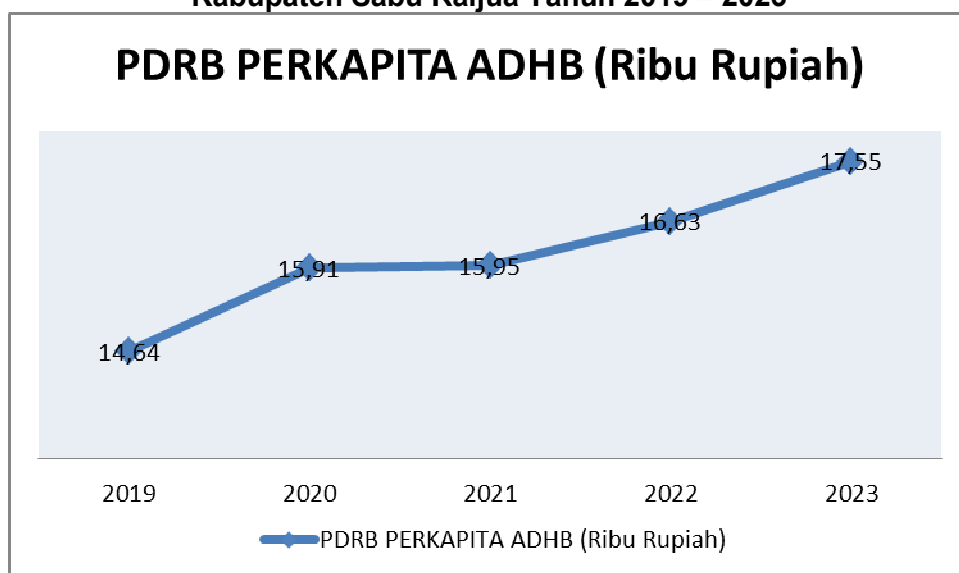


5.6. Pendapatan Perkapita

Pendapatan Perkapita merupakan indikator atau tolak ukur yang digunakan dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara atau daerah yang digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata perorang disuatu daerah serta untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk. Nilainya didapat dari hasil pembagian pendapatan nasional dengan jumlah penduduk suatu daerah dan diukur dengan menggunakan adalah Nilai PDB untuk mengukur pendapatan perkapita secara nasional dan PDRB per kapita untuk wilayah regional. Semakin tinggi pendapatan perkapita menunjukkan semakin baik pula tingkat kemakmuran masyarakat.

Data yang digunakan merupakan data terbaru BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, nilai PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) atau pendapatan perkapita berdasarkan PDRB Nominal Kabupaten Sabu Raijua terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya hal ini dapat dibuktikan dengan grafik Pendapatan Perkapita yang ada pada grafik di bawah. Dari tabel grafik dibawah dapat dikatakan bahwa penghasilan dan aktivitas ekonomi di masyarakat terus berkembang kearah positif.

Grafik 5.4
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita ADHB
Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 – 2023



Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka, 2023

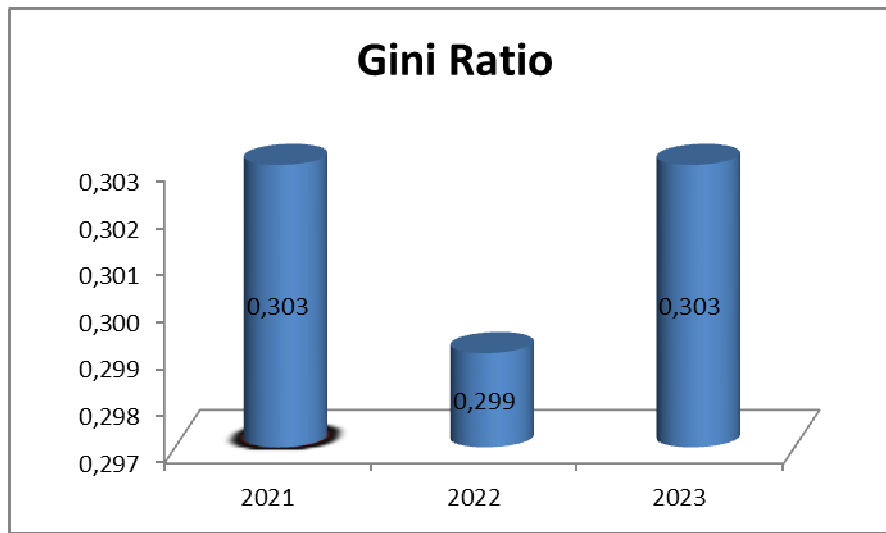


5.7. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Ketimpangan Pendapatan / Gini Ratio merupakan salah satu alat untuk mengukur kesenjangan masyarakat. Selain itu juga memberikan gambaran tentang tingkat pemerataan maupun ketimpangan pendapatan. Gini Ratio kabupaten sabu raijua di tahun 2023 sebesar 0,303 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Adapun Ketimpangan Pendapatan atau Gini Ratio Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Grafik 5.5
Gini Ratio Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021-2023



Sumber: Data Sosial Ekonomi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024



BAB VI

PENUTUP

Dalam rangka menjamin transparansi, akuntabilitas, akurasi dan obyektifitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sabu Raijua, penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 dilakukan dengan mempedomani amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023 ini memuat capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan, kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya, tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2023 yang disepakati bersama mitra yang terhormat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua. Disamping itu disampaikan pula Pencapaian Kinerja Makro Pembangunan Daerah untuk diketahui dan menjadi bahan rekomendasi bagi peningkatan kinerja pemerintahan di masa mendatang.

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua menyadari bahwa pencapaian beberapa target pembangunan belum sesuai harapan, akan tetapi dengan dukungan dan kerjasama yang produktif khususnya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, pemerintah optimis dapat mengatasi berbagai permasalahan yang ada dan dapat membawa masyarakat Sabu Raijua menuju masyarakat yang maju dan bermartabat.

Demikian seluruh uraian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023 yang dapat disampaikan kepada Dewan yang terhormat. Besar harapan kami, kiranya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini dapat dicermati dan dibahas untuk menghasilkan masukan, kritik dan koreksi yang konstruktif dalam bentuk rekomendasi Dewan untuk ditindaklanjuti demi menyempurnakan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada tahun yang akan datang.



Dalam semangat hubungan kemitraan, kami mengharapkan dukungan dan kerja sama dari Dewan yang terhormat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat untuk bersama-sama kita wujudkan visi “**Sabu Raijua Bersatu, Maju dan Bermartabat**”.

Sekian dan terima kasih.

Seba, 25 Maret 2024



Drs. NIKODEMUS N. RIHI HEKE, M.Si

